SALINAN

WALI KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 40 TAHUN 2026

T E N T A N G
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat; maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumberdaya manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Wali Kota tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

7. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasa Kemiskinan;

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dahesh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tanjungbalai;

15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2025-2029

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungbalai;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai;
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai;
8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan progam pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
9. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan yang berisi rangkaian progam dan kegiatan yang dilanjutkan secara sinergis oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui jaminan bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta progam dan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan perekonomian;

BAB II

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, progam dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya.

Pasal 3

(1) RPKD Kota Tanjungbalai dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI UMUM DAERAH

BAB III : PROFIL KEMISKINAN

BAB IV : PROGRAM PRIORITAS

BAB V : PRIORITAS WILAYAH

BAB VI : PENUTUP

(2) Dokumen RPKD Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dalam bentuk

arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.

(2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 30 Juli 2026
WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Diundangkan di Tanjungbalai
Pada tanggal 30 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

ttd

NURMALINI MARPAUNG

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2026 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERMAN GULTOM, S.H
PENATA TK.1 / III-d
NIP. 198106030 200604 1 003



RENCANA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
RPKD
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2025 - 2029

DAFTAR ISI

kata Pengantar ..... **I**

Daftar isi ..... **III**

BAB I Pendahuluan **I-1**

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Maksud dan Tujuan I-2

1.3. Dasar Hukum Penyusunan I-2

1.4. Hubungan RPKD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya I-4

1.5. Sistematika Penulisan I-4

BAB II Kondisi Umum Daerah **II-1**

2.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1

2.2. Potensi Pengembangan Wilayah II-10

2.3. Wilayah Rawan Bencana II-19

2.4. Daya Dukung Daya Tampung Likungan Hidup Keberancanaan dan Perubahan Iklim II-24

2.5. Demografi II-30

2.6. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-35

2.7. Pendidikan Berkualitas yang Merata II-51

2.8. Perlindungan Sosial yang Adaptif II-54

2.9. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju II-55

BAB III PROFIL KEMISKINAN III-1

3.1. Kondisi Kemiskinan Konsumsi III-1

3.2. Kondisi Kemiskinan Non Konsumsi III-12

BAB IV PROGRAM PRIORITAS IV-1

4.1. Permasalahan dan Isu Strategis Kemiskinan Kota Tanjungbalai IV-1

4.2. Kebijakan Nasional dalam RPJPN IV-4

4.3. Analisis Program Prioritas Kemiskinan IV-10

4.4. Analisa Relevansi dan Efektivitas APBD Kota Tanjungbalai IV-26

BAB V PRIORITAS WILAYAH V-1

5.1. Lokasi Prioritas V-1

5.2. Monitoring dan Evaluasi V-7

5.3. Organisasi dan Kelembagaan V-10

5.4. Pengaduan Masyarakat V-10

BAB VI PENUTUP VI-1

1. Kebijakan Pendidikan VI-1
2. Kebijakan Kesehatan VI-1
3. Kebijakan UMKM VI-2
4. Kebijakan Infrastruktur Dasar VI-2
5. Kebijakan Pertanian dan Perikanan VI-3

LAMPIRAN MATRIKS KEMISKINAN .....

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kota Tanjungbalai, 2024 ..... II-3

Tabel 2.2. Panjang dan Lebar Sungai di Kota Tanjungbalai, 2024 ..... II-6

Tabel 2.3. Jumlah Hari Hujan dan Rata-Rata Curah Hujan Setiap Bulan di KotaTanjungbalai, Tahun 2023 ..... II-7

Tabel 2.4. Penggunaan Lahan di Kota Tanjungbalai, 2016-2022 ..... II-8

Tabel 2.5. Daerah Rawan Bencana Banjir di Kota Tanjungbalai II-20

Tabel 2.6. Kejadian Bencana di Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-21

Tabel 2.7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai 2024 ..... II-27

Tabel 2.8. Indeks Resiko Bencana Kota Tanjungbalai 2024 ..... II-29

Tabel 2.9. Indeks Ketahanan Pangan Kota Tanjungbalai 2020-2024 ..... II-30

Tabel 2.10.Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin, 2022-2024 ..... II-31

Tabel 2.11. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, 2020-2024 ..... II-32
Tabel 2.12. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-33
Tabel 2.13. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Tanjungbalai 2026-2030 ..... II-34
Tabel 2.14. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024 (Miliar Rupiah) II-35
Tabel 2.15. Produk Domestik Regional Bruto Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024 (Miliar Rupiah) II-36
Tabel 2.16. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungbalai (persen), 2020– 2024 ..... II-39
Tabel 2.17. Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan di Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-40
Tabel 2.18. PDRB ADHB Per Kapita Kota Tanjungbalai (Juta Rupiah), 2020-2024 ..... II-41
Tabel 2.19. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-43

Tabel 2.20. Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Tanjungbalai, 2024 ..... II-48
Tabel 2.21. Usia Harapan Hidup di Perkotaan, 2024 .....
Tabel 2.22. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Tanjungbalai 2024 ..... II-50
Tabel 2.23. Persentase RT menurut Jenis Jaminan Sosial yang Dimiliki atau Diterima, 2023-2024 ..... II-53
Tabel 2.24. Kasus Kriminal di Kota Tanjungbalai, 2022-2023 ..... II-55
Tabel 2.25. Indeks Perlindungan Anak 2022 ..... II-56
Tabel 2.26. Indeks Pendidikan Kota Tanjungbalai 2020-2024 ..... II-60
Tabel 2.27. PDRB, Peranan, dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan, 2020-2024 ..... II-62
Tabel 2.28. PDRB, Peranan, dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Akomodasi Makan dan Minum, 2020-2024 ..... II-63
Tabel 2.29. Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Utama Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-65
Tabel 2.30. Penduduk 15 Tahun ke Atas Termasuk Angkatan Kerja Menurut Jenis Pendidikan yang Ditamatkan Kota Tanjungbalai,2020-2024 ..... II-65
Tabel 2.31. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu di Kota Tanjungbalai, 2024 ..... II-66

Tabel 2.32. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai, 2024 ..... II-66
Tabel 2.33. PDRB, Peranan, dan Pertumbuhan PMTB Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-69
Tabel 2.34. Perkembangan Ekspor Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-70
Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Miskin Kota di Provinsi Sumatera Utara III-2
Tabel 3.2. Persentase Penduduk Miskin Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2022-2024 ..... III-4
Tabel 3.3. Masalah Kemiskinan Konsumsi III-11
Tabel 3.4. Jumlah Penduduk Miskin Kota Tanjungbalai III-12
Tabel 3.5. Capaian Indikator Kemiskinan Bidang Pendidikan 2022-2024 ..... III-12
Tabel 3.6. Jumlah Siswa yang belum Menerima Bantuan Pendidikan Dasar III-21
Tabel 3.7. Masalah Kemiskinan Dimensi Pendidikan III-22
Tabel 3.8. Capaian Indikator Kemiskinan Bidang Kesehatan, 2023-2024 ..... III-23
Tabel 3.9. Kondisi Mikro Kesehatan pada Penduduk Miskin III-26
Tabel 3.10. Masalah Kemiskinan Dimensi Pendidikan III-27

Tabel 3.11. Capaian Indikator Kemiskinan Bidang Ketenagakerjaan, 2024 ..... III-27
Tabel 3.12. Masalah Kemiskinan Dimensi Pendidikan III-29
Tabel 3.13. Usia Produktif tidak Bekerja III-30
Tabel 3.14. Capaian Indikator Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar,2024 ..... III-31
Tabel 3.15. Jumlah Keluarga dengan Rumah Kurang Layak Huni III-37
Tabel 3.16. Masalah Kemiskinan Dimensi Pendidikan III-37
Tabel 3.17. Indeks Ketahanan Pangan Kota Tanjungbalai Tahun 2020—2024 ..... III-38
Tabel 4.1. Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 ..... IV-9
Tabel 4.2. Kinerja Keuangan Kota Tanjungbalai Periode 2020-2024 (Juta Rupiah) IV-26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Luas Kota Tanjungbalai Berdasarkan Kecamatan (Ha) II-1

Gambar 2.2. Peta Administrasi Wilayah Kota Tanjungbalai II-2

Gambar 2.3. Peta Wilayah Kota Tanjungbalai berdasarkan Geologi II-5

Gambar 2.4. Persentase Luas Penggunaan Lahan Eksisting Tahun 2016 dan 2022 (Ha) II-9

Gambar 2.5. Potensi Wisata Kota Tanjungbalai II-15

Gambar 2.6. Peta Wilayah Kota Tanjungbalai berdasarkan Rawan Banjir II-24

Gambar 2.7. Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Kota Tanjungbalai, 2024 ..... II-31

Gambar 2.8. Piramida Penduduk Kota Tanjungbalai, 2024 ..... II-33

Gambar 2.9. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional ADHK 2010, 2020-2024 ..... II-38

Gambar 2.10. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-42

Gambar 2.11. Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kota Tanjungbalai, 2024 ..... II-43

Gambar 2.12. Gini Ratio Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2024 ... II-44
Gambar 2.13. Gini Ratio Kota Tanjungbalai, Provinsi dan Nasional 2024 ..... II-45
Gambar 2.14. Perkembangan IPM Kota Tanjungbalai, Sumut dan Nasional, 2020-2024 ..... II-45
Gambar 2.15. IPM Kabupaten/Kota, 2024 ..... II-46
Gambar 2.16. Tingkat Pengangguran di Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-47
Gambar 2.17. Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional, 2024 ..... II-48
Gambar 2.18. Perkembangan Pengeluaran per Kapita per Tahun (ribu rupiah), 2020-2024 ..... II-49
Gambar 2.19. Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-50
Gambar 2.20. Pravalensi Stunting Kota Tanjungbalai, 2021-2024 ..... II-51
Gambar 2.21. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-52
Gambar 2.22. Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kota Tanjungbalai , 2020-2024 ..... II-53
Gambar 2.23. Jumlah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 2020-2024 ..... II-54
Gambar 2.24. Indeks Pembangunan Gender Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-58

Gambar 2.25. Indeks Pemberdayaan Gender Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... II-59
Gambar 2.26. Indeks Ketimpangan Gender Kota Tanjungbalai 2020-2024 ..... II-59
Gambar 2.27. Angka Ketergantungan Kota Tanjungbalai 2020-2024 ..... II-61
Gambar 2.28. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Kota Tanjungbalai, ,2020-2024 ..... II-63
Gambar 2.29. Tingkat Kesempatan Kerja Kota Tanjungbalai, 2021-2024 ..... II-64
Gambar 2.30. Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan, 2020-2024 ..... II-68
Gambar 2.31. Perkembangan Inflasi Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, 2020-2024 ..... II-71
Gambar 3.1. Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Kota Tanjungbalai, 2024 ..... III-1
Gambar 3.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... III-2
Gambar 3.3. Tingkat Efektifitas Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... III-3

Gambar 3.4. Relevansi Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Kota terhadap Provinsi dan Nasional, 2020-2024 ..... III-3

Gambar 3.5. Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kota Tanjungbalai,2024 ..... III-4

Gambar 3.6. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... III-5

Gambar 3.7. Tingkat Efektivitas Persentase Penduduk Miskin Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..... III-5

Gambar 3.8. Relevansi Persentase Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Kota terhadap Provinsi dan Nasional, 2020-2024 ... III-6

Gambar 3.9. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Tanjungbalai, 2024 ..... III-6

Gambar 3.10. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Tanjungbalai,2020 2024 ..... III-7

Gambar 3.11. Tingkat Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Tanjungbalai,2020 2024 ..... III-7

Gambar 3.12. Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota terhadap Provinsi dan Nasional, 2020-2024 ... III-8

Gambar 3.13. Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Tanjungbalai, 2024..... III-8

Gambar 3.14. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Tanjungbalai,2020 2024 ..... III-9

Gambar 3.15. Tingkat Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Tanjungbalai,2020 2024 ..... III-9

Gambar 3.16. Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota terhadap Provinsi dan Nasional, 2020-2024 ... III-10

Gambar 3.17. Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kota Tanjungbalai 2024 ..... III-10

Gambar 3.18. Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Tanjungbalai,2020 2024 ..... III-11

Gambar 3.19. Analisis Capaian Harapan Lama Sekolah kota, 2020- 2024..... III-14

Gambar 3.20. Analisis Capaian Rata-Rata Lama Sekolah kota, 2020- 2024..... III-15

Gambar 3.21. Analisis Capaian APM SD/MI Kota Tanjungbalai 2020- 2024 ..... III-16

Gambar 3.22. Analisis Capaian APM SMP/MTs Kota Tanjungbalai 2020- 2024 ..... III-17

Gambar 3.23. Analisis Capaian APM SMA/MA Kota Tanjungbalai, 2020- 2024 ..... III-18

Gambar 3.24. Analisis Persentase Putus Sekolah SD/MI Kota Tanjungbalai 2020- 2024 ..... III-19

Gambar 3.25. Analisis Persentase Putus Sekolah Smp/Mts Kota Tanjungbalai 2020- 2024 ..... III-20
Gambar 3.26. Analisis Capaian Putus Sekolah SMA/MA Kota Tanjungbalai,2020 2024 ..... III-21
Gambar 3.27. Analisis Capaian Usia Harapan Hidup Kota Tanjungbalai,2020 2024 ..... III-24
Gambar 3.28. Analisis Capaian Persentase Penduduk dengan Keluhan Kesehatan Kota Tanjungbalai, 2020 2024 ..... III-25
Gambar 3.29. Analisis Pravalensi Stunting Kota Tanjungbalai 2020 2024 ..... III-25
Gambar 3.30. Analisis Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tanjungbalai,2020 2024 ..... III-28
Gambar 3.31. Analisis Tingkat Kesempatan Kerja Kota Tanjungbalai,2020 2024 ..... III-29
Gambar 3.32. Analisis Persentase Rumah Tangga Kumuh, 2020-2024 ..... III-32
Gambar 3.33. Analisis Sanitasi Layak, 2020-2024 ..... III-33
Gambar 3.34. Analisis Proporsi RT dengan Air Minum Layak 2020-2024 ..... III-34
Gambar 3.35. Analisis Proporsi RT terhadap Akses Listrik, 2020-2024 ..... III-35
Gambar 3.36. Analisis Rumah Layak Huni, 2020-2024 ..... III-36

Gambar 3.37. Analisis Indeks Ketahanan Pangan, 2020-2024 ..... III-37
Gambar 4.1. Teory of Change untuk Peningkatan Harapan Lama Sekolah Kota Tanjungbalai IV-1
Gambar 4.2. Analisis Keterkaitan untuk Peningkatan Harapan Lama Sekolah Kota Tanjungbalai..... IV-14
Gambar 4.3. Teory of Change untuk Peningkatan Derajat Kota Tanjungbalai IV-16
Gambar 4.4. Analisis Keterkaitan untuk Peningkatan Umur Harapan Hidup Kota Tanjungbalai IV-18
Gambar 4.5. Teory of Change untuk Menurunkan Tingkat Pengangguran Kota Tanjungbalai IV-20
Gambar 4.6. Teory of Change untuk Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Kota Tanjungbalai IV-22
Gambar 4.7. Analisis Keterkaitan untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tangga Kumuh Kota Tanjungbalai IV-23
Gambar 4.8. Teory of Change untuk Peningkatan Ketersediaan Pangan Kota Tanjungbalai IV-25
Gambar 4.9. Daya Dukung Fiskal IV-28
Gambar 4.10. Komposisi Belanja Urusan Pendidikan 2023-2024 ..... IV-30
Gambar 4.11. Belanja Urusan Pendidikan dan Indikator Bidang Pendidikan, 2020-2024 ..... IV-31

Gambar 4.12. Komposisi Belanja Urusan Kesehatan Kota Tanjungbalai, 2023-2024 ..... IV-32

Gambar 4.13. Belanja Urusan Kesehatan dan Indikator Bidang Kesehatan IV-33

Gambar 4.14. Komposisi Belanja Urusan Infrastruktur Dasar Kota Tanjungbalai, 2023-2024 ..... IV-34

Gambar 4.15. Belanja Urusan Infrastruktur Dasar dan Indikator Bidang Infrastruktur Dasar, 2020-2024 ..... IV-34

Gambar 4.16. Komposisi Belanja Urusan Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai, 2023-2024 ..... IV-35

Gambar 4.17. Belanja Urusan Ketenagakerjaaan dan Indikator Bidang Ketenagakerjaan, 2021-2024 ..... IV-36

Gambar 4.18. Komposisi Belanja Urusan Ketahanan Pangan Kota Tanjungbalai, 2023-2024 ..... IV-37

Gambar 4.18. Belanja Urusan Ketahanan Pangan dan Indikator Bidang Ketahanan Pangan IV-38

Gambar 5.1. Prioritas Lokasi Pengurangan Kantong-Kantong Kemiskinan V-1

Gambar 5.2. Prioritas Lokasi Penerima Bantuan Pendidikan V-2

Gambar 5.3. Prioritas Lokasi Penerima Bantuan Kesehatan V-3

Gambar 5.4. Prioritas Lokasi Penerima Bantuan Sektor Perikanan V-4

Gambar 5.5. Prioritas Lokasi Penerima Bantuan Wirausaha V-5

Gambar 5.6. Prioritas Lokasi Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni V-6

PENGANTAR

Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensi yang menyangkut ketidakmampuan individu dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Permasalahan kemiskinan harus diatasi dengan langkah-langkah sistematik, terpadu dan menyeluruh agar beban untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak untuk mengembangkan diri menuju kehidupan yang layak dan bermartabat dapat terpenuhi. Upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting mengingat keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara simultan, berkelanjutan dan bersinergi antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah. Di tataran pemerintah pusat hal ini telah tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2025-2045. Selanjutnya didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, hal ini juga dipertegas di dalam salah satu arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yakni pemerataan dan penanggulangan kemiskinan. Sementara itu di tingkat pemerintah Propinsi Sumatera Utara upaya penanggulangan kemiskinan masuk sebagai salah satu prioritas Propinsi Sumatera Utara untuk kurun waktu 2025-2029, sedangkan untuk tingkat Pemerintah Kota Tanjungbalai penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan sebagai salah satu prioritas didalam RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 yang dijabarkan ke dalam prioritas di RKPD setiap tahunnya.

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan selama ini meski telah dapat menurunkan angka kemiskinan namun dirasakan masih memiliki banyak kendala dan kekurangan. Oleh karena itu kebijakan penanggulangan kemiskinan terus disempurnakan baik dari segi paradigma, anggaran, maupun instrumen program. Telah disebutkan di atas bahwa dukungan pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan secara agregat. Oleh karenanya perlu perumusan masalah kemiskinan yang lebih komprehensif di masing-masing daerah yang diawali dengan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangun maka dapat dilihat bahwa RPKD seharusnya dapat mengisi, memperkaya dan memperkuat proses penyusunan, dan substansi dari setiap dokumen perencanaan dan pembangunan daerah, baik dokumen 5 tahunan yakni RPJMD dan Renstra-SKPD, begitu juga dengan dokumen tahunan yakni RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pertimbangan lain yang membuat RPKD sangat diperlukan adalah karena masalah kemiskinan merupakan masalah khas lokal (*local specific*) sehingga setiap daerah akan

memerlukan kebijakan yang berbeda. RPKD diperlukan untuk menjabarkan strategi dasar ke dalam konteks masalah lokal. Proses ini menjadi sangat strategis, mengingat dokumen RPKD bukanlah dokumen yang eksklusif, tetapi seharusnya inklusif. RPKD harus mengisi, memperkaya dan memperkuat proses penyusunan dokumen perencananaan dan penganggaran reguler di daerah. Hal ini sejalan dan sesuai dengan semangat otonomi daerah yang sedang berjalan menuju arah perbaikan kesejahteraan masyarakat di daerah.

RPKD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 ini dikoordinasikan dan disusun dalam rangka memenuhi muatan rancangan RPJMD Kota Tanjungbalai tahun 2025-2029 di bidang penanggulangan kemiskinan yang saat ini sedang dalam proses penyusunan yang selanjutnya akan diintegrasikan ke dalam program dan kegiatan pada Renstra, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Tanjungbalai, 2025

Kepala Bapperida Kota Tanjungbalai

Mariani, S.Si., M.Si

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang disebabkan tidak memiliki sumberdaya dan pendapatan, kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga kebijakan pengentasan kemiskinan harus mencakup berbagai dimensi yang menjangkau berbagai aspek meliputi aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis sehingga kebijakan yang disusun harus berpihak pada pemenuhan perolehan sumberdaya untuk memperoleh kebutuhan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bertujuan untuk mengurai kebijakan penanggulangan kemiskinan maka dibutuhkan sebuah strategi yang lebih rinci yang didasarkan pada permasalahan yang bersifat *local oriented*, potensi wilayah dan sumberdaya yang dimiliki serta mengikutsertakan isu-isu yang berkembang baik dalam konteks global, nasional sehingga perlu dibentuk Tim Koordinasi untuk menjembatani pelaksanaan program/kegiatan Lintas OPD. Dalam rangka mendukung upaya tersebut maka pemerintah menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut memuat peran dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota, diantaranya menyebutkan bahwa TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan rencana aksi kabupaten/kota.

Ruang lingkup RPKD meliputi penetapan konsep pemahaman kemiskinan dan intervensi kebijakan untuk penanggulangannya. Secara kontekstual, masalah kemiskinan di daerah dibentuk oleh kombinasi karakteristik wilayah (makro), komunitas (meso) dan rumah-tangga (mikro) sehingga RPKD diperlukan untuk menjabarkan strategi dasar kemiskinan ke dalam konteks penyelesaian masalah lokal. Selain itu ada karakteristik tertentu dari kemiskinan yang secara empiris canderung tipikal antar-daerah dan oleh karena itu menjadi target untuk ditangani sehingga dalam hal ini RPKD perlu untuk memastikan bahwa indikator itu menjadi prioritas intervensi kebijakan daerah dan merancang sinergi antara inisiatif kebijakan (program) nasional dan daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota tujuan dari penyusunan RPKD adalah:

1. Sebagai dasar dalam menyusun rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan yang dimuat dalam dokumen RPJMD;
2. Sebagai dasar Perangkat Daerah dan stakeholder terkait dalam mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan ke dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah;
3. Sebagai tolok ukur keberhasilan TKPK Kota Tanjungbalai dalam penyelenggaraan upaya penanggulangan kemiskinan; dan
4. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan target pembangunan di bidang penanggulangan kemiskinan.

Penyusunan RPKD Tahun 2025-2029 bertujuan untuk:

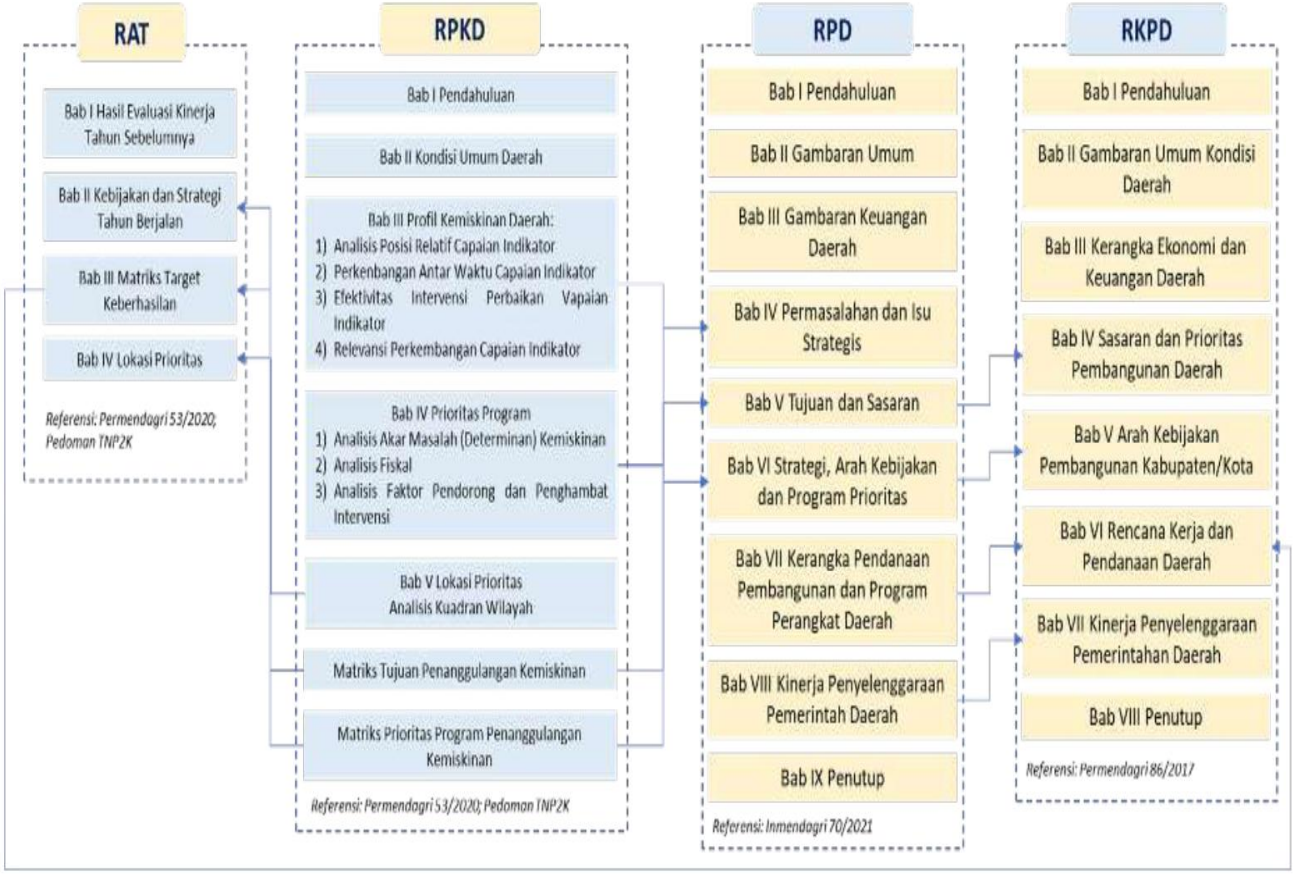
1. Menjadi instrumen dalam upaya pencapaian target penanggulangan kemiskinan di daerah;
2. Menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Aksi Tahunan di bidang penanggulangan kemiskinan;
3. Menjadi instrumen sinkronisasi kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian sampai dengan evaluasi di tingkat daerah hingga pusat;
4. Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara inklusif; dan
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2024.

1.4. Hubungan RPKD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya



1.5. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen RPKD mengikuti struktur dan sistematika sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan

Menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum dari penyusunan dokumen RPKD. Selain itu, pada bab ini juga diulas mengenai hubungan antara dokumen RPKD dan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, serta sistematika penulisan dokumen

Bab 2: Kondisi Umum Daerah

Menyajikan deskripsi ringkas terkait karakteristik wilayah baik secara geografi, demografi, pemerintahan, sosial budaya dan perekonomian

Bab 3: Profil Kemiskinan Daerah

Menjelaskan hasil analisis karakteristik kemiskinan makro dan mikro. Analisis dilakukan dengan melakukan identifikasi posisi relatif, perkembangan antar

waktu, efektivitas intervensi perbaikan, hingga relevansi perkembangan untuk capaian setiap indikator.

Bab 4: Prioritas Program

Menyajikan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, kemudian dilakukan analisis kuadran wilayah untuk menentukan lokasi prioritas program

Bab 5: Penutup

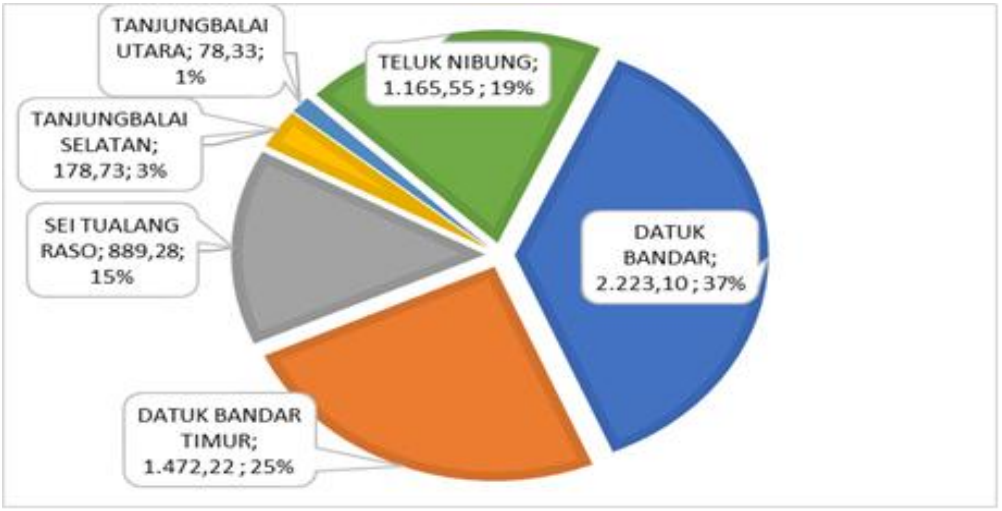
BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kota Tanjungbalai sebesar 6.007,21 Ha atau 60,0721 km^2 dan menjadi wilayah terkecil di Sumatera Utara selain Kota Sibolga dan Kota Tebing Tinggi. Wilayah admisnistrasi Kota Tanjungbalai terbagi ke dalam 6 kecamatan dan 31 kelurahan. Kecamatan Datuk Bandar menjadi wilayah terluas dengan luas wilayah mencapai 2.223,10 Ha atau sekitar 37 persen dari seluruh luas Kota Tanjungbalai, sedangkan Kecamatan Tanjungbalai Utara menjadi wilayah terkecil dengan luas 78,33 ha atau hanya sekitar 1 persen dari seluruh luas Kota Tanjungbalai.



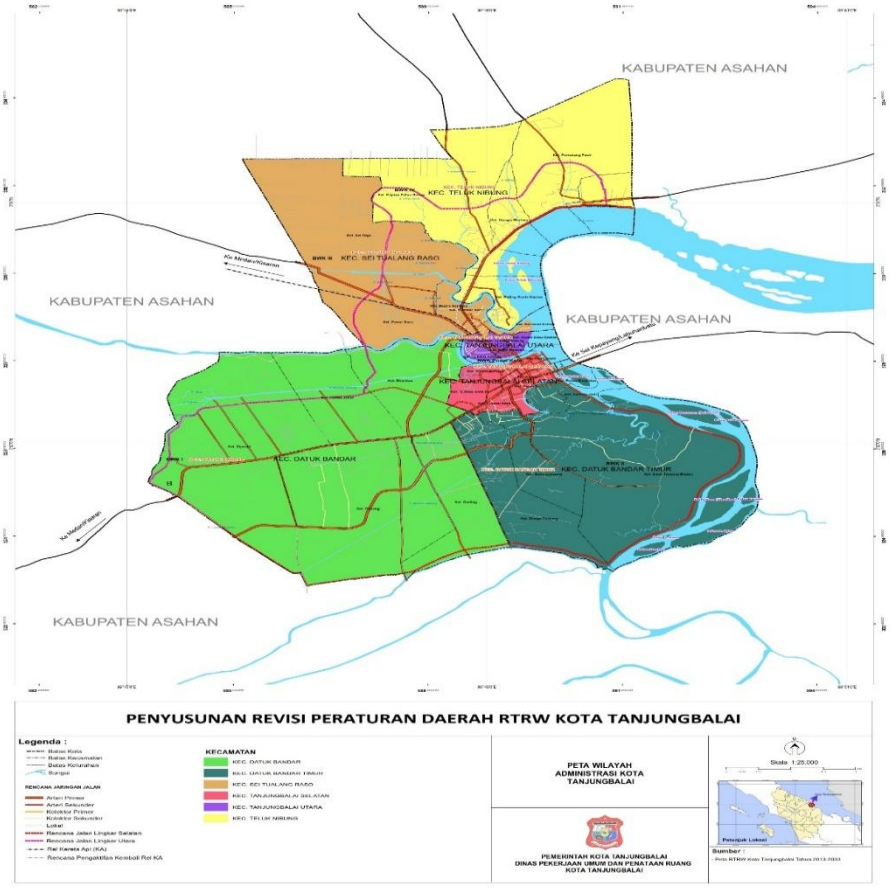
Gambar 2.1
Luas Kota Tanjungbalai Berdasarkan Kecamatan (Ha)

Sumber: *Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2024*

Secara administratif, semua bagian wilayah Kota Tanjungbalai berbatasan langsung dengan Kabupaten Asahan. Batas wilayah Kota Tanjungbalai secara rinci adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan
Sebelah selatan : Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan
Sebelah barat : Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan
Sebelah timur : Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan

Gambar 2.2
Peta Administrasi Wilayah Kota Tanjungbalai



Sumber: Revisi RTRW Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033

2. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Tanjung Balai merupakan tempat pertemuan bagi dua sungai besar yang bermuara ke Selat Malaka, yaitu Sungai Silau dan Sungai Asahan. Lokasi pertemuan kedua sungai ini berada di timur laut Kota Tanjung Balai. Kota Tanjung Balai memiliki sebuah pelabuhan bernama Pelabuhan Teluk Nibung. Lokasinya berada di Kecamatan Teluk Nibung. Pelabuhan Teluk Nibung merupakan pelabuhan tertua kedua di provinsi Sumatera Utara sesudah Pelabuhan Belawan. Keberadaan Pelabuhan Teluk Nibung telah dikenal sejak zaman kolonial Belanda sebagai pelabuhan internasional yang memiliki kegiatan ekspor-impor yang cukup ramai dikunjungi karena berdekatan dengan negara tetangga Malaysia, Singapura, dan Thailand. Selain itu, Kota Tanjung Balai juga memiliki jembatan terpanjang di provinsi Sumatera Utara sepanjang ±600 m yang menghubungkan Kota Tanjung Balai dengan desa Sei Kepayang Kiri, Sei Kepayang Tengah, dan Sei Kepayang Kanan kabupaten Asahan.

a. Posisi Astronomis

Letak astronomis Kota Tanjungbalai terletak di antara 2°58'15"-3°'01"32 Lintang Utara dan antara 99°48'00" – 99°50' 16"99° Bujur Timur. Kota Tanjungbalai berada di

wilayah pesisir pantai Timur Sumatera Utara tepatnya berada di tepi Sungai Asahan yang merupakan sungai terpanjang di Sumatera Utara. Kota Tanjungbalai berada sekitar 184 km dari Medan sebagai ibukota Sumatera Utara. Meskipun relatif tidak terlalu dekat dengan ibukota provinsi, Kota Tanjungbalai diuntungkan karena terletak pada pertemuan dua sungai besar yaitu Sungai Asahan dan Sungai Silau yang bermuara ke Selat Malaka. Kondisi tersebut menjadikan Kota Tanjungbalai sebagai jalur perdagangan internasional dan menjadi tempat lalu lintas barang dan jasa yang relatif ramai di pesisir Timur Pulau Sumatera.

b. Posisi Geostrategis

Berdasarkan posisi geografis, Kota Tanjungbalai berada di kawasan pantai timur Pulau Sumatera serta merupakan wilayah bagian hilir dari Sungai Asahan serta dikelilingi oleh Kabupaten Asahan. Kota Tanjungbalai diuntungkan karena terletak pada pertemuan dua sungai besar yaitu Sungai Asahan dan Sungai Silau yang bermuara ke Selat Malaka. Kondisi tersebut menjadikan Kota Tanjungbalai sebagai jalur perdagangan internasional dan menjadi tempat lalu lintas barang dan jasa yang relatif ramai di pesisir Timur Pulau Sumatera.

3. Topografi

a. Ketinggian Lahan

Secara umum, wilayah Kota Tanjungbalai terletak pada 0-3 m dari atas permukaan laut atau berupa dataran rendah dengan dominasi jenis tanah alluvial, latosol, dan pasir. Kecamatan Datuk Bandar menjadi daerah tertinggi dengan tinggi wilayah sekitar 3 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Kecamatan Teluk Nibung menjadi daerah terendah dengan tinggi wilayah hanya sekitar 0-1 meter di atas permukaan laut.

Posisi Kota Tanjungbalai yang dilalui dua sungai besar menyebabkan tingkat kesuburan tanahnya dipengaruhi oleh pasang surut air, sehingga tidak jarang wilayah Kota Tanjungbalai digenangi oleh air dan menjadi kawasan rawa-rawa.

Tabel 2.1
Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL)
Menurut Kecamatan di Kota Tanjungbalai, 2024

No	Kecamatan	Tinggi (m)
1	Datuk Bandar	3
2	Datuk Bandar Timur	2
3	Tanjungbalai Selatan	2
4	Tanjungbalai Utara	2
5	Sei Tualang Raso	1,5
6	Teluk Nibung	1

Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2024

b. Kemiringan Lahan

Secara umum, wilayah Kota Tanjungbalai terletak pada 0-3 m dari atas permukaan laut atau berupa dataran rendah dengan dominasi jenis tanah alluvial, latosol, dan pasir.

Kecamatan Datuk Bandar menjadi daerah tertinggi dengan tinggi wilayah sekitar 3 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Kecamatan Teluk Nibung menjadi daerah terendah dengan tinggi wilayah hanya sekitar 0-1 meter di atas permukaan laut.

Posisi Kota Tanjungbalai yang dilalui dua sungai besar menyebabkan tingkat kesuburan tanahnya dipengaruhi oleh pasang surut air, sehingga tidak jarang wilayah Kota Tanjungbalai digenangi oleh air dan menjadi kawasan rawa-rawa.

Data kemiringan ini dapat diturunkan menjadi beberapa data yang bekaitan dengan bentuk bentang alam dan kemiringannya, antara lain; data morfologi dan kemiringan lereng. Ditinjau dari kondisinya, Kota Tanjungbalai memiliki kemiringan lahan 0-3 % dan kondisi morfologi yang relatif datar.

4. Geologi

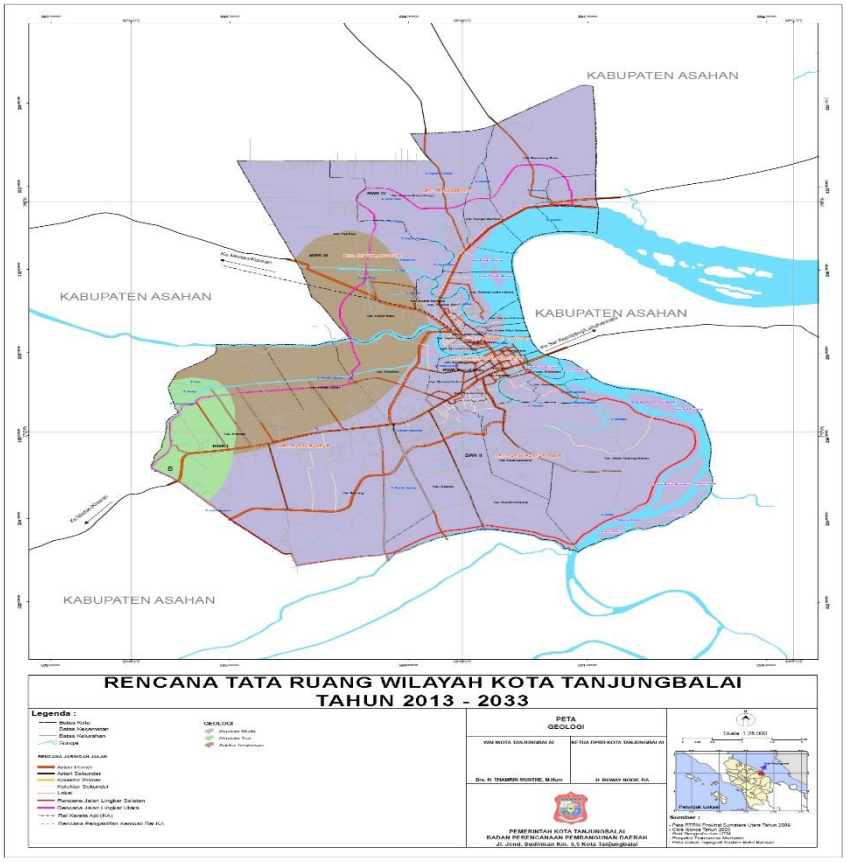
a. Struktur dan Karakteristik

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, jenis batuan yang ada di wilayah Kota Tanjungbalai dapat digolongkan terhadap beberapa bagian, antara lain : Jenis batuan yang terdapat di Kota Tanjungbalai, meliputi : alluvium (alluvium muda dan alluvium tua). Jenis ini tersebar hampir diseluruh wilayah Kota Tanjungbalai, antara lain:

1. Alluvium Muda
   - Sebagian wilayah Kecamatan Sei Tualang Raso (Kelurahan : Pasar Baru dan Sungai Raja).
   - Kecamatan Teluk Nibung
   - Kecamatan Tanjungbalai Utara
   - Kecamatan Tanjungbalai Selatan
   - Kecamatan Datuk Bandar
   - Kecamatan Datuk Bandar Timur
2. Aluvium Tua terdiri atas : krikil, pasir, dan lempung. Penyebaran jenis batuan ini, antara lain : Kecamatan Datuk Bandar (Kelurahan Sijambi).
3. Aneka Terobosan, jenis ini menyebar disebagian Kecamatan Datuk Bandar dan Kecamatan Sei Tualang Raso.

b. Potensi

Potensi sumber daya alam bila ditinjau dari sisi geologi adalah Galian golongan C berupa pasir yang tersebar di sepanjang Sungai Silau dan sebagian Sungai Asahan.



Gambar 2.3
Peta Wilayah Kota Tanjungbalai berdasarkan Geologi
Sumber: Revisi RTRW Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033

5. Hidrologi

a. Sungai

Selain Sungai Asahan dan Sungai Silau yang bermuara ke Selat Malaka, Kota Tanjungbalai juga dialiri beberapa sungai kecil. Sungai-sungai kecil tersebut diantaranya adalah Sungai Pematang, Sungai Merbau, Sungai Kapias, dan Sungai Raja yang bermuara ke Sungai Asahan dan Sungai Silau.

Kondisi air sungai saat ini telah mengalami pencemaran. Hal tersebut disebabkan oleh limbah perkotaan dan pembuangan sampah ke sungai. Penurunan kualitas air sungai juga disebabkan oleh pencucian pasir-pasir maupun akibat dari lahan yang telah menjadi terbuka karena tidak ada vegetasi penutup, sehingga air dapat mengalir bebas ke badan-badan air. Diketahui bahwa jika vegetasi tidak ada, maka air hujan langsung jadi *overland flow* dan biasanya membawa material-material yang dapat mengurangi kualitas air sungai.

Tabel 2.2
Panjang dan Lebar Sungai di Kota Tanjungbalai, 2024

Nama Sungai	Panjang (Km)	Lebar (m)
Sungai Bandar Jaksa	8,20	10,00
Sungai Bandar Jepang	5,10	6,1 s/d 5,6
Sungai Bandar Sipoyong	6,00	6,00
Sungai Kanal Sultan	4,00	10,15
Sungai Giam I	6,50	6,00
Sungai Aek Noto	1,75	20,00
Sungai Parit Kangkung	1,50	20,00
Sungai Sei Giam II	2,35	6,00
Sungai Pantai Burung	4,25	25,00
Sungai Kapias	4,20	35,00
Sungai Tanjung Medan	6,00	30,00
Sungai Sarap	2,10	25,00
Sungai Daun Besar	1,50	25,00
Sungai Merbau	4,50	25,00
Sungai Rintis	2,00	25,00
Sungai Mata Halasan	1,20	3,00
Sungai Silau	7,00	125,00
Sungai Asahan	7,50	700,00

Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2024

6. Klimatologi

a. Suhu dan Kelembaban

Suhu udara rata-rata Kota Tanjungbalai sekitar 25 ^{o}C. Kota Tanjungbalai beriklim tropis serta mengalami musim hujan dan musim kemarau, relatif sama dengan wilayah lainnya yang berada di Sumatera Utara. Iklim Kota Tanjungbalai diklasifikasikan sebagai Af (iklim hutan hujan tropis) berdasarkan sistem *Koppen-Geiger* dengan kelembaban suhu udara rata-rata Kota Tanjungbalai sekitar 27,9^{0}-32 C^{0} dan memiliki Presipitasi rata-rata 18,63 mm dengan kelembaban udara rata-rata 77%-98%. Lokasi yang berada dekat dengan laut membuat Kota Tanjungbalai tergolong daerah yang panas. Selama Tahun 2019 tercatat bahwa temperatur Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Suhu maksimum mencapai 37^{0}C yang terjadi pada bulan Juni, sedangkan suhu minimum.

b. Curah hujan

Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Kondisi alam atau topografi Kota Tanjungbalai pada umumnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 0-3 meter diatas permukaan laut. Sehingga Kota Tanjungbalai mempunyai iklim seperti daerah lain di kawasan pantai timur Pulau Sumatera yang beriklim tropis dan memiliki dua

musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada tahun 2019 terdapat 130 hari hujan dengan volume curah hujan sebanyak 1.627 mm^3.

Curah hujan terbesar terjadi pada bulan September yaitu 462,5 mm^3 dengan jumlah hari hujan sebanyak 17 hari, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Februari sebesar 41,5 mm^3 dengan jumlah hari hujan sebanyak 8 hari.

Tabel 2.3
Jumlah Hari Hujan dan Rata-Rata Curah Hujan Setiap Bulan di Kota Tanjungbalai, 2023

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)
Januari	146	11
Februari	41,5	8
Maret	91,0	10
April	114,5	9
M e i	82,0	9
J u n i	71,0	7
J u l i	48,0	8
Agustus	195,5	11
September	462,5	17
Oktober	231,0	17
November	291,5	19
Desember	151,5	17
	1.926,0	**143**

Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka, 2025

7. Penggunaan lahan

Berdasarkan hasil perhitungan daya dukung dengan menggunakan konsep perhitungan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No, 17 Tahun 2009, Kota Tanjungbalai mempunyai status daya dukung lahan yang defisit terhadap penduduk yang tinggal di Kota Tanjungbalai. Artinya, kebutuhan akan lahan lebih besar dari ketersediaan lahan. Penurunan daya dukung lahan dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang terus meningkat, luas lahan yang semakin berkurang, persentase jumlah petani dan luas lahan yang diperlukan untuk hidup layak, dan jenis komoditas yang ada di wilayah setempat.

Perkembangan penduduk yang didorong dengan adanya kemajuan perekonomian masyarakat serta diiringi kemajuan akan teknologi maupun informasi tentunya akan berdampak pada skala global maupun lokal yang mendorong terjadinya perubahan pemilihan lokasi permukiman dan kegiatan, dengan adanya perkembangan kegiatan dan fungsi suatu lokasi dan wilayah pada akhirnya akan merubah pemanfaatan ruang.

Perubahan pemanfaatan ruang permukiman untuk kebutuhan rumah, bangunan perdagangan dan jasa, dan perlengkapan permukiman lainnya terjadi sejalan dengan penyebaran penduduk dari kondisi yang ada sehingga pemanfaatan ruang permukiman akan semakin ekspansif dari lokasi yang sudah ada.

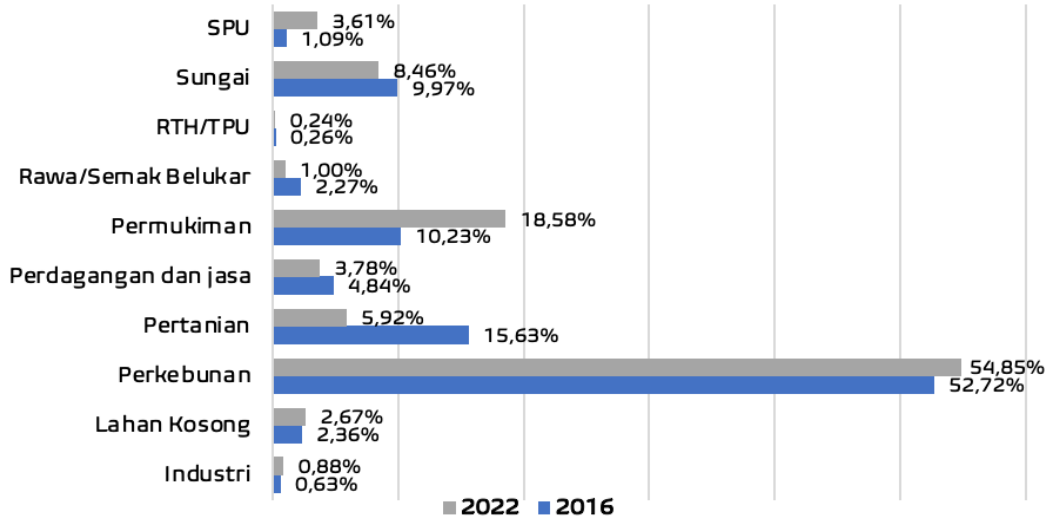
Dalam distribusi ruang, wilayah yang pada saat ini masih memiliki kawasan hutan yang juga berfungsi untuk perlindungan daerah bawahannya ataupun fungsi ekologis lainnya, perlu menyiapkan pengendalian terhadap alih fungsi hutan, baik oleh perambahan maupun pemanfaatan untuk usaha ekonomi formal terutama dalam rangka perolehan PAD, Konflik kepentingan dalam kondisi keterbatasan lahan budidaya perlu diatasi melalui kesepakatan yang mengikat dalam pelestarian kawasan hutan yang berfungsi lindung, Untuk itu, salah satu dasar pengendalian adalah menyesuaikan pengembangan kegiatan pada lahan dengan kemampuan yang memadai.

Berdasarkan hasil analisa digitasi secara makro dengan menggunakan interpretasi peta citra satelit. Kota Tanjungbalai pada tahun 2022 di dominasi olah perkebunan dimana luasnya diperkirakan mencapai 3,299 Ha, sementara untuk kegiatan permukiman di tahun 2022 perkiraan mencapai 1,117 Ha. Bila dilihat dari tabel di bawah dapat disimpulkan terdapat perubahan fungsi lahan dari tahun 2016 hingga 2022, adapun fungsi lahan yang paling meningkat yaitu meningkatnya kawasan permukiman, hal tersebut dapat diperkirakan akibat adanya peningkatan distribusi penduduk yang mengarahkan kepada pemanfaatan lahan untuk permukiman. Untuk lebih jelasnya terkait penggunaan lahan di Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Penggunaan Lahan di Kota Tanjungbalai, 2016-2022

PENGGUNAAN LAHAN	2016	2022
Industri	37,76	53,09
Lahan Kosong	142,06	160,74
Perkebunan	3.171,11	3.299,00
Pertanian	939,87	356,26
Perdagangan dan jasa	291,04	227,48
Permukiman	615,02	1,117,58
Rawa/Semak Belukar	136,63	60,22
RTH/TPU	15,50	14,23
Sungai	599,93	508,98
SPU	65,75	217,12
Jumlah	**6.014,69**	**6.014,69**

Sumber: Revisi RTRW Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033



Gambar 2.4
Persentase Luas Penggunaan Lahan Eksisting Tahun 2016 dan 2022 (Ha)

Berdasarkan gambar di atas dapat kita ketahui bahwa alih fungsi pertanian dari tahun 2016 ke tahun 2022 mencapai 62 persen. Ini berarti bahwa konversi lahan pertanian yang terjadi di Kota Tanjungbalai apabila tidak dilakukan upaya pengendalian, akan mengurangi kapasitas dalam memproduksi pangan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat ketentuan pencegahan alih fungsi lahan pertanian antara lain:

a. Undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang mengatur penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah yang akan membagi habis wilayah administratif menurut fungsi (peruntukan) kawasan, termasuk di dalamnya kawasan lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering dengan ketentuan pengaturan tertentu
b. Keputusan Presiden nomor 53 tahun 1989 juncto Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1996 juncto Keputusan Presiden nomor 98 tahun 1998 tentang Kawasan Industri, melarang perubahan penggunaan lahan pertanian subur untuk pembangunan Kawasan Industri.

8. Keanekaragaman Hayati

Kota Tanjungbalai memiliki keanekaragaman hayati dengan kekayaan flora dan fauna yang unik, termasuk beberapa spesies endemik. Kota ini merupakan habitat berbagai jenis tumbuhan, termasuk flora lokal dan khas ekosistem sungai pesisir dan rawa yang merupakan bagian integral dari ekosistem lahan basah dan estuari, seperti kelapa (Cocos nucifera), nipah (Nypa fruticans), nibung (Oncosperma tigillarium), birah (Ziziphus mauritiana), berombang (Sonneratia caseolaris), ara (Ficus racemosa), putat (Barringtonia racemosa), rukam (Flacourtia rukam), bajaronggi (Premna serratifolia), daun sikontut-kontut (Paederia foetida), sibuas-buas (Premna cordifolia L.), temu pauh (urcuma mangga), serta ulam raja (Cosmos caudatus) yang banyak ditemukan di permukiman dan tepian sungai.

Kota ini juga menjadi habitat bagi satwa lokal seperti buaya muara (Crocodylus porosus), yang juga dikenal sebagai buaya bekatak. Satwa ini merupakan predator di Sungai Asahan, dengan makanan utama berupa ikan, meskipun juga dapat memangsa reptil dan mamalia lain. Satwa lainnya adalah monyet ekor panjang (Macaca fascicularis), yang sering ditemukan di hutan-hutan sekunder dan tepian sungai di Kota Tanjungbalai. Di ekosistem perairan Kota Tanjungbalai juga terdapat berbagai jenis organisme akuatik. Di antaranya udang galah (Macrobrachium rosenbergii) dan kepah lumpur (Polymesoda erosa) yang merupakan organisme bentos di Sungai Asahan. Adapun organisme nekton yang banyak ditemukan antara lain ikan sindarsat (Leptobarbus hoeveni), ikan balido (Cyclocheilichthys apogon), ikan paitan/wader (Rasbora argyrotaenia), ikan putak (Notopterus notopterus), dan ikan kedukang/duri (Hexanematichthys sagor). Selain itu, terdapat 12 kelas plankton di perairan Sungai Asahan, Kota Tanjungbalai, yang terdiri dari 5 kelas fitoplankton dan 7 kelas zooplankton. Kelas fitoplankton tersebut meliputi Bacillariophyceae, Chlorophyceae, Conjugatophyceae, Coscinodiscophyceae, dan Cyanophyceae. Sedangkan kelas zooplankton tersebut antara lain Branchiopoda, Cladocera, Clitellata, Copepoda, Crustacea, Filosia, Gastropoda, Lobosea, Monogonta, Oligotrichea, Tubulinea dan Turbellaria. Satwa darat khas lainnya adalah kepiting kelapa (Birgus latro), yang merupakan artropoda darat terbesar di dunia. Spesies ini dikenal karena kemampuannya memecahkan buah kelapa dengan capit kuatnya untuk mengonsumsi isinya. Di antara vegetasi seperti tanaman nipah, hidup pula serangga dan organisme kecil lainnya, seperti kumbang nipah, yang umumnya merujuk pada kumbang badak (Oryctes rhinoceros). Kumbang ini dikenal sebagai hama utama tanaman kelapa dan berpotensi menyerang nipah. Dalam siklus hidupnya, kumbang ini mengalami fase larva (ulat) sebelum menjadi pupa dan imago (dewasa). Dalam bentuk pupa, kumbang ini dikenal sebagai ulat nipah. Selain itu, terdapat juga cacing nipah (Polychaeta sp.) yang hidup di jaringan lunak atau lumpur di sekitar akar nipah. Meskipun memiliki kekayaan hayati yang beragam, Kota Tanjungbalai tidak memiliki kawasan konservasi maupun cagar alam untuk melindungi flora dan fauna spesifik tersebut. Namun demikian, keanekaragaman hayati di wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam pengembangan ekowisata, perikanan berkelanjutan, dan pemanfaatan tanaman lokal sebagai sumber obat-obatan dan pangan alternatif, yang jika dikelola secara berkelanjutan dapat memberikan manfaat ekologis sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

2.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Karakteristik fisik, sosial ekonomi dan sumberdaya alam yang beragam mengakibatkan potensi wilayah yang berbeda. Pembangunan suatu wilayah tidak dilakukan secara sembarangan tetapi harus memperhatikan karakteristik dan potensi utama suatu wilayah. Berikut ini merupakan rencana pola ruang pengembangan kawasan Kota Tanjungbalai:

1. Pengembangan Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya yaitu tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai budaya tinggi yang telah mempunyai umur lebih dari 50 tahun dan perlu untuk dilestarikan. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya di Kota Tanjungbalai, meliputi :

a. Kawasan perdagangan yang berada di Kelurahan Karya, Kelurahan Perwira, Kelurahan Pantai Burung dan Kelurahan Indra Sakti,
b. Kawasan bangunan tua berupa bangunan yang berusia lebih dari 50 (limapuluh) tahun di Kelurahan Indra Sakti, Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kelurahan Tanjungbalai Kota II dan Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan,
c. Kawasan stasiun kereta api di Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara,

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungbalai arahan terhadap rencana kawasan cagar budaya melalui :

a. Mempertahankan karakteristik bangunan dan lingkungan sekitarnya,
b. Merevitalisasi kawasan cagar budaya,

2. Pengembangan Kawasan Perumahan

Kawasan peruntukan perumahan dikembangkan dengan tujuan untuk pemerataan distribusi kependudukan di wilayah Kota Tanjungbalai yang dilakukan teritegrasi dengan rencana sistem jaringan transportasi sebagai penopang pergerakan penduduk, Kawasan peruntukan perumahan seluas kurang lebih 1,562,3 Ha terdiri dari :

A. Kawasan Permukiman Kepadatan Tinggi (>150 bangunan/ha)

Kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Pada pinsipnya kawasan perumahan padat di Kota Tanjungbalai, terdapat hampir disetiap titik-titik permukiman yang tersebar di :

a. Kecamatan Tanjungbalai Utara dan Kecamatan Tanjungbalai Selatan (Pusat Pelayanan Kota),
b. Kecamatan Teluk Nibung (SPPK 4),
c. Kecamatan Sei Tualang Raso (SPPK 3),
d. Kecamatan Datuk Bandar Timur (SPPK 2),
e. Sampai dengan tahun 2033 perkembangan permukiman kepadatan tinggi tidak diarahkan lagi selain di wilayah tersebut, Kawasan permukiman kepadatan tinggi direncanakan seluas kurang lebih 91 ha dikembangkan ke arah vertikal pada wilayah pusat pelayanan kota di Kecamatan Tanjungbalai Utara dan Kecamatan Tanjungbalai Selatan.

B. Kawasan Permukiman Kepadatan Sedang (51-150 bangunan/ha)

Kawasan permukiman kepadatan sedang di Kota Tanjungbalai direncanakan seluas kurang lebih 163 (seratus enampuluh tiga) hektar di Kecamatan Datuk Bandar,

Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kecamatan Sei Tualang Raso dan Kecamatan Teluk Nibung.

C. Kawasan Permukiman Kepadatan Rendah (0-50 bangunan/ha)

Kawasan perumahan kepadatan tinggi merupakan perumahan kebanyakan yang terdapat di wilayah perkotaan yang relatif kecil atau masih bersifat kedaerahan seperti Kota Tanjungbalai, sehingga alokasinya merupakan alokasi perumahan terbesar. Perumahan kepadatan rendah di Kota Tanjungbalai direncanakan seluas kurang lebih 1,309 yang terletak di Kelurahan Pematang Pasir, Kelurahan Perjuangan, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kelurahan Sungai Merbau Kecamatan Teluk Nibung, Kelurahan Sei Raja, Muara Sentosa, Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso, Kelurahan Sirantau, Sigading, Sijambi, Pantai Johor, Pahang Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Pulau Simardan, Bunga Tanjung, Selat Lancang, Selat Tanjung Medan, Semula Jadi, Pasar Baru Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kelurahan Perwira, Tanjungbalai Kota I, Tanjungbalai Kota II Kecataman Tanjungbalai Selatan.

Pengembangan perumahan di Kota Tanjungbalai juga diklasifikasikan atas 3 (tiga) tipe kavling atau persil bangunan. Klasifikasi luas kavling tersebut ditentukan berdasarkan kondisi luas kavling bangunan saat ini, Adapun klasifikasi luas kavling perumahan tersebut adalah sebagai berikut :

- Kavling besar dengan luas kavling 600 m^2,
- Kavling sedang dengan luas kavling 250 m^2,
- Kavling kecil dangan luas kavling 150 m^2,

Perbandingan yang dipakai dalam membagi jumlah unit rumah yang akan dikembangkan tersebut berpedoman pada standar Perumnas (Perumahan Nasional) yaitu 1 : 3 : 6 atau tipe besar : sedang : kecil.

Selain jenis permukiman diatas, jenis pemukiman yang diatur di Kota Tanjungbalai adalah kawasan perumahan rusunawa pada wilayah SPPK 3 (Kecamatan Sei Tualang Raso) dan Kawasan Perumahan Nelayan yang diarahkan pada wilayah SPPK 4 (Kecamatan Teluk Nibung). Pengertian perumahan rusunawa disini adalah perumahan yang dibangun dengan ketentuan-ketentuan atau persyaratan teknis bangunan/konstruksi tahan gempa, sehingga perumahan yang dibangun tahan terhadap bencana seperti banjir dan gempa bumi. Pembangunan perumahan nelayan ini selain harus memenuhi persyaratan teknis juga jumlah rumahnya dibatasi dan penduduk yang tinggal di kawasan itu, memang penduduk yang benar-benar mata pencahariannya sebagai nelayan.

3. Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa dengan luas 160 Ha dikembangkan untuk mengarahkan perkembangan sektor industri dan jasa dan menciptakan iklim investasi dan perdagangan yang tertib dan teratur. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa meliputi :

a. Kawasan pasar tradisional seluas kurang lebih 3,5 Ha dikembangkan di Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai

Selatan, Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung, dan Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso.

b. Kawasan pusat perbelanjaan seluas kurang lebih 5 Ha dikembangkan di Kelurahan Mata Halasan, Kelurahan Tanjungbalai Kota II dan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara.

c. Kawasan toko modern seluas kurang lebih 3 Ha dikembangkan di Kelurahan Indra Sakti, Kelurahan Karya dan Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan.

4. Pengembangan Kawasan Perkantoran

Berdasarkan kondisi eksistingnya, kawasan peruntukan perkantoran di Kota Tanjungbalai tersebar dibeberapa kawasan, antara lain SPPK 1 dan Pusat Pelayanan Kota. Kawasan peruntukan perkantoran dikembangkan untuk mengoptimalkan kegiatan perkantoran yang didukung dengan kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan hunian. Kawasan peruntukan perkantoran dengan luas 69 Ha terdiri dari :

Kawasan perkantoran pemerintahan meliputi kawasan perkantoran pemerintahan di sepanjang Jl, Jend, Sudirman dan sekitarnya pada wilayah SPPK 1 di Kelurahan Sijambi, Kelurahan Pahang, dan Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar.

Kawasan perkantoran swasta berada di Kelurahan Tanjungbalai Kota II dan Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara. Rencana pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan dan swasta meliputi:

a. Kawasan perkantoran pemerintahan di Kelurahan Pahang dan Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar.

b. Kawasan perkantoran swasta di Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur dan Kelurahan Sei Raja kecamatan Sei Tualang Raso.

5. Pengembangan Kawasan Industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri di Kota Tanjungbalai pada prinsipnya saat ini sudah berkembang di hampir diseluruh sub pusat pelayanan kota, antara lain: industri besar/sedang tersebar di SPPK 1 (Kelurahan Pahang, Sirantau dan Pantai Johor), SPPK 3 (Kelurahan Keramat Kubah dan Sumber Sari) dan SPPK 4 (Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kapias Pulau Buaya, Sei Merbau dan Pematang Pasir). Kawasan peruntukan industri dikembangkan untuk mendukung sektor industri dan membatasi dampak negatif industri terhdap kawasan sekitarnya. Sampai dengan tahun 2033 rencana pengembangan kawasan peruntukan industri seluas ± 348 ha yang di arahkan pada:

a. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro; dan Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro di Kota Tanjungbalai seluas kurang lebih 6,15 hektar terdapat di Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Teluk Nibung;

b. Kawasan peruntukan industri menengah;

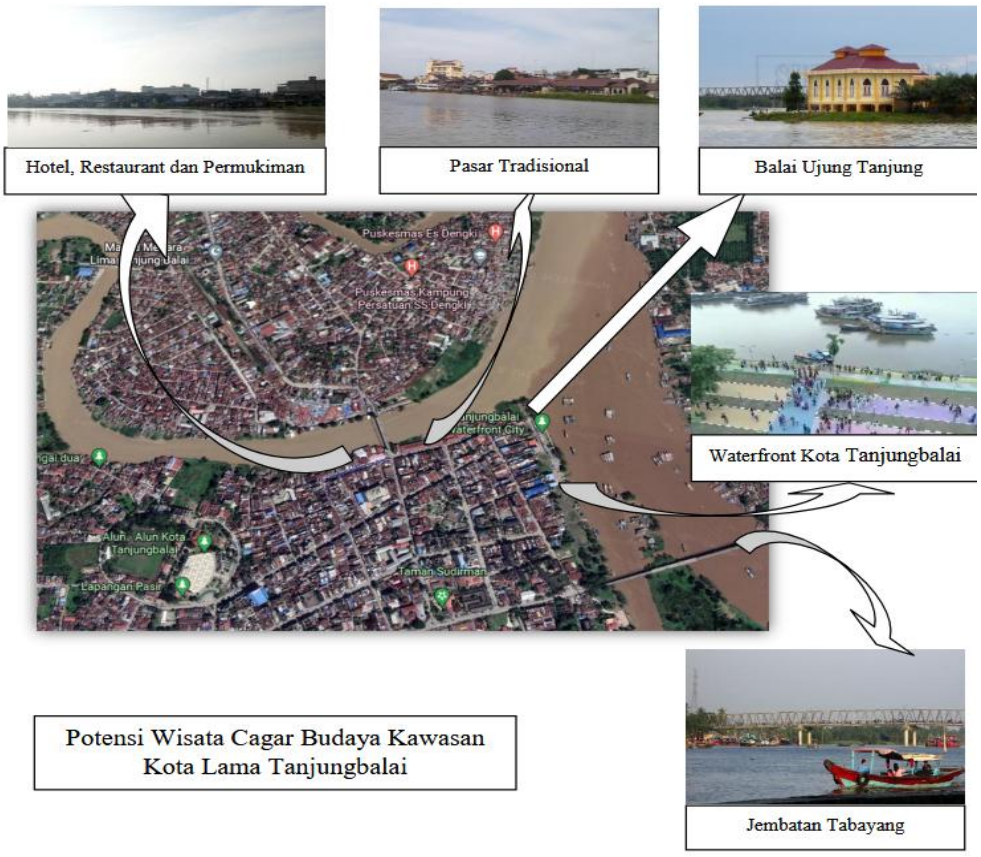
c. Kawasan peruntukan industri menengah bidang pengolahan hasil perikanan dan perkebunan di Kota Tanjungbalai seluas kurang lebih 342,08 hektar terdapat di Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso; dan Kelurahan Beting Kuala Kapias,

Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kelurahan Sei Merbau, Kelurahan Pematang Pasir, dan Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung.

6. Pengembangan Kawasan Pariwisata

Pengembangan kawasan ini diarahkan dengan potensi wisata budaya, wisata buatan dan wisata alam dengan lahan seluas ± 157 meliputi kawasan pariwisata alam di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur, dan Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung.

Kawasan tepi sungai selalu menjadi tempat yang menarik untuk permukiman. Gejala tersebut terjadi karena beberapa alasan diantaranya adalah bahwa kawasan tepi sungai merupakan dataran subur yang dapat memproduksi pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudahan transportasi air, kebutuhan atas air (minum, mandi dan cuci) dan salah satu pintu gerbang perdagangan dari tempat yang terpisah oleh badan air. Melihat kenyataan tersebut, upaya penataan dan perbaikan kawasan tepi sungai merupakan hal yang tidak berlebihan, bahkan sudah selayaknya dilakukan. Penataan yang baik akan menjadikan suatu kawasan yang berpotensi sebagai suatu destinasi wisata. Dilihat dari permasalahan yang ada, penataan kawasan tepi sungai menjadi salah satu model alternatif penanganan Kota Tanjungbalai mengatasi permasalahan banjir dan kumuh perkotaan. Kota Tanjungbalai telah mencoba menata kawasan tepi air Waterfront Kota Tanjungbalai tepatnya berada di pinggir Sei Asahan di jalan Asahan Kota Tanjungbalai. Kawasan ini berpotensi menjadi kawasan cagar budaya karena merupakan kawasan kota lama. Pada kawasan ini terdapat potensi-potensi wisata cagar buda seperti Bangunan Balai Ujung Tanjung, Pasar Tradisional, Restaurant, Hotel dan bekas lahan Istana Kesultanan yang akan dibangun kembali Replika Istana Sultan. Juga terdapat Jembatan Tabayang yang menjadi jembatan terpanjang di Provinsi Sumatera Utara.



Gambar 2.5
Potensi Wisata Kota Tanjungbalai

Selain Kawasan Waterfront, Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sumatera Utara telah menata kawasan permukiman kumuh di pinggir Sungai Silau yang berada di Kelurahan Sirantau. Kawasan ini ditata dengan membuat pedestrian pejalan kaki di sepanjang Sungai Silau. Selain untuk tujuan wisata, kegiatan ini juga bertujuan untuk menjadi benteng masuknya air ke kawasan permukiman dan perkotaan Kota Tanjungbalai. Kondisi muka air sungai yang tinggi akibat sedimentasi menjadi salah satu penyebab banjir di kawasan permukiman dan perkotaan.

Aksesibilitas Pendukung Pariwisata

Akses menuju pulau-pulau kecil DAS Asahan adalah melalui badan sungai dengan sarana perahu. Saat ini belum ada angkutan air yang melayani transportasi umum ke pulau-pulau tersebut, hanya para nelayan dan pengambil hasil bumi (seperti Nira dan Sagu) yang berkegiatan di pulau-pulau tersebut dengan menggunakan perahu bermotor milik nelayan.

Untuk pengembangan pulau-pulau tersebut salah satu prasarana dasar yang harus tersedia adalah transportasi air sebagai aksesibilitas ke/dari pulau-pulau tersebut. Pada RTRK Tanjungbalai terdapat pengembangan Kawasan Water Front di Kecamatan Datuk Bandar Timur. Kawasan Water Front sebagai suatu kawasan yang berhadapan langsung dengan Sungai Asahan dan menonjolkan kegiatan yang berhubungan langsung maupun

tidak langsung dengan keberadaan Sungai Asahan maupun kegiatan transisi antara kegiatan perkotaan dan badan sungai, dapat dimanfaatkan sebagai vocal point aksesibilitas ke/dari pulau-pulau tersebut. Untuk itu pembangunan dermaga di Kawasan Water Front untuk transportasi air lokal, khususnya untuk penunjang kegiatan pariwisata merupakan prasyarat
pertama yang harus dipenuhi.

Pengembangan Fasilitas Penunjang Wisata

Untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan pemenuhan kebutuhan wisatawan selama berwisata, suatu objek daerah tujuan wisata seharusnya dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung (seperti: restoran, kafe, parkir, dan lain-lain) agar wisatawan dapat menambah waktu tinggalnya lebih lama.

Hampir semua objek daerah tujuan wisata di Kota Tanjungbalai belum dilengkapi dengan fasilitas penunjang wisata ini, kalaupun ada kondisinya sudah tidak terawat lagi. Untuk itu pembangunan fasilitas wisata di tiap-tiap objek daerah tujuan wisata harus menjadi prioritas pengembangan pariwisata.

7. Pengembangan Perikanan

Di Kota Tanjungbalai lokasi pendaratan hasil perikanan tangkap tersebar di 3 Kecamatan yaitu kecamatan Teluk Nibung, kecamatan Tanjungbalai Utara, kecamatan Tanjungbalai Selatan dengan jumlah nelayan sebesar 7.703 jiwa. Pada tahun 2024 produksi perikanan tangkap sebesar ± 12.030 ton. Jenis ikan yang ditangkap merupakan produk perikanan komoditas ekspor seperti pari, senangin, kembung, tongkol, kakap, kerapu, bawal, udang, kepiting, cumi-cumi, mayong.

Sebagai proses produksi yang komersial, pemasaran hasil perikanan merupakan syarat mutlak yang diperlukan dalam pembangunan di sektor perikanan karena sistem pemasaran mampu menciptakan nilai tambah melalui guna tempat, guna bentuk dan guna waktu. Para nelayan di Kota Tanjungbalai mendaratkan ikan hasil tangkapannya di tangkahan pribadi. Produksi perikanan tangkap sebagian kecil di olah dengan teknologi yang sederhana menjadi terasi, ikan asin, dan ikan rebus sebagian lagi didistribusikan dalam bentuk segar ke pasar lokal maupun ke luar daerah. Permasalahannya adalah kualitas ikan yang cepat sekali menurun sebelum sampai ke tangan konsumen dikarenakan penanganan yang seadanya maupun lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tujuan. Hal ini menjadi peluang investasi usaha di bidang pengolahan hasil perikanan, agar dapat mendirikan pabrik pengolahan ikan sehingga memberikan nilai tambah pada produk perikanan. Untuk memperkuat upaya hilirisasi perikanan di Kota Tanjungbalai, maka pemerintah Kota Tanjungbalai akan membuat strategi dan inisiatif melibatkan semua pelaku sektor industri perikanan termasuk lembaga riset, pembiayaan dan investor. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hilirisasi perikanan di Kota Tanjungbalai:

a. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur: Membangun dan meningkatkan fasilitas pengolahan hasil laut, seperti pabrik pengolahan ikan, gudang berpendingin, dan fasilitas pengepakan.

b. Pengembangan Teknologi Pengolahan: Mengadopsi teknologi modern dalam pengolahan hasil laut, seperti pengeringan, pengasapan, pembekuan, dan pengalengan termasuk meningkatkan riset dan pengembangan untuk menciptakan produk-produk olahan baru yang bernilai tinggi.
c. Pelatihan dan Pendidikan: Memberikan pelatihan kepada nelayan dan pekerja industri pengolahan tentang teknik-teknik pengolahan dan manajemen bisnis serta Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kualitas dan standar keamanan pangan.
d. Kemitraan dan Kerjasama: Membentuk kemitraan antara pemerintah, swasta, dan komunitas nelayan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta mendorong investasi dari sektor swasta dalam pengembangan fasilitas pengolahan dan pemasaran.
e. Diversifikasi Produk: Mengembangkan berbagai produk olahan yang dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional, seperti nugget ikan, sosis ikan, dan produk makanan laut siap saji.

8. Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau

Ruang terbuka non hijau dikembangkan dengan tujuan untuk menjaga ketersediaan ruang terbuka sebagai wadah aktivitas sosial dan budaya politik dengan lahan seluas kurang lebih 7,25 ha meliputi:

a. Kawasan pelataran parkir pada bangunan pemerintahan, perdagangan dan jasa maupun fasilitas umum lainnya seluas ± 1,39 ha di Kelurahan Sijambi Kecamatan Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan, dan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara;
b. Lapangan upacara seluas ± 2 ha di Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan;
c. Lapangan olahraga/stadion, lapangan bermain dan rekreasi ± 3,86 ha di Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan; dan
d. Pembatas/median jalan serta koridor antar bangunan seluas ± 0,7 ha di Kelurahan Sijambi (Jalan Kartini dan Jalan Stadion Baru) Kecamatan Datuk Bandar.

9. Pengembangan Ruang Evakuasi Bencana

Ruang evakuasi bencana merupakan upaya untuk menyediakan ruang evakuasi darurat bagi warga kota sebagai tempat berlindung dan tempat penyaluran bantuan sosial. Adapun di dalam Kota Tanjungbalai diarahkan ruang evakuasi bencana sebagai berikut :

1. Lapangan sultan abdul jalil rahmadsyah di kelurahan pantai burung kecamatan tanjungbalai selatan;
2. Fasilitas olahraga (gedung serba guna) kelurahan sijambi kecamatan datuk bandar; dan
3. Fasilitas olahraga (lapangan bola kaki) kelurahan pematang pasir kecamatan Teluk Nibung.

10. Pengembangan Kawasan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian dikembangkan untuk menjaga keberlangsungan ketersediaan pangan dan lahan pertanian. Kawasan peruntukkan lahan pertanian di Kota Tanjungbalai seluas ± 1,591 ha yang diarahkan dengan kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Sampai dengan tahun 2033 pengembangan arahan Kawasan peruntukan pertanian dikembangkan meliputi:

a. Kawasan tanaman pangan dengan luas keseluruhan kurang lebih 359 hektar meliputi kawasan persawahan beririgasi di Kelurahan Sijambi, Pantai Johor dan Sirantau dengan luas kurang lebih 361 (tiga ratus enam puluh satu) hektar ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan; dan
b. Kawasan hortikultura dengan komoditas utama kelapa sawit, kelapa dan palawija di Kelurahan Pahang, Gading Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Selat Tanjung Medan, Simula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kelurahan Pasar Baru, Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso, dan Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Pematang Pasir, Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung.

11. Pengembangan Iklim Investasi

Kota Tanjungbalai berada pada lokasi yang sangat strategis yaitu merupakan lintasan jalur lalu lintas Internasional Selat Malaka yang padat dan berhadapan dengan negara tetangga (Malaysia) lokasi yang strategis ini memungkinkan Kota Tanjungbalai untuk mengoptimalkan perannya dalam sistem ekonomi lokal, regional, nasional maupun internasional di masa yang akan datang. Adapun rencana investasi Kota Tanjungbalai pada saat ini, berdasarkan data informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai yaitu :

a. Pengembangan Pelabuhan
b. Pengembangan Kawasan Industri
c. Penambahan sumber daya energi listrik terbarukan
d. Peningkatan kapasitas pengolahan Air Bersih
e. Pengembangan destinasi wisata (Waterfront City dan Wisata Pulau) serata Perhotelan.
f. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan

Adapun arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal:

a. Penyelenggaraan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
b. Melakukan harmonisasi dan simplikasi prosedur serta penyederhanaan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal mencakup penyelenggaraan sistem Online Single Submission (OSS) seperti dikemukakan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 dan kemudian diatur lebih rinci pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
c. Mengarahkan lembaga penanaman modal di pusat dan daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (problem-solving).

12. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerja sama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat).

Adapun usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai yaitu:

a. Melakukan pemutakhiran data seluruh UMKM di Kota Tanjungbalai, memverifikasi keabsahan data UMKM, selanjutnya menetapkan UMKM yang potensial untuk dikembangkan seperti penawaran kerja sama dengan usaha besar.
b. Melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya UMKM di Kota Tanjungbalai, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi dan manajemen.
c. Memfasilitasi pihak UMKM dalam hal pengenalan dan pemasaran produk mereka, seperti mengikutsertakan dalam berbagai bazar, pameran promosi, pameran perdagangan, temu usaha, terutama yang berhubungan dengan penanam modal atau investor potensial.
d. Memanfaatkan CSR perusahaan – perusahaan yang berada di Kota Tanjungbalai agar lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktivitas UMKM terutama yang bergerak di sektor–sektor yang prioritas.

2.3. Wilayah Rawan Bencana

Identifikasi wilayah rawan bencana di Kota Tanjungbalai dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana yang berpotensi terjadi. Area Kota Tanjungbalai yang relatif beradadi dataran rendah dengan kemiringan wilayah hanya sekitar 0-3 meter di atas permukaan laut, membuat Kota Tanjungbalai cenderung rawan terhadap genangan-genangan air, baik yang disebabkan oleh air hujan maupun dari pengaruh pasang surut air sungai.

Bencana alam pada dasarnya adalah gejala atau proses yang terjadi akibat upaya alam mengembalikan keseimbangan ekosistem yang terganggu, baik proses alam itu sendiri maupun oleh manusia. Jenis bencana alam yang berpotensi terjadi di Kota Tanjungbalai hanya kerawanan terhadap genangan-genangan air baik yang disebabkan oleh hujan maupun pengaruh pasang surut air sungai.

A. Rawan Genangan

Potensi rawan genangan di Kota Tanjungbalai diakibatkan oleh rendahnya ketinggian permukaan Kota Tanjungbalai terhadap permukaan air, sehingga bila terjadi pasang maka air yang terdapat di daratan Tanjungbalai tidak mampu turun menuju

sungai. Sebaliknya air pasang naik kedaratan melalui sistem drainase perkotaan sehingga terjadilah genangan.

Adapun daerah-daerah yang menjadi rawan genangan tersebut umumnya di sekitar aliran sungai yaitu di Kelurahan Pahang dan Kelurahan Gading (Kecamatan Datuk Bandar), Kelurahan Bunga Tanjung, Selat Lancang, Selat Tanjung Medan, Semula Jadi dan Kelurahan Pulau Simardan (Kecamatan Datuk Bandar Timur).

B. Rawan Banjir

Potensi rawan banjir di Kota Tanjungbalai pernah terjadi yang diakibatkan oleh bencana alam jebolnya tembok (benteng jalan) sepanjang aliran Sungai Silau, hal ini diakibatkan oleh tingginya debit air sungai yang mempengaruhi secara langsung terhadap ketahanan benteng itu sendiri. Daerah yang berpotensi rawan banjir secara umumnya Kota Tanjungbalai mempunyai potensi tetapi yang telah mengalami potensi rawan banjir ini pada daerah-daerah seperti Kelurahan Sijambi, Kelurahan Pantai Johor, Kelurahan Gading, Kelurahan Pahang dan Kelurahan Sirantau.

Wilayah rawan bencana alam di Kota Tanjungbalai merupakan wilayah banjir yang terjadi di sekitar daerah aliran Sungai Silau dan Sungai Asahan. Kawasan yang dimaksud adalah kawasan rawan banjir/genangan berada disebagian wilayah Kecamatan Datuk Bandar di Kelurahan Sijambi, Kelurahan Pahang, Kelurahan Gading, Kelurahan Pantai Johor dan Kecamatan Datuk Bandar Timur di Kelurahan Semula Jadi, Kelurahan Selat Tanjung Medan, Kelurahan Bunga Tanjung, Kawasan rawan banjir tersebut dilakukan suatu rencana arahan ruang sebagai antisipasi penanggulangan melalui:

a. Normalisasi dan pengerukan Sungai Asahan, Sungai Silau, Sungai Bandar Jepang dan Sungai Bandar Sipoyong;
b. Melaksanakan penanaman di daerah sempada sungai Asahan dan Sungai Silau;
c. Membangun benteng alam sebagai penyangga.

Tabel 2.5
Daerah Rawan Bencana Banjir di Kota Tanjungbalai

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
1	Datuk Bandar	Pahang	Banjir Kiriman, Banjir Rob
		Gading	Banjir Kiriman, Banjir Rob
		Sijambi	Banjir Kiriman, Banjir Rob
		Pantai Johor	Banjir Kiriman, Banjir Rob
		Sirantau	Banjir Kiriman, Banjir Rob
2	Datuk Bandar Timur	Bunga Tanjung	Banjir Kiriman, Banjir Rob
		Selat Lancang	Banjir Kiriman, Banjir Rob
		Selat Tanjung Medan	Banjir Kiriman, Banjir Rob
		Pulau Simardan	Banjir Rob
		Semula Jadi	Banjir Rob
3	Tanjungbalai Utara	TB Kota III	Banjir Rob

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
		TB Kota IV	Banjir Rob
		Kuala Silo Bestari	Banjir Rob
		Matahalasan	Banjir Rob
4	Sei Tualang Raso	Sumber Sari	Banjir Rob
		Pasar Baru	Banjir Kiriman, Banjir Rob, Pecah Benteng
		Muara Sentosa	Banjir Kiriman, Banjir Rob, Pecah Benteng
		Keramat Kubah	Banjir Rob
5	Teluk Nibung	Pematang Pasir	Banjir Rob
		Beting Kuala Kapias	Banjir Rob
		Kapias Pulau Buaya	Banjir Rob
		Sei Merbau	Banjir Rob
		Perjuangan	Banjir Rob
6	Tanjungbalai Selatan	Pantai Burung	Banjir Rob
		Indra Sakti	Banjir Rob

Sumber: BPBD Kota Tanjungbalai, 2025

Kejadian bencana lain yang terjadi di Kota Tanjungbalai selain banjir adalah bencana kebakaran. Kota Tanjungbalai memiliki luas wilayah hanya sebesar 6,052 Ha atau 60,52 km^2 dengan jumlah penduduk yang besar mengakibatkan kepadatan penduduk tinggi terutama wilayah Kecamatan Tanjung Balai Utara dan Kecamatan Teluk Nibung sehingga memperbesar resiko kebakaran terjadi. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan kejadian bencana di Kota Tanjungbalai.

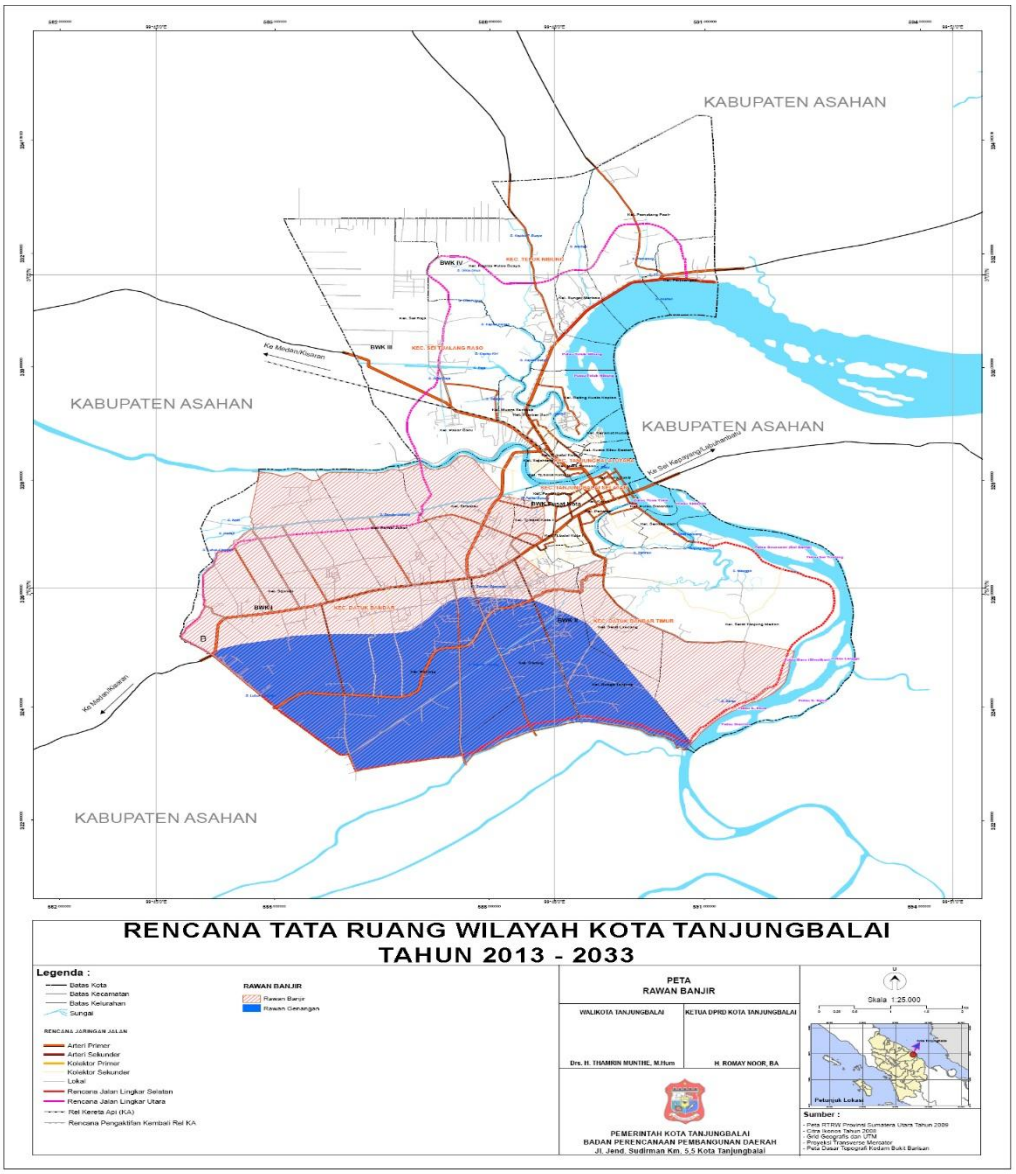
Tabel 2.6
Kejadian Bencana di Kota Tanjungbalai, 2020-2024

TAHUN	BENCANA	LOKASI KEJADIAN	KETERANGAN
2020	Kebakaran	Kelurahan Sei Merbau, Kelurahan Tanjungbalai Kota IV, Kelurahan Tanjungbalai Kota III, Kelurahan Tanjungbalai Kota II, Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kelurahan Kuala Silau Bestari, Kelurahan Perwira, Kelurahan Karya, Kelurahan Indra Sakti, Kelurahan Pantai Burung,	**36 kasus**

TAHUN	BENCANA	LOKASI KEJADIAN	KETERANGAN
		Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kelurahan Pematang Pasir, Kelurahan Pantai johor, Kelurahan Matahalasan, Kelurahan Muara Sentosa, Kelurahan Pulau Simardan, Kelurahan Keramat Kubah, Kelurahan Perjuangan, Kelurahan Selat Lancang	
2021	Kebakaran	Kelurahan Perjuangan, Kelurahan Semula Jadi, Kelurahan Sijambi, Kelurahan Perwira, Kelurahan Pantai Burung, Kelurahan Tanjungbalai Kota III	**8 kasus**
2022	Kebakaran	Kelurahan Gading Kelurahan Bunga Tanjung Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kelurahan Karya Kelurahan Pahang Kelurahan Pantai Burung Kelurahan Pantai Johor Kelurahan Pasar Baru Kelurahan Perwira Kelurahan Sejahtera Kelurahan Sijambi Kelurahan Tanjungbalai Kota I Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kabupaten Asahan	**23 Kasus**
2023	Kebakaran	Kelurahan Beting Kuala Kapias Kelurahan Gading Kelurahan Indra Sakti Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kelurahan Kuala Silo Bestari Kelurahan Pematang Pasir Kelurahan Perjuangan Kelurahan Perwira Kelurahan Sei Merbau Kelurahan Sei Raja Kelurahan Selat Tanjung Medan Kelurahan Semula Jadi	**35 Kasus**

TAHUN	BENCANA	LOKASI KEJADIAN	KETERANGAN
		Kelurahan Sijambi Kelurahan Sirantau Kelurahan Sumber Sari Kelurahan Tanjungbalai Kota I Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kabupaten Asahan	
	Banjir	Kelurahan Sijambi, Gading, Pahang, Pantai Johor, Sirantau, Bunga Tanjung, Selat Tanjung Medan, Selat Lancang	
2024	Kebakaran	Kelurahan Sirantau Kelurahan Beting Kuala Kapias Kelurahan Bunga Tanjung Kelurahan Gading Kelurahan Indra Sakti Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kelurahan Karya Kelurahan Keramat Kubah Kelurahan Pahang Kelurahan Pantai Burung Kelurahan Pantai Johor Kelurahan Pasar Baru Kelurahan Perjuangan Kelurahan Selat Lancang Kelurahan Selat Tanjung Medan Kelurahan Semula Jadi Kelurahan Sijambi Kelurahan Sirantau Kelurahan Tanjungbalai Kota I Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kabupaten Asahan	**50 Kasus**
	Banjir	Kelurahan Sijambi, Gading, Pahang, Pantai Johor, Sirantau, Bunga Tanjung, Selat Tanjung Medan, Selat Lancang	

Sumber: Satpol PP Kota Tanjungbalai, 2025



Gambar 2.6

Peta Wilayah Kota Tanjungbalai berdasarkan Rawan Banjir

Sumber: Revisi RTRW Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033

2.4. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup, Kebencanaan dan Perubahan Iklim

Analisis daya dukung dan daya tampung untuk aspek air, udara, pangan, serat, sumberdaya genetik, kebencanaan, dan perubahan iklim di Kota Tanjungbalai, dalam kaitannya dengan RPJPD Kota Tanjungbalai 2025-2045, adalah sebagai berikut:

1. **Air**: Kota Tanjungbalai mengalami defisit daya dukung penyediaan air bersih yang signifikan. Dengan populasi 175.223 jiwa dan konsumsi rata-rata 1.600 m^3 per orang per tahun, kebutuhan air mencapai sekitar 790.684.800 m^3 per tahun, sementara

ketersediaan hanya sekitar 23.542.293 m^3 per tahun, menyebabkan defisit mencapai 767.142.507 m^3 per tahun.

2. **Udara**: DDDTLH yang dominan untuk pemeliharaan kualitas udara di Kota Tanjungbalai berada pada kondisi tinggi dengan luas 3.009,07 Ha atau sekitar 50,1% dari total area.
3. **Pangan**: Terdapat defisit yang signifikan dalam penyediaan beras. Konsumsi beras penduduk Tanjungbalai sebesar 19.099,3 ton per tahun, sedangkan ketersediaan hanya 8.304 ton per tahun, sehingga terdapat defisit sebesar 10.795,3 ton per tahun .
4. **Serat**: Jasa ekosistem penyediaan serat di dominasi oleh kondisi tinggi, dengan luas area 3.722,75 Ha atau 62% dari total area. Daya dukung dan daya tampung yang tinggi untuk penyediaan serat dominan berada di Kecamatan Datuk Bandar dan Datuk Bandar Timur.
5. **Sumberdaya Genetik**: Kondisi jasa ekosistem penyediaan sumberdaya genetik didominasi oleh kondisi rendah dan sangat rendah dengan luas 4.246,09 Ha atau 70,7% dari total area, tersebar tidak merata di Kota Tanjungbalai.
6. **Kebencanaan**: Mayoritas wilayah Kota Tanjungbalai memiliki DDDTLH yang rendah dan sangat rendah untuk pencegahan dan perlindungan dari bencana alam dengan total luas 5.044,32 Ha atau 84% dari total area. Hal ini memerlukan upaya tambahan dari BPBD Kota Tanjungbalai untuk mencapai target kebencanaan pada tahun 2030.
7. **Perubahan Iklim**: Dampak perubahan iklim yang dirasakan di Kota Tanjungbalai termasuk peningkatan permukaan air laut yang memasuki kawasan pemukiman dan pusat kota, serta perubahan pola curah hujan dan kelembaban udara.

Dalam menyusun kebijakan untuk masa depan Kota Tanjungbalai, berikut beberapa langkah strategis yang dapat dipertimbangkan, mengacu pada tantangan daya dukung dan daya tampung lingkungan Kota Tanjungbalai 2025-2045:

1. **Manajemen Sumber Daya Air**:
    - Meningkatkan kapasitas infrastruktur penampungan dan distribusi air, termasuk pembangunan waduk atau peningkatan kemampuan penampungan air hujan.
    - Mengimplementasikan program penghematan air dan kampanye penggunaan air secara efisien.
    - Mengembangkan teknologi penyaringan dan daur ulang air untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya air yang terbatas.
2. **Peningkatan Kualitas Udara**:
    - Mengembangkan dan menerapkan peraturan yang ketat terhadap emisi polutan dari industri dan kendaraan.
    - Memperluas ruang terbuka hijau sebagai 'paru-paru' kota untuk meningkatkan kualitas udara.
    - Mendorong penggunaan energi bersih dan teknologi rendah karbon untuk mengurangi pencemaran udara.

3. **Ketahanan Pangan**:
    - Mengembangkan sektor pertanian urban untuk meningkatkan produksi pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor.
    - Mendukung diversifikasi pangan.
    - Meningkatkan kapasitas dan efisiensi rantai pasokan pangan untuk menurunkan kerugian pascapanen.
4. **Pengelolaan Sumberdaya Genetik**:
    - Melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati.
    - Mendorong penelitian dan pengembangan dalam bidang genetika untuk melestarikan dan mengoptimalkan sumberdaya genetik.
5. **Pengurangan Resiko Bencana**:
    - Memperkuat infrastruktur kota untuk menjadi lebih tahan terhadap bencana alam.
    - Meningkatkan sistem peringatan dini dan mempersiapkan komunitas untuk menghadapi bencana.
    - Merancang dan menerapkan pembangunan kawasan perkotaan yang mempertimbangkan risiko bencana alam.
6. **Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim**:
    - Mengadopsi strategi pembangunan rendah karbon dan mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan kota.
    - Meningkatkan inisiatif seperti penghijauan, pengelolaan limbah, dan efisiensi energi.
    - Melakukan pendidikan dan advokasi kepada masyarakat tentang pentingnya tindakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
7. **Integrasi Pembangunan Berkelanjutan**:
    - Menyusun rencana tindakan lokal untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil.
    - Memastikan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan berkala untuk memantau kemajuan dan membuat penyesuaian kebijakan.
8. **Inisiatif Ekonomi Berkelanjutan**:
    - Mengembangkan industri yang berkelanjutan dan memberikan peluang pekerjaan yang ramah lingkungan.
    - Mendorong investasi dan inovasi dalam ekonomi hijau dan ekonomi biru untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi.
9. **Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan**:
    - Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
    - Menggalakkan program kewirausahaan sosial yang mempromosikan solusi berkelanjutan untuk masalah lokal.

Daya tampung lingkungan hidup mengacu pada kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Selain itu, diperlukan sinergi antara berbagai tingkatan pemerintahan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirancang dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal untuk pembangunan berkelanjutan Kota Tanjungbalai.

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Tanjungbalai adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam wilayah Kota Tanjungbalai pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Dalam konteks global, IKLH berperan penting dalam memastikan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya untuk memantau kualitas air dan mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan penyediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan berdasarkan indikator Indeks Kualitas Air (IKA).

Perhitungan IKLH berdasarkan pemantauan kualitas lingkungan termasuk kualitas air dan udara ambien dan penghitungan tutupan lahan yang berkesinambungan memberikan dasar bagi kerja sama internasional dalam mengatasi isu-isu lingkungan global dan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada kesehatan lingkungan dan keadilan sosial. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Tanjungbalai tahun 2024 adalah nilai indeks 63,80 melampaui target nilai indeks 62,79. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tersebut termasuk kategori sedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Tabel 2.7
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai 2024

Variabel	IKU	IKA	IKTL	IKLH
Nilai Indeks	55,71	90,98	27,40	63,80
Target	54,01	87,74	31,74	62,79

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai 2025

Walaupun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2024 tersebut melampaui target yang ditetapkan yaitu indeks 62,79 tetapi masih di bawah capaian nasional (indeks 73,07) dan capaian Provinsi Sumatera Utara (indeks 69). Salah satu komponen dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tersebut yang masih di bawah target yang ditentukan yaitu Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan nilai indeks 27,40 dibawah target nilai indeks 31,74. IKL Kota Tanjungbalai tahun 2024 berada pada peringkat 419 dari 514 Kabupaten/Kota secara nasional dan pada peringkat 26 dari 33 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara. Nilai IKL Kota Tanjungbalai pada indeks 27,40 menunjukkan bahwa tutupan vegetasi Kota Tanjungbalai masih relatif rendah, hal tersebut berhubungan dengan RTH publik sebesar 20% masih jauh dari kondisi ideal sebagaimana

ditetapkan, terutama pada area berfungsi lindung. Rendahnya tutupan vegetasi Kota Tanjungbalai juga disebabkan oleh masih rendahnya pengawasan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam menerapkan ketentuan penggunaan 10 persen luas sebagai RTH pada lahan-lahan privat. Perubahan tutupan vegetasi yang relatif tinggi akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan non tutupan vegetasi di Kota Tanjungbalai juga besar pengaruhnya terhadap rendahnya niali IKL Kota tanjungbalai Tahun 2024. Sementara komponen lainnya yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2024 yaitu indeks 55,71 telah melampaui target indeks 54.01. IKA Kota Tanjungbalai berada pada peringkat 121 dari 514 Kabupaten/Kota secara nasional dan pada peringkat 14 dari 33 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara.

Nilai IKA Kota Tanjungbalai pada indeks 55,71 yang menandakan adanya ruang signifikan untuk peningkatan dalam pengelolaan kualitas air. Nilai ini mengimplikasikan bahwa masalah seperti pencemaran air oleh limbah domestic, industri, dan pertanian masih menjadi tantangan utama. Kebijakan yang ditujukan untuk perlindungan sumber air, peningkatan system pengolahan limbah, dan edukasi masyarakat mengenai praktik pembuangan limbah yang bertanggung jawab, menjadi penting untuk diintensifkan. Komponen Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Tanjungbalai pada tahun 2024 yaitu indeks 90,98 telah melampau target indeks 87,74. IKU Kota Tanjungbalai berada pada peringkat 264 dari 514 Kabupaten/Kota secara nasional dan pada peringkat 25 dari 33 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara.

Nilai IKU Kota Tanjungbalai pada indeks 90,98 menggambarkan kualitas udara yang relatif sangat baik. Nilai ini mengindikasikan bahwa upaya pengendalian polusi udara dan implementasi standar emisi telah cukup efektif. Namun, tetap penting untuk mempertahankan dan meningkatkan strategi pengelolaan kualitas udara, terutama di wilayah dengan risiko polusi tinggi. Secara keseluruhan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Tanjungbalai tahun 2024 yang berada pada peringkat 354 dari 514 Kabupaten/Kota. IKLH Kota Tanjungbalai Tahun 2024 masih di bawah berada pada peringkat 26 dari 33 Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara memerlukan langkah-langkah kebijakan yang komprehensif untuk dapat meningkatkan nilai komposit dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tersebut dan aspek-aspek lingkungan hidup perlu mendapatkan perhatian lebih. Integrasi kebijakan lingkungan yang menyeluruh, yang mencakup udara, air, dan tanah serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan, menjadi kunci untuk meningkatkan nilai IKLH ini.

B. Indeks Resiko Bencana

Dalam rangka meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan, analisis Indeks Risiko Bencana (IRB) menjadi komponen penting dalam dokumen RPJPD Kota Tanjungbalai 2025-2045. Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat risiko yang dihadapi oleh Kota Tanjungbalai terhadap berbagai jenis bencana, serta kerentanan dan kapasitas daerah dalam menghadapinya. Dengan memahami IRB, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam mitigasi dan penanggulangan bencana.

Tabel 2.8
Indeks Risiko Bencana Kota Tanjungbalai 2024

No	Jenis Bencana	Skor	Kelas Resiko
1	Banjir	29,24	Tinggi
2	Tanah Longsor	9,75	Sedang
3	Kekeringan	10,12	Sedang
4	Cuaca Ekstrim	11,83	Tinggi
5	Gempa Bumi	9,40	Sedang
TOTAL	**107,26**	**Sedang**	

Sumber: Buku IRBI 2025

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana (IRB) tahun 2024, Kota Tanjungbalai memiliki tingkat risiko sedang dengan total skor 107,26, yang mencakup berbagai jenis bencana seperti banjir (29,24 risiko tinggi), tanah longsor (9,75, risiko sedang), kekeringan (10,12, risiko sedang), cuaca ekstrem (11,83, risiko tinggi), dan gempa bumi (9,40, risiko sedang). Analisis ini menunjukkan bahwa Kota Tanjungbalai harus memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui peningkatan infrastruktur, edukasi masyarakat, pengembangan sistem peringatan dini, serta perlindungan lingkungan untuk memastikan ketahanan dan keberlanjutan pembangunan di masa mendatang. Perlu peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana. Pendidikan dan pelatihan tentang langkah-langkah kesiapsiagaan bencana harus menjadi prioritas, agar masyarakat dapat merespons dengan cepat dan efektif dalam situasi darurat. Program-program seperti latihan evakuasi, pendidikan tentang bencana di sekolah-sekolah, dan kampanye informasi publik dapat meningkatkan ketahanan komunitas.

Kota Tanjungbalai, yang berada di dataran rendah dengan kemiringan wilayah hanya sekitar 0-3 meter di atas permukaan laut, cenderung rawan terhadap genangan air. Genangan ini dapat disebabkan oleh air hujan atau pasang surut air sungai, khususnya di sekitar daerah aliran Sungai Silau dan Sungai Asahan. Wilayah yang paling rawan bencana, khususnya banjir, berada di beberapa bagian wilayah Kecamatan Datuk Bandar dan Datuk Bandar Timur, meliputi Kelurahan Sijambi, Kelurahan Pahang, Kelurahan Gading, Kelurahan Pantai Johor, Kelurahan Semula Jadi, Kelurahan Selat Tanjung Medan, dan Kelurahan Bunga Tanjung.

C. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Tanjungbalai adalah alat evaluasi yang mengukur tingkat ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas pasokan pangan. Berdasarkan data Indeks sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek ketahanan pangan - ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas dapat ditingkatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat Tanjungbalai.

Ketahanan Pangan Nasional tahun 2024, IKP memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi ketahanan pangan di Kota Tanjungbalai, termasuk produksi lokal, distribusi pangan, akses ekonomi, serta kualitas dan keamanan pangan yang tersedia bagi

masyarakat. Indeks ini sangat penting dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan berkelanjutan, yang bertujuan untuk memastikan kecukupan gizi, mengurangi kerawanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan IKP, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perhatian lebih dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dan merancang program-program yang efektif untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih baik di masa mendatang.

Tabel 2.9
Indeks Ketahanan Pangan Kota Tanjungbalai 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Pangan	53,21	54,30	53,20	70,83	74,59

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

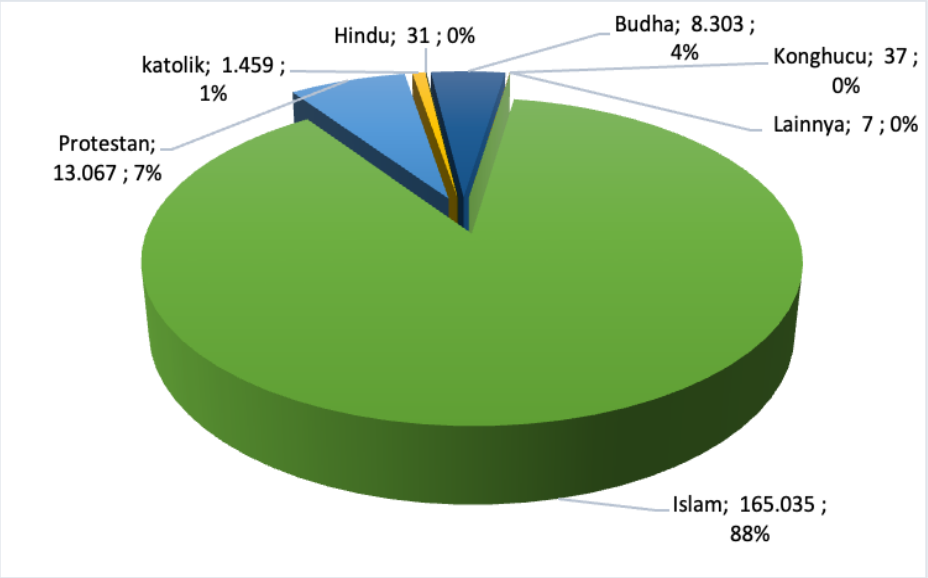
Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun 2023, Kota Tanjungbalai menunjukkan tingkat ketahanan pangan yang cukup baik dengan skor 70,83, meningkat menjadi 74,59 pada tahun 2024. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun akses ekonomi terhadap pangan cukup baik, perhatian lebih harus diberikan pada aspek pemanfaatan untuk memastikan bahwa seluruh penduduk tidak hanya memiliki akses, tetapi juga mengonsumsi pangan yang bergizi dan aman. Hal ini penting untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih holistik dan berkelanjutan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

2.5. Demografi

Dalam pelaksanaan pembangunan di suatu daerah, pengintegrasian penduduk menjadi suatu hal yang teramat penting mengingat penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek pembangunan, namun juga sebagai subyek pembangunan. Ketika peran sebagai "subyek" pembangunan maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya Konsep *people centered development* merupakan konsep yang mewadahi prinsip pembangunan yang berwawasan kependudukan yang meliputi beberapa komponen yakni: pengendalian kuantitas penduduk; peningkatan kualitas penduduk; penataan persebaran dan mobilitas penduduk; pembangunan keluarga sejahtera serta manajemen database & informasi kependudukan. Untuk itu sasaran serta program prioritas pembangunan jangka menengah ke depan untuk urusan pengendalian penduduk harus mengacu pada prinsip dan konsep tersebut.

Kondisi penduduk Kota Tanjungbalai mengalami berbagai dinamika yang relatif menantang untuk diatasi. Sebelum berpisah dari Kabupaten Asahan melalui Undang-Undang Darurat Nomor 9 tahun 1956, dengan luas hanya 199 ha Tanjungbalai pernah menjadi kota terpadat di Asia Tenggara dengan kepadatan sekitar 3.090 jiwa/km2. Pada tahun 2024, Kota Tanjungbalai dihuni oleh beragam suku diantaranya; Suku Batak

(Simalungun, Toba, Mandailing, Pakpak, dan Karo), Jawa, Melayu, Minang, Aceh, dan suku lainnya. Berdasarkan dari sisi agama yang dianut, sebagian besar penduduk Kota Tanjungbalai beragama Islam dengan jumlah 88 persen dari seluruh populasi.



Gambar 2.7
Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Kota Tanjungbalai, 2024
Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka, 2025

Jumlah penduduk laki-laki di Kota Tanjungbalai pada Tahun 2020 sebesar 89.208 jiwa atau sebesar 50,68 persen dari penduduk Kota Tanjungbalai, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 87.797 jiwa atau sebesar 49,60 persen dari penduduk Kota Tanjungbalai. Selama lima tahun rasio jenis kelamin mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2024, rasio jenis kelamin sebesar 102,42, artinya bahwa dari 100 penduduk perempuan di Kota Tanjungbalai terdapat 102 hingga 103 penduduk laki-laki.

Tabel 2.10
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin, 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-laki	89.208	90.004	91.099	92.715	93.932
Perempuan	87.797	87.636	88.649	90.455	91.715
Rasio Jenis Kelamin	101,60	102,70	102,76	102,50	102,42

Sumber: BPS Provsu, 2025

Berdasarkan tabel diketahui bahwa jumlah penduduk menurut kecamatan di Kota Tanjungbalai maka diketahui bahwa Kecamatan Datuk Bandar merupakan wilayah dengan penduduk terbanyak yaitu pada Tahun 2024 mencapai 45.017 jiwa, disusul oleh Kecamatan Teluk Nibung dengan jumlah penduduk sebanyak 43.634 jiwa. Wilayah dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Tanjungbalai Utara sebesar 16.313 jiwa. Untuk melihat persebaran penduduk pada setiap kecamatan, maka diketahui bahwa

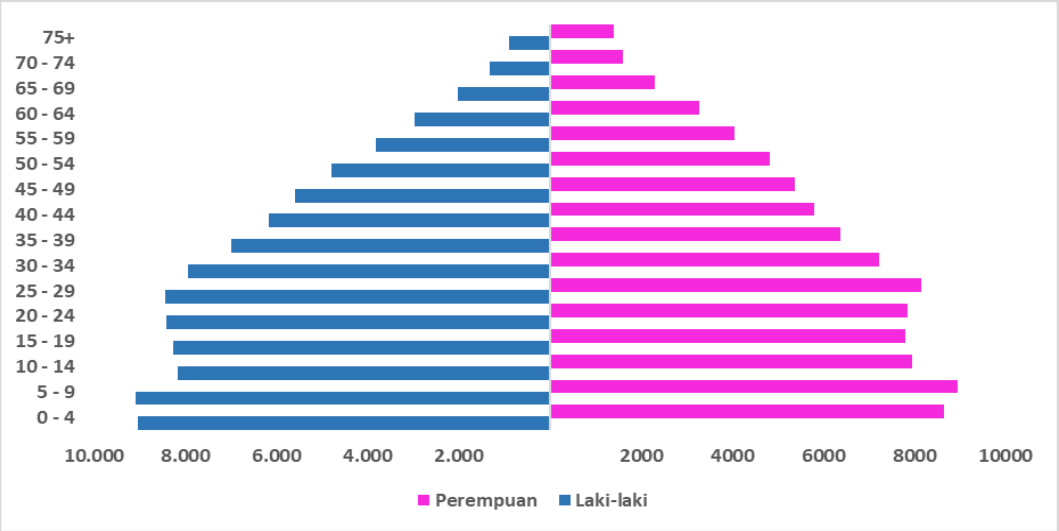
Kecamatan Tanjungbalai Utara merupakan wilayah dengan penduduk terpadat sebanyak 19.654,22 jiwa per kilometer. Tingkat kepadatan pada Kota Tanjungbalai memang tidak merata, dibuktikan dengan kepadatan Kecamatan Datuk Bandar hanya mencapai 2.026,88 jiwa per kilometer. Kepadatan yang tidak merata ini dapat menimbulkan permasalahan kependudukan seperti: penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, keamanan dan kesempatan kerja.

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, 2020-2024

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024	Kepadatan 2024 (jiwa/km)
Datuk Bandar	41.544	42.212	41.727	44.121	45.017	2.026,88
Datuk Bandar Timur	30.492	30.741	31.369	31.631	32.024	2.174,07
Tanjungbalai Selatan	19.277	19.213	19.362	19.320	19.337	10.924,86
Tanjungbalai Utara	16.173	16.141	16.305	16.277	16.313	19.654,22
Sei Tualang Raso	27.283	27.665	28.393	28.796	29.322	3.180,26
Teluk Nibung	41.258	41.668	42.592	43.025	43.634	3.858,00

Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka, 2021-2025

Dominasi usia penduduk dapat dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan kelas usia, jika piramida penduduk tebal di bawah berarti lebih banyak penduduk usia muda, namun jika tebal diatas maka lebih banyak penduduk usia tua. Berdasarkan tabel diketahui bahwa penduduk Kota Tanjungbalai didominasi oleh penduduk usia muda. Sampai dengan periode 2024 diketahui penduduk usia 5-9 tahun merupakan penduduk dengan jumlah terbanyak dibanding usia penduduk Kota Tanjungbalai lainnya yang mencapai 18,056 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 9.088 jiwa dan perempuan sebanyak 8.968 jiwa, Hal tersebut menjelaskan bahwa saat ini Kota Tanjungbalai sedang dapat menikmati bonus demografi jika disertai dengan angka pengangguran yang rendah, Pada grafik juga terlihat bahwa jumlah penduduk usia 70–75 sangat kecil menunjukkan bahwa angka harapan hidup pada Kota Tanjungbalai masih relatif rendah.



Gambar 2.8
Piramida Penduduk Kota Tanjungbalai, 2024
Sumber: Kota Tanjungbalai dalam Angka, 2025

Penduduk sebagai modal utama pembangunan Kota Tanjungbalai selalu mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Tanjungbalai sebanyak 176.027 jiwa meningkat menjadi 185.647 jiwa pada Tahun 2024 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,39 persen, Pertambahan penduduk otomatis menambah kepadatan penduduk Kota Tanjungbalai, pada Tahun 2020 kepadatan penduduk sebesar 1632,45 jiwa per km meningkat menjadi 3.090,41 jiwa per km.

Tabel 2.12
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Tanjungbalai, 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Kepadatan Penduduk
2020	176.027	1,27	1632,45
2021	177.640	1,22	1647,41
2022	179.748	1,20	2992,31
2023	183.170	1,41	3.049,17
2024	185.647	1,39	3.090,41

Sumber: Kota Tanjungbalai dalam Angka, 2025

Proyeksi Penduduk

Jumlah penduduk Kota Tanjungbalai pada tahun 2026 diperkirakan akan mencapai 191.976 jiwa. Proyeksi ini menunjukkan kenaikan yang konsisten seiring dengan perkembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup. Selanjutnya, pada tahun 2030, diperkirakan akan terjadi lonjakan menjadi 199.300 jiwa, yang menandakan pertumbuhan penduduk sekitar 5.9% dari tahun 2026.

Tabel 2.13
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Tanjungbalai 2026-2030

No.	Wilayah	2026	2027	2028	2029	2030
1	Datuk Bandar	46.580	47.252	47.929	48.601	49.270
2	Datuk Bandar Timur	32.714	33.020	33.321	33.616	33.900
3	Tanjung Balai Selatan	19.372	19.396	19.415	19.428	19.431
4	Tanjung Balai Utara	16.382	16.419	16.452	16.479	16.499
5	Sei Tualang Raso	30.239	30.636	31.033	31.427	31.817
6	Teluk Nibung	44.664	45.094	45.523	45.945	46.354
Tanjung Balai		**191.976**	**193.843**	**195.700**	**197.524**	**199.300**

Sumber: Kota Tanjungbalai dalam Angka, 2025 (diolah)

Trend pertumbuhan ini menegaskan kebutuhan untuk memahami dinamika demografis dalam kerangka waktu yang panjang. Pentingnya proyeksi ini terletak pada kemampuan pemerintah dan pemangku kebijakan untuk merencanakan dan mengimplementasikan strategi pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memprediksi jumlah penduduk dan kebutuhan sarana serta prasarana yang sesuai, pemerintah dapat memastikan bahwa pertumbuhan penduduk akan diimbangi dengan peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, dan infrastruktur lainnya. Pendekatan proaktif ini juga mendukung upaya dalam memitigasi potensi masalah seperti kepadatan penduduk, pengangguran, dan tekanan pada sumber daya alam. Dengan demikian, proyeksi penduduk menjadi komponen kritikal dalam perencanaan pembangunan jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Tanjungbalai dan memastikan keberlanjutan sumber daya untuk generasi yang akan datang.

Namun, peningkatan ini juga memberikan indikasi akan kebutuhan untuk perencanaan yang matang dalam aspek-aspek infrastruktur dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan layanan publik lainnya. Peningkatan populasi yang signifikan ini akan menuntut peningkatan kapasitas layanan publik dan infrastruktur, serta penanganan masalah lingkungan yang mungkin timbul sebagai akibat dari tekanan demografis.

Kebijakan dan strategi pembangunan yang proaktif diperlukan untuk mengelola pertumbuhan ini agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi penduduk Kota Tanjungbalai. Ini termasuk peningkatan investasi dalam pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, dan pengembangan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

i. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi; (2) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan

sosial; dan (3) aspek kesejahteraan dengan fokus Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

2.6. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini serta rasio penduduk miskin, Kinerja indikator-indikator tersebut mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sesuai ketersediaan data adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator utama untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Manfaat yang dapat diperoleh dari data PDRB adalah: (1) Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi; (2) Untuk mengetahui struktur perekonomian; (3) Untuk mengetahui besarnya PDRB per kapita penduduk dan (4) Untuk mengetahui tingkat inflasi.

PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit), Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Tabel 2.14
Produk Domestik Regional Bruto Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha, 2020—2024 (Miliar Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023*	2024**
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1.467,57	1.488,62	1.561,92	1.634,94	1.673,21
B. Pertambangan & Penggalian	166,87	172,79	182,50	192,09	200,17
C. Industri Pengolahan	1.798,54	2.000,08	2.145,83	2.263,76	2.560,33
D. Pengadaan Listrik dan Gas	62,31	67,29	73,12	74,44	77,19
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	15,06	15,10	15,39	16,04	17,17
F. Konstruksi	1.428,58	1.491,62	1.608,38	1.712,51	1.877,18
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	2.071,00	2.185,01	2.519,70	2.700,38	2.985,87
H.Transportasi & Pergudangan	522,06	536,40	602,28	685,36	749,04

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023*	2024**
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	192,65	194,79	210,6,	231,27	251,98
J.Informasi dan Komunikasi	80,14	87,93	94,54	100,85	109,99
K. Jasa Keuangan & Asuransi	154,71	164,46	181,58	195,82	203,65
L. Real Estate	295,36	305,03	321,04	336,61	360,8
M.N. Jasa Perusahaan	27,20	20,91	31,16	34,17	36,14
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	579,72	578,67	573,59	648,84	695,76
P. Jasa Pendidikan	129,91	134,30	142,68	152,66	164,08
Q.Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	77,19	78,54	83,84	91,28	101,81
R.S.T.U. Jasa Lainnya	102,67	104,19	115,99	129,49	143,36
Total	**9.180,54**	**9.632,70**	**10.466,70**	**11.209,49**	**12.207,74**

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun untuk menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, dan bertujuan untuk melihat sebaran struktur perekonomian, Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa lapangan usaha pembentuk PDRB terbesar di Kota Tanjungbalai adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda sebesar Rp, 1,58 triliun kemudian disusul oleh Industri Pengolahan sebesar Rp, 1,36 triliun.

Tabel 2.15
Produk Domestik Regional Bruto Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024 (Miliar Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023*	2024**
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	946,42	948,74	968,26	996,31	996,2
B.Pertambangan & Penggalian	123,97	126,23	129,28	133,65	137,67
C. Industri Pengolahan	1.120,94	1.172,75	1.205,78	1.260,24	1.365,35
D. Pengadaan Listrik dan Gas	40,25	43,13	45,92	46,42	48,84
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	10,44	10,34	10,46	10,77	11,19
F. Konstruksi	839,51	851,46	868,87	907,46	958,41
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	1.275,23	1.323,48	1.426,72	1.500,72	1.588,42

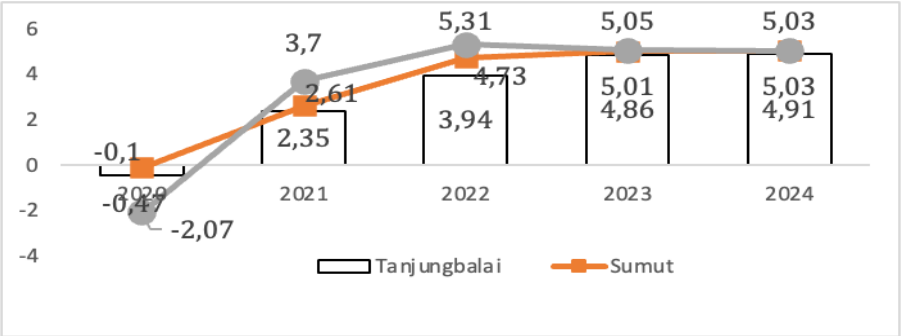
LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023*	2024**
H.Transportasi & Pergudangan	352,51	355,24	379,15	401,34	421,99
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	139,98	141,16	149,4	161,36	169,6
J. Informasi dan Komunikasi	71,24	76,33	80,29	84,65	88,78
K. Jasa Keuangan & Asuransi	102,78	105,41	109,37	115	117,05
L. Real Estate	188,51	189,71	195,44	202,54	208,85
M.N. Jasa Perusahaan	18,18	18,34	19,66	20,6	21,27
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	333,22	332,78	326,79	359,14	370,43
P. Jasa Pendidikan	94,71	97,49	103,19	109,42	113,28
Q.Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	44,83	45,1	47,42	48,83	51,94
R.S.T.U. Jasa Lainnya	60,48	61,12	65,04	70,3	75,08
Total	**5.763,21**	**5.898,81**	**6.131,04**	**6.428,77**	**6.744,35**

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025

PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sama halnya seperti PDRB atas dasar harga berlaku maka lapangan usaha pembentuk PDRB terbesar di Kota Tanjungbalai adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda sebesar Rp.1,58 triliun kemudian disusul oleh Industri Pengolahan sebesar Rp, 1,36 triliun.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu, Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Di Kota Tanjungbalai, analisis pertumbuhan ekonomi selama periode 2019-2023 memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika ekonomi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan ekonomi, kondisi global, dan perubahan lokal. Grafik berikut ini menyajikan data pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan tingkat nasional, yang mencerminkan upaya pemulihan dari dampak pandemi COVID-19 serta pencapaian dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Analisis ini penting untuk memahami konteks ekonomi Tanjungbalai dan mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di masa mendatang.



Gambar 2.9
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional ADHK 2010, 2020-2024

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025

Pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai mengalami perubahan pola pertumbuhan yang hampir sama dengan Provinsi Sumatera Utara yaitu mengalami pertumbuhan yang melambat pada tahun 2020 dan akselerasi pada tahun 2021 2022, 2023 dan 2024. Sepanjang tahun 2021 sampai 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai selalu berada di bawah pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara. Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan percepatan pemulihan ekonomi di Tanjungbalai dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,86 persen dan 4,91 persen. Meskipun pertumbuhan ini sedikit di bawah tingkat provinsi dan nasional, pencapaian ini menandakan stabilitas dalam pemulihan ekonomi dan keberlanjutan kebijakan yang mendukung pertumbuhan. Fokus pada pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemberdayaan UMKM menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Ke depan, upaya diversifikasi ekonomi, peningkatan daya saing, dan pembangunan berkelanjutan akan menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tren Sumatera Utara dan Nasional menggambarkan pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, dan tingkat nasional dari tahun 2020 hingga 2024. Pemulihan mulai terlihat pada tahun 2021 dengan pertumbuhan ekonomi Tanjungbalai mencapai 2,35 persen, meskipun masih di bawah tingkat provinsi (2,61 persen) dan nasional (3,69 persen). Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai sebesar 4,91 persen masih di bawah provinsi dan nasional dengan masing-masing capaian sebesar 5,03 persen. Berbagai faktor dapat mempengaruhi perbedaan ini, termasuk:

a. Dinamika Ekonomi Lokal: Kota Tanjungbalai mungkin lebih terpengaruh oleh dinamika ekonomi lokal dan kegiatan ekonomi yang spesifik, yang tidak sepenuhnya selaras dengan tren provinsi atau nasional.
b. Sektor Unggulan: Perbedaan sektor unggulan dan struktur ekonomi di Tanjungbalai dibandingkan dengan Sumatera Utara dan Indonesia secara keseluruhan.
c. Kebijakan Daerah: Kebijakan dan inisiatif pemerintah kota yang berbeda dari kebijakan provinsi atau nasional dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.16
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungbalai (persen), 2020– 2024

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023*	2024**
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	-0,76	0,24	2,06	2,90	-0,01
B. Pertambangan & Penggalian	-1,08	1,82	2,42	3,38	3,01
C. Industri Pengolahan	1,89	4,62	2,82	4,52	8,34
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3,38	7,15	6,47	1,1	5,21
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	1	-0,99	1,12	3,03	3,86
F. Konstruksi	-4,63	1,42	2,05	4,44	5,61
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	-0,18	3,78	7,80	5,19	5,84
H. Transportasi & Pergudangan	-0,5	0,78	6,73	5,85	5,15
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,53	0,84	5,84	8,01	5,1
J. Informasi dan Komunikasi	6,17	7,15	5,18	5,43	4,88
K. Jasa Keuangan & Asuransi	0,84	2,56	3,75	5,15	1,78
L. Real Estate	0,57	0,64	3,02	3,64	3,11
M.N. Jasa Perusahaan	-1,71	0,85	7,21	4,77	3,27
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	-0,32	-0,13	-1,8	9,9	3,14
P. Jasa Pendidikan	1,52	2,94	5,85	6,03	3,53
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	-1,46	0,61	5,14	2,97	6,37
R.S.T.U, Jasa Lainnya	-1,17	1,06	6,42	8,08	6,81
Total	**-0,47**	**2,35**	**3,94**	**4,86**	**4,91**

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025
*Catatan : *) Angka sementara*
***) Angka sangat sementara*

Perekonomian Kota Tanjungbalai pada tahun 2023 mengalami akselerasi dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kota Tanjungbalai tahun 2023 mencapai 4,86 persen, sedangkan tahun 2022 sebesar 3,94 persen. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,19 persen, Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 4,52 persen, Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 4,44 persen dan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2.90 persen serta lapangan usaha lainnya.

Strategi kebijakan kedepan dalam menanggapi tren pertumbuhan ekonomi ini, strategi kebijakan yang dapat diadopsi meliputi:

a. Penguatan Sektor Strategis: Fokus pada penguatan sektor-sektor strategis di Tanjungbalai, termasuk perikanan, pariwisata, dan perdagangan.

b. Diversifikasi Ekonomi: Diversifikasi kegiatan ekonomi untuk mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi di sektor tertentu.
c. Investasi Infrastruktur: Meningkatkan investasi dalam infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas.
d. Kapasitas *Resiliensi*: Membangun kapasitas resiliensi ekonomi lokal untuk menghadapi guncangan ekonomi global atau nasional.

Struktur ekonomi Kota Tanjungbalai tahun 2024 sebagian besar dihasilkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan, dan disusul oleh lapangan usaha kontruksi, Sementara peranan lapangan usaha pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, lapangan usaha jasa perusahaan serta lapangan usaha pengadaan listrik dan gas terhadap PDRB merupakan konstribusi terkecil, seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17
Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungbalai, 2020-2024

LAPANGAN USAHA	DISTRIBUSI TAHUN				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	16,08	15,45	14,92	14,67	**13,71**
B. Pertambangan & Penggalian	1,82	1,79	1,74	1,71	**1,64**
C. Industri Pengolahan	19,59	20,76	20,5	20,2	**20,97**
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,68	0,7	0,7	0,66	**0,63**
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,16	0,16	0,15	0,14	**0,14**
F. Konstruksi	15,56	15,48	15,37	15,28	**15,38**
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	22,56	22,68	24,07	24,09	**24,46**
H. Transportasi & Pergudangan	5,69	5,57	5,75	6,11	**6,14**
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,1	2,02	2,01	2,06	**2,06**
J. Informasi dan Komunikasi	0,87	0,91	0,9	0,9	**0,9**
K. Jasa Keuangan & Asuransi	1,69	1,71	1,73	1,75	**1,67**
L. Real Estate	3,22	3,17	3,07	3	**2,96**
M.N. Jasa Perusahaan	0,3	0,29	0,3	0,3	**0,3**
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	6,31	6,01	5,48	5,79	**5,7**
P. Jasa Pendidikan	1,42	1,39	1,36	1,36	**1,34**
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,84	0,82	0,82	0,81	**0,83**

LAPANGAN USAHA	DISTRIBUSI TAHUN				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
R.S.T.U. Jasa Lainnya	1,12	1,08	1,11	1,16	**1,17**
Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025
*Catatan : *) Angka sementara*
***) Angka sangat sementara*

4. PDRB Per kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi, PDRB Per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, PDRB per kapita Kota Tanjungbalai mengalami kenaikan setiap tahunnya, baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku. Perkembangan PDRB per kapita tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
PDRB ADHB Per Kapita Kota Tanjungbalai (Juta Rupiah), 2020-2024

No	Deskripisi	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Penduduk (jiwa)	176.027	177.640	179.748	183.170	185.647
2	PDRB ADHB (juta rupiah)	9.180.540	9.632.700	10.466.700	11.209.490	12.207.740
3	**PDRB Per Kapita (juta rupiah)**	52,15	54,23	58,23	61,2	65,76

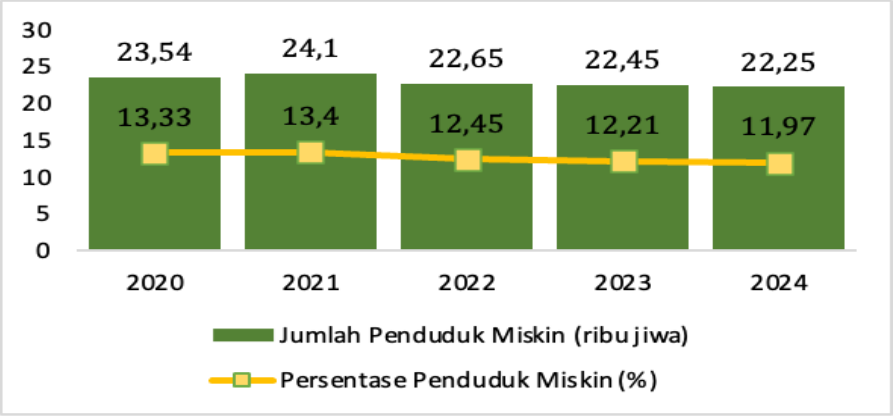
Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025

Jumlah penduduk Kota Tanjungbalai juga meningkat dari 176.027 jiwa pada tahun 2020 menjadi 185.647 jiwa pada tahun 2024. Dengan peningkatan jumlah penduduk ini, PDRB per kapita ADHB meningkat dari Rp 52,15 juta pada tahun 2020 menjadi Rp 65,76 juta pada tahun 2024, Peningkatan PDRB per kapita ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai tidak hanya sekedar ekspansi ekonomi tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam mengelola pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan pendapatan per kapita meskipun jumlah penduduk terus bertambah.

5. Tingkat Kemiskinan

Grafik berikut menggambarkan tren jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Tanjungbalai dari tahun 2020 hingga 2024. Data ini memberikan wawasan mengenai efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah. Dengan melihat perubahan jumlah dan persentase penduduk miskin

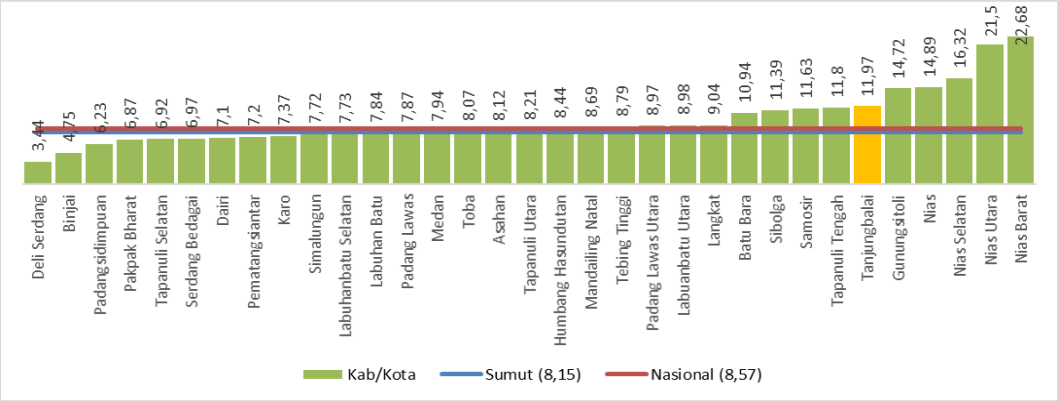
dari tahun ke tahun, kita dapat memahami dinamika kemiskinan di Kota Tanjungbalai dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih untuk memastikan keberlanjutan penurunan angka kemiskinan di masa depan.



Gambar 2.10
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tanjungbalai, 2020-2024
Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025

Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 23.540 orang dengan persentase 13,33 persen. Namun, pada tahun 2021 terjadi sedikit peningkatan jumlah penduduk miskin menjadi 24.100 orang dengan persentase 13,40 persen, yang kemungkinan disebabkan oleh dampak lanjutan dari pandemi COVID-19 yang mengganggu stabilitas ekonomi dan lapangan pekerjaan. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin kembali menurun menjadi 22.650 orang dengan persentase 12,45%, dan tren positif ini berlanjut hingga tahun 2024 dengan jumlah penduduk miskin turun menjadi 22.250 orang dan persentase menjadi 11,97 persen. Penurunan yang konsisten ini menunjukkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang diterapkan oleh pemerintah Kota Tanjungbalai, termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Namun, meskipun ada kemajuan yang signifikan, upaya untuk mengurangi kemiskinan harus terus dilanjutkan dengan fokus pada keberlanjutan program-program yang ada serta pengembangan inisiatif baru yang lebih inklusif dan tepat sasaran untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Jika dilihat lebih mendalam pada angka kemiskinan juga terlihat bahwa seiring pertumbuhan ekonomi yang terjadi juga berefek positif pada pengurangan angka kemiskinan. Terlepas dari indikasi positif dari dampak ekonomi ini, di sisi lain hal ini menunjukkan bahwa secara umum pengurangan angka kemiskinan terjadi karena perubahan kue ekonomi. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa dibutuhkannya metode penanganan kemiskinan yang bersifat lebih "*out of the box*" dalam artian melalui cara-cara yang lebih spesifik dan inovatif.



Gambar 2.11
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kota Tanjungbalai, 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2025

Posisi tingkat kemiskinan Kota Tanjungbalai pada tahun 2024 masih berada di atas rata-rata provinsi dan nasional. Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Prov. Sumatera Utara maka Kota Tanjungbalai menempati posisi keenam tertinggi. Diketahui bahwa Deli Serdang merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah sebesar 3,44 persen, sedangkan Nias Barat dengan tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 22,68 persen.

6. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Menurut BPS, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) adalah merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan kemiskinan, Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan,

Indikator lainnya adalah Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tabel 2.19
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Tanjungbalai, 2020-2024

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,69	1,72	1,81	1,34	1,6
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,32	0,32	0,42	0,25	0,33
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	444.125	482.602	515.456	554.065	592.573

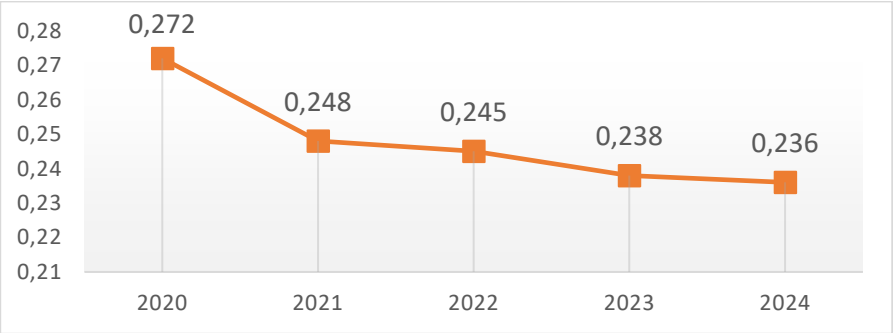
Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 mencapai 1,69 turun menjadi 1,60 pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan atau menunjukkan ekonomi penduduk miskin semakin jauh dari terpuruk. Selanjutnya, indeks keparahan kemiskinan selama lima tahun yang mengalami fluktuasi, diketahui bahwa P2 Kota Tanjungbalai pada tahun 2023 sebesar 0,25 meningkat menjadi 0,33 pada tahun 2024.

7. Gini Rasio

Gini rasio adalah angka yang digunakan untuk menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, Besar gini rasio dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 1, Jika gini rasio sama dengan 0, berarti distribusi pendapatan sudah merata dengan sempurna (dengan kata lain tidak terjadi ketimpangan distribusi pendapatan), Jika gini rasio sama dengan 1, berarti distribusi pendapatan tidak merata secara sempurna, Untuk lebih jelasnya, standar penilaian gini rasio dapat ditentukan dengan menggunakan kriteria (*Heri Susanti dkk, Indikator-Indikator Makro Ekonomi, LPEM-FEUI, 1995*) sebagai berikut:

- GR < 0,4 : ketimpangan rendah
- 0,4 < GR < 0,5 : ketimpangan sedang
- GR > 0,5 : ketimpangan tinggi

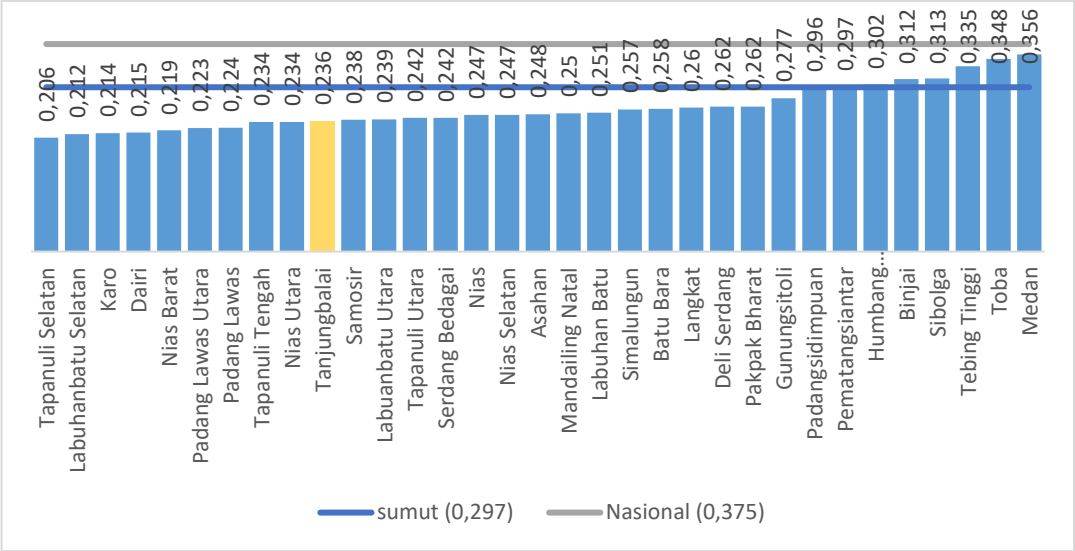


Gambar 2.12
Gini Ratio Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2025

Indeks Gini membantu menilai kesenjangan sosial dan ekonomi, serta efektivitas kebijakan ekonomi dan distribusi sumber daya. Dengan memahami indeks ini, pemerintah dapat merancang kebijakan untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mencapai pembangunan yang lebih inklusif. Indeks Gini memberikan pandangan penting untuk mengarahkan upaya menuju keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bila dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakat, secara umum dapat dikatakan bahwa pendapatan masyarakat Kota Tanjungbalai cukup merata yang ditunjukkan oleh nilai koefisien gini (gini ratio) Kota Tanjungbalai dari tahun 2020—2024 berada dibawah 0,4, artinya tingkat ketimpangan rendah yang ditunjukkan pada grafik berikut.

Penurunan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, meskipun masih terdapat variasi yang menunjukkan adanya tantangan dalam mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata di masyarakat.

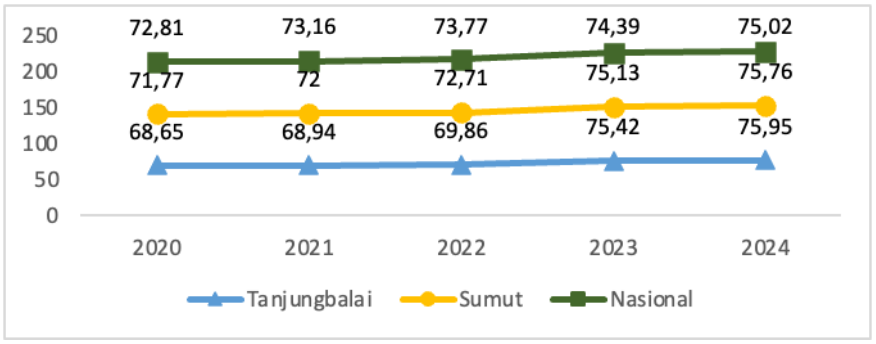


Gambar 2.13
Gini Ratio Kota Tanjungbalai, Provinsi dan Nasional, 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2025

Posisi gini rasio Kota Tanjungbalai tidak terlalu tinggi bila dibandingkan kabupaten/kota lain. Posisi ketimpangan tertinggi adalah Kota Medan sebesar 0,356 dan terendah Kabupaten Tapanuli Selatant sebesar 0,206, sedangkan Kota Tanjungbalai berada pada posisi kesepuluh terendah sebesar 0,236. Posisi gini rasio Kota Tanjungbalai juga masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional.

8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

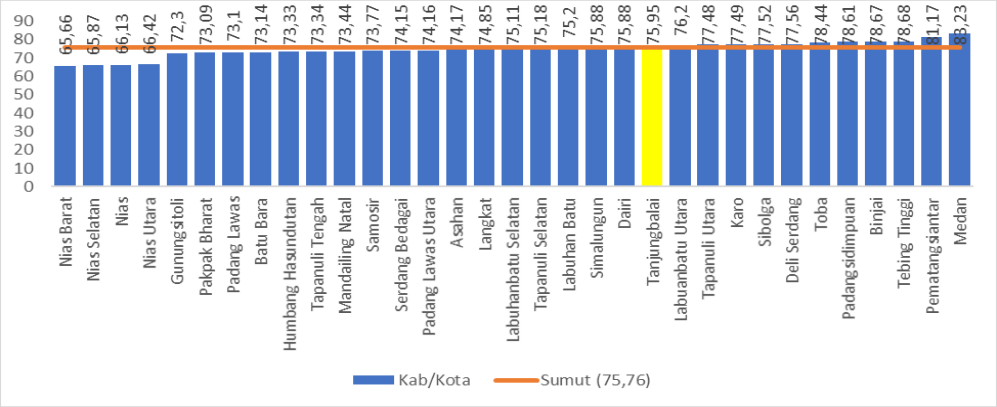
Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah dapat digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM juga merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU), IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; Pengetahuan dan Standar hidup layak.



Gambar 2.14
Perkembangan IPM Kota Tanjungbalai, Sumut dan Nasional, 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2025

IPM Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 mencapai 68,65 meningkat menjadi 75,95 pada tahun 2024.

Peningkatan tersebut sudah cukup baik karena angka IPM Kota Tanjungbalai sudah berada di atas rata-rata angka provinsi dan nasional. Pada tahun 2020 Provinsi Sumatera Utara sudah mencapai angka 71,77 bahkan nasional mencapai 72,81 berada di atas capaian Kota Tanjungbalai, tetapi pada Tahun 2024 Kota Tanjungbalai dapat mengejar capaian indikator ini karena capaian Sumut sebesar 75,76 dan nasional sebesar 75,02. Hal tersebut mengindikasi bahwa capaian pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungbalai sudah membaik.



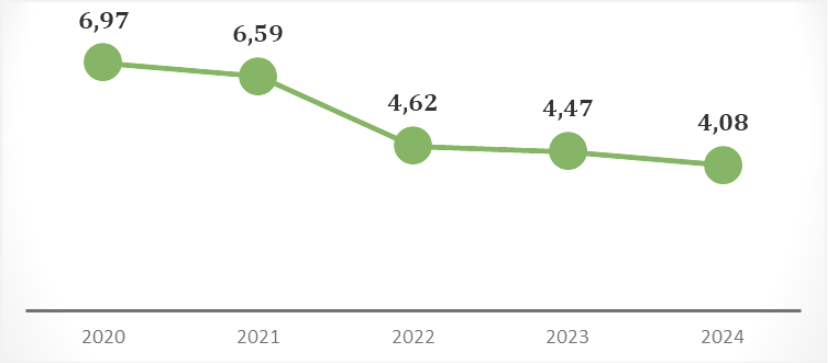
Gambar 2.15
IPM Kabupaten/Kota, 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2025

Berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa posisi relatif IPM Kota Tanjungbalai berada pada peringkat keduabelas tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Utara, Indeks Pembangunan Manusia di Kota Tanjung Balai pada tahun 2024 telah mencapai 75,95 dengan status "tinggi". Pada tingkat Kabupaten/Kota, capaian pembangunan manusia cukup bervariasi. Capaian pembangunan manusia tertinggi berada di Kota Medan dengan IPM sebesar 83,23 dan termasuk kategori IPM 'Sangat Tinggi', Sementara capaian pembangunan manusia terendah berada di Kabupaten Nias Barat yaitu sebesar 65,66. Pengukuran IPM di Indonesia mengacu pada tiga dimensi yang diperkenalkan UNDP, yang terdiri dari umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak.

9. Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator utama makro ekonomi lain yang perlu diperhatikan untuk melihat kinerja ekonomi Kota Tanjungbalai adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT mengukur persentase tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan namun belum menemukan pekerjaan dalam suatu periode tertentu. Tingkat pengangguran yang tinggi mengindikasikan rendahnya pertumbuhan ekonomi, kesulitan penciptaan lapangan kerja, dan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, sedangkan tingkat pengangguran yang rendah menandakan pertumbuhan ekonomi yang positif dan kesehatan pasar tenaga kerja. Analisis TPT membantu pemerintah dan pengambil keputusan ekonomi merancang kebijakan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.16
Tingkat Pengangguran di Kota Tanjungbalai, 2020-2024
Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025

Grafik menunjukkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun 2020 hingga 2024. Terdapat penurunan TPT dari tahun 2020 dengan angka 6,97 persen menurun signifikan pada tahun 2022 dengan angka 4,62 persen dan terus menurun hingga tahun 2024 menjadi 4.08 persen. Penurunan ini mengindikasikan adanya peningkatan dalam penciptaan lapangan kerja dan keberhasilan program pengurangan pengangguran.

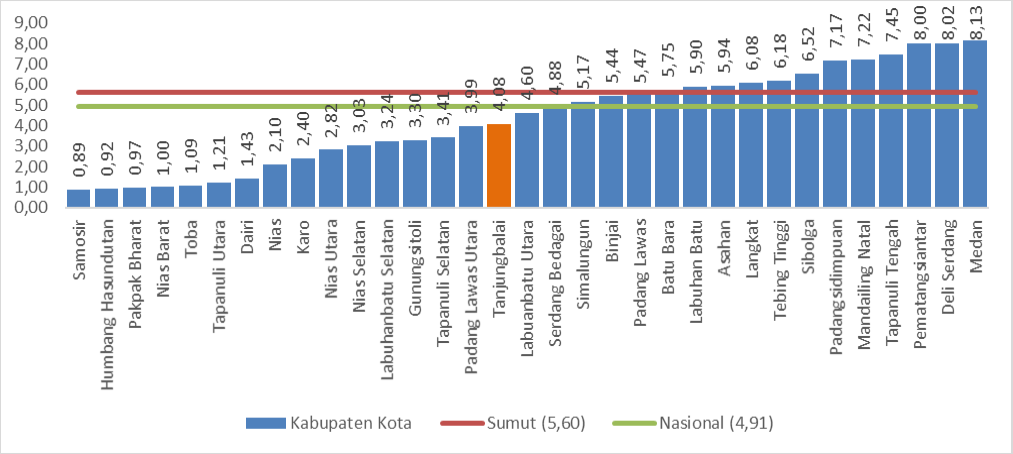
Penurunan TPT pada tahun 2024 menjadi 4,08 persen menandakan keberhasilan kebijakan dan inisiasi program yang diambil untuk memperbaiki pasar tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Ini bisa mencerminkan pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan efektivitas program intervensi pasar tenaga kerja, seperti pelatihan kejuruan, subsidi upah, atau insentif bagi perusahaan untuk perekrutan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi:

- Pemulihan Ekonomi: Pemulihan dari dampak pandemi COVID-19 yang memulihkan sektor-sektor ekonomi penting dan penciptaan lapangan kerja.
- Program Pemerintah: Implementasi dari berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi pengangguran.
- Fleksibilitas Pasar Kerja: Peningkatan fleksibilitas dalam pasar tenaga kerja yang memungkinkan penyerapan tenaga kerja lebih efisien. Strategi kebijakan kedepan:
- Fokus pada Pendidikan dan Pelatihan: Melanjutkan dan memperkuat program pendidikan dan pelatihan vokasional untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja.
- Dukungan Terhadap Industri Penggerak: Memberikan dukungan khusus pada industri yang menjadi penggerak utama perekonomian untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
- Peningkatan Investasi: Mengundang investasi dalam bidang yang memiliki potensi tinggi untuk pertumbuhan lapangan kerja seperti teknologi, energi terbarukan, dan sektor jasa.
- Reformasi Regulasi: Melakukan reformasi regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan memperbaiki iklim bisnis.

- Program Insentif: Menyediakan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan angkatan kerja baru, termasuk insentif fiskal atau non-fiskal.

Dari perspektif lain, pengurangan tingkat pengangguran menjadi indikator positif terhadap dinamika ekonomi lokal dan efektivitas kebijakan pemerintah kota dalam menciptakan lapangan kerja baru serta memperkuat kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan vokasional. Fenomena ini mungkin juga diakibatkan oleh pertumbuhan sektor ekonomi tertentu yang memicu penyerapan tenaga kerja, diversifikasi ekonomi, serta investasi yang masuk ke kota Tanjungbalai.



Gambar 2.17
Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional, 2024
Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025

Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Utara maka tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Tanjungbalai relatif tidak tinggi karena berada pada posisi keenambelas terendah dan berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional.

Tabel 2.20
Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Tanjungbalai, 2024

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah
1.	Pertanian & perikanan	**16.613**
2.	Industri, pengadaan listrik, air, pengelolaan sampah dan konstruksi	**12.222**
3.	Perdagangan, transportasi, penyediaan makan minum, informasi dan komunikasi dan Jasa-jasa	**60.646**
	Jumlah	**89.481**

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025

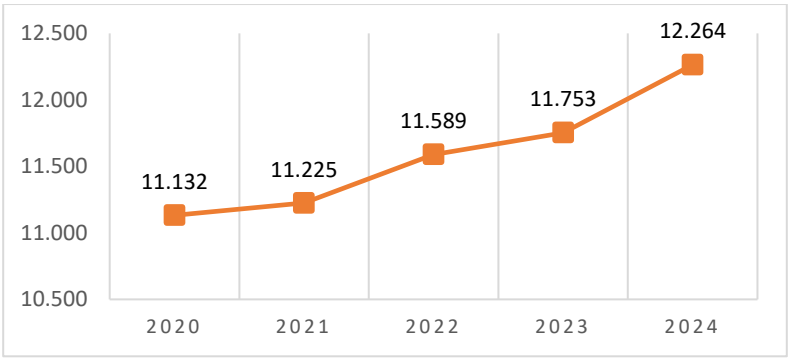
Lapangan pekerjaan yang memadai dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan lapangan kerja juga merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara.

Dilihat berdasarkan penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kota Tanjungbalai bekerja di sektor jasa

yakni sebanyak 60.646 orang atau sebesar 67,78 persen disusul sektor pertanian dan perikanan sebesar 16.613 orang atau sebesar 18,57 persen, dan yang terendah adalah sektor industri, pengadaan listrik, air, pengelolaan sampah dan konstruksi sebanyak 12.222 orang atau 13,66 persen. Kelangkaan lapangan pekerjaan dapat terjadi karena ketidakseimbangan antara kemampuan dalam menyediakan lapangan pekerjaan dengan penduduk usia kerja yang semakin bertambah. Membuka lapangan pekerjaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya dengan

10. Pengeluaran per Kapita

Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa, Kemampuan ini berbeda antar wilayah, karena nilai tukar antar wilayah juga berbeda bergantung kepada harga riil pada masing-masing wilayah. Agar kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah menjadi terbanding, perlu dibuat standarisasi. Misalnya, satu rupiah di suatu wilayah memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta Selatan. Dengan adanya standarisasi ini, maka perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan.



Gambar 2.18
Perkembangan Pengeluaran per Kapita per Tahun (ribu rupiah), 2020-2024
Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025

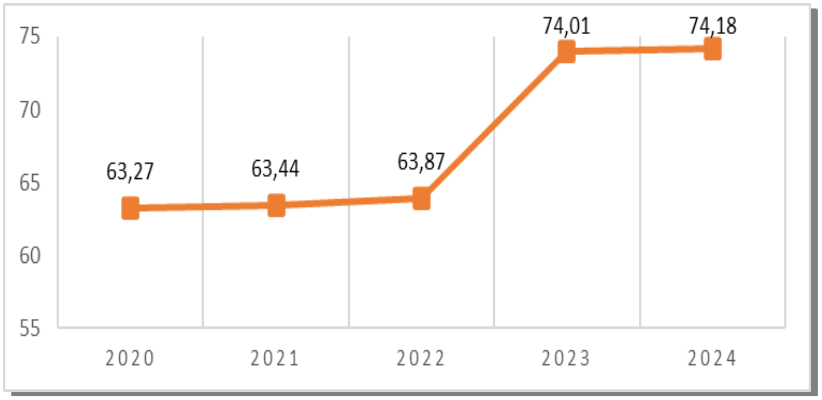
Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita penduduk Kota Tanjung Balai telah mencapai Rp 11.132.000 per tahun, meningkat menjadi Rp.12.264.000 pertahun pada tahun 2024. Kemampuan daya beli masyarakat Kota Tanjung Balai selama periode 2021-2024 terus meningkat meskipun tidak signifikan, dengan rata rata pertumbuhan sekitar 2,46 persen per tahun.

2.1.2.2 Fokus Kesehatan untuk Semua

Fokus kesehatan untuk semua mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan penyakit, peningkatan layanan kesehatan primer, hingga penguatan sistem kesehatan nasional, dengan tujuan mencapai Indonesia sehat dan sejahtera. Selain itu, juga menjelaskan kondidi Kesehatan seluruh penduduk pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

1. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup dapat menggambarkan tingkat kesehatan yang telah dicapai oleh masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesehatan masyarakat, diharapkan kesempatan untuk bertahan hidup akan semakin besar. Sebaliknya, tingkat kesehatan yang buruk akan cenderung memperpendek usia hidup.



Gambar 2.19
Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kota Tanjungbalai, 2020-2024
Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025

Pada gambar terlihat bahwa UHH Kota Tanjungbalai periode 2020-2024 menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. Peningkatan UHH Kota Tanjung Balai pada tahun 2024 meningkat 0,17 poin yaitu mencapai 74,18 tahun, artinya setiap bayi di Kota Tanjung Balai yang dilahirkan pada tahun 2024, diperkirakan hidup sampai usia 74,18 tahun. Selama tahun 2020-2024, umur harapan hidup saat lahir di Kota Tanjung Balai tumbuh rata-rata 0,37 persen per tahun.

Usia Harapan Hidup (UHH) di perkotaan, merupakan rata-rata harapan hidup penduduk di kota-kota. Berikut tabel yang menunjukkan capaian Angka Harapan Hidup di perkotaan di Provinsi Sumatera utara.

Tabel 2.21
Usia Harapan Hidup di Perkotaan, 2024

No	Usia Harapan Hidup	2024
1	Sibolga	74,19
2	Tanjungbalai	74,18
3	Pematang Siantar	75,03
4	Tebing Tinggi	74,29
5	Medan	75,09
6	Binjai	74,45
7	Padangsidempuan	73,73
8	Gunungsitoli	74,23

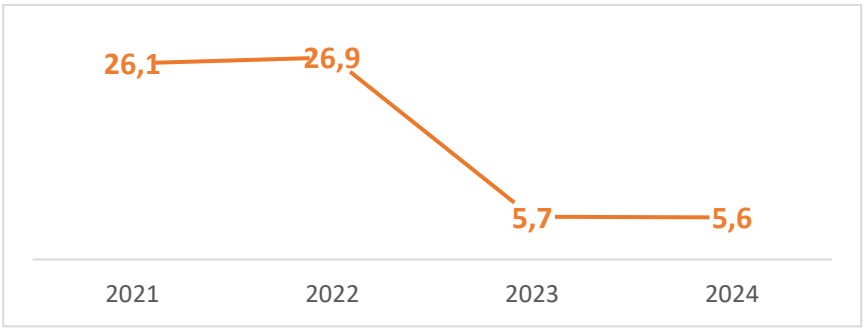
Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025

Capaian usia harapan hidup pada masing-masing kota tidak memiliki perbedaan secara signifikan. Medan merupakan kota yang memiliki UHH tertinggi sekitar 75,09

tahun, sedangkan UHH terendah adalah Kota Padangsidempuan dengan capaian sebesar 73,73 tahun. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

2. Pravalensi Stunting

Prevalensi balita stunting mengacu pada persentase jumlah balita di suatu populasi yang mengalami stunting dalam pertumbuhan fisiknya. Prevalensi balita stunting digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah atau negara.



Gambar 2.20
Pravalensi Stunting Kota Tanjungbalai, 2021-2024
Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025

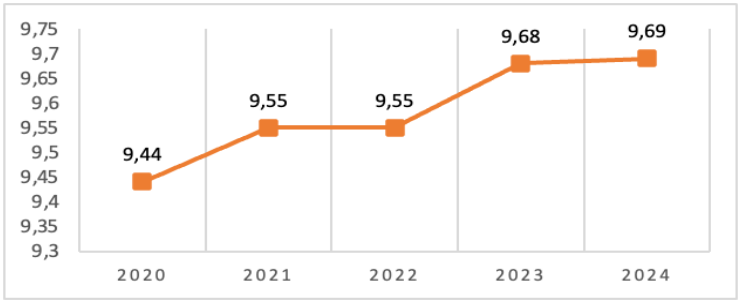
Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Tanjungbalai berhasil menurunkan prevalensi angka stunting menjadi 5,60 persen dari sebelumnya sebesar 5,70 persen. Hal ini tidak terlepas dari kolaborasi dan sinergitas antara Pemerintah Kota, Forkopimda dan OPD terkait yang telah bersama-sama saling bekerja, serta dukungan program kegiatan yang telah dilaksanakan untuk percepatan penurunan stunting. Untuk mengejar target penurunan stunting di Kota Tanjungbalai dikisaran 5,70-5,50 maka Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Tanjungbalai bersama Forkopimda melaksanakan kegiatan intervensi percepatan penurunan stunting di Kota Tanjungbalai baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif.

2.7 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, sedangkan pendidikan yang merata adalah dasar yang penting dalam mengembangkan kapasitas manusia, mendorong mobilitas sosial, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Diharapkan kondisi Pendidikan masyarakat memiliki peran sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat.

1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Di Indonesia, semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar selama sembilan tahun, enam tahun di sekolah dasar (SD)/ madrasah ibtidaiyah (MI) dan tiga tahun di sekolah menengah pertama (SMP)/ madrasah tsanawiyah (MTs). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk untuk menempuh pendidikan formal yang dihitung untuk penduduk berusia 15 tahun ke atas.

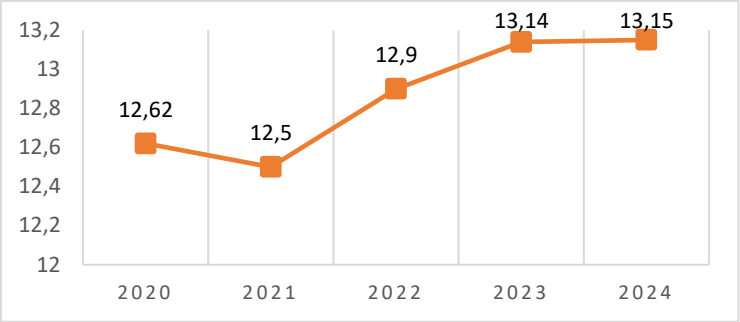


Gambar 2.21
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Tanjungbalai, 2020-2024
Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025

Perkembangan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kota Tanjung Balai selama lima tahun terakhir secara umum terus meningkat. Sampai dengan tahun 2024, rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Kota Tanjung Balai telah mencapai 9,69 tahun atau setara dengan tamat SLTP, Sementara anak usia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 13,15 tahun atau mencapai Diploma I.

2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Sesuai dengan publikasi terbaru BPS Kota Tanjungbalai, angka melek huruf (AMH) yang biasanya digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung Koefisien Pembangunan Manusia (IPM) dianggap sudah tidak relevan, sehingga indikator untuk menghitung dimensi pendidikan penduduk salah satunya menggunakan angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Tujuan penghitungan HLS adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.



Gambar 2.22
Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kota Tanjungbalai, 2020-2024
Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025

Pada tahun 2020 capaian harapan lama sekolah di Kota Tanjung Balai sebesar 12,50 tahun, secara konsisten terus meningkat menjadi 13,15 tahun pada tahun 2024. Demikian juga dengan rata-rata lama sekolah, pada tahun 2020 sebesar 9,44 tahun meningkat hingga 9,69 tahun pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan harapan lama sekolah sebesar 1,28 persen per tahun, lebih lambat dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan rata-rata lama sekolah yang tumbuh 0,66 persen per tahun.

Tren positif dalam Indeks Pendidikan tersebut menandakan adanya komitmen dan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah kota dan pemangku kepentingan pendidikan untuk meningkatkan standar pendidikan dan memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat. Ini adalah indikator penting yang menggambarkan upaya Kota Tanjungbalai dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan merata, yang berpotensi membawa dampak jangka panjang terhadap pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan ekonomi daerah.

3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Berdasar data Laporan Akhir Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2023, IPLM Kota Tanjungbalai mencatatkan skor diangka 57,08 dengan faktor penentu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.22
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Tanjungbalai 2024

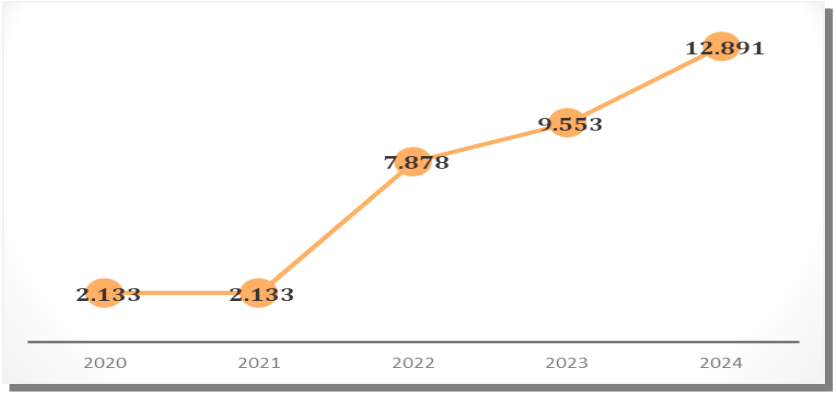
No	Unsur (UPLM)	Skor
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	0,7792
2	Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (IPLM2)	0,2447
3	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	1,0000
4	Tingkat Kunjungan Pemustaka (UPLM4)	0,1684
5	Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)	1,0000
6	Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6)	1,0000
7	Jumlah Pemustaka (UPLM7)	1,0000

No	Unsur (UPLM)	Skor
INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT		74,18

Sumber: *BPS Kota Tanjungbalai, 2025*

2.8. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Kondisi perlindungan sosial yang adaptif menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih Tangguh dan inklusif sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik.



Gambar 2.23
Jumlah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, 2020-2024
Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai, 2025

Program BPJS ketenagerjaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi pekerja dan keluarganya dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti Sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang akibat resiko sosial. Selama lima tahun terakhir jumlah kepesertaan BPJS ketenagakerjaan meningkat dari 2.133 pekerja pada tahun 2020 menjadi 12.891 pekerja pada tahun 2024.

Tabel 2.23
Persentase RT menurut Jenis Jaminan Sosial yang Dimiliki atau Diterima, 2023-2024

Jenis Jaminan Sosial	2023	2024
Jaminan Pensiun/Veteran	10,93	5,92
Jaminan Hari Tua	6,41	4,79
Jaminan/Asuransi Kecelakaan Kerja	5,04	3,59
Jaminan/Asuransi Kematian	4,97	5,05
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)	0,55	0,37
Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	1,41	0,87

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025

Program BPJS meliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Pada tahun 2024, seluruh jenis jaminan social di atas mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, kecuali pada jenis jaminan/asuransi kematian yang meningkat dari 4,97 persen menjadi 5.05 persen.

2.9 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

1. Forum Kerukunan Umat Beragama

Beragama maslahat sebagai kebijakan pemerintah, sejalan dengan Asta Cita pemerintahan visi nomor 8, yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya dan peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama, Pemerintah Kota Tanjungbalai membentuk Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB). FKUB berperan penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. FKUB berfungsi sebagai wadah dialog antar pemuka agama, mengawal kebijakan terkait kehidupan beragama, dan menjadi mediator dalam penyelesaian konflik antar umat beragama.

2. Kasus Kejahatan

Statistik kriminal adalah hasil pencatatan aparat penegak hukum (khususnya polisi) berdasarkan laporan korban dan masyarakat pada umumnya. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat kriminalitas seperti ketimpangan pendapatan, kemiskinan dan pengangguran.

Tabel 2.24
Kasus Kriminal di Kota Tanjungbalai, 2022-2023

Jenis Kriminal	2022	2023	2024
Pembakaran	3	4	3
Kebakaran	10	12	10
Pemalsuan mateai, Merek dan Surat	2		
Melanggar Kesopanan			
Pemerkosaan			1
Perjudian	13	8	12
Penganiayaan Berat	9	7	
Penganiayaan Ringan	30	112	114
Pencurian Biasa	40	114	104
Pencurian dengan Kekerasan	2	2	3
Pemerasan	5	2	1
Penggelapan	7	32	28
Penipuan	32	29	11
Merusak barang Orang Lain	19	8	9
Penadahan			
Pembunuhan	3	1	1

Jenis Kriminal	2022	2023	2024
Narkotika	88	111	
Pencurian Kendaraaan Bermotor	35	38	48
Penculikan			

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025

Jumlah kasus kriminal di Kota Tanjungbalai pada tahun 2024 tercatat sebanyak 345 kasus, ada penurunan signifikan dibandingkan Tahun 2023 sebanyak 480 kasus. Kasus penganiayaan ringan menjadi yang tertinggi diikuti oleh pencurian biasa. Pendidikan agama sejak dini dapat membantu membentuk karakter individu yang kuat, bertanggung jawab, dan memiliki moralitas yang baik, yang pada gilirannya dapat mengurangi kecenderungan melakukan tindakan criminal.

2.10 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

1. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak dalam RPJPD menjadi fondasi untuk membangun strategi jangka panjang yang bertujuan untuk menjamin setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan positif, sesuai dengan hak asasi dan kebutuhan mereka yang fundamental.

Dari data yang dirilis oleh KemenPPPA dan Bappenas, indeks perlindungan anak di Kota Tanjungbalai tercermin dalam tabel berikut.

Tabel 2.25
Indeks Perlindungan Anak 2022

Kabupaten/Kota	Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan	Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Indeks D5 Perlindungan Khusus
Tanjungbalai	42,27	73,30	71,60	23,54	68,43
Sumatera Utara	44,64	79,00	74,06	33,42	66,66

Sumber: Indeks Perlindungan Anak Indonesia 2022

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta Bappenas, Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Kota Tanjungbalai pada tahun 2022 menunjukkan gambaran yang bervariasi dalam berbagai dimensi perlindungan anak.

Indeks D1 yang mencerminkan hak sipil dan kebebasan anak di Kota Tanjungbalai berada pada angka 42,27. Angka ini relatif rendah dan menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam memastikan bahwa hak-hak sipil dan kebebasan anak-anak di Kota Tanjungbalai terjamin. Aspek-aspek seperti hak untuk memiliki identitas, kebebasan

berpendapat, dan akses terhadap informasi harus diperkuat melalui kebijakan yang lebih inklusif dan perlindungan hukum yang lebih ketat.

Indeks D2 yang mengukur lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif berada pada angka 73,30, yang merupakan salah satu indeks tertinggi dalam laporan ini. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, anak-anak di Kota Tanjungbalai mendapatkan dukungan yang baik dalam lingkungan keluarga dan akses terhadap pengasuhan alternatif. Ini mencerminkan efektivitas program-program yang mendukung penguatan keluarga dan penyediaan layanan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang memerlukannya.

Indeks D3 yang mencakup kesehatan dasar dan kesejahteraan anak berada pada angka 70,49. Indeks ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak di Kota Tanjungbalai memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan. Meskipun demikian, masih ada ruang untuk perbaikan terutama dalam akses yang lebih merata dan peningkatan kualitas layanan kesehatan untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan.

Indeks D4 yang mengukur pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya berada pada angka 23,54, yang merupakan indeks terendah di antara semua dimensi. Ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam memastikan bahwa anak-anak di Kota Tanjungbalai memiliki akses yang cukup terhadap pendidikan yang berkualitas, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya dan pemanfaatan waktu luang yang konstruktif. Upaya peningkatan fasilitas pendidikan, program ekstrakurikuler, dan kegiatan budaya perlu ditingkatkan untuk mengatasi kesenjangan ini.

Indeks D5 yang mencakup perlindungan khusus untuk anak berada pada angka 68,43. Ini menunjukkan bahwa ada perlindungan yang cukup baik bagi anak-anak yang memerlukan perhatian khusus, seperti anak-anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Namun, perlindungan ini harus terus ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas lembaga perlindungan anak dan implementasi kebijakan yang lebih efektif.

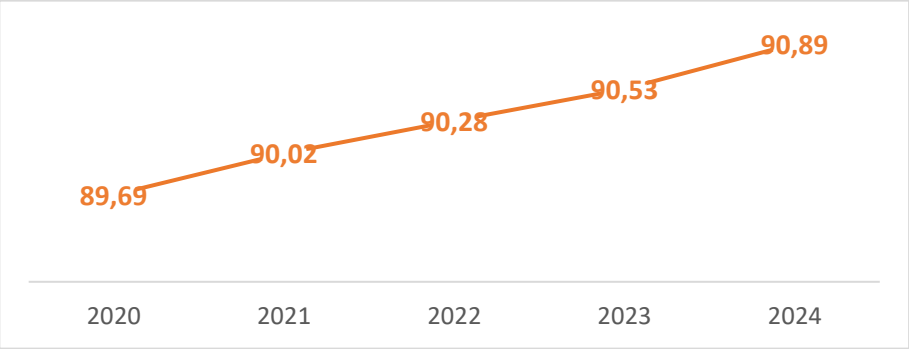
Indeks Perlindungan Anak (IPA) keseluruhan untuk Kota Tanjungbalai adalah 56,56, dengan Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA) sebesar 53,14 dan Indeks Perlindungan Keluarga Anak (IPKA) sebesar 70,64. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa dimensi yang menunjukkan kinerja baik, seperti lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, serta kesehatan dasar dan kesejahteraan, masih ada tantangan signifikan dalam hak sipil dan kebebasan serta pendidikan dan kegiatan budaya.

2. Indeks Pembangunan Gender/Pemberdayaan Gender/Ketimpangan Gender

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG di Kota Tanjungbalai bukan sekadar metrik statistik; ia merupakan kompas yang mengarahkan kebijakan dan inisiatif pembangunan. Mengintegrasikan IPG ke dalam kerangka pembangunan berkelanjutan menegaskan komitmen Kota Tanjungbalai dalam mendorong kesetaraan gender sebagai pondasi untuk kemajuan sosial-ekonomi yang inklusif. Dengan memahami dan memprioritaskan kesenjangan

gender, kota dapat membuka potensi penuh separuh populasi yang seringkali belum tergali secara optimal.



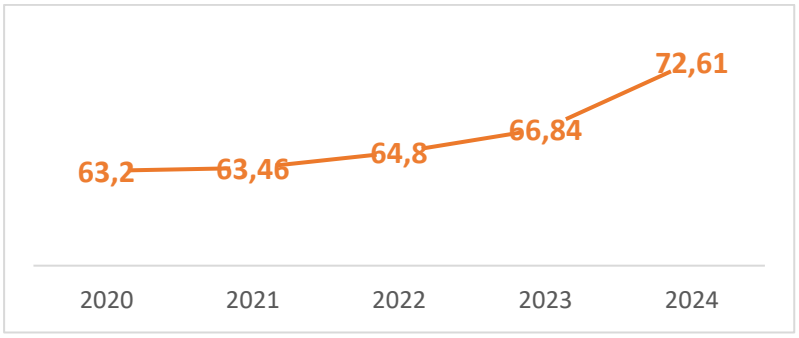
Gambar 2.24
Indeks Pembangunan Gender Kota Tanjungbalai, 2020-2024
Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025

Dalam pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender adalah prasyarat yang tidak dapat ditawar-tawar. Hal ini mengakui bahwa perempuan dan laki-laki harus memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya, mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta pembangunan sosial. Keterlibatan penuh dan setara dari semua gender tidak hanya merupakan tujuan pembangunan yang adil dan etis tetapi juga katalisator untuk mencapai efisiensi ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup bagi semua warga.

Oleh karena itu, IPG di Kota Tanjungbalai menjadi indikator penting yang merefleksikan sejauh mana ketidakseimbangan gender telah diatasi dan menjadi acuan dalam merumuskan program-program yang dapat memberdayakan perempuan serta menciptakan kesetaraan gender. Penanganan isu gender yang komprehensif dan strategis merupakan langkah kunci untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan yang cepat, tetapi juga pertumbuhan yang adil dan bertahan lama untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG menunjukkan sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi dan politik. IDG juga mengukur partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Komposit pembentuk IDG adalah (1) keterlibatan perempuan di parlemen, (2) perempuan sebagai tenaga profesional, dan (3) sumbangan pendapatan perempuan.

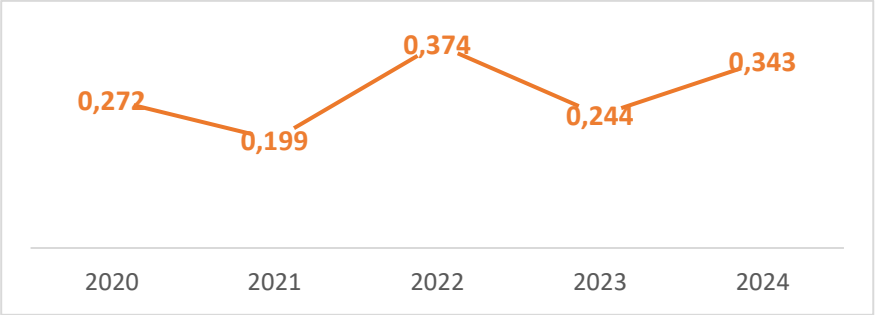


Gambar 2.25
Indeks Pemberdayaan Gender Kota Tanjungbalai, 2020-2024
Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025

Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Tanjungbalai dari tahun 2023 ke 2024, dari 66,84 menjadi 72,61, menggambarkan kemajuan signifikan dalam pemberdayaan perempuan di berbagai sektor dan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan untuk berkecimpung di bidang ekonomi dan politik serta terlibat dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan kian menipis.

c. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Ketimpangan gender adalah keadaan dimana adanya perlakuan atau tindakan yang tidak adil pada jenis kelamin tertentu. IKG berkisar antara 0–1, dengan semakin tinggi indeksnya, semakin timpang capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan.



Gambar 2.26
Indeks Ketimpangan Gender Kota Tanjungbalai, 2020-2024
Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025

Pada tahun 2024, IKG Kota Tanjungbalai adalah 0,343, yang merupakan penurunan 0,099 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan yang stabil dalam kesetaraan gender di Kota Tanjungbalai.

2.11 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah (local competitiveness) menggambarkan kemampuan suatu sektor ekonomi daerah bersaing secara relatif dengan sektor ekonomi yang sama daerah lain dan hinggga saat ini masih menjadi salah satu isu penting dalam membangun ekonomi

daerah. Perlunya dilakukan pemetaan daya saing daerah, karena akan menjadi informasi penting dan mendasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana-rencana capaian kebijakan pembangunan daerah.

2.11.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

1. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan di Kota Tanjungbalai menunjukkan tren positif selama periode 2019-2023, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungbalai. Indeks ini merupakan ukuran penting yang menggambarkan kualitas dan akses pendidikan di suatu wilayah. Menggunakan dua komponen utama, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), indeks ini menawarkan gambaran menyeluruh tentang status pendidikan di Kota Tanjungbalai.

Cara menghitung indeks ini dimulai dengan menilai IHLS, yang merupakan perbandingan antara harapan lama sekolah di suatu daerah dengan standar maksimum pendidikan formal yang umumnya ditetapkan sebesar 18 tahun. Ini mengukur jumlah tahun pendidikan yang diharapkan bisa dijalani oleh anak-anak yang sedang dalam usia sekolah. Selanjutnya, IRLS dihitung dengan membandingkan rata-rata lama sekolah yang telah diterima oleh populasi usia 25 tahun ke atas dengan standar yang sama, yaitu 18 tahun. Ini merefleksikan durasi pendidikan yang secara rata-rata telah diterima oleh warga dewasa. Dengan menggabungkan kedua indeks ini, didapatkan gambaran komprehensif mengenai status pendidikan di suatu wilayah, yang tidak hanya melihat ke depan ke harapan masa depan tetapi juga menilai kondisi saat ini berdasarkan pengalaman pendidikan masa lalu.

Indeks Pendidikan secara keseluruhan kemudian dihitung dengan mengambil ratarata geometris dari IHLS dan IRLS. Ini dilakukan dengan mengalikan kedua nilai indeks dan mengambil akar kuadrat dari hasil perkalian tersebut. Dengan cara ini, Indeks Pendidikan memberikan nilai yang mencerminkan kombinasi dari aspirasi pendidikan masa depan dan realitas pendidikan masa lalu, memberikan pandangan yang seimbang dan mendalam tentang kualitas dan akses pendidikan dalam suatu populasi.

Tabel 2.26
Indeks Pendidikan Kota Tanjungbalai 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Harapan Lama Sekolah	12,47	12,49	12,50	13,14	13,15
Rata-rata Lama Sekolah	9,24	9,26	9,44	9,68	9,69
Indeks Pendidikan	10,86	10,88	10,97	11,41	11,42

Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025 (diolah)

Dari tahun 2020 hingga 2024, terjadi peningkatan yang signifikan pada Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Tanjungbalai. HLS meningkat dari 12,47 tahun pada tahun 2020 menjadi 13,15 tahun pada tahun 2024. Sementara itu, RLS juga mengalami peningkatan dari 9,24 tahun pada tahun 2020 menjadi 9,66 tahun pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya yang berhasil dalam

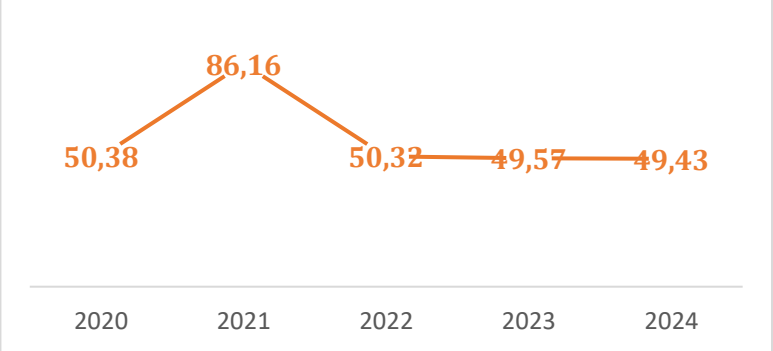
memperpanjang durasi pendidikan yang diharapkan dan yang sebenarnya dijalani oleh siswa di kota ini.

Sejalan dengan peningkatan HLS dan RLS, Indeks Pendidikan di Kota Tanjungbalai juga menunjukkan tren positif. Pada tahun 2020, Indeks Pendidikan berada pada angka 10,86, kemudian meningkat secara bertahap setiap tahunnya hingga mencapai 11,42 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan program dan kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah daerah, termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan, kualitas pendidikan, serta berbagai inisiatif untuk mengurangi angka putus sekolah.

Tren positif dalam Indeks Pendidikan tersebut menandakan adanya komitmen dan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah kota dan pemangku kepentingan pendidikan untuk meningkatkan standar pendidikan dan memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat. Ini adalah indikator penting yang menggambarkan upaya Kota Tanjungbalai dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan merata, yang berpotensi membawa dampak jangka panjang terhadap pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan ekonomi daerah.

2. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan adalah sebuah parameter demografis yang memperbandingkan proporsi penduduk yang tidak produktif (yang mencakup individu berusia 0-14 tahun dan yang berusia lebih dari 65 tahun) dengan jumlah penduduk dalam kelompok usia yang produktif (usia 15-64 tahun). Penghitungan rasio ketergantungan melibatkan pengambilan jumlah total penduduk yang tidak produktif, dibagi oleh jumlah penduduk yang produktif, dan kemudian dikalikan dengan 100 untuk menghasilkan persentase.



Gambar 2.27
Angka Ketergantungan Kota Tanjungbalai 2020-2024
Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025

Pada tahun 2020, Rasio Ketergantungan di Kota Tanjungbalai berada di angka 58,38. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban ekonomi dari sekitar 58 penduduk non-produktif. Pada tahun 2021, terjadi lonjakan drastis dalam Rasio Ketergantungan menjadi 86,16. Lonjakan ini menunjukkan peningkatan beban ekonomi yang signifikan pada penduduk usia produktif. Lonjakan yang tajam ini mungkin disebabkan oleh peningkatan tajam jumlah penduduk non-produktif

atau penurunan jumlah penduduk usia produktif, yang bisa terkait dengan dinamika demografis seperti migrasi, peningkatan angka kelahiran, atau peningkatan angka kematian di kelompok usia produktif.
Pada tahun 2023, Rasio Ketergantungan kembali turun drastis menjadi 49,57 dan sedikit menurun lagi menjadi 49,43 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan pemulihan atau stabilisasi dalam struktur demografis Kota Tanjungbalai. Stabilitas ini penting untuk memastikan bahwa penduduk usia produktif dapat mendukung penduduk non-produktif tanpa beban ekonomi yang berlebihan.

2.11.2Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

1. Rasio Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

Tabel 2.27
PDRB, Peranan, dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
ADHB (Miliar/Rp)	1.798,54	2.000,08	2.145,83	2.263,76	2.560,33
ADHK (Miliar/Rp)	1.120,94	1.172,94	1.205,78	1.260,24	1.365,35
Proposi terhadap Total PDRB	19,59	20,76	20,50	20,20	20,97
Pertumbuhan PDRB	1,89	4,62	2,82	4,53	8,34

Sumber: Kota Tanjungbalai dalam Angka, 2025

Lapangan usaha Industri pengolahan menempati porsi kedua setelah perdagangan dalam pembentukan PDRB Kota Tanjungbalai. Tahun 2024 peranannya mencapai 20,97 persen, meningkat dari tahun sebelumnya. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Industri Pengolahan tahun 2024 mencapai 2,56 triliun rupiah, sedangkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 mencapai 1.36 triliun rupiah. Laju pertumbuhan industri pengolahan tahun 2024 sebesar 8,34 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang bernilai 4.53 persen.

2. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Kegiatan subkategori ini mencakup pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, estoran *self service* atau restoran *take away*, baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

Tabel 2.28
PDRB, Peranan, dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Akomodasi Makan dan Minum, 2020-2024

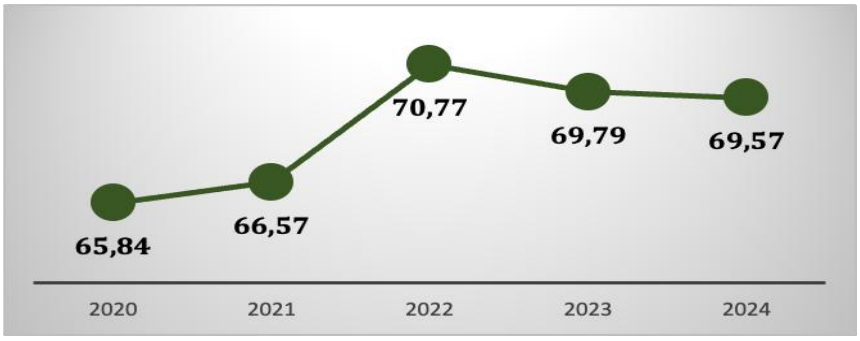
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
ADHB (Miliar/Rp)	192,65	194,79	210,60	231,27	251,98
ADHK (Miliar/Rp)	139,98	141,16	149,40	161,36	169,60
Proposi terhadap Total PDRB	2,10	2,02	2,01	2,06	2,06
Pertumbuhan PDRB	-0,53	0,84	5,84	8,01	5,10

Sumber: Kota Tanjungbalai dalam Angka, 2025

Tahun 2023, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kota Tanjungbalai sebesar 2,06 persen. Kontribusi sublapangan usaha Penyediaan Makan Minum sebesar 1,91 persen (92,46 persen terhadap lapangan usaha), sedangkan sublapangan usaha Penyediaan Akomodasi memberi kontribusi sebesar 0,16 persen (7,54 persen terhadap lapangan usaha).

3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun keatas, TPAK berguna untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini mengukur sejauh mana penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi, termasuk pekerjaan formal, pekerjaan informal, atau mencari pekerjaan baru.

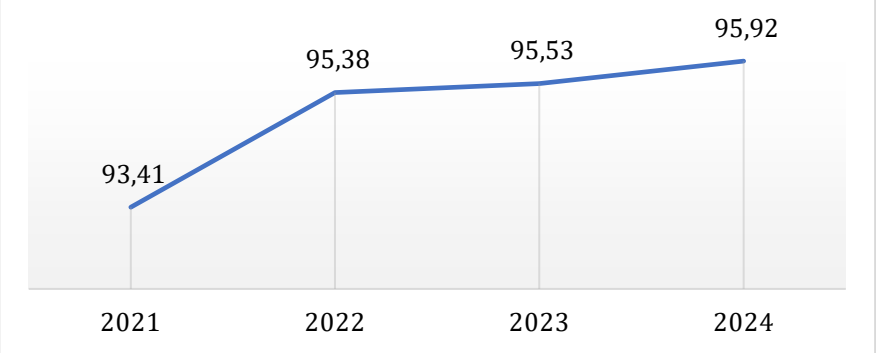


Gambar 2.28
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Kota Tanjungbalai, 2020-2024
Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025

Secara keseluruhan, tren TPAK di Kota Tanjungbalai dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang positif, mencerminkan pemulihan ekonomi dan adaptasi yang baik dari penduduk usia kerja dalam menghadapi tantangan ekonomi. Pada tahun 2020, TPAK Kota Tanjungbalai berada di angka 65,84 persen. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 64,83 persen dari penduduk usia kerja di Kota Tanjungbalai terlibat dalam kegiatan ekonomi. Pada tahun 2021, TPAK meningkat menjadi 66,57 persen yang mencerminkan adanya peningkatan partisipasi angkatan kerja meskipun terdapat tantangan dari pandemi COVID-19. Ini menunjukkan adaptasi masyarakat dalam menghadapi kondisi ekonomi yang sulit dengan tetap aktif mencari pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja baru. Pada Tahun 2022 mencatat puncak TPAK dengan angka 70,77 persen, menunjukkan pemulihan yang signifikan dan partisipasi yang sangat tinggi. Namun, pada tahun 2024, TPAK mengalami penurunan menjadi 55,47 persen. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan kondisi pasar kerja, kebijakan ekonomi, atau migrasi tenaga kerja.

4. Tingkat Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja merupakan perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Selama lima tahun terakhir tingkat kesempatan kerja Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 mencapai angka sebesar 93,41 persen meningkat menjadi 95,92 persen pada tahun 2024. Tren ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kesempatan kerja di Kota Tanjungbalai.



Gambar 2.29
Tingkat Kesempatan Kerja Kota Tanjungbalai, 2021-2024
Sumber: BPS Kota Tanjungbalai 2025, (diolah)

5. Tenaga Kerja

Angkatan kerja mengacu pada individu yang berusia antara 15 hingga 64 tahun yang sudah siap untuk bekerja, baik yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan Bukan angkatan kerja adalah individu yang tidak termasuk dalam kategori angkatan kerja. Kelompok ini mencakup berbagai alasan ketidakikutsertaan dalam pasar tenaga kerja.

Jumlah tenaga kerja di Kota Tanjungbalai dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Pada Tahun 2020 jumlah Angkatan kerja meningkat dari 82.977 orang menjadi 93.286 orang pada tahun 2024, sedangkan bukan Angkatan kerja mengalami penurunan dari 43.045 orang menjadi 40.810 orang.

Mengetahui nilai Angkatan kerja dan bukan Angkatan kerja penting untuk merancang program-program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang efektif.

Tabel 2.29
Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Utama Kota Tanjungbalai, 2020-2024

No	Jenis Kegiatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Angkatan Kerja	82.977	85.276	92.132	91.966	93.286
	1.Bekerja	77.196	79.653	87.876	87.857	89.481
	2.Pengangguran terbuka	5.781	5.623	4.256	4.109	3.805
B	Bukan Angkatan Kerja	43.045	42.821	38.057	39.815	40.810
	Total (A+B)	126.022	128.097	130.189	131.781	134.096

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025

Angkatan kerja di Kota Tanjungbalai, berdasarkan tingkat pendidikan, menunjukkan dominasi lulusan SMA/SMK dalam jumlah penduduk usia kerja yang siap untuk bekerja, diikuti oleh lulusan SD kemudian SMP, sedangkan lulusan Perguruan tinggi masih sangat kecil sebanyak 11.311 orang. Hal ini menandakan masih rendahnya kualitas/mutu yang dimiliki Angkatan kerja di Kota Tanjungbalai, karena diasumsikan bahwa orang yang memiliki pendidikan tinggi memiliki pengetahuan dan kemampuan yang tinggi pula. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka peluangnya untuk melamar pekerjaan di suatu lapangan usaha semakin besar.

Tabel 2.30
Penduduk 15 Tahun ke Atas Termasuk Angkatan Kerja
Menurut Jenis Pendidikan yang Ditamatkan Kota Tanjungbalai, 2020-2024

Tahun	Angkatan Kerja				
	Tidak Sekolah/SD	SMP	SMA/SMK	PT	Total
2020	25.234	14.731	33.604	9.408	82.977
2021	25.709	15.494	33.091	10.982	85.276
2022	24.538	16918	39.046	11.630	92.132
2023	23.498	15.472	37.875	11.012	87.857
2024	26.123	15.866	39.986	11.311	93.286

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu daerah. Oleh karenanya pembangunan SDM harus diarahkan kepada penciptaan SDM yang produktif, inovatif dan profesional disamping mampu memanfaatkan, mengembangan dan menguasai IPTEK sehingga mampu bersaing di dunia global, Selanjutnya kualitas SDM juga memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja yang ada.

Kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi banyaknya tenaga kerja yang diserap, Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin besar kemungkinan orang tersebut memperoleh pekerjaan, Tingkat pendidikan para pekerja di Kota Tanjungbalai tergolong relatif rendah, Hal tersebut dapat kita lihat seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.31
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu di Kota Tanjungbalai, 2024

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja	
	Bekerja	Pengangguran Terbuka
Tidak/belum pernah sekolah; Tidak/belum tamat Sekolah Dasar	24.257	864
Sekolah Menengah Pertama	16.575	561
Sekolah Menengah Tingkat Atas	27.938	2.257
Sekolah Menengah Kejuruan	8.242	69
Program Diploma I/II/III	1.545	96
Akademi/ Universitas	9.319	262
Jumlah	**87.876**	**4.109**

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai 2025, (diolah)

Secara umum, seperti di banyak daerah lain di Indonesia, pekerjaan di Kota Tanjungbalai didominasi oleh lulusan SMA, dengan banyak peluang di sektor informal dan jasa. Jumlah penduduk Kota Tanjungbalai yang bekerja didominasi dari tamatan SMA sebesar 27.938 orang, dan pendidikan yang terendah berasal dari tamatan Diploma dan Universitas, sedangkan tingkat pengangguran tertinggi juga didominasi dari tamatan SMA selanjutnya tamatan sekolah dasar. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas.

Tabel 2.32
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai, 2024

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Total
Berusaha Sendiri	9.985	7.965	17.950
Berusaha dibantu Buruh tidak Tetap/buruh tidak dibayar	3.439	3.828	7.267
Berusaha dibantu Buruh Tetap/Buruh dibayar	2.307	825	3.132
Buruh/Karyawan/Pegawai	33.507	14.844	48.351
Pekerja Bebas Pertanian	883	-	883
Pekerja Bebas Non Pertanian	519	616	1.135

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Total
Pekerja Keluarga/tak dibayar	2.052	7.087	9.139
Jumlah	**52.692**	**35.165**	**87.857**

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai 2021

Penduduk Kota Tanjungbalai yang bekerja dilihat berdasarkan status pekerjaan utama didominasi pada buruh/karyawan/pegawai dengan total keseluruhan sebesar 48.351 orang, kemudian diikuti oleh berusaha sendiri dengan jumlah 17.950 orang. Status pekerjaan utama didominasi oleh perempuan adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas non pertanian dan pekerja keluarga/tak dibayar.

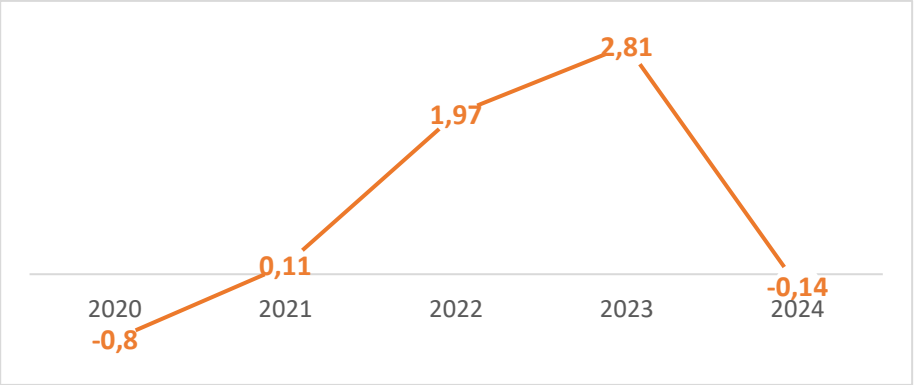
6. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Kota Tanjungbalai pada Tahun 2024 yang tercatat sebesar 34,28 menunjukkan posisi Kota Tanjungbalai dalam predikat kurang inovatif. Menurut Kepmendagri No 400.10.11-4898 Tahun 2026, Kota Tanjungbalai berada di peringkat ke-87 dari total 93 kota yang dievaluasi di Indonesia. Skor tersebut mencerminkan sejauh mana inovasi telah diadopsi dan diintegrasikan dalam berbagai aspek pembangunan di Tanjungbalai, termasuk dalam pemerintahan, industri, pendidikan, dan masyarakat.

Angka tersebut memberikan gambaran tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Kota Tanjungbalai dalam meningkatkan kapasitas inovatifnya. Skor Indeks Inovasi yang berada di bawah rata-rata nasional menandakan bahwa terdapat ruang yang signifikan bagi peningkatan dan pembaharuan di berbagai sektor. Hal ini menjadi sinyal bagi pemangku kepentingan kota untuk merancang dan menerapkan strategi yang dapat memacu pertumbuhan inovatif, memanfaatkan teknologi terkini, serta mengadopsi praktik terbaik untuk pembangunan berkelanjutan.

2.11.3 Penerapan Ekonomi Biru

Ekonomi biru atau "*blue economy*" adalah konsep pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis pada pemanfaatan sumber daya laut dan perairan. Di Kota Tanjungbalai, sektor perikanan memegang peranan penting dalam ekonomi lokal, dengan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Analisis kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB memberikan gambaran tentang bagaimana ekonomi biru dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kota ini.



Gambar 2.30
Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan, 2020-2024
Sumber: BPS Kota Tanjungbalai 2025, (diolah)

Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah).

Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan sektor perikanan terus mengalami peningkatan secara signifikan. Pada Tahun 2020, akibat covid-19 pertumbuhan sektor ini mencapai negatif 0,8 persen, namun pada tahun berikutnya terus mengalami pertumbuhan hingga mencapai 2,81 persen pada tahun 2023, tetapi Kembali mengalami penurunan menjadi 0,18 persen pada Tahun 2024.

Dengan melihat kondisi ini, dapat disimpulkan bahwa ekonomi biru memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai. Pengelolaan yang berkelanjutan dan optimalisasi sumber daya perairan, termasuk perikanan tangkap dan budidaya, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta menjaga keseimbangan ekosistem laut dan perairan. Peningkatan infrastruktur pendukung, seperti pelabuhan perikanan, pasar ikan, dan fasilitas pengolahan, akan semakin memperkuat kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi lokal, sekaligus mendukung visi pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan.

2.1.3.3 Transformasi Digital

Dalam rangka mendukung transformasi digital nasional, maka pemerintah Kota Tanjungbalai telah menyusun Langkah-langkah transformasi digital yang dimuat dalam master plan e-Government Kota Tanjungbalai, antara lain: (a) mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet, (b) mempersiapkan roadmap transformasi digital, (c) mempercepat integrasi pusat data nasional, (d) mengembangkan sumber daya manusia dan talenta digital, (e) menyiapkan berbagai regulasi dan skema pembiayaan untuk mendukung ekosistem digital.

Transformasi Digital adalah proses mengintegrasikan teknologi digital ke dalam semua aspek bisnis atau organisasi, mengubah cara kerja, interaksi dengan pelanggan, dan penyampaian nilai.

Super Platform Kota Tanjungbalai antara lain :

1. Portal Tanjungbalai (https://tanjungbalaikota.go.id)
2. Aplikasi Srikandi
3. Aplikasi SIPD
4. Aplikasi Inaproc pada pengadaan barang dan jasa
5. Aplikasi e-lapor Menpan RB

Percepatan Transformasi Digital seperti :

1. Layanan internet keseluruh OPD dan Ruang Publik,
2. Transformasi server local ke Pusat Data Nasional (PDNS)

Produksi talenta digital Pemerintah Kota telah bekerja sama dengan BKPSDM Kementerian Kominfo untuk membuat program pelatihan untuk ASN dan Masyarakat umum.

2.11.4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan .

aset sumber daya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources*/CBR), sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Tabel 2.33
PDRB, Peranan, dan Pertumbuhan PMTB Kota Tanjungbalai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
ADHB (Miliar/Rp)	2956,59	3065,78	3150,13	3418,77	3.692,70
ADHK (Miliar/Rp)	1943,36	1987,71	2025,12	2099,85	2.136,84
Proposi terhadap Total PDRB	32,2	31,83	30,1	30,5	30,25
Pertumbuhan	-2,52	2,28	1,88	3,69	1,76

Sumber: Kota Tanjungbalai dalam Angka, 2025

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di atas menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2020–2024 cenderung berfluktuatif yaitu; -2,52 persen (2020); 2,28 persen (2021); 1,88 persen (2022), 3,69 persen (2023) dan 1,76 persen (2024) . Pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2023, hal ini

disebabkan oleh besarnya pembangunan perumahan dari berbagai perusahaan real estate maupun rumah tangga di Kota Tanjungbalai.

2. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kota Tanjungbalai, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Tabel 2.34
Perkembangan Ekspor Kota Tanjungbalai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023
ADHB (Miliar/Rp)	2.404,09	2.715,5	3.257,92	4.263,78
ADHK (Miliar/Rp)	1.395,36	1.470,13	1.656,17	2.071,49
Proposi terhadap Total PDRB	26,19	28,19	31,13	38,04
Pertumbuhan	0,24	5,36	12,65	25,08

Sumber: Kota Tanjungbalai dalam Angka, 2025

Secara total, dalam kurun waktu 2020-2023 nilai ekspor barang dan jasa cenderung meningkat setiap tahun. Pada tahun 2020 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 2.404,09 miliar rupiah meningkat menjadi sebesar 2.715,5 miliar rupiah pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022-2023 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 3.257,92 miliar rupiah, menjadi 4.263,78 miliar rupiah. Sejalan dengan nilai ekspor atas dasar harga Berlaku, nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukan arah pertumbuhan yang sama, yaitu dengan nilai "riil" masing-masing tahun sebesar: 1.395,36 miliar rupiah (2020); 1.470,13 miliar rupiah (2021); 1.656,17 miliar rupiah (2022) dan 2.071,49 miliar rupiah (2023). Sementara itu, pada periode 2020 s.d 2023, proporsi dalam PDRB justru cenderung meningkat dari 26,19 persen pada tahun 2020 menjadi 38,04 persen di tahun 2023. Pertumbuhan riil total ekspor mencapai angka yang tinggi, khususnya pada tahun 2023 mencapai dua puluh lima persen lebih. Pertumbuhan yang tinggi tersebut disebabkan adanya pengiriman barang ke luar negeri seperti Malaysia dan China. Pertumbuhan ekspor pada masing-masing tahun adalah sebesar 0.24 persen (2020) meningkat menjadi 5,36 persen pada tahun 2021, 12,65 persen pada tahun 2022 dan 25,08 persen pada tahun 2023.

2.11.5. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi adalah kondisi di mana perekonomian berjalan stabil, dengan pertumbuhan yang berkelanjutan, inflasi yang terkendali, dan keseimbangan antara permintaan dan penawaran, menciptakan kepastian bagi pelaku ekonomi.

1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio pajak terhadap PDRB adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penerimaan pajak dalam kaitannya dengan ukuran perekonomian suatu wilayah. Rasio ini penting karena menunjukkan seberapa baik pemerintah mampu membiayai pengeluarannya melalui penerimaan pajak.

Tabel 2.35
Rasio Pajak terhadap PDRB, 2020-2024

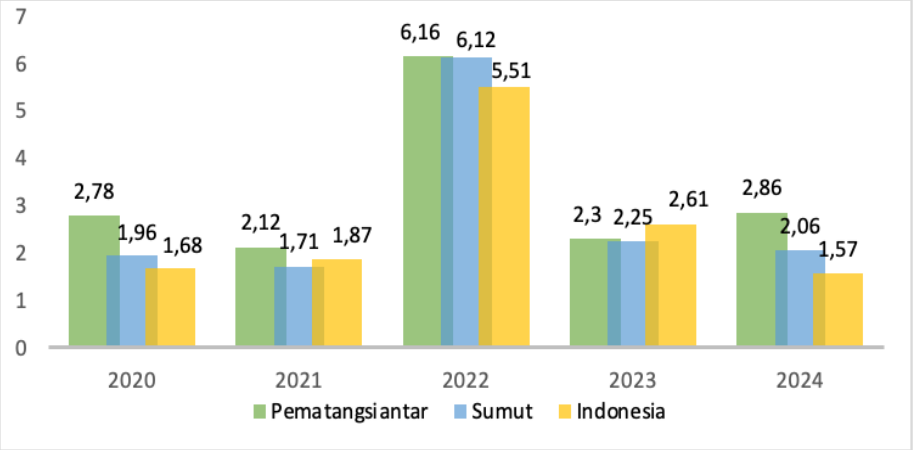
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak (Juta Rp)	14.459	17.206	17.460	20.429	22.519,50
PDRB (Miliar Rp)	5.763,21	5.898,81	6.131,04	6.428,77	6.744,35
Rasio Pajak terhadap PDRB (%)	0,25	0,29	0,28	0,32	0,33

Sumber: Kota Tanjungbalai dalam Angka, 2025

Rasio pajak Kota Tanjungbalai dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan, dari 0,25 persen menjadi 0,33 persen. Semakin tinggi rasio pajak, semakin kokoh pula sumber pendanaan yang dimiliki suatu daerah. Dengan fondasi perpajakan yang kuat tersebut dapat mendorong stabilitas ekonomi di Kota Tanjungbalai.

2. Laju Inflasi

Sesuai dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungbalai, pendataan terhadap inflasi tidak dilakukan di Kota Tanjungbalai. Ukuran inflasi Kota Tanjungbalai mengacu pada perkembangan inflasi Kota Pematangsiantar, karena gambaran inflasi Kota Pematangsiantar dianggap dapat mewakili inflasi di Kota Tanjungbalai.



Gambar 2.31
Perkembangan Inflasi Kota Pematang Siantar
Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2025

Selama lima tahun terakhir, perkembangan inflasi Kota Pematangsiantar berfluktuasi. Pada tahun 2020, nilai inflasi Kota Pematangsiantar sebesar 2,78 persen menjadi 2,86 persen pada tahun 2024. Nilai inflasi Kota Pematangsiantar relatif berada di atas provinsi

dan nasional. Dalam perekonomian inflasi tidak bisa dihilangkan tetapi dikendalikan agar tetap berada pada posisi aman, tetap seimbang antara penawaran dan permintaan, tidak mengganggu perekonomian, dan tetap berada dalam daya beli masyarakat luas. Inflasi terkendali, kesejahteraan masyarakat tetap terjaga dan meningkat.

BAB III

PROFIL KEMISKINAN

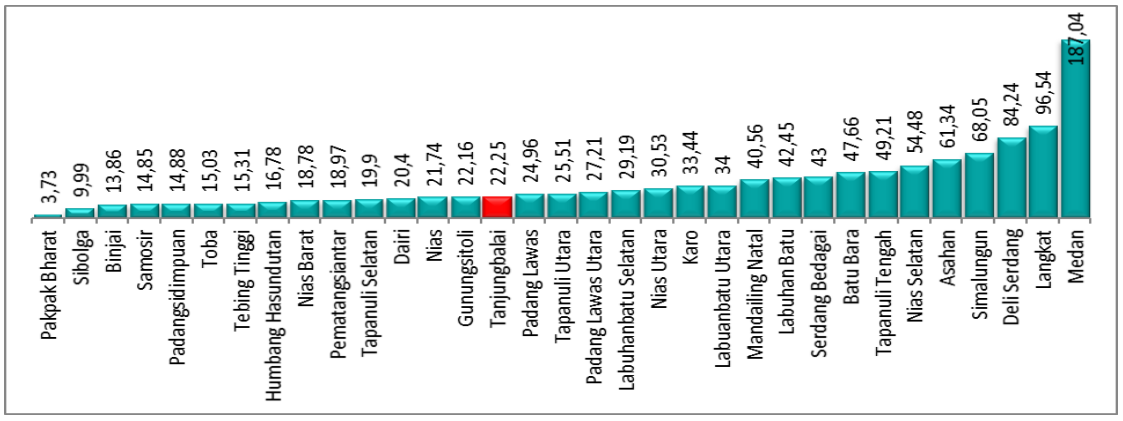
3.1. Kondisi Kemiskinan Konsumsi

Kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain: terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik (Bappenas, 2004). Menurut World Bank (Bank Dunia), kemiskinan adalah deprivasi dalam kesejahteraan. Berdasarkan definisi tersebut kemiskinan dapat dipandang dari beberapa sisi. Dari pandangan konvensional kemiskinan dipandang dari sisi moneter, yaitu kemiskinan diukur dengan membandingkan pendapatan/konsumsi individu dengan beberapa batasan tertentu, jika mereka berada di bawah batasan tersebut, maka mereka dianggap miskin. Kondisi kemiskinan konsumsi pada Kota Tanjungbalai dapat dinilai dari indikator berikut: jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2).

1. Jumlah Penduduk Miskin

a. Analisis Posisi Relatif

Jumlah penduduk miskin Kota Tanjungbalai pada tahun 2024 sebanyak 22.250 jiwa. Posisi Kota Tanjungbalai berada pada urutan kelimabelas terendah berdasarkan posisi relatif jumlah penduduk miskin Kota Tanjungbalai dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Posisi relatif Kota Tanjungbalai yang tidak terlalu tinggi karena Kota Tanjungbalai merupakan kota kecil seluas 60,52 km dengan jumlah penduduk yang relatif kecil dibandingkan kabupaten/kota lainnya yaitu sebesar 179.748 jiwa.



Gambar 3.1 Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Kota Tanjungbalai, 2024
Sumber : BPS Provinsi Sumut, 2025

Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan posisi relatif jumlah penduduk miskin Kota Tanjungbalai bila dibandingkan dengan kota lain di Sumatera Utara. Jumlah penduduk miskin Kota Tanjungbalai berada pada posisi kedua tertinggi bila dibandingkan dengan 7 (tujuh) kota lain di Provinsi Sumatera Utara. Dilihat dari posisi relatif, Kota Tanjungbalai masih lebih tinggi dari Kota Sibolga, Tebing Tinggi, Binjai dan Padang Sidempuan dan memiliki posisi yang sama dengan Kota Gunung Sitoli. Kota Medan memiliki jumlah penduduk miskin yang terbesar sebanyak 187.04 jiwa pada tahun 2024.

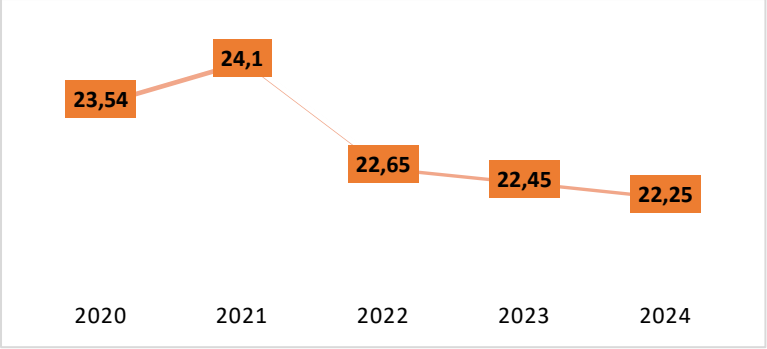
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Miskin Kota di Provinsi Sumatera Utara

No	KOTA	2022	2023	2024
		(ribu jiwa)	**(ribu jiwa)**	**(ribu jiwa)**
1.	Sibolga	10,05	10,02	9,99
2.	Tanjungbalai	22,65	22,45	22,25
3.	Pematangsiantar	20,53	18,96	18,97
4.	Tebing Tinggi	16,34	16,36	15,31
5.	Medan	187,74	187,28	187,04
6.	Binjai	14,61	13,85	13,86
7.	Padangsidempuan	16,03	16,15	14,88
8.	Gunungsitoli	21,85	22,03	22,16

Sumber : BPS Provinsi Sumut, 2025

b. Analisis Perkembangan Waktu

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir selalu mengalami penurunan. Pada Tahun 2020 jumlah penduduk miskin sebesar 23.540 jiwa menurun sebesar 4,69 persen menjadi 22.450 jiwa pada tahun 2023, selanjutnya pada Tahun 2024 jumlah penduduk miskin Kota Tanjungbalai menurun menjadi 22.250 jiwa, artinya selama lima tahun terakhir Pemerintah Kota Tanjungbalai hanya mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 5,48 persen.

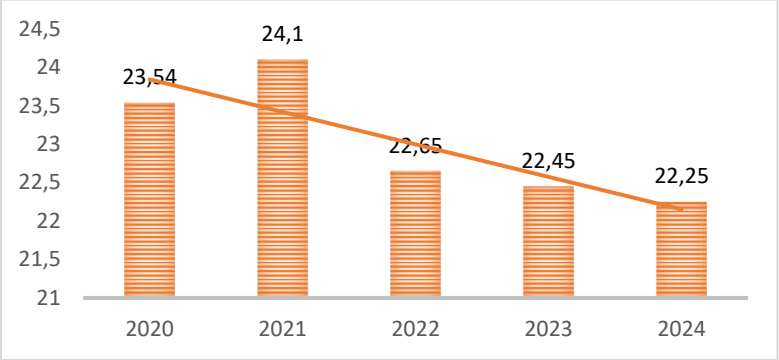


Gambar 3.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Kota Tanjungbalai, 2020-2024

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025

c. Analisis Efektivitas

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi tetapi *trend line* cenderung menunjukkan penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilaksanakan untuk penurunan jumlah penduduk miskin cukup efektif.

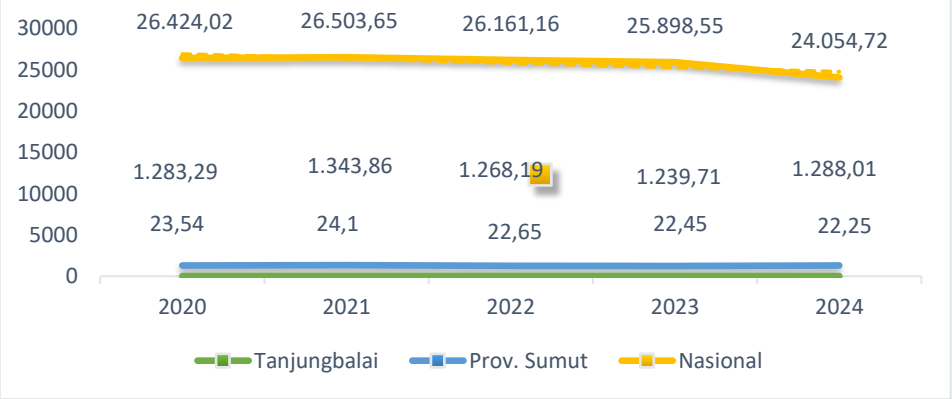


Gambar 3.3 Tingkat Efektifitas Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Kota Tanjungbalai, 2020-2024

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025

d. Analisis Relevansi

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Tanjungbalai pada Tahun 2020-2022 mengalami penurunan, demikian halnya dengan capaian nasional dan provinsi yang mengalami penurunan. Dilihat pada tahun 2022-2023, jumlah penduduk miskin Kota Tanjungbalai, provinsi dan nasional mengalami penurunan, meskipun penurunan yang dialami Kota Tanjungbalai belum signifikan, khususnya bila dibandingkan dengan penurunan yang dialami oleh provinsi dan nasional. Selanjutnya, yang terjadi pada Tahun 2023-2024 juga adalah penurunan jumlah penduduk miskin. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Kota Tanjungbalai sudah sejalan dengan kebijakan provinsi dan nasional dalam menekan jumlah penduduk miskin.



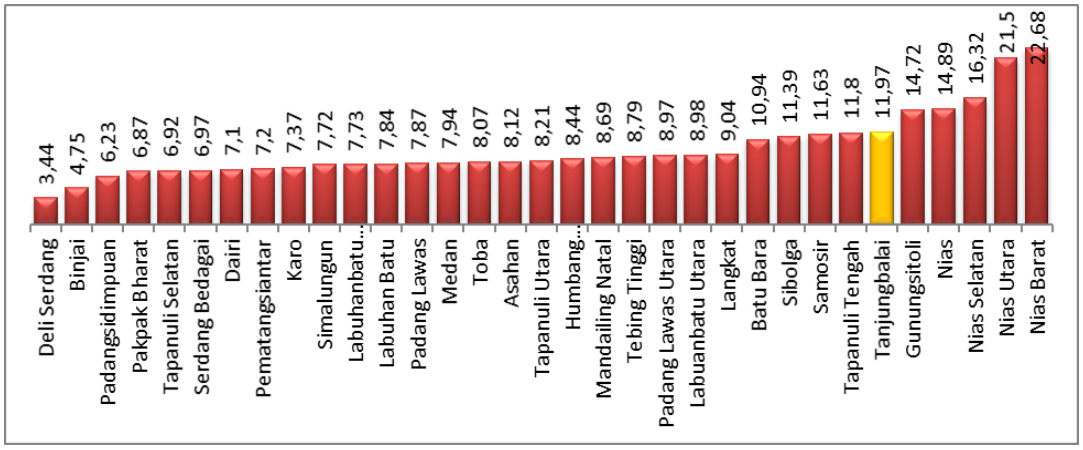
Gambar 3.4 Relevansi Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Kota terhadap Provinsi dan Nasional, 2020-2024

Sumber : BPS Provinsi Sumut, 2025

2. Persentase Penduduk Miskin

a. Analisis Posisi Relatif

Bila dilihat berdasarkan indikator persentase penduduk miskin maka diketahui bahwa Kabupaten Deli Serdang memiliki posisi dengan persentase penduduk miskin terendah sebesar 3,44 persen, sedangkan Nias Barat berada pada posisi tertinggi sebesar 22,68 persen. Kota Tanjungbalai berada pada posisi keenam tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya.



Gambar 3.5
Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kota Tanjungbalai, 2024
Sumber : BPS Provinsi Sumut, 2025

Persentase penduduk miskin Kota Tanjungbalai bila dibandingkan 7 (tujuh) kota lain di Provinsi Sumatera Utara berada pada posisi kedua tertinggi setelah Kota Gunung Sitoli. Pada Tahun 2024 semua kota di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan pada persentase penduduk miskin bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

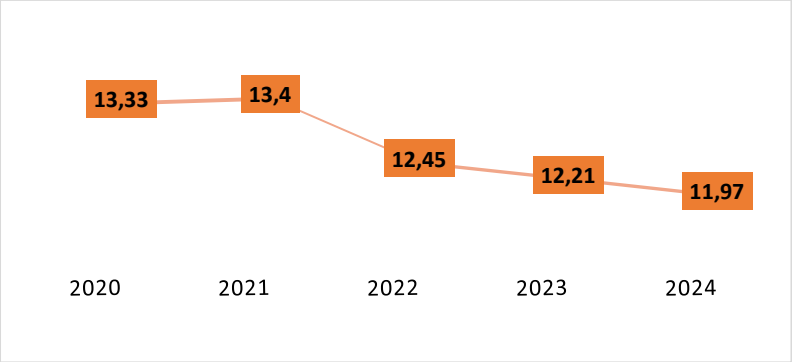
Tabel 3.2 Persentase Penduduk Miskin Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2022-2024

No	KOTA	2022	2023	2024
		(Persen)	(Persen)	(Persen)
1.	Sibolga	11.47	11.42	11,39
2.	Tanjungbalai	12.45	12.21	11,97
3.	Pematangsiantar	7.88	7.24	7,2
4.	Tebing Tinggi	9.59	9.49	8,79
5.	Medan	8.07	8.00	7,94
6.	Binjai	5.10	4,79	4,75
7.	Padangsidempuan	6.89	6.85	6,23
8.	Gunungsitoli	14.87	14.78	14,72

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025

b. Analisis Perkembangan Waktu

Perkembangan persentase penduduk miskin pada Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir cenderung menunjukkan penurunan tetapi relatif lambat. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin sebesar 13,33 persen menurun menjadi 12,21 persen pada tahun 2023 dan kembali menurun menjadi 11,97 persen pada tahun 2024. Artinya selama lima tahun persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 10,20 persen.

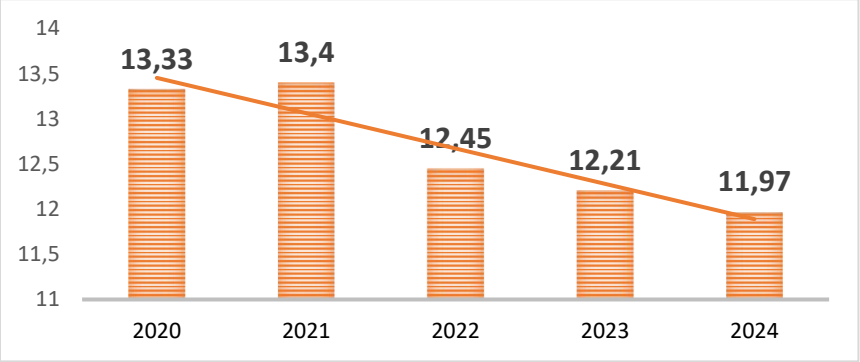


Gambar 3.6 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota Tanjungbalai, 2020-2024

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025

c. Analisis Efektivitas

Berdasarkan *trend line* diketahui bahwa Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Tanjungbalai selama lima tahun cenderung menunjukkan penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa program yang ditujukan untuk penurunan jumlah penduduk miskin sudah cukup efektif.

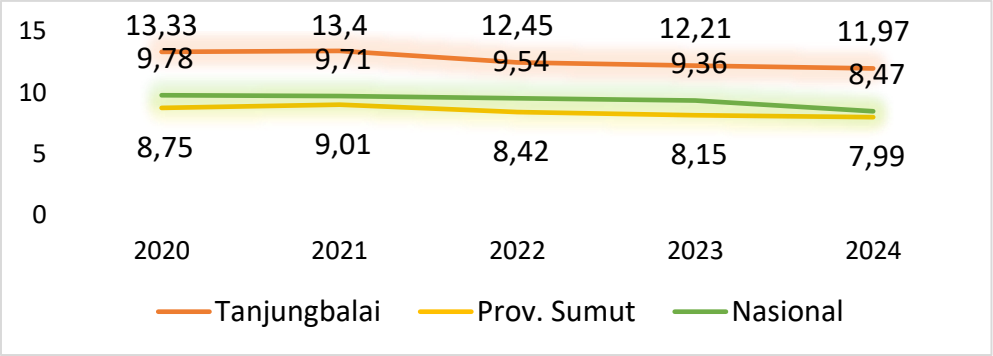


Gambar 3.7 Tingkat Efektivitas Persentase Penduduk Miskin Kota Tanjungbalai, 2020-2024

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025

d. Analisis Relevansi

Perkembangan persentase penduduk miskin di Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir cenderung menunjukkan penurunan, sama halnya dengan nasional dan provinsi yang juga menunjukkan penurunan pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Kota Tanjungbalai sudah relevan dengan kebijakan provinsi dan nasional dalam menurunkan persentase kemiskinan.



Gambar 3.8 Relevansi Persentase Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Kota terhadap Provinsi dan Nasional, 2020-2024

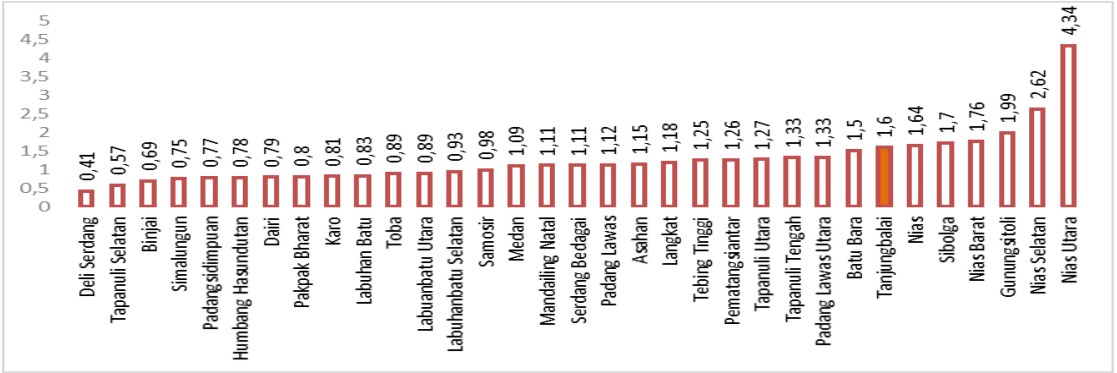
Sumber : BPS Provinsi Sumut, 2025

3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalam Kemiskinan (yang sering dinotasikan dengan P1) merupakan indeks yang merepresentasikan besarnya total uang yang harus disediakan untuk mengangkat seluruh individu dan rumah tangga miskin sampai pada garis kemiskinan (sebagai rasio terhadap total pendapatan seluruh penduduk pada tingkat garis kemiskinan). Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan memgindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2022).

a. Analisis Posisi Relatif

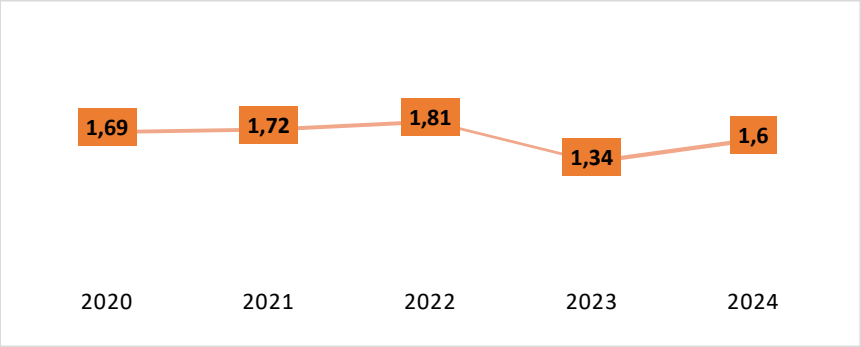
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Tanjungbalai pada tahun 2024 sebesar 1,60 poin. Daerah yang menempati posisi terendah adalah Kota Deli Serdang dengan capaian 0,41 poin, sedangkan posisi tertinggi ditempati Kabupaten Nias Utara dengan capaian 4,34 poin. Posisi Kota Tanjungbalai berada pada urutan ketujuh tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Artinya total uang yang dibutuhkan untuk mengangkat seluruh individu dan RT miskin masih relatif lebih besar dibandingkan kabupaten/kota lainnya.



Gambar 3.9 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Tanjungbalai, 2024
Sumber : BPS Prov.Sumut, 2025

b. Analisis Perkembangan Waktu

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir selalu mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2020 capaian P1 sebesar 1,69 poin, tetapi pada tahun 2021 meningkat menjadi 1,72 poin hingga pada tahun 2022, lalu mengalami penurunan secara signifikan menjadi 1,34 poin pada Tahun 2023 dan meningkat Kembali menjadi 1,6 pada tahun 2024. Peningkatan capaian P1 mengindikasikan bahwa individu dan RT miskin makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga semakin melebar.

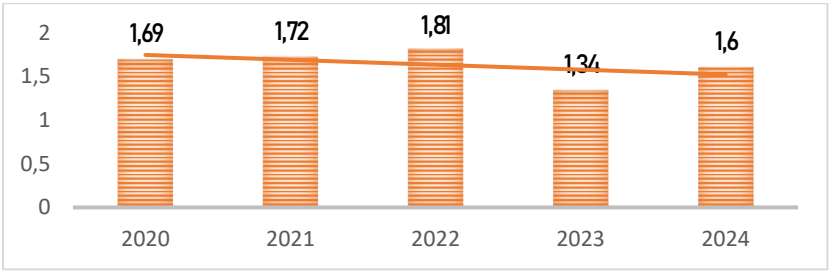


Gambar 3.10 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Tanjungbalai, 2020-2024

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025

c. Analisis Efektivitas

Berdasarkan gambar di bawah ini, menunjukkan bahwa Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Tanjungbalai selama lima tahun cenderung menunjukkan penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilaksanakan untuk mengangkat kesejahteraan individu dan RT miskin sekaligus upaya mengurangi ketimpangan pengeluaran penduduk miskin relatif cukup efektif.



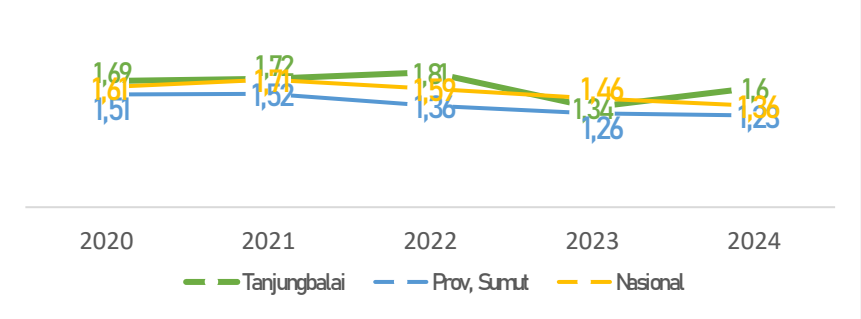
Gambar 3.11 Tingkat Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Tanjungbalai, 2020-2024

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025

d. Analisis Relevansi

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskian Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, Pada Tahun 2020 mencapai 1,69 poin meningkat menjadi 1,81 poin pada tahun 2022. Capaian ini berbeda dengan nasional dan provinsi

yang menunjukkan penurunan. Pada Tahun 2024 indikator P1 Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan, berbeda dengan provinsi dan nasional yang mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Kota Tanjungbalai belum relevan dengan kebijakan provinsi dan nasional dalam upaya mengangkat seluruh individu dan rumah tangga miskin sampai pada garis kemiskinan dan upaya mengurangi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.



Gambar 3.12 Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota terhadap Provinsi dan Nasional, 2020-2024

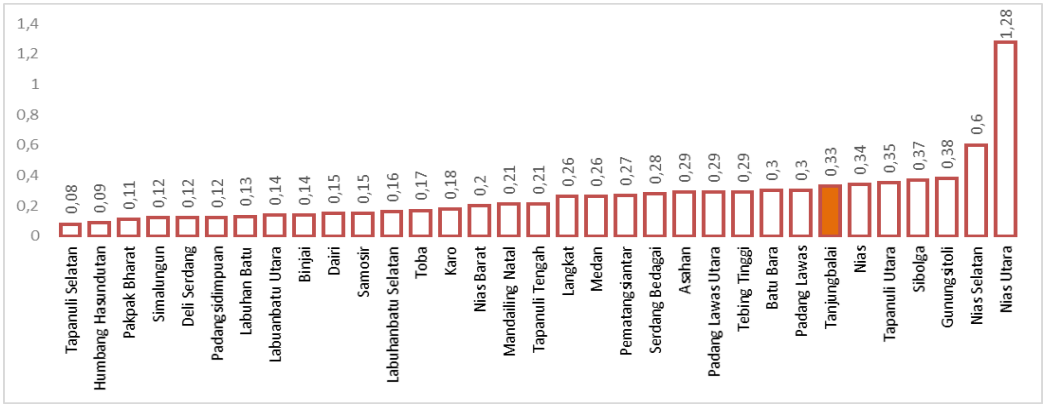
Sumber : BPS Provinsi Sumut, 2025

4. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (yang sering dinotasikan dengan P2) merupakan ukuran kemiskinan yang memberikan bobot yang lebih besar kepada masyarakat yang lebih miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2022).

a. Analisis Posisi Relatif

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Tanjungbalai pada tahun 2024 sebesar 0,33 poin. Daerah yang menempati posisi terendah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan capaian 0,08 poin, sedangkan posisi tertinggi ditempati Kabupaten Nias Utara dengan capaian 1,28 poin. Posisi Kota Tanjungbalai berada pada urutan ketujuh tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain.

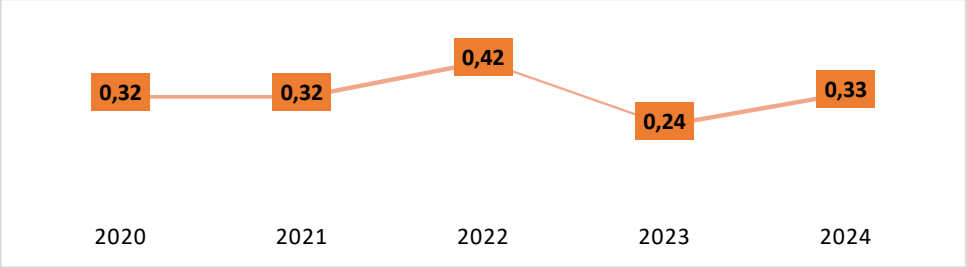


Gambar 3.13 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Tanjungbalai, 2024

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025

b. Analisis Perkembangan Waktu

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir selalu mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2020 capaian P2 sebesar 0,32 poin meningkat menjadi 0,42 poin pada Tahun 2022, tetapi pada tahun 2023 terjadi penurunan signifikan menjadi sebesar 0,24 poin, tetapi pada Tahun 2024 indikator P2 mengalami peningkatan secara signifikan. Peningkatan capaian P2 mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin melebar.

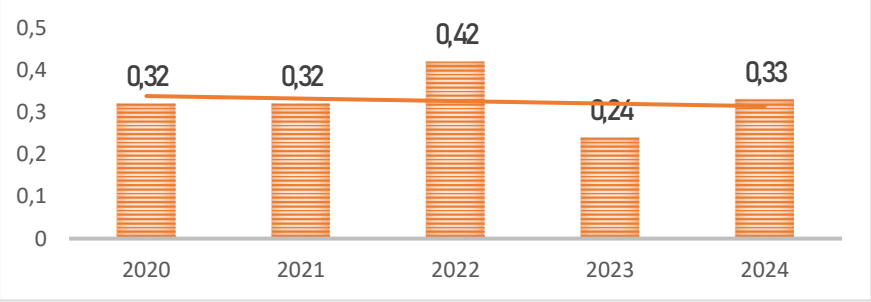


Gambar 3.14 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Tanjungbalai, 2020-2024

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025

c. Analisis Efektivitas

Berdasarkan gambar di bawah ini, menunjukkan bahwa Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Tanjungbalai selama lima tahun cenderung menunjukkan penurunan, meskipun pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilaksanakan untuk mengurangi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin sudah relatif efektif, tetapi pada tahun 2024, kondisi capaian indikator ini perlu menjadi perhatian karena mengalami peningkatan, yang artinya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin yang semakin melebar.



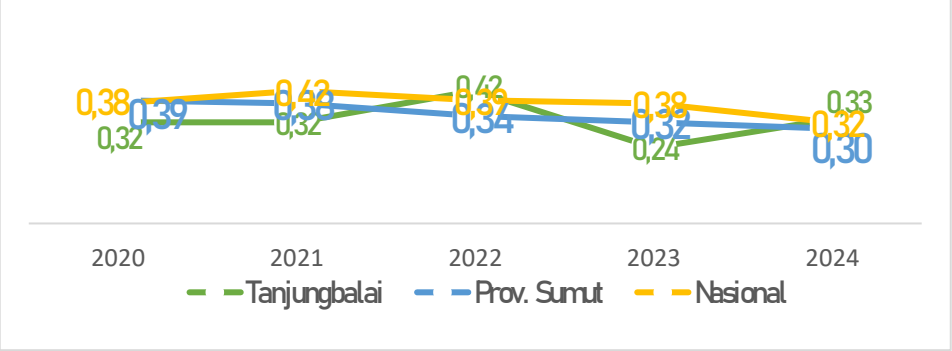
Gambar 3.15 Tingkat Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Tanjungbalai, 2020-2024

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025

d. Analisis Relevansi

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskian Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, tetapi pada tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 indikator P2 mengalami peningkatan dibandingkan capaian Tahun 2020,

tetapi pada Tahun 2022, indikator ini sempat mengalami penurunan, tetapi kembali meningkat signifikan menjadi 0,33 pada tahun 2024. Perkembang capaian P2 Provinsi dan nasional juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2024 capaian provinsi dan nasional terhadap P2 sama-sama mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dalam menurunkan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Tanjungbalai belum relevan dengan kebijakan yang dilakukan oleh provinsi dan nasional.



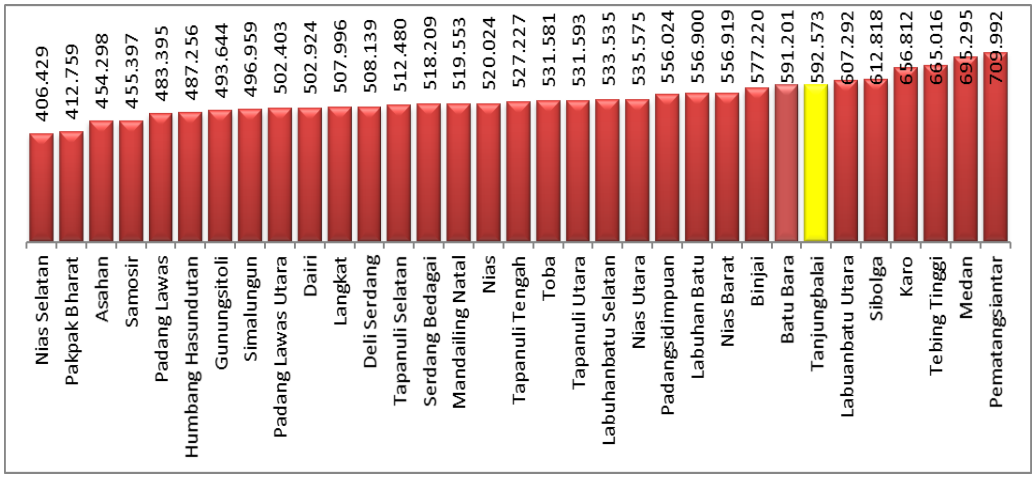
Gambar 3.16 Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Tanjungbalai terhadap Provinsi dan Nasional, 2020-2024

Sumber : BPS Provinsi Sumut, 2024

5. Garis Kemiskinan

a. Analisis Posisi Relatif

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Kota Tanjungbalai pada tahun 2024 sebesar Rp.597.573,-/kapita/bulan. Posisi Kota Tanjungbalai berada pada urutan ketujuh tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Posisi Garis Kemiskinan terendah ditempati oleh Kabupaten Nias Selatan, sedangkan posisi tertinggi ditempati oleh Kota Pematangsiantar.

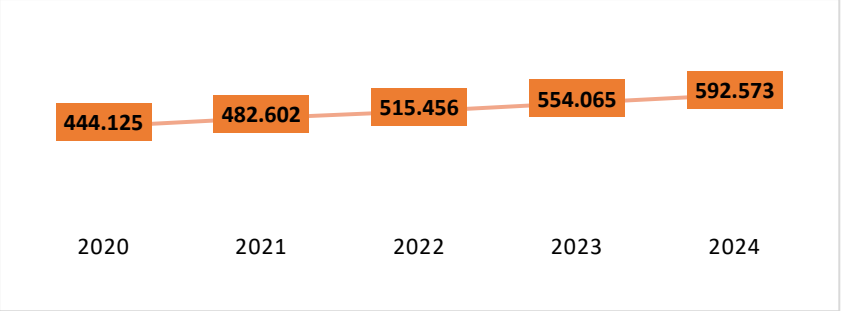


Gambar 3.17 Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kota Tanjungbalai, 2024

Sumber : BPS Prov.Sumut, 2025

b. Analisis Perkembangan Waktu

Perkembangan Garis Kemiskinan selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan karena secara umum Garis Kemiskinan menunjukkan kecendrungan meningkat seiring dengan kenaikan inflasi. Pada tahun 2020 Garis Kemiskinan Kota Tanjungbalai sebesar Rp.444.125,-/kapita/bulan meningkat menjadi Rp.592.573,-/kapita/bulan pada Tahun 2024.



Gambar 3.18 Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Tanjungbalai, 2020-2024
Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025

6. Prioritas Permasalahan Kemiskinan dalam Dimensi Kemiskinan Konsumsi

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan, tingkat keparahan kemiskinan, dan garis kemiskinan Kota Tanjungbalai menunjukkan kondisi yang bervariasi. Kondisi tersebut menggambarkan posisi, perkembangan, efektivitas, dan relevansi program yang menjabarkan analisis karakteristik kemiskinan dalam dimensi kemiskinan konsumsi sebagai berikut.

Tabel 3.3. Masalah Kemiskinan Konsumsi

No	Indikator Utama	Aspek yang Dianalisis			
		Perkembangan	Efektifitas	Posisi Relatif	Relevansi
1	Jumlah Penduduk Miskin	Menurun	Efektif	Posisi kelimabelas terendah	Relevan
2	Persentase Penduduk Miskin	Menurun	Efektif	Posisi keenam tertinggi	Relevan
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Fluktuasi	Efektif	Posisi ketujuh tertinggi	Belum relevan
4	Indeks Keparahan Kemiskinan	Fluktuasi	Efektif	Posisi ketujuh tertinggi	Belum relevan
5	Garis Kemiskinan	Meningkat		Posisi ketujuh tertinggi	

7. Data Mikro Jumlah Penduduk Miskin dan Rentan

Berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terdapat 6.821 keluarga pada Desil 1 dengan jumlah individu sebanyak 25.134 jiwa. Kecamatan Teluk Nibung merupakan wilayah dengan keluarga desil 1 terbanyak yaitu sejumlah 1.916 Keluarga dan 6.895 individu. Kecamatan Tanjungbalai Selatan merupakan wilayah dengan jumlah penduduk desil 1 terkecil yaitu sejumlah 319 KK dan 1.053 individu.

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Miskin Kota Tanjungbalai

	Individu Desil 1	Keluarga Desil 1
Kec. Teluk Nibung	6.895	1.916
Kec. Sei Tualang Raso	5.504	1.436
Kec. Datuk Bandar Timur	4.923	1.298
Kec. Datuk Bandar	4.058	1.102
Kec. Tanjungbalai Utara	2.691	750
Kec. Tanjungbalai Selatan	1.063	319
Total	25.134	6.821

Sumber : DTSEN, 2025

3.2 Kondisi Kemiskinan Non Konsumsi

Kondisi kemiskinan non konsumsi pada Kota Tanjungbalai dapat dinilai dari indikator berikut: indikator ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan dan ketenagakerjaan.

3.2.1. BIDANG PENDIDIKAN

1. Kondisi Makro Pendidikan

Keikutsertaan penduduk Kota Tanjungbalai dalam program pendidikan sesuai dengan usia sekolah menunjukan perkembangan yang menggembirakan. Menurut data BPS Kota Tanjungbalai, pada tahun 2024 Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI) selama lima tahun terakhir relatif tinggi artinya masyarakat sudah sadar akan menyekolahkan anak pada tingkat SD/MI sesuai umur yang ditentukan, sedangkan jenjang pendidikan menengah untuk (SMP/MTs) dan (SMA/MA) masih memerlukan perbaikan. Seperti terlihat pada tabel bahwa APM untuk jenjang SD/MI pada tahun 2024 sebesar 99,02 persen dan APM untuk jenjang SMP/MTs sebesar 89,89 persen, sedangkan APM untuk jenjang SMA/MA sebesar 71,22 persen. Capaian APM Kota Tanjungbalai pada seluruh jenjang pendidikan masih berada di bawah rata-rata provinsi.

Angka putus sekolah paling rendah terdapat pada usia SD dibandingkan tingkat pendidikan lain sebesar 0,98 persen dan berada di atas provinsi sebesar 0,50 persen dan nasional 0,67 persen, sedangkan angka putus sekolah usia SMP sebesar 1,60 persen dan berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Angka putus sekolah tertinggi pada usia SMA sebesar 26,09 persen dan capaian tersebut merupakan tertinggi dibandingkan capaian provinsi sebesar 21,41 persen dan nasional sebesar 21,61 persen.

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kemiskinan Bidang Pendidikan,2023-2024

INDIKATOR	CAPAIAN (%)		CAPAIAN PROVINSI (%)		CAPAIAN NASIONAL (%)	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Harapan Lama Sekolah	13,14	13,15	13,48	13,49	13,15	13,21
Rata-rata Lama Sekolah	9,68	9,69	9,82	9,93	8,77	8.85

INDIKATOR	CAPAIAN (%)		CAPAIAN PROVINSI (%)		CAPAIAN NASIONAL (%)	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	99,71	99,02	97,95	97,68	97,89	98,28
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	89,65	89,89	82,09	82,15	81,35	79,17
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA	63,07	71,22	68,67	69,71	62,53	67,06
Jumlah Putus Sekolah SD/MI	0,29	0,98	0,49	0.50	0,65	0,67
Jumlah Putus Sekolah SMP/MTs	2,95	1,6	3,24	2,65	6,77	6,93
Jumlah Putus Sekolah SMA/SMK/MA	24,95	26,09	20,75	21,41	21,47	21,61

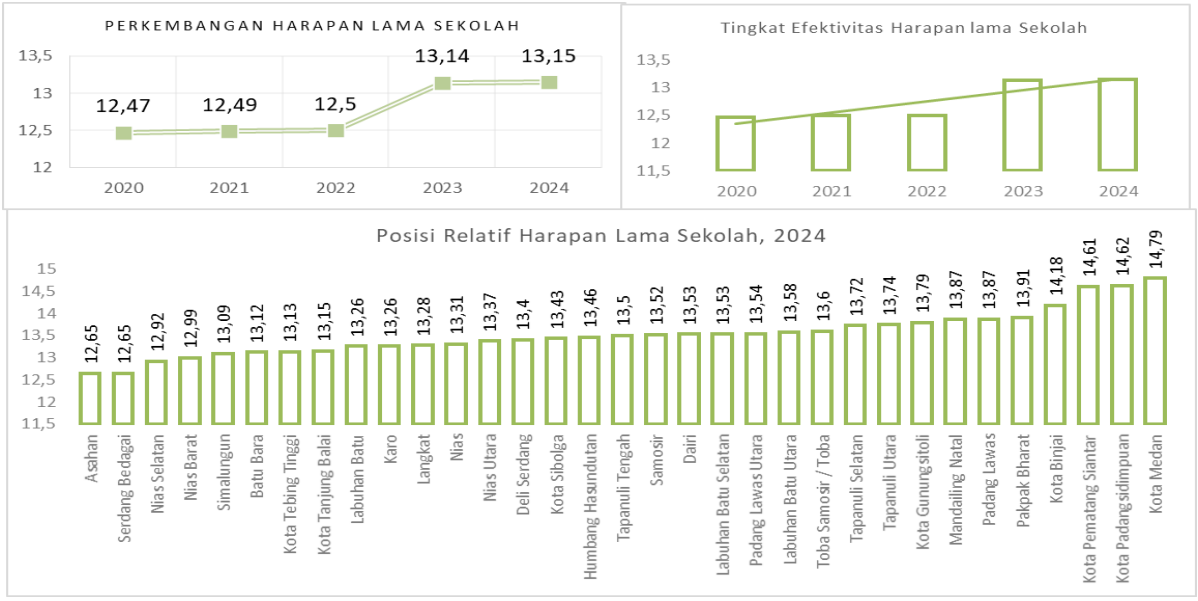
Sumber : BPS, 2025

A. Harapan lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Pada tahun 2020 capaian harapan lama sekolah di Kota Tanjung Balai sebesar 12,50 tahun, secara konsisten terus meningkat menjadi 13,15 tahun pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan harapan lama sekolah sebesar 1,28 persen per tahun. Tren positif dalam Indeks Pendidikan tersebut menandakan adanya komitmen dan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah kota dan pemangku kepentingan pendidikan untuk meningkatkan standar pendidikan dan memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat. Ini adalah indikator penting yang menggambarkan upaya Kota Tanjungbalai dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan merata, yang berpotensi membawa dampak jangka panjang terhadap pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan ekonomi daerah.

Angka Harapan Lama Sekolah Kota Tanjungbalai dari tahun 2020-2024 menunjukkan tren meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa program pendidikan yang dijalankan oleh Pemerintah berjalan efektif di dalam peningkatan harapan lama sekolah. Adapun hal ini berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar di bidang pendidikan mengenai efektivitas kegiatan dan program pengelolaan pendidikan serta program pengembangan kurikulum di jenjang PAUD, SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, dan SMA/MA/Paket C.

Posisi relatif Harapan Lama Sekolah Kota Tanjungbalai berada pada posisi kedelapan terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Posisi tertinggi ditempati Kota Medan, dengan capaian 14,79 persen, sedangkan posisi terendah ditempati oleh Kabupaten Asahan dengan capaian sebesar 12,65 persen.



Gambar 3.19 Analisis Capaian Harapan Lama Sekolah Kota, 2020-2024

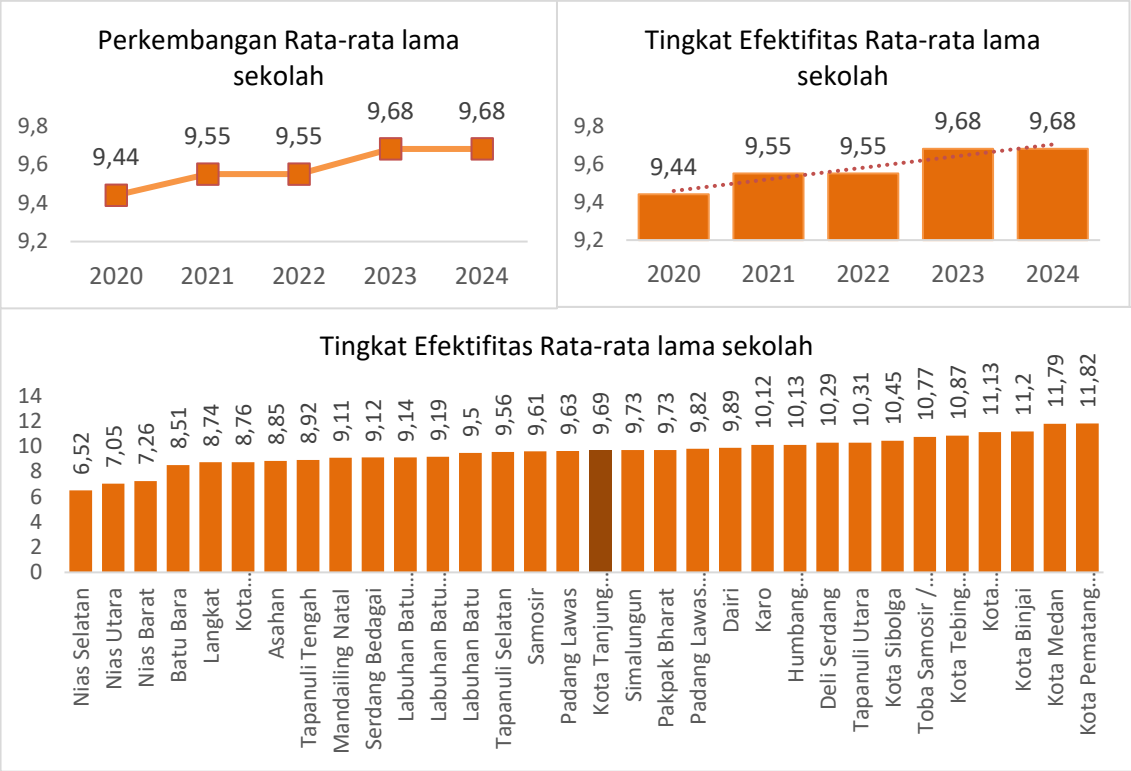
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

B. Rata-Rata lama Sekolah

Perkembangan rata-rata lama sekolah di Kota Tanjung Balai selama lima tahun terakhir secara umum terus meningkat. Sampai dengan tahun 2024, rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Kota Tanjung Balai telah mencapai 9,69 tahun atau setara dengan tamat SLTP, Sementara anak usia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 13,15 tahun atau mencapai Diploma.

Rata-Rata Lama Sekolah Kota Tanjungbalai dari tahun 2020-2024 menunjukkan tren meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa program pendidikan yang dijalankan oleh Pemerintah berjalan efektif di dalam peningkatan rata-rata lama sekolah.

Posisi relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kota Tanjungbalai berada pada posisi keenambelas tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Posisi tertinggi ditempati Kota Pematangsiantar, dengan capaian 11,82 persen, sedangkan posisi terendah ditempati oleh Kabupaten Nias Selatan dengan capaian sebesar 6,52 persen.



Gambar 3.20 Analisis Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kota, 2020-2024

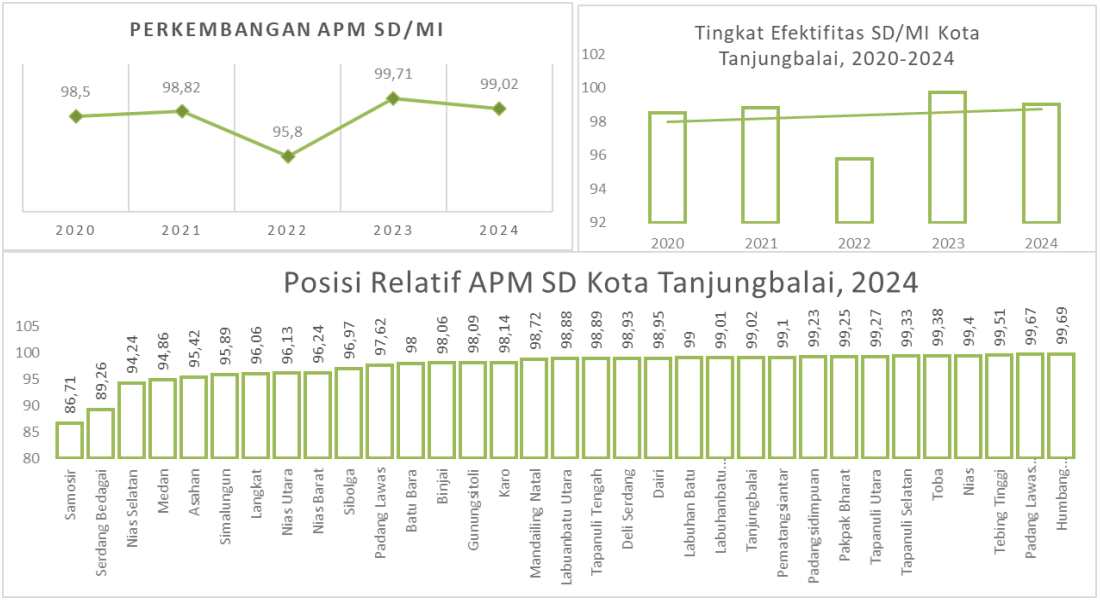
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

C. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

Perkembangan APM SD/MI Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2020 capaian APM SD/MI adalah sebesar 98,50 persen, meningkat menjadi 98,80 persen pada Tahun 2021, hingga menurun secara signifikan menjadi 95,8 persen pada tahun 2022. Setelah sempat mengalami peningkatan pada Tahun 2023, Kembali menurun menjadi 99,02 persen pada Tahun 2024. APM SD/MI sulit untuk mencapai seratus persen disebabkan karena ruang kelas sekolah dasar negeri pada Kecamatan Teluk Nibung masih kurang sehingga masih banyak anak yang sudah berusia 7 tahun belum bisa mendaftar sekolah karena kekurangan ruang kelas. Saat ini pemerintah Kota Tanjungbalai melalui dinas pendidikan masih terus mengupayakan penambahan ruang kelas di daerah tersebut

Tingkat efektifitas APM SD/MI Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2019-2024 mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dan upaya yang ditujukan untuk peningkatan APK SMP/MTs sudah cukup efektif.

Posisi relatif APM SD/MI Kota Tanjungbalai berada pada posisi kesebelas tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Posisi tertinggi ditempati Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan capaian 99,69 persen, sedangkan posisi terendah ditempati oleh Kabupaten Samosir dengan capaian sebesar 86,71 persen.



Gambar 3.21 Analisis Capaian APM SD/MI Kota Tanjungbalai, 2020-2024

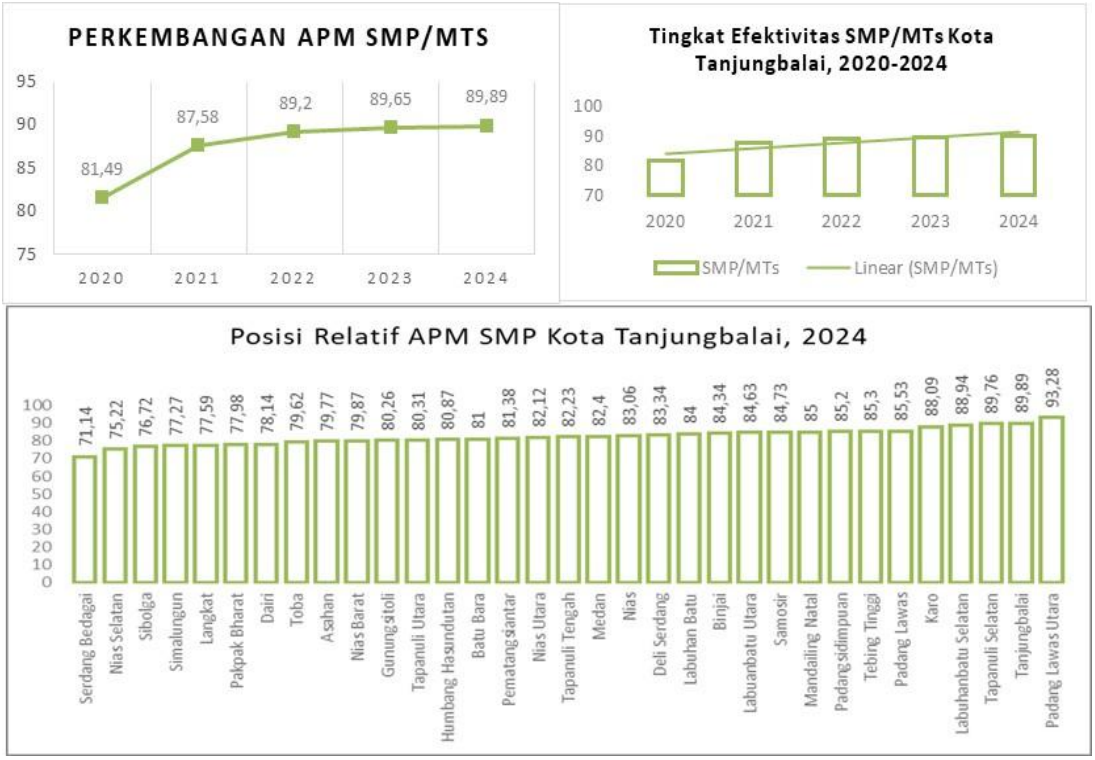
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

D. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Perkembangan APM SMP/MTs selama lima tahun terakhir relatif menunjukkan peningkatan. APM SMP/MTs pada Tahun 2020 sebesar 81,49 persen meningkat menjadi 89,20 persen pada Tahun 2022 hingga meningkat menjadi 89,89 persen pada Tahun 2024.

Tingkat efektifitas APM SMP/MTs Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2020-2024 mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dan upaya yang ditujukan untuk peningkatan APK SMP/MTs sudah cukup efektif.

Capaian APM SMP/MTs Kota Tanjungbalai sudah relatif tinggi yaitu berada pada posisi kedua tertinggi bila dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Posisi tertinggi ditempati Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan capaian 93,28 persen, sedangkan posisi terendah ditempati oleh Kabupaten Serdang Bedagai dengan capaian sebesar 71,14 persen.



Gambar 3.22 Analisis Capaian APM SMP/MTs Kota Tanjungbalai, 2020-2024

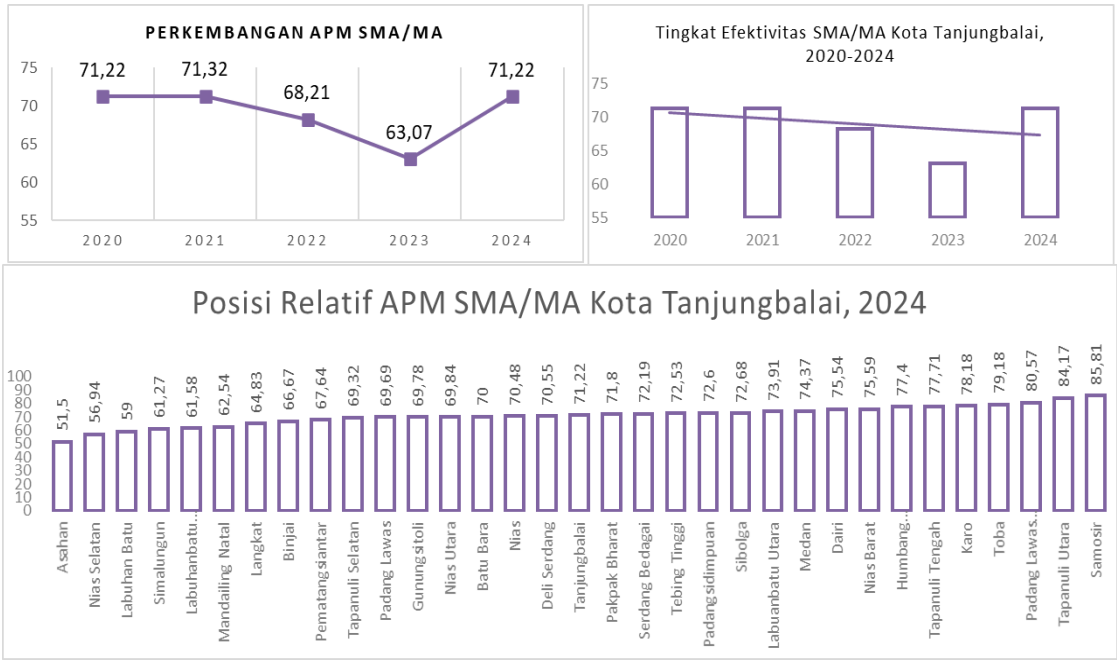
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

E. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA

Perkembangan APM SMA/MA Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir menunjukkan penurunan. Pada Tahun 2020 capaian APM SMA/MA adalah sebesar 71,22 persen menurun menjadi 68,21 persen pada Tahun 2022, kemudian menurun kembali menjadi 63,07 persen pada Tahun 2023, selanjutnya meningkat menjadi 71,22 persen persen pada Tahun 2024.

Tingkat efektifitas APM SMA/MA Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2020-2024 mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dan upaya yang ditujukan untuk peningkatan APM SMA/MA belum cukup efektif.

Posisi relatif APM APM SMA/MA Kota Tanjungbalai berada pada posisi ketujuhbelas terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Posisi tertinggi ditempati Kabupaten Samosir dengan capaian 85,81 persen, sedangkan posisi terendah ditempati oleh Kabupaten Asahan dengan capaian sebesar 51,50 persen.



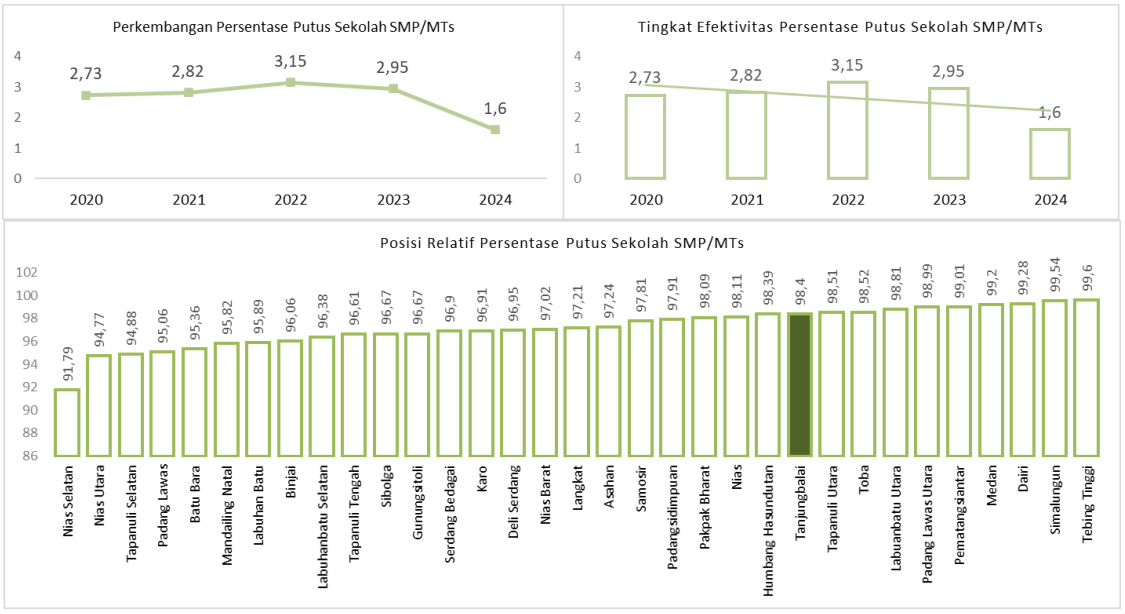
Gambar 3.23 Analisis Capaian APM SMA/MA Kota Tanjungbalai, 2020-2024
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

F. Persentase Putus Sekolah SD/MI

Perkembangan persentase anak putus sekolah jenjang Pendidikan SD/MI Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir cenderung menunjukkan peningkatan. Pada Tahun 2020 capaian inidikator ini sebesar 0,2 persen, kemudian meningkat menjadi 0,98 persen pada tahun 2024.

Tingkat efektifitas persentase putus sekolah SD/MI Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2020-2024 mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dan upaya yang ditujukan untuk peningkatan jumlah putus sekolah SMA/MA belum cukup efektif.

Posisi relatif perkembangan putus sekolah SD/MI Kota Tanjungbalai berada pada posisi kelima terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Posisi tertinggi ditempati Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan capaian 99,97 persen, sedangkan posisi terendah ditempati oleh Kabupaten Mandailing Natal dengan capaian sebesar 98,41 persen.



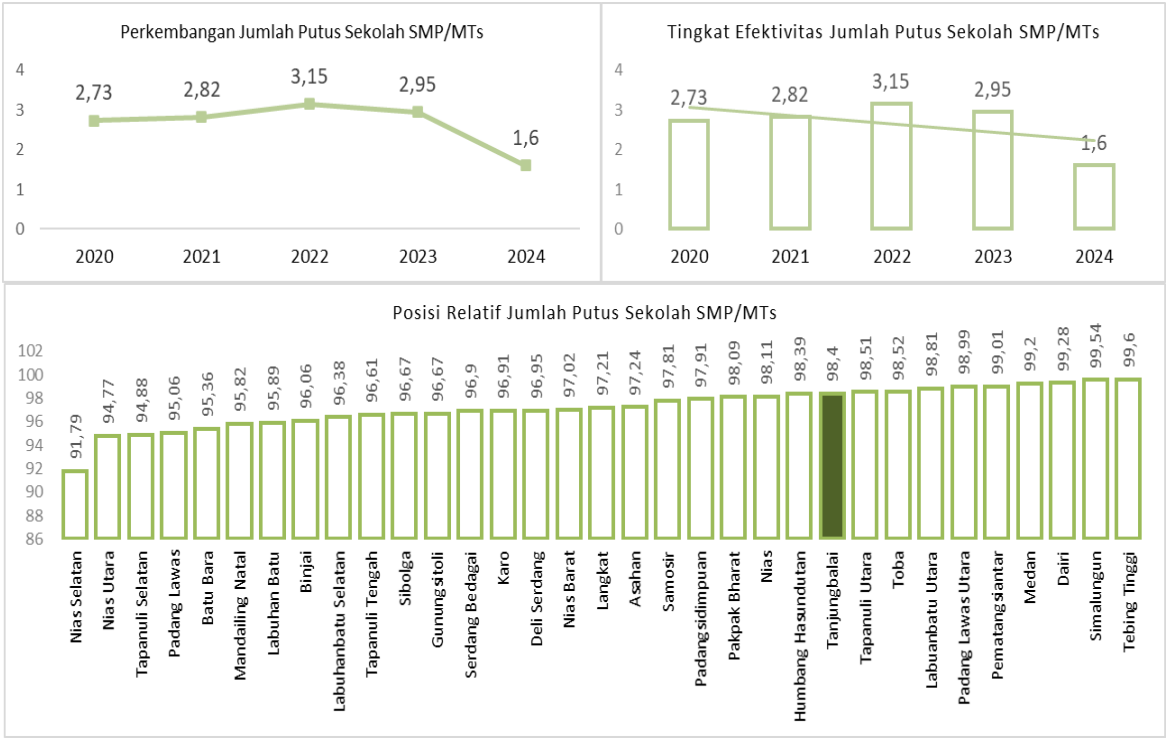
Gambar 3.24 Analisis Persentase Putus Sekolah SD/MI Kota Tanjungbalai, 2020-2024
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

G. Persentase Putus Sekolah SMP/MTs

Perkembangan putus sekolah SMP/MTs selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Persentase putus sekolah SMP/MTs pada Tahun 2020 sebesar 2,73 persen meningkat menjadi 3,15 persen pada Tahun 2022 hingga menurun menjadi 1,60 persen pada Tahun 2024.

Tingkat efektifitas persentase putus sekolah SMP/MTs Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2020-2024 mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dan upaya yang ditujukan untuk peningkatan APK SMP/MTs sudah cukup efektif.

Capaian persentase Putus Sekolah SMP/MTs Kota Tanjungbalai relatif tinggi yaitu berada pada posisi kesepuluh tertinggi bila dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Posisi tertinggi ditempati Kota Tebing Tinggi dengan capaian 99,60 persen, sedangkan posisi terendah ditempati oleh Kabupaten Nias Selatan dengan capaian sebesar 91,79 persen.



Gambar 3.25 Analisis Persentase Putus Sekolah SMP/MTs Kota Tanjungbalai, 2020-2024

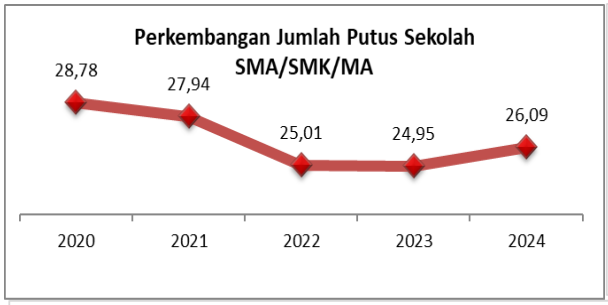
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

H. Persentase Putus Sekolah SMA/SMK/MA

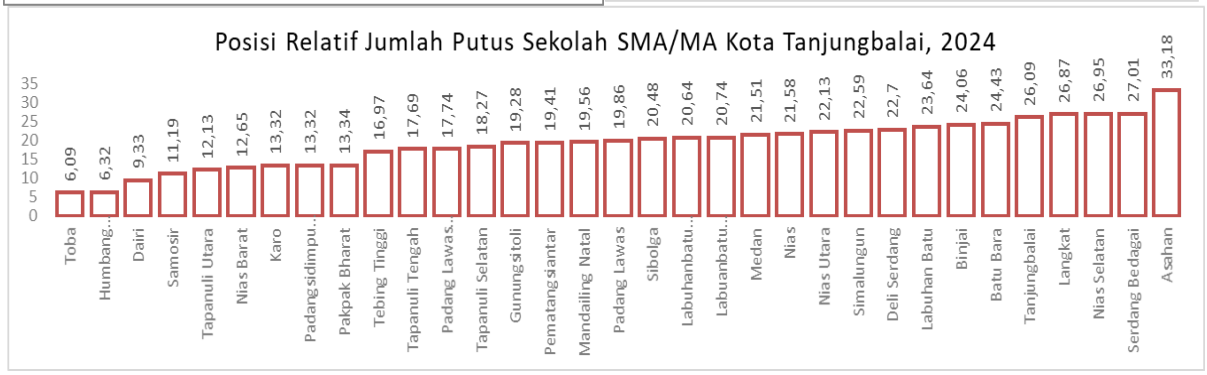
Perkembangan Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA selama rentang waktu lima tahun terakhir yaitu 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2020 capaian indikator ini sebesar 28,78 persen dan menurun menjadi 27,94 persen pada Tahun 2021 hingga pada Tahun 2023 mencapai 24,95 persen selanjutnya mengalami sedikit peningkatan menjadi 26,09 persen pada Tahun 2024. Faktor penyebab tingginya angka putus sekolah di Kota Tanjungbalai, diantaranya disebabkan oleh kemiskinan serta rendahnya tingkat pendidikan orang tua mengakibatkan keterlantaran pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan formal. Selain itu disebabkan oleh anak itu sendiri, karena merasa malas untuk belajar dan lebih memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Bila diperhatikan dari keberhasilan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam menurunkan angka putus sekolah, maka diketahui bahwa capaian indikator ini masih sangat tinggi dan tetapi menunjukkan kecenderungan menurun, sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya dan kebijakan yang dilaksanakan selama lima tahun terakhir sudah cukup efektif.

Capian Usia Putus Sekolah SMA/SMK/MA memang sangat memprihatinkan. Berdasarkan perbandingan indikator ini dengan kabupaten/kota lainnya maka diketahui bahwa Kota Tanjungbalai berada pada posisi kelima tertinggi setelah Kabupaten Asahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Langkat, sedangkan capaian terendah oleh Kabupaten Toba dengan capaian sebesar 6,09 persen.







Gambar 3.26 Analisis Capaian Putus Sekolah SMA/MA Kota Tanjungbalai, 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2. Kondisi Mikro Pendidikan

Berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun 2024 dapat diketahui jumlah siswa yang belum menerima bantuan Pendidikan dasar pada desil 1 berjumlah 4.028 siswa yang tersebar pada seluruh kecamatan. Jumlah siswa terbanyak yang belum menerima bantuan terdapat pada Kecamatan Teluk Nibung, yaitu sebesar 1.041 siswa, sedangkan yang terkecil terdapat pada Kecamatan Tanjungbalai Selatan, yaitu berjumlah 169 siswa. Bantuan yang dimaksud adalah penyaluran bantuan social untuk anak sekolah melalui Program Keluarga Harapan (PKH). PKH menjadi salah satu bentuk bansos pendidikan yang disalurkan setiap tiga bulan sekali, dan pada tahun 2024, program ini kembali dijalankan dengan skema pencairan dalam empat tahap sepanjang tahun.

Tabel 3.6 Jumlah Siswa yang belum Menerima Bantuan Pendidikan Dasar

Kecamatan	
Tanjungbalai Selatan	169
Tanjungbalai Utara	374
Sei Tualang Raso	885
Teluk Nibung	1.041
Datuk Bandar	757
Datuk Bandar Timur	802

Total	**4.028**

Sumber: DTSEN

3. Prioritas Permasalahan Kemiskinan dalam Dimensi Pendidikan

Berdasarkan uraian permasalahan kemiskinan dalam dimensi pendidikan, maka dihasilkan matriks masalah kemiskinan bidang Pendidikan yang memuat indikator Harapan Lama Sekolah, Angka Partisipasi Murni (APM) tiap jenjang Pendidikan dan Persentase putus sekolah pada semua jenjang pendidikan.

Tabel 3.7 Masalah Kemiskinan Dimensi Pendidikan

No	Indikator Utama	Aspek yang Dianalisis			
		Perkembangan	Efektifitas	Posisi Relatif	Relevansi
1	**Harapan Lama Sekolah**	Meningkat	Efektif	Posisi kedelapan terendah	Relevan
2	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**	Fluktuasi	Efektif	Posisi kesebelas tertinggi	Belum relevan
3	**Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs**	Meningkat	Efektif	Posisi kedua tertinggi	Relevan dengan Provinsi
4	**Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA**	Menurun	Belum efektif	Posisi ketujuhbelas terendah	Relevan
5	**Persentase Putus Sekolah SD/MI**	Meningkat	Belum efektif	Posisi kelima terendah	Relevan
6	**Persentase Putus Sekolah SMP/MTs**	Fluktuasi	Efektif	Posisi kesepuluh tertinggi	Relevan dengan Provinsi
7	**Persentase Putus Sekolah SMA/SMK/MA**	Fluktuasi	fektif	Posisi kelima tertinggi	Relevan

3.2.2. BIDANG KESEHATAN

Dari berbagai data kemiskinan yang dihimpun menyebutkan adanya keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas kesehatan masyarakat. Rendahnya kemampuan pendapatan dalam mencukupi/memenuhi kebutuhan pokok menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk menjangkau atau memperoleh standar kesehatan yang ideal/layak baik dalam bentuk gizi maupun pelayanan kesehatan yang memadai.

1. Kondisi Makro Kesehatan

Capaian usia harapan hidup Kota Tanjungbalai tidak jauh berbeda dengan capaian provinsi dan nasional. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Capaian Kota Tanjungbalai terhadap penduduk dengan keluhan kesehatan sebesar 46,97 persen, capaian ini lebih baik dari Provinsi yang mencapai 40,39 persen dan capaian nasional sebesar 27,34 persen.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Tanjungbalai berhasil menurunkan prevalensi angka stunting menjadi 5,60 persen dari sebelumnya sebesar 5,70 persen. Hal ini tidak terlepas dari kolaborasi dan sinergitas antara Pemerintah Kota, Forkopimda dan OPD terkait yang telah bersama-sama saling bekerja, serta dukungan program kegiatan yang telah dilaksanakan untuk percepatan penurunan stunting. Untuk mengejar target penurunan stunting di Kota Tanjungbalai dikisaran 5,70-5,50 maka Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Tanjungbalai bersama Forkopimda melaksanakan kegiatan intervensi percepatan penurunan stunting di Kota Tanjungbalai baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif.

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kemiskinan Bidang Kesehatan, 2023-2024

INDIKATOR	CAPAIAN		CAPAIAN PROVINSI		CAPAIAN NASIONAL	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Perkembangan Usia Harapan Hidup (tahun)	74,01	74,18	73,67	73,9	72,13	74,15
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan	20,41	46,97	23,75	40,39	29,94	27,34
Pravalensi Stunting (%)	5,7	5,6	18,9	5,8	21,5	19,8

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

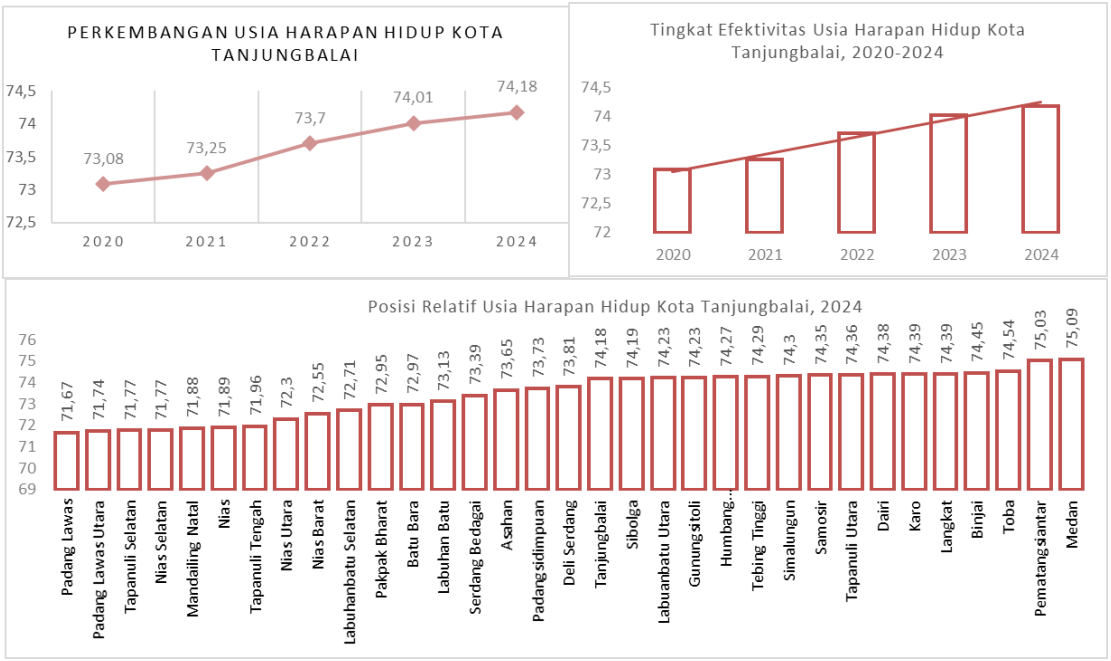
2. Usia Harapan Hidup

Perhitungan Usia Harapan Hidup oleh BPS mengalami perubahan sejak Tahun 2020 yaitu menggunakan metode hasil longform. Perkembangan usia harapan hidup penduduk kota tanjungbalai mengalami tren kenaikan setiap tahunnya, meskipun tidak terlalu signifikan. Jika pada tahun 2020 usia harapan hidup Kota Tanjungbalai sebesar 73,08 tahun, selanjutnya pada periode 2024 usia harapan hidup Kota Tanjungbalai meningkat menjadi 74,18 tahun. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan yang terjadi selama lima tahun terakhir hanya sebesar 1,5 persen.

Dilihat dari tren indikator Usia Harapan Hidup Kota Tanjungbalai dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang terus dilakukan untuk perbaikan indikator ini sudah relevan, tetapi karena peningkatannya tidak cukup signifikan maka masih memerlukan upaya yang lebih serius.

Posisi relatif Usia Harapan Hidup Kota Tanjungbalai berada pada posisi keenambelas tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Utara.

Posisi tertinggi ditempati oleh Kota Medan sebesar 75,09 tahun dan Kabupaten Padang Lawas sebesar 71,67 tahun,



Gambar 3.27 Analisis Capaian Usia Harapan Hidup Kota Tanjungbalai, 2020-2024

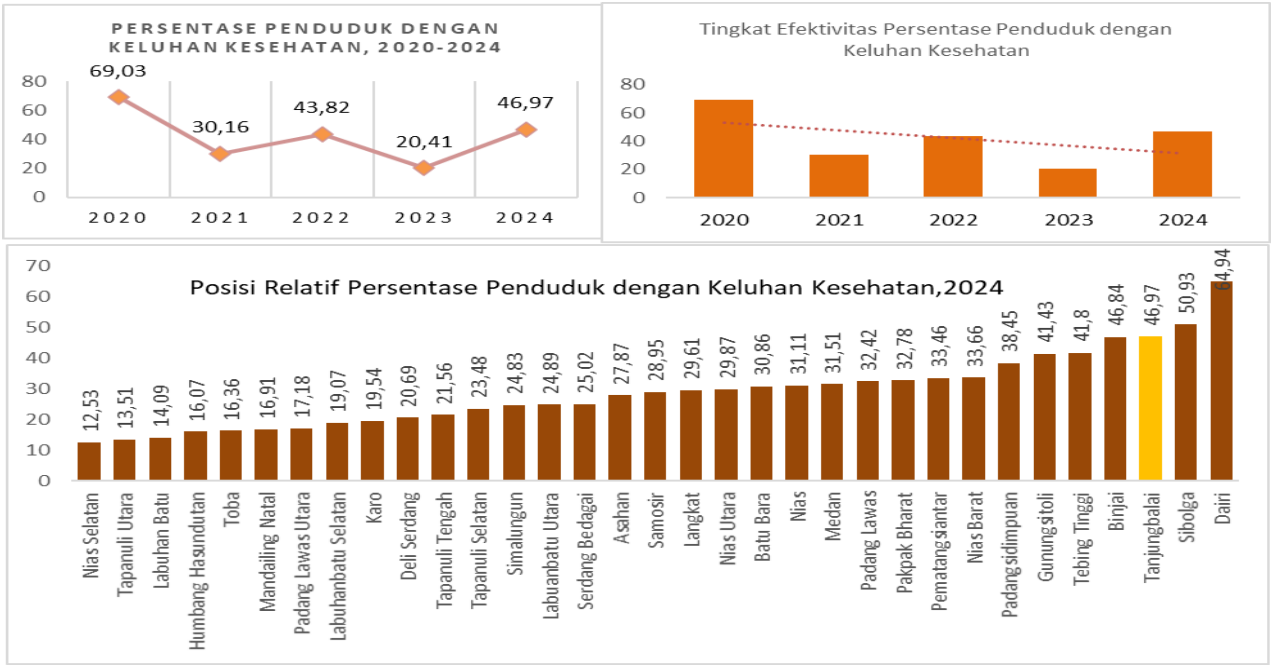
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2. Persentase Penduduk dengan Keluhan Kesehatan

Perkembangan persentase penduduk dengan keluhan kesehatan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Jika pada tahun 2020 indikator ini mencapai 69,03 persen, menurun menjadi 30,16 persen pada tahun 2021 selanjutnya pada periode 2024 indikator ini mencapai 46,97 persen. Dapat disimpulkan bahwa penurunan yang terjadi selama lima tahun terakhir sebesar 22,06 persen.

Dilihat dari tren persentase penduduk dengan keluhan kesehatan Kota Tanjungbalai dapat diketahui bahwa cenderung terjadi penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang terus dilakukan untuk perbaikan indikator ini sudah efektif, tetapi karena penurunannya tidak cukup signifikan maka masih memerlukan upaya yang lebih serius.

Posisi relatif persentase penduduk dengan keluhan kesehatan Kota berada pada posisi ketiga tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain. Posisi tertinggi ditempati oleh Kabupaten Dairi sebesar 64,94 persen, sedangkan posisi terendah adalah Kabupaten Nias Selatan sebesar 12,53 persen.



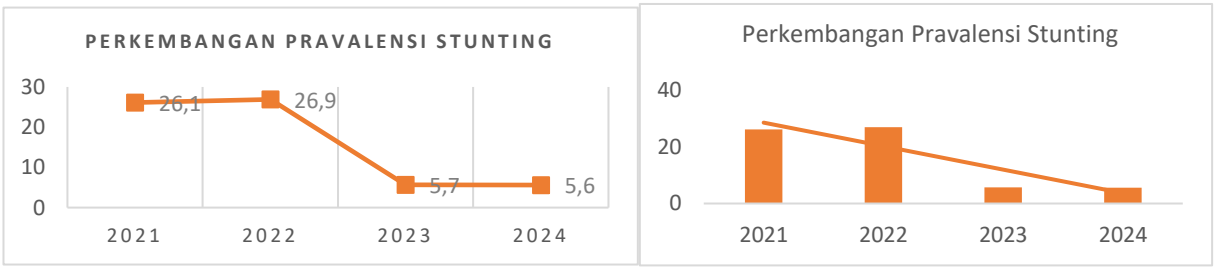
Gambar 3.28 Analisis Capaian Persentase Penduduk dengan Keluhan Kesehatan Kota Tanjungbalai, 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

3. Pravalensi Stunting

Stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang berdampak jangka Panjang terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga di bawah 14 persen pada tahun 2024 melalui berbagai strategi lintas sektor. Kota Tanjungbalai menjadi salah satu daerah yang berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan dan meraih penghargaan Kategori Penurunan Stunting. Angka prevalensi stunting di Kota Tanjungbalai menurun secara signifikan dari 26,1 persen pada tahun 2021 menjadi 5,6 persen pada tahun 2024.

Dilihat dari tren pencapaian pravalensi stunting Kota Tanjungbalai dapat diketahui bahwa cenderung terjadi penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang terus dilakukan untuk perbaikan indikator ini sudah sangat efektif.



Gambar 3.29 Analisis Pravalensi Stunting Kota Tanjungbalai, 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

4. Kondisi Mikro Kesehatan

Berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional, terdapat 1.885 orang lansia pada desil 1 yang tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah lansia terbanyak terdapat pada Kecamatan Teluk NIbung yaitu sejumlah 545 orang. Pemerintah perlu memperhatikan lansia dalam berbagai aspek, terutama kesehatan, perlindungan sosial, dan fasilitas yang ramah lansia. Ini termasuk menyediakan akses ke layanan kesehatan yang komprehensif, program bantuan sosial, dan infrastruktur yang memudahkan mobilitas serta interaksi sosial mereka. Upaya kesehatan lanjut usia dilakukan sejak seseorang berusia 60 (enam puluh) tahun meliputi fasilitasi lanjut usia untuk menjaga kebersihan diri, mengonsumsi gizi seimbang, melakukan aktivitas fisik secara rutin, memiliki kehidupan sosial, memiliki kesempatan berkarya, serta memiliki lingkungan yang ramah lanjut usia.

Pemerintah perlu memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk aksesibilitas fisik di ruang publik, pendidikan inklusif, layanan kesehatan, dan jaminan sosial. Selain itu, pemerintah harus memastikan tidak ada diskriminasi, serta memberikan kesempatan yang sama dalam pekerjaan, kewirausahaan, dan kegiatan lainnya, dengan dukungan seperti akomodasi yang layak dan informasi yang mudah diakses.

Tahun 2024 terdapat 89 orang disabilitas pada desil 1 yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Kewajiban negara untuk memenuhi hak penyandang disabilitas termasuk langkah-langkah konkret seperti penyediaan aksesibilitas, layanan kesehatan mental, pendidikan inklusif, dan perlindungan dari diskriminasi.

Tabel 3.9 Kondisi Mikro Kesehatan pada Penduduk Miskin

Kecamatan	Lansia	Disabilitas
Tanjungbalai Selatan	85	0
Tanjungbalai Utara	218	12
Sei Tualang Raso	381	21
Teluk Nibung	545	24
Datuk Bandar	311	12
Datuk Bandar Timur	345	20
Total	1.885	89

Sumber: DTSEN

5. Prioritas Permasalahan Kemiskinan dalam Dimensi Pendidikan

Berdasarkan uraian permasalahan kemiskinan dalam dimensi kesehatan, maka dihasilkan matriks masalah kemiskinan bidang kesehatan yang memuat indikator Harapan Lama Sekolah, Angka Partisipasi Murni (APM) tiap jenjang Pendidikan dan Persentase putus sekolah pada semua jenjang pendidikan.

Tabel 3.10 Masalah Kemiskinan Dimensi Pendidikan

No	Indikator Utama	Aspek yang Dianalisis			
		Perkembangan	Efektifitas	Posisi Relatif	Relevansi
1	**Umur Harapan Hidup**	Meningkat	Efektif	Posisi keenambelas tertinggi	Relevan
2	**Persentase Penduduk dengan Keluhan Kesehatan**	Fluktuasi	Efektif	Posisi ketiga tertinggi	Belum relevan dengan nasional
3	**Pravalensi Stunting**	Menurun	Efektif		Relevan

3.2.3 BIDANG KETENAGAKERJAAN

1. Kondisi Makro Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun keatas. TPAK berguna untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Pada tahun 2024 capaian TPAK Kota Tanjungbalai sebesar 69,57 persen, lebih rendah dari capaian provinsi sebesar 71,36 persen dan capaian nasional sebesar 70,63 persen. Capaian TPAK sebesar 70,77 persen artinya bahwa dari 100 orang tenaga kerja pada Kota Tanjungbalai terdapat 71 orang angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja, menganggur dan sedang mencari kerja.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan banyaknya jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan. Pada Tahun 2024 capaian TPT Kota Tanjungbalai sebesar 4,08 persen, capaian tersebut lebih rendah dari capaian provinsi sebesar 5,60 persen dan dari capaian nasional sebesar 4,91 persen.

Tabel 3.11 Capaian Indikator Kemiskinan Bidang Ketenagakerjaan, 2024

INDIKATOR	CAPAIAN		CAPAIAN PROVINSI		CAPAIAN NASIONAL	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT))	4,47	4,08	5,89	5,60	5,32	4,91
Tingkat Kesempatan kerja	95.53	95,92	94,11	94,68	94,68	95,15
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,79	69,57	71,06	71,36	70,59	70,63

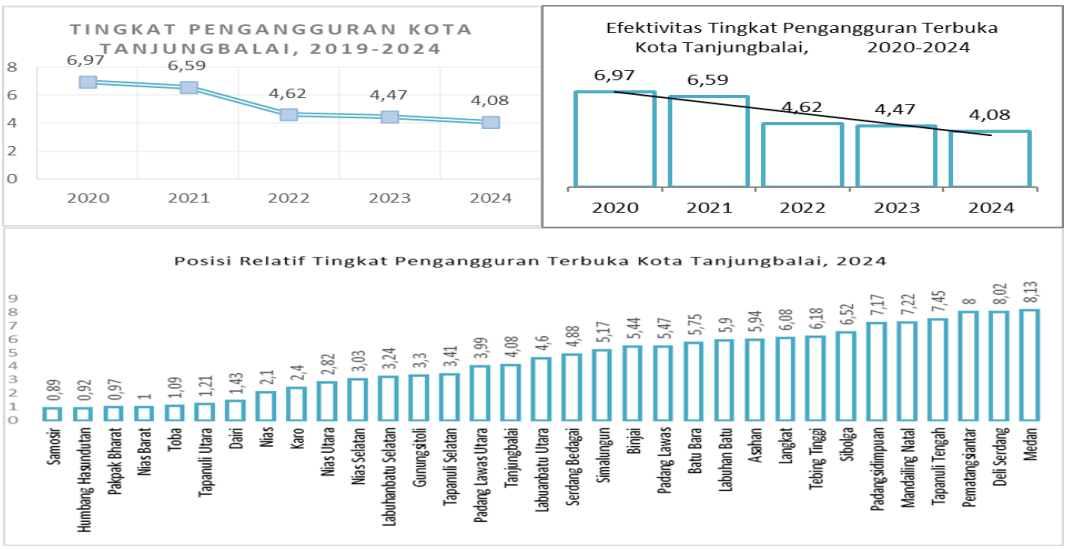
Capaian TPAK Kota Tanjungbalai lebih tinggi dari nasional tetapi kondisi tersebut tidak menjadi permasalahan utama bagi Kota Tanjungbalai mengingat TPAK berguna hanya untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK Kota Tanjungbalai yang tinggi hanya menunjukkan bahwa pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian cukup tinggi.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa capaian tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Tanjungbalai pada Tahun 2020 sebesar 6,97 persen menurun menjadi 4,62 persen pada tahun 2022 hingga menurun menjadi 4,08 persen pada tahun 2024.

Bila dilihat tingkat efektivitas pada TPT maka terlihat bahwa terjadi tren penurunan selama Tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diupayakan untuk menurunkan tingkat pengangguran sudah cukup efektif.

Tingkat pengangguran Kota Tanjungbalai sudah relatif membaik, hal tersebut terlihat dari posisi relatif TPT kota Tanjungbalai yang berada pada posisi keenambelas terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Utara. Posisi TPT terendah adalah Kabupaten Samosir dengan capaian 0,89 persen, sedangkan posisi tertinggi adalah Kota Medan dengan capaian 8,13 persen.



Gambar 3.30 Analisis Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tanjungbalai, 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

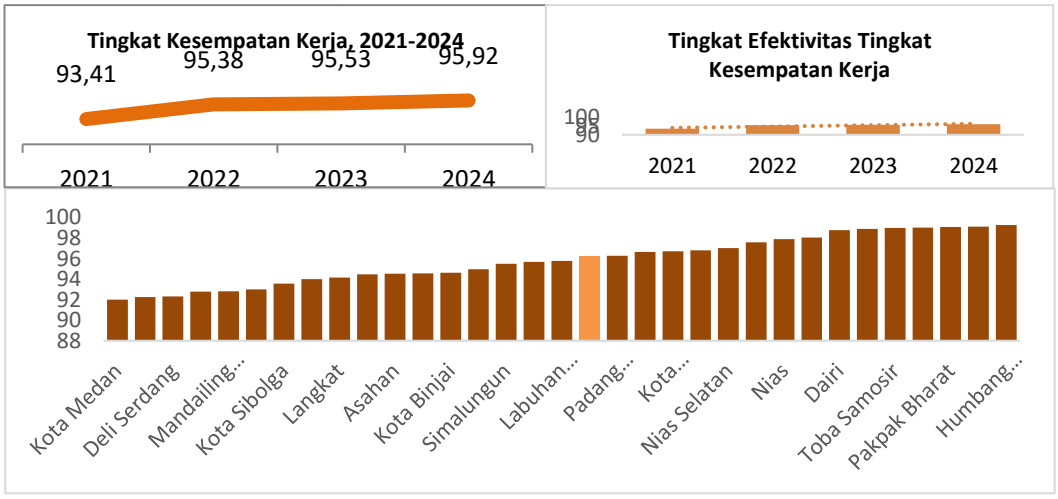
3. Tingkat Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja merupakan perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Selama lima tahun terakhir tingkat kesempatan kerja Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 mencapai angka sebesar 93,41 persen meningkat menjadi 95,92 persen pada tahun 2024. Tren ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kesempatan kerja di Kota Tanjungbalai.

Bila dilihat tingkat efektivitas pada tingkat kesempatan kerja maka terlihat bahwa terjadi tren peningkatan selama Tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diupayakan untuk menurunkan tingkat pengangguran sudah cukup efektif.

Tingkat kesempatan Kota Tanjungbalai masih memerlukan upaya peningkatan, hal tersebut terlihat dari posisi Kota Tanjungbalai yang berada pada posisi kedelapanbelas terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Utara. Posisi Tingkat

kesempatan kerja tertinggi adalah Kabupaten Humbanghasundutan, sedangkan posisi terendah adalah Kota Medan.



Gambar 3.31 Analisis Tingkat Kesempatan Kerja Kota Tanjungbalai, 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

4. Prioritas Permasalahan Kemiskinan dalam Dimensi Pendidikan

Berdasarkan uraian permasalahan kemiskinan dalam dimensi ketenagakerjaan, maka dihasilkan matriks masalah kemiskinan bidang ketenagakerjaan yang memuat indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kesempatan Kerja.

Tabel 3.12 Masalah Kemiskinan Dimensi Pendidikan

No	Indikator Utama	Aspek yang Dianalisis			
		Perkembangan	Efektifitas	Posisi Relatif	Relevansi
1	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	Menurun	Efektif	Posisi keenambelas terendah	Relevan
2	**Tingkat Kesempatan Kerja**	Meningkat	Efektif	Posisi kedelapanbelas terendah	Belum

2. Kondisi Mikro Ketenagakerjaan

Berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional diketahui bahwa terdapat sejumlah 3.631 usia produktif tidak bekerja, dengan jumlah individu terbanyak terdapat pada Kecamatan Teluk Nibung sejumlah 1,037 orang. Tingginya jumlah kelompok ini dapat menjadi beban ekonomi jika lapangan kerja formal tidak mencukupi, sehingga membutuhkan intervensi dari pemerintah dan dunia usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat terserap di pasar kerja.

Tabel 3.13 Usia Produktif tidak Bekerja

Kecamatan	
Tanjungbalai Selatan	138
Tanjungbalai Utara	431
Sei Tualang Raso	855
Teluk Nibung	1.037
Datuk Bandar	468
Datuk Bandar Timur	702
Total	3.631

Sumber : DTSEN

3.2.4 BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR

1. Kondisi Makro Infrastruktur Dasar

Persentase RT kumuh Kota Tanjungbalai pada Tahun 2024 mencapai 4,62 persen, lebih tinggi dari capaian provinsi sebesar 4,53 persen, tetapi lebih rendah dari capaian nasional sebesar 8,93 persen. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan persentase rumah tangga kumuh adalah dengan meningkatkan kemudahan akses infrastruktur permukiman, seperti pelayanan air minum dan sanitasi layak.

Dikatakan sanitasi layak apabila RT memiliki fasilitas buang air besar sendiri, jenis kloset leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik dan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Proporsi RT dengan sanitasi layak di Kota Tanjungbalai pada Tahun 2024 sudah mencapai sebesar 96,82 persen, lebih tinggi dari capaian Provinsi sebesar 85,73 persen dan nasional sebesar 83,60 persen.

Kelayakan air minum yang dikonsumsi rumah tangga perlu mendapat perhatian serius karena berhubungan langsung dengan tingkat kesehatan anggota rumah tangga. Proporsi RT dengan air minum layak di Kota Tanjungbalai pada Tahun 2024 sudah mencapai 91,27 persen, capaian ini lebih rendah dari capaian provinsi sebesar 92,94 persen dan capaian nasional sebesar 92,64 persen.

Rumah tangga yang sudah menikmati fasilitas penerangan listrik sudah cukup baik karena mencapai 100 persen. Proporsi RT yang menikmati fasilitas listrik dari PLN di Kota Tanjungbalai sudah lebih tinggi dari capaian provinsi sebesar 99,23 persen dan capaian nasional sebesar 96,95 persen.

Rumah layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang layak huni karena memenuhi persyaratan untuk hunian yang baik, keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan memenuhi unsur kesehatan bagi penghuninya. Pada tahun 2024 persentase RT yang memiliki rumah layak huni masih mencapai 69,34 persen, lebih rendah dari capaian provinsi sebesar 67,44 persen tetapi lebih tinggi dari capaian nasional sebesar 65,25 persen.

Tabel 3.14 Capaian Indikator Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar, 2024

Indikator	Capaian (%)		Capaian Provinsi (%)		Capaian Nasional (%)	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Persentase RT kumuh	5,85	4,62	5,75	4,53	10,74	8,93
Proporsi RT dengan sanitasi layak	94,37	96,82	84,14	85,73	82,36	83,60
Proporsi RT dengan air minum layak	100	91,27	92,19	92,94	91,72	92,64
Proporsi RT terhadap akses listrik	99,99	100	98,90	99,23	99,37	99,48
Proporsi RT terhadap hunian yang layak	74,47	69,34	76,89	73,47	63,15	65,25

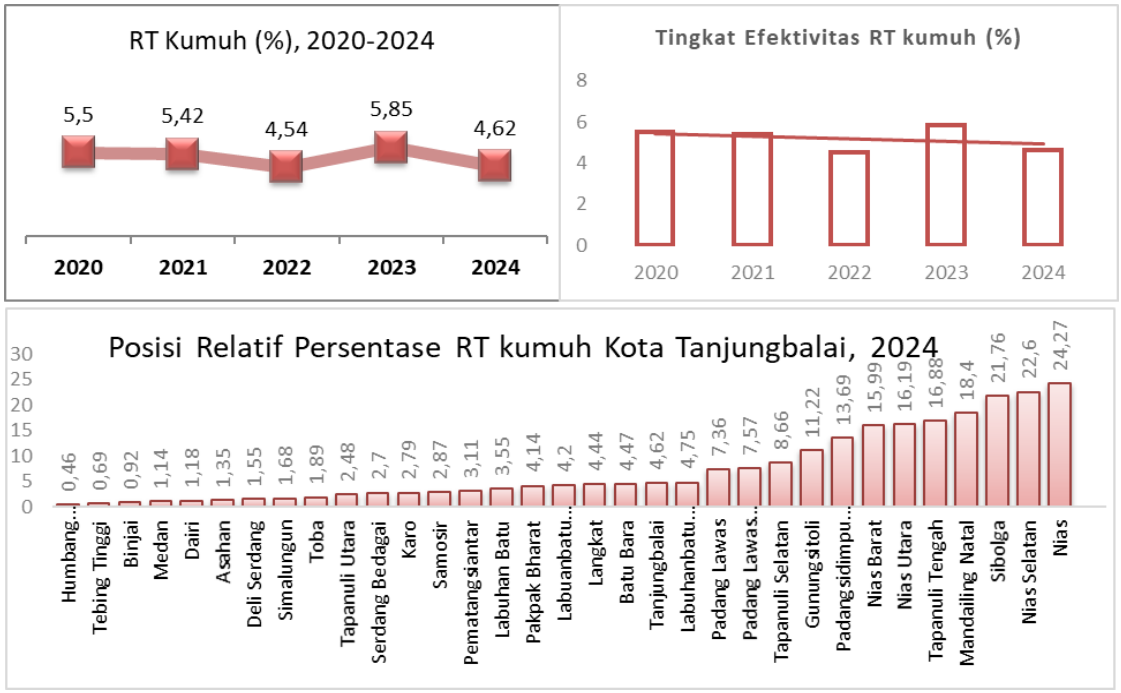
2. Persentase Rumah Tangga Kumuh

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa yang menjadi permasalahan utama Pemerintah Kota Tanjungbalai terhadap penyediaan infrastruktur dasar adalah persentase rumah tangga kumuh. rumah tangga kumuh merupakan sekelompok individu yang hidup di bawah atap yang sama pada daerah perkotaan yang kurang memenuhi satu atau lima kondisi antara lain: ketahanan rumah, kecukupan tempat tinggal, akses air bersih, akses sanitasi yang memadai, dan kepemilikkan yang aman yang masih berada di bawah capaian provinsi, selanjutnya ada proporsi RT terhadap hunian yang layak yang capaiannya masih berada di bawah provinsi.

Proporsi rumah tangga dengan persentase rumah tangga kumuh di Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir denderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2020 indikator ini mencapai 5,5 persen kemudian mengalami sedikit peningkatan menjadi 5,85 persen pada Tahun 2023 tetapi tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 4,62 persen.

Perkembangan capaian persentase rumah tangga kumuh Kota Tanjungbalai mengalami fluktuasi dengan tren yang menunjukkan kecendrungan terjadinya penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menurunkan indikator ini sudah cukup efektif.

Bila diperhatikan posisi relatif persentase rumah tangga kumuh maka Kota Tanjungbalai berada pada posisi keempatbelas tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Posisi tertinggi terhadap capaian persentase rumah tangga kumuh yaitu Kota Nias dengan capaian 24,27 persen, sedangkan terendah dicapai oleh Kabupaten Humbang Hasundutan dengan capaian 0,46 persen.



Gambar 3.32 Analisis Persentase Rumah Tangga Kumuh, 2020-2024

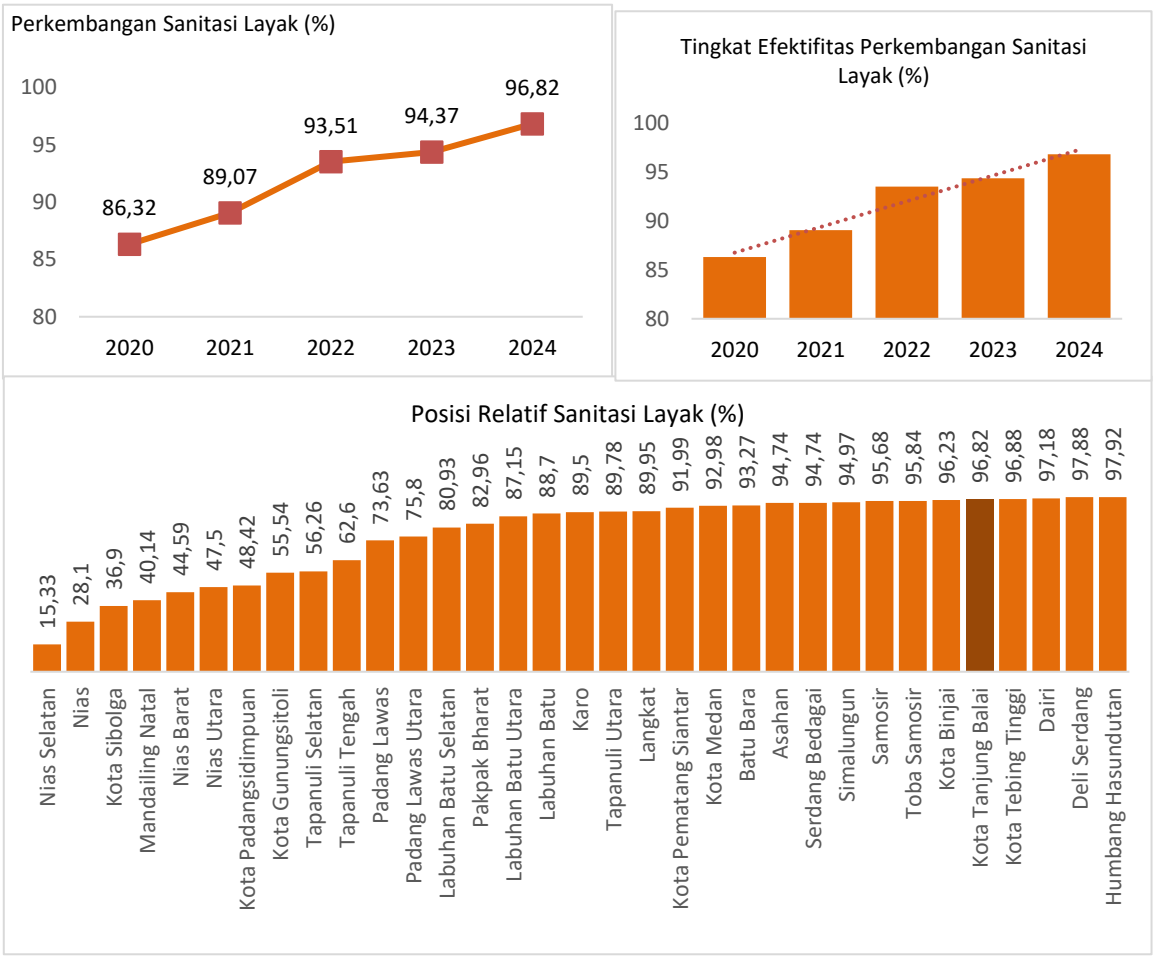
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

3. Sanitasi Layak

Perkembangan sanitasi layak di Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020 indikator ini mencapai 86,32 persen kemudian sedikit mengalami peningkatan setiap tahunnya menjadi 96,82 persen pada Tahun 2024.

Perkembangan capaian sanitasi Kota Tanjungbalai mengalami tren meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan indikator ini sudah cukup efektif.

Bila diperhatikan posisi relatif sanitasi layak maka Kota Tanjungbalai berada pada posisi kelima tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Posisi tertinggi terhadap capaian persentase sanitasi layak yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan dengan capaian 97,92 persen, sedangkan terendah dicapai oleh Kabupaten Nias Selatan dengan capaian 15,33 persen.



Gambar 3.33 Analisis Sanitasi Layak, 2020-2024

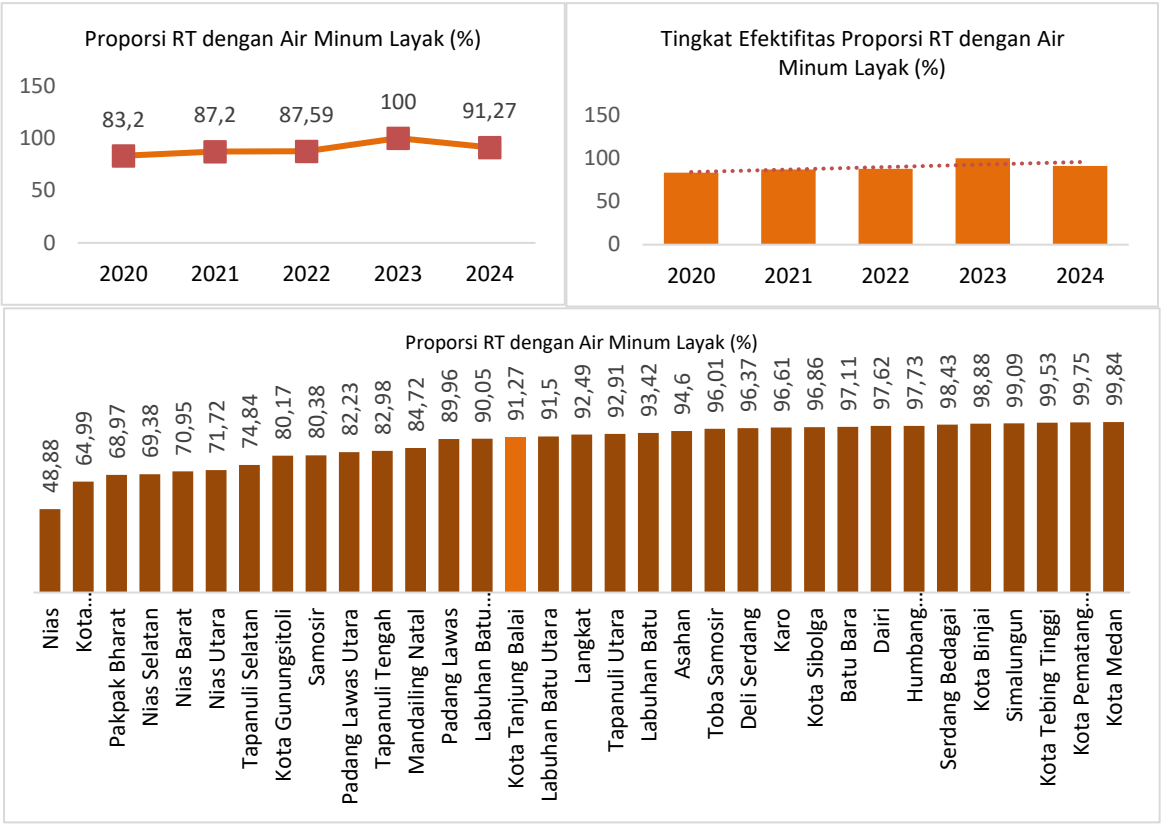
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

4. Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak

Perkembangan proporsi rumah tangga dengan air minum layak di Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020 indikator ini mencapai 83,20 persen kemudian sempat mengalami peningkatan hingga 100 persen pada tahun 2023, tetapi mengalami penurunan menjadi 91,27 persen pada Tahun 2024.

Perkembangan capaian proporsi RT dengan air minum layak mengalami tren meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan indikator ini sudah cukup efektif.

Bila diperhatikan posisi relatif capaian proporsi RT dengan air minum layak maka Kota Tanjungbalai berada pada posisi kelimabelas terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Posisi tertinggi terhadap capaian indikator ini adalah Kota Medan sebesar 99,84 persen, sedangkan posisi terendah dicapai oleh Kabupaten Nias dengan capaian 48,88 persen.



Gambar 3.34 Analisis Proporsi RT dengan Air Minum Layak, 2020-2024

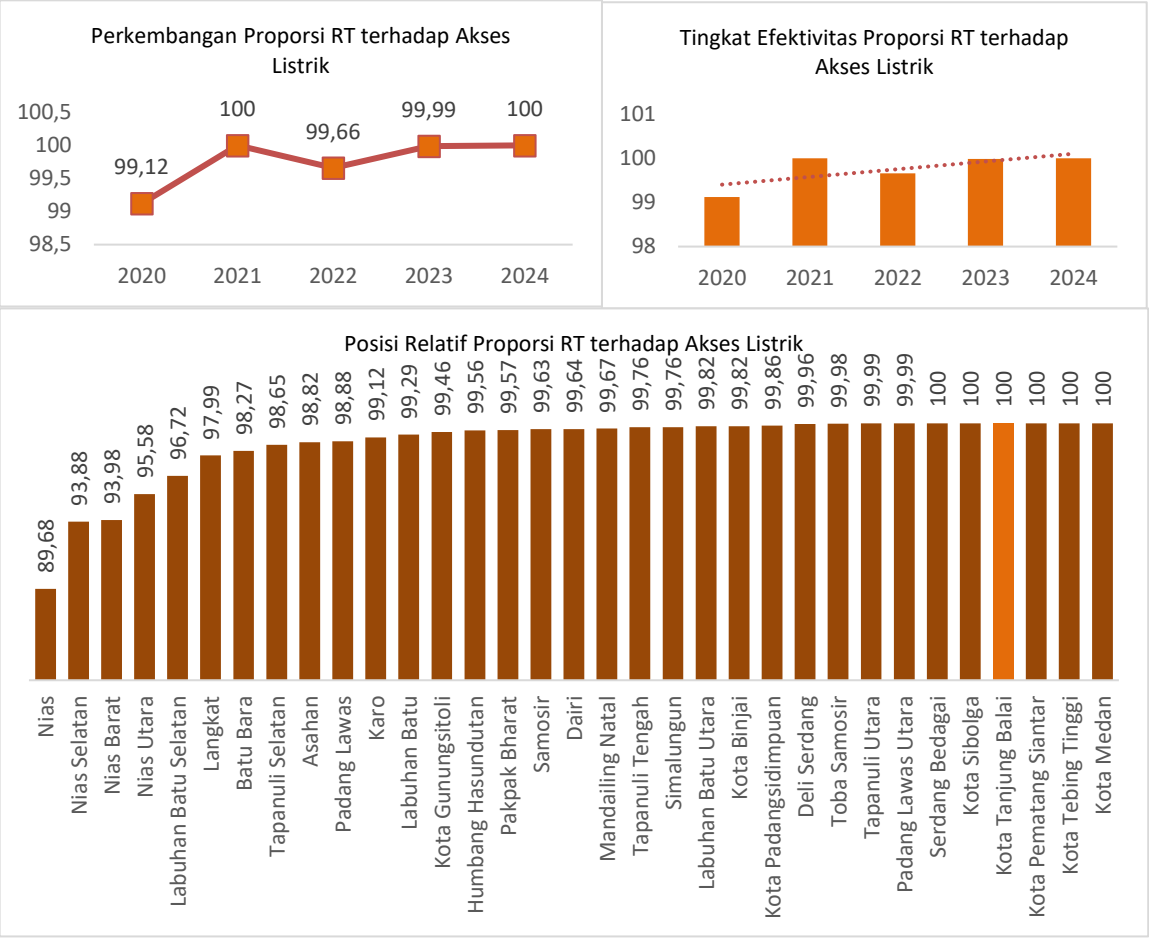
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

5. Proporsi Rumah Tangga terhadap Akses Listrik

Perkembangan indikator proporsi rumah tangga terhadap akses listrik di Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020 capaian indikator ini sebesar 99,12 persen kemudian sedikit mengalami peningkatan setiap tahunnya menjadi 100 persen pada Tahun 2024.

Perkembangan capaian indikator proporsi rumah tangga terhadap akses listrik Kota Tanjungbalai mengalami tren meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan indikator ini sudah cukup efektif.

Bila diperhatikan posisi relatif indikator proporsi rumah tangga terhadap akses listrik maka Kota Tanjungbalai berada pada posisi tertinggi Bersama 3 (tiga) kabupaten/kota lainnya antara lain: Kota Pematangsiantar, Kota Tebing Tinggi dan Kota Medan dengan capaian 100 persen, sedangkan terendah dicapai oleh Kabupaten Nias dengan capaian 89.68 persen.



Gambar 3.35 Analisis Proporsi RT terhadap Akses Listrik, 2020-2024

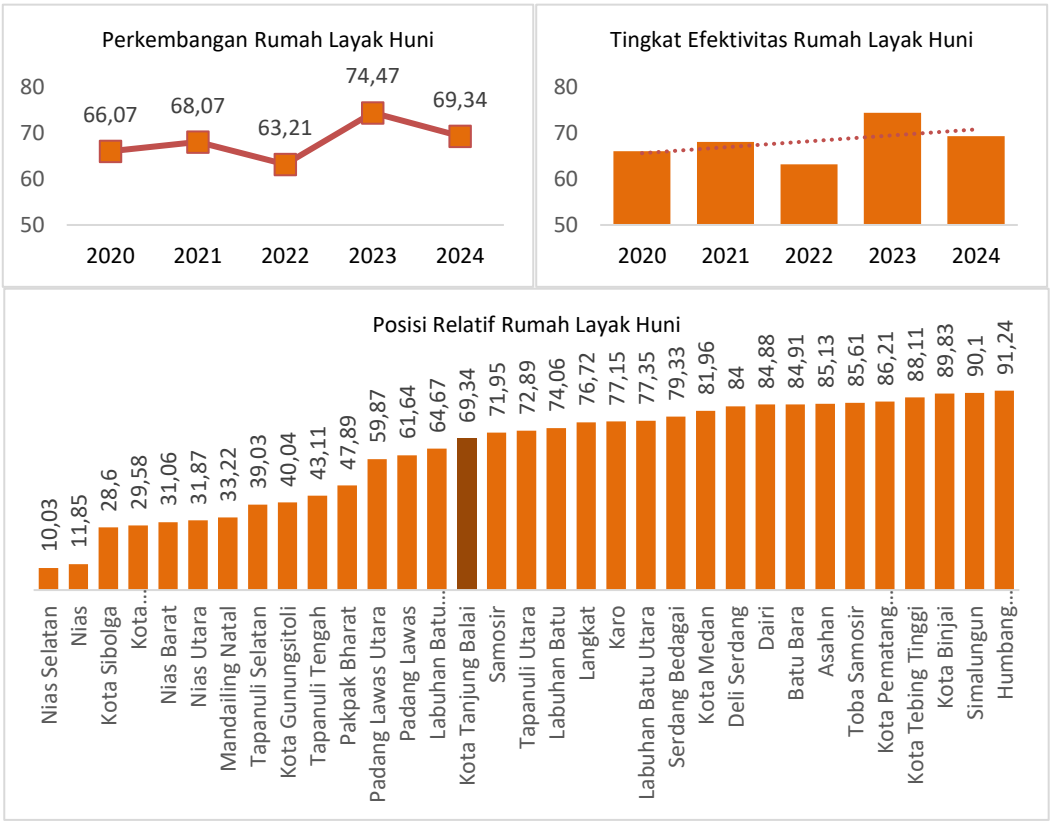
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

6. Proporsi Rumah Tangga dengan Hunian layak

Capaian indikator rumah layak huni di Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir denderung mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2020 indikator ini mencapai 66,07 persen kemudian mengalami sedikit peningkatan menjadi 74,47 persen pada Tahun 2023 tetapi tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 69,34 persen.

Perkembangan capaian persentase rumah tangga kumuh Kota Tanjungbalai mengalami fluktuasi dengan tren yang menunjukkan kecendrungan terjadinya peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menurunkan indikator ini sudah cukup efektif.

Bila diperhatikan posisi relatif indikator rumah layak huni maka Kota Tanjungbalai berada pada posisi kelimabelas terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Posisi tertinggi terhadap capaian rumah layak huni yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan dengan capaian 91,24 persen, sedangkan terendah dicapai oleh Kabupaten Nias Selatan dengan capaian 10,03 persen.



Gambar 3.36 Analisis Rumah Layak Huni, 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

7. Kondisi Mikro Infrastruktur Dasar

Menurut data BPS, hanya ada sekitar 69,34 persen rumah tangga di Kota Tanjungbalai yang memiliki tempat tinggal layak huni, sedangkan sisanya tidak. Pada dasarnya, rumah tidak layak huni adalah bangunan tempat tinggal yang tidak memenuhi persyaratan hunian layak sesuai ketetapan pemerintah. RTLH memiliki konstruksi bangunan yang tidak andal, luasnya tidak sesuai standar hunian per orang, serta tidak menyehatkan dan/atau membahayakan bagi penghuni. Berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Terpadu, diketahui bahwa jumlah RT di Kota Tanjungbalai dengan rumah kurang layak huni pada desil 1 berjumlah 103 KK, dengan jumlah terbesar terdapat pada Kecamatan Datuk bandar Timur sebanyak 29 KK, sedangkan terkecil terdapat pada Kecamatan Tanjungbalai Selatan karena hanya terdapat 1 KK.

Dilihat berdasarkan penggunaan fasilitas listrik, masih dijumpai RT yang tidak memiliki listrik. Jumlah Rumah tangga yang tidak memiliki listrik terdapat 28 rumah tangga, dengan jumlah terbesar terdapat di Kecamatan Datuk Bandar sebanyak 7 Rumah Tangga.

Tabel 3.15 Jumlah Keluarga dengan Rumah Kurang Layak Huni

Kecamatan	
Tanjungbalai Selatan	1
Tanjungbalai Utara	14
Sei Tualang Raso	16
Teluk Nibung	15
Datuk Bandar	28
Datuk Bandar Timur	29
Total	**103**

Sumber : DTSEN

8. Prioritas Permasalahan Kemiskinan dalam Dimensi Infrastruktur Dasar

Berdasarkan uraian permasalahan kemiskinan dalam dimensi ketenagakerjaan, maka dihasilkan matriks masalah kemiskinan bidang ketenagakerjaan yang memuat indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kesempatan Kerja.

Tabel 3.16 Masalah Kemiskinan Dimensi Pendidikan

No	Indikator Utama	Aspek yang Dianalisis			
		Perkembangan	Efektifitas	Posisi Relatif	Relevansi
1	Persentase RT kumuh	Menurun	Efektif	posisi keempatbelas tertinggi	Relevan
2	Proporsi RT dengan sanitasi layak	Meningkat	Efektif	Posisi kelima tertinggi	Relevan
3	Proporsi RT dengan air minum layak	Meningkat	Efektif	Posisi kelimabelas terendah	Relevan
4	Proporsi RT terhadap akses listrik	Meningkat	Efektif	Posisi tertinggi	Belum relevan
5	Proporsi RT terhadap hunian yang layak	Meningkat	Efektif	Posisi kelimabelas terendah	Relevan

3.2.5 BIDANG KETAHANAN PANGAN

1. Kondisi Ketahanan Pangan

Kota Tanjungbalai sebagai daerah perkotaan bukan merupakan daerah yang potensi pertanian. Tanaman pangan yang di tanam yaitu padi sawah dengan irigasi setengah teknis. Lahan sawah yang ada di Kota Tanjungbalai terdapat pada Kecamatan Datuk Bandar, Datuk Bandar Timur, dan Sei Tualang Raso. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Tanjungbalai adalah alat evaluasi yang mengukur tingkat ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas pasokan pangan. Berdasarkan data Indeks sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek

ketahanan pangan-ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas dapat ditingkatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat Tanjungbalai.

Ketahanan Pangan Nasional tahun 2024, IKP memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi ketahanan pangan di Kota Tanjungbalai, termasuk produksi lokal, distribusi pangan, akses ekonomi, serta kualitas dan keamanan pangan yang tersedia bagi masyarakat. Indeks ini sangat penting dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan berkelanjutan, yang bertujuan untuk memastikan kecukupan gizi, mengurangi kerawanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.17 Indeks Ketahanan Pangan Kota Tanjungbalai Tahun 2020—2024

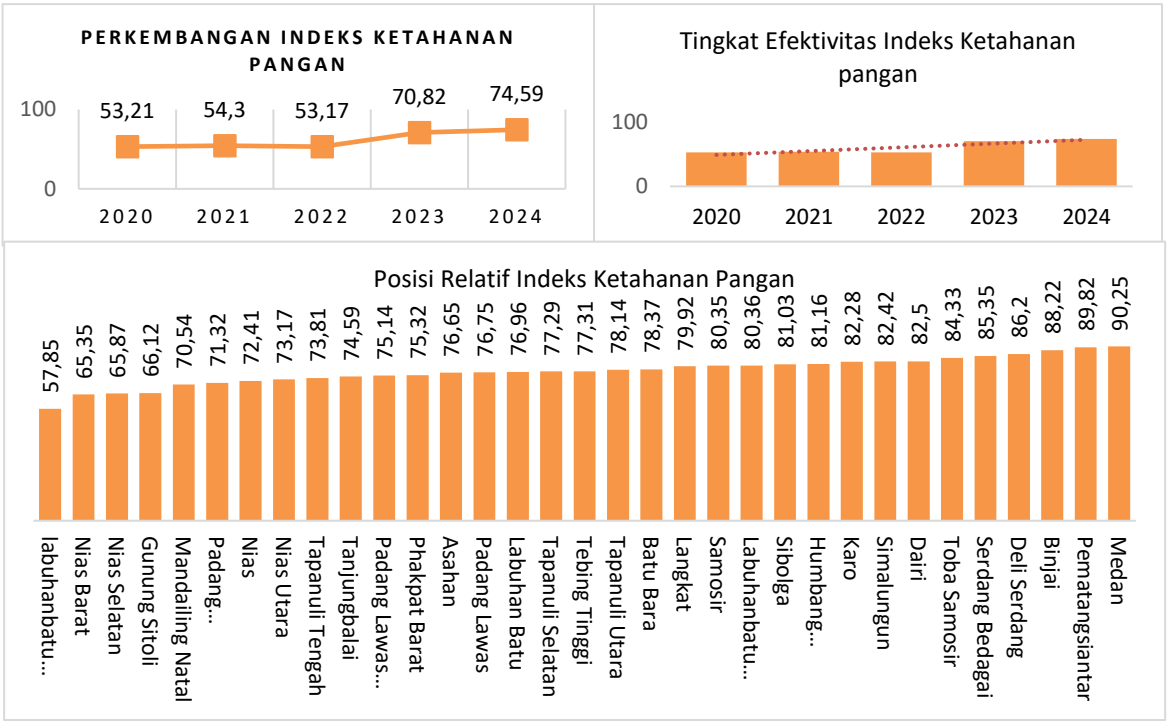
Indikator	Capaian		Provinsi	
	2023	2024	2023	2024
Indeks Ketahanan Pangan	70,83	74,59	71,84	77,79

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun 2023, Kota Tanjungbalai menunjukkan tingkat ketahanan pangan yang cukup baik dengan skor 70,83, meningkat menjadi 74,59 pada tahun 2024. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun akses ekonomi terhadap pangan cukup baik, perhatian lebih harus diberikan pada aspek pemanfaatan untuk memastikan bahwa seluruh penduduk tidak hanya memiliki akses, tetapi juga mengonsumsi pangan yang bergizi dan aman. Hal ini penting untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih holistik dan berkelanjutan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Perkembangan capaian indikator Indeks Ketahanan Pangan Kota Tanjungbalai mengalami tren meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan indikator ini sudah cukup efektif.

Bila diperhatikan posisi relatif indikator Indeks Ketahanan Pangan Kota Tanjungbalai berada pada posisi kesepuluh tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Posisi tertinggi terhadap capaian Indeks Ketahanan Pangan yaitu Kota Medan dengan capaian 90,25 persen, sedangkan terendah dicapai oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan capaian 57,85 persen.



Gambar 3.37 Analisis Indeks Ketahanan Pangan, 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

BAB IV
PROGRAM PRIORITAS

4.1 Permasalahan dan Isu Strategis Kemiskinan Kota Tanjungbalai

1. Permasalahan

Permasalahan penanggulangan kemiskinan artinya adalah berbagai tantangan, hambatan, atau kendala yang dihadapi pemerintah dan pemangku kepentingan saat berusaha menjalankan program pengurangan kemiskinan. Potensi permasalahan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Ada beberapa permasalahan pokok di Kota Tanjungbalai yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Tanjungbalai yaitu; (1) Angka kemiskinan yang relatif tinggi; (2) Peningkatan Kapasitas SDM yang Lambat; (3) Akses terhadap layanan kesehatan berkualitas yang belum optimal; (4) Kesempatan masyarakat terhadap Pendidikan berkualitas yang tidak merata; (5) Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi untuk peningkatan nilai tambah ekonomi yang masih rendah, (6) masih belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat dan (7) Rendahnya inovasi daerah.

Berdasarkan hasil analisis pada bagian sebelumnya, berikut ini beberapa permasalahan terkait dengan penanggulangan kemiskinan di Kota Tanjungbalai.

A. Permasalahan Bidang Pendidikan

Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan akses pendidikan, kualitas pendidikan di Kota Tanjungbalai masih menjadi isu sentral. Kurangnya fasilitas pendidikan, kekurangan sumber daya manusia berkualitas di bidang pendidikan, dan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan berkualitas merupakan tantangan serius. Dalam jangka panjang, rendahnya kualitas pendidikan dapat menghasilkan generasi muda yang kurang siap menghadapi perubahan ekonomi dan sosial. Pemerintah Kota Tanjungbalai perlu memastikan bahwa pendidikan mampu menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan transformasi ekonomi daerah ke depan.

B. Permasalahan Bidang Kesehatan

Pada sektor kesehatan, Masyarakat Kota Tanjungbalai masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Fasilitas kesehatan yang kurang memadai dan terbatasnya tenaga medis menjadi faktor utama yang menyebabkan beberapa warga tidak dapat memperoleh akses kesehatan yang layak. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik tetapi juga berdampak negatif pada produktivitas dan kesejahteraan umum masyarakat.

C. Permasalahan Bidang Ketenagakerjaan

Kapasitas tenaga kerja di Kota Tanjungbalai masih terbatas, terutama pada sektor informal yang memiliki tingkat *competitive advantage* rendah. Banyak tenaga kerja yang masih bekerja di sektor informal dengan produktivitas rendah. Selain itu, keterbatasan keterampilan dan pendidikan membuat tenaga kerja sulit bersaing di pasar kerja. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Dengan tenaga kerja yang lebih terampil dan berdaya saing, produktivitas dan pendapatan masyarakat dapat ditingkatkan.

Keterbatasan akses terhadap modal dan pembiayaan usaha menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha di Kota Tanjungbalai. Banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kesulitan mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya. Hal ini berdampak pada kemampuan bisnis untuk berekspansi dan naik kelas. Kurangnya akses terhadap pembiayaan membuat pelaku usaha sulit untuk meningkatkan kapasitas produksi, inovasi, dan daya saing. Untuk itu, diperlukan upaya dalam meningkatkan akses permodalan dan pembiayaan usaha bagi pelaku ekonomi daerah melalui program-program pemerintah dan kerja sama dengan lembaga keuangan.

D. Permasalahan Bidang Infrastruktur Dasar

Pada sektor infrastruktur dasar, permasalahan masih adanya penduduk miskin yang mendiami pemukiman padat huni, Kekurangan ini menyebabkan berbagai kesulitan bagi masyarakat, mulai dari masalah kesehatan akibat sanitasi yang buruk. Kurangnya infrastruktur dasar seperti drainase, gorong-gorong, jalan-jembatan, penyediaan air bersih, dan lampu penerangan jalan umum juga menjadi masalah yang signifikan.

2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil analisis data dan FGD yang dilakukan, ada beberapa isu strategis dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Tanjungbalai yaitu:

A. Kesehatan dan Pelayanan Sosial

Bidang kesehatan dan pelayanan sosial di Kota Tanjungbalai menghadapi berbagai masalah yang memerlukan perhatian serius. Kurangnya tenaga ahli dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta terbatasnya fasilitas untuk penyandang disabilitas, menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Rendahnya capaian imunisasi dan tingginya angka putus sekolah juga menjadi indikator perlunya peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.

Peningkatan fasilitas kesehatan dan pendistribusian tenaga kesehatan yang merata menjadi prioritas dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kota Tanjungbalai. Alat kesehatan yang tidak memadai di Pustu dan Posyandu, serta sanitasi yang buruk, memperburuk kondisi kesehatan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup bersih dan sehat juga sangat penting untuk mencegah berbagai penyakit.

Di bidang sosial, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kurangnya mitra dalam pengembangan usaha masyarakat menunjukkan perlunya peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Program-program yang mendukung pemberdayaan perempuan dan anak, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, harus menjadi fokus utama.

B. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas SDM di Kota Tanjungbalai masih menjadi isu utama yang memerlukan perhatian khusus. Pencari kerja di kota ini sebagian besar masih minim memiliki keterampilan yang memadai untuk bersaing di pasar kerja. Selain itu, kurangnya pelatihan bagi pelaku UMKM memperburuk situasi ini. Banyak UMKM yang belum mendapatkan bantuan yang memadai, dan sulitnya pemasaran produk UMKM menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk intervensi yang lebih sistematis dan terstruktur dalam hal pelatihan dan pendampingan. Pengembangan kualitas SDM di sektor perikanan juga memerlukan perhatian, karena rendahnya kualitas SDM pembudidaya ikan mempengaruhi produktivitas dan kualitas hasil perikanan.

Pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan juga sangat penting untuk memastikan bahwa pelatihan yang diberikan sesuai dengan standar industri dan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Dengan SDM yang berkualitas, Kota Tanjungbalai dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

C. Tantangan Ekonomi dan Investasi

Banyak pencari kerja yang dilatih masih kesulitan mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha, yang menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas program pelatihan kerja. Minimnya jumlah lapangan kerja formal juga menunjukkan kurangnya investasi di sektor-sektor produktif yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pemerintah perlu meningkatkan upaya dalam menarik investasi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memberikan insentif kepada investor. Pengembangan infrastruktur yang memadai dan penyederhanaan perizinan juga penting untuk menarik investasi. Selain itu, penguatan kapasitas pengelolaan UMKM melalui pelatihan dan pendampingan dapat membantu meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan diperlukan untuk menciptakan solusi yang holistik dan berkelanjutan dalam mengatasi tantangan ekonomi. Program-program yang mendukung kewirausahaan dan inovasi juga harus didorong untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran.

D. Infrastruktur dan Konektivitas

Minimnya sarana dan prasarana infrastruktur di Kota Tanjungbalai menjadi salah satu penghambat utama dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur di Kota Tanjungbalai. Investasi dalam infrastruktur yang memadai dan berkualitas akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

E. Daya Dukung Pangan

Kota Tanjungbalai menghadapi masalah kurangnya daya dukung pangan yang disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk berkurangnya lahan pertanian dan rendahnya produktivitas pertanian. Berkurangnya lahan pertanian disebabkan oleh alih fungsi lahan untuk pembangunan, serta kurangnya perhatian terhadap pengelolaan lahan secara berkelanjutan. Kondisi ini berdampak pada ketersediaan pangan lokal yang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.

Rendahnya produktivitas pertanian juga dipengaruhi oleh kurangnya akses terhadap teknologi pertanian modern dan minimnya dukungan penyuluhan pertanian. Banyak petani yang masih menggunakan metode tradisional dan tidak memiliki akses terhadap bibit unggul, pupuk, dan alat pertanian yang memadai. Hal ini menyebabkan hasil panen yang rendah dan tidak optimal, yang pada akhirnya mempengaruhi ketahanan pangan di kota ini.

4.2 Kebijakan Nasional dalam RPJPN

Kemiskinan masih menjadi isu strategis dalam pembangunan nasional, hal ini tercermin dari berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Kebijakan kemiskinan dalam RPJMN 2025-2029 berfokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada tahun 2026 dan menurunkan angka kemiskinan absolut menjadi 4,5–5 persen pada 2029. Strategi ini bertumpu pada penguatan data Regsosek**,** integrasi bantuan sosial, serta pemberdayaan ekonomi melalui program terpadu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan beban pengeluaran. Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan di Indonesia, ada 3 strategi utama dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, meliputi:

(1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;

Pada aspek pertama, pemerintah terus memperkuat berbagai program bantuan sosial dan subsidi, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, serta subsidi energi dan Pendidikan.

(2) Peningkatan pendapatan masyarakat;

Bantuan sosial tidak dapat menjadi instrumen permanen. Pemerintah mulai mendorong transformasi dari bantuan sosial menuju pemberdayaan ekonomi. Salah satunya melalui penguatan program padat karya di berbagai kementerian teknis seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pertanian, dan Kelautan. Proyek-proyek infrastruktur diarahkan agar menyisihkan sebagian anggarannya untuk kegiatan padat karya, sehingga membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Berbagai program penguatan ekonomi lokal juga dikembangkan, misalnya mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), koperasi merah putih, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mampu menciptakan sumber penghasilan mandiri

(3) **Penghapusan kantong-kantong kemiskinan.**

Pembangunan infrastruktur berperan penting dalam pengentasan kemiskinan. Tidak hanya berfungsi sebagai sarana fisik, infrastruktur juga berfungsi sebagai pengungkit sosial ekonomi yang meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan rendah umumnya merupakan wilayah yang memiliki fasilitas dan infrastruktur yang memadai, mulai dari akses transportasi, ketersediaan perumahan layak huni, hingga jaringan air bersih dan sanitasi yang baik. Sebaliknya, keterbatasan sarana tersebut sering kali menjadi penyebab utama tingginya tingkat kemiskinan di suatu wilayah.

Status kesejahteraan masyarakat diukur melalui pembagian desil di DTSEN, yang salah satunya ditentukan oleh kepemilikan dan kualitas aset. Aset berupa rumah yang layak, akses terhadap air bersih, dan fasilitas sanitasi merupakan indikator penting dalam menentukan apakah seseorang tergolong miskin atau tidak. Dengan demikian, infrastruktur dasar berperan langsung dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

4.3 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam RPJMD Kota Tanjungbalai

Visi Kota Tanjungbalai yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 yaitu: "**Mewujudkan Tanjungbalai Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera (EMAS)"**. Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Elok**

   Elok menggambarkan Kota Tanjungbalai yang bersih, tertata, dan humanis, dengan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat.

2. **Maju**

   Maju mencerminkan fokus pada peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi daerah, dan pemerataan infrastruktur. Pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama untuk menciptakan masyarakat cerdas dan sehat. Infrastruktur diperluas untuk membuka akses antarwilayah dan mendukung ekonomi, dengan fokus pada pengembangan jalan, drainase, dan transportasi, serta mitigasi banjir. Sektor jasa dan perdagangan, terutama UMKM, diberdayakan agar lebih produktif dan mandiri, dengan tujuan mencapai kemajuan yang tidak hanya fisik, tetapi juga penguatan kapasitas masyarakat menuju kesejahteraan.

3. **Agamais**

   Agamais mencerminkan kehidupan sosial masyarakat Tanjungbalai yang didasari nilai keimanan, toleransi, dan kearifan lokal.

4. **Sejahtera**

   Sejahtera mencerminkan kondisi di mana kebutuhan dasar masyarakat—seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan tempat tinggal—terpenuhi secara layak. Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen meningkatkan taraf hidup warga melalui berbagai program yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari, terutama dalam menciptakan peluang kerja dan mendukung aktivitas ekonomi produktif. Pembangunan dilakukan secara inklusif, dengan memastikan setiap kelompok masyarakat memiliki akses yang adil terhadap fasilitas dan layanan kota.

Menurut Pasal 15 dan 16 Permendagri No. 53 tahun 2020 kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terkooordinasi oleh TKPKD dan dilakukan melalui strategi dan program. Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan: (1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin; (2) peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (3) pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan (4) sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Sedangkan program penanggulangan kemiskinan secara garis besar sesuai dengan pasal 18 Permendagri 53 tahun 2020 dilakukan dengan:

a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;

b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Berikut ini kebijakan penanggulangan kemikinan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029

Misi	:	Memajukan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan Infrastruktur, dan Perekonomian Berbasis Jasa dan Perdagangan
Tujuan/ Sasaran	:	1. Menciptakan SDM unggul - Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas wilayah dan mitigasi resiko bencana banjir - Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi - Meningkatnya pendapatan masyarakat - Meningkatnya perekonomian sektor jasa dan perdagangan serta sektor produktif lainnya
Strategi	:	a. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dari dasar hingga menengah b. Mengembangkan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja berbasis potensi daerah c. Meningkatkan akses dan kualitas cakupan layanan Kesehatan d. Meningkatkan promosi pola hidup sehat e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dan daya saing tenaga layanan Kesehatan f. Meningkatkan infrastruktur jalan dan sarana publik g. Meningkatkan sistem drainase untuk mencegah banjir dan memperbaiki pengelolaan air h. Meningkatkan daya saing pelaku usaha

i. Mendorong kolaborasi antar pelaku bisnis, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif dan terintegrasi

j. Memperkuat sektor perdagangan dan industri produktif lainnya

k. Pengembangan sektor perikanan

l. Pengembangan sektor pariwisata

Misi	:	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Tujuan/ Sasaran	:	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam kehidupan sosial - Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan Masyarakat
Strategi	:	a. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menengah b. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia

6.3. Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Strategi penanggulangan kemiskinan Kota Tanjungbalai disusun dengan mengacu kepada strategi penanggulangan kemiskinan pada tingkat yang lebih tinggi. Empat strategi dalam penanggulangan kemiskinan menurut Permendagri 53 tahun 2020 yaitu:

1. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil dan;
4. sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Untuk mengoperasionalkan strategi di atas, dalam jangka menengah akan dilaksanakan berbagai kebijakan secara terpadu, sinergis, terukur dan terencana yang dilandasi kebersamaan, kemitraan dan keterlibatan stakeholder dan dikelola sebagai suatu gerakan bersama dalam penanggulangan kemiskinan.

Tabel 4.1 Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERAN PERANGKAT DAERAH	
Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Penguatan Integrasi Bantuan Sosial	1	Memanfaatkan dan memutakhirkan Data Terpadu Sosial & Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk meningkatkan akurasi dan kovergensi program
		2	Mengintegrasikan program bantuan sosial daerah guna meningkatkan cakupan dan efektivitas program
	Pengembangan dan implementasi perlindungan sosial adaptif	1	Mengembangkan program perlindungan sosial berbasis risiko
		2	Memperkuat program bantuan sosial berbasis komunitas
	Penyaluran bantuan yang terintegrasi dan terdigitalisasi	1	Menyediakan infrastruktur digital untuk penyaluran bantuan
		2	Meningkatkan literasi digital SDM pengelola di daerah
	Penguatan manajemen kepesertaan bersama dan pendampingan terintegrasi	1	Memperkuat sistem rujukan untuk penanganan keluhan dan pengaduan
		2	Mengoptimalkan peran pendamping dalam meningkatkan kemandirian penerima bantuan
	Pengembangan mekanisme graduasi dan integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi	1	Mendorong graduasi penerima manfaat yang sudah tidak layak
		2	Melakukan rujukan program pemberdayaan ekonomi bagi penduduk yang telah graduasi
Peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja melalui kartu usaha	Penguatan UMKM dan akses permodalan	1	Penyediaan fasilitas perizinan dan legalitas usaha
		2	Penyediaan akses fasilitas permodalan usaha
		3	Pelatihan dan Pendampingan
	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah	1	Pengelolaan SDA dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
		2	Promosi produk unggulan daerah
		3	Peningkatan infrastruktur ekonomi
	Pembangunan Ekosistem Ekonomi Kreatif dan Digital	1	Kolaborasi lintas sektor dengan stakeholders
		2	Penguatan literasi digital
		3	Penyediaan infrastruktur teknologi
	Peningkatan Keterampilan Sumber Daya Manusia	1	Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi
		2	Program padat karya dan pemberdayaan masyarakat
		3	Fasilitasi penempatan tenaga kerja

Pembangunan infrastruktur dasar afirmatif untuk penduduk miskin dan rentan	Peningkatan Akses dan Kualitas Fasilitas Pendidikan serta Kesehatan	1	Mengalokasikan anggaran daerah untuk pembangunan dan pemeliharaan sekolah serta fasilitas kesehatan
		2	Memperkuat program beasiswa, pelatihan tenaga pendidik, dan tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan
	Pembangunan dan perbaikan rumah layak huni	1	Mengintegrasikan program bantuan perumahan dengan skema subsidi dan dana daerah
		2	Mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga sosial dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin
	Penguatan Infrastruktur Digital dan Energi untuk Ekonomi Inklusif	1	Mempercepat pembangunan jaringan internet di daerah terpencil untuk mendukung pendidikan dan ekonomi digital
		2	Mengembangkan akses listrik dan energi terbarukan guna meningkatkan daya saing ekonomi lokal
	Peningkatan Produktivitas Pertanian untuk Ketahanan Pangan dan Ekonomi Desa	1	Meningkatkan akses petani terhadap teknologi pertanian, pupuk bersubsidi, dan irigasi
		2	Mengembangkan pasar hasil pertanian melalui kemitraan dengan koperasi, BUMDes, dan pelaku usaha lokal
Peningkatan Inklusivitas bagi Kelompok Rentan	Pelayanan Publik dan Aksesibilitas Ramah Kelompok Re	1	Pemenuhan SPM Bidang Sosial untuk penyandang disabilitas dan lansia
		2	Memastikan kebutuhan PD melalui program rehabilitasi sosial
		3	Internalisasi isu disabilitas dan kelanjutusiaan dalam perencanaan dan penanggaran

4.3 Analisis Program Prioritas Kemiskinan

Analisis akar masalah merupakan analisis lebih mendalam setelah menggambarkan kondisi umum kemiskinan daerah atau disebut juga sebagai determinan kemiskinan. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada setiap bidang selanjutnya akan dijadikan prioritas kebijakan. Untuk itu sebelum melakukan intervensi perlu mencari tahu akar masalah dari setiap permasalahan pada setiap bidang tersebut. Akar masalah dari determinan kemiskinan dapat diperoleh melalui analisis dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan/supply side dan aspek pemanfaatan/demand side.

Prioritas intervensi dapat disimpulkan dari hasil analisis relevansi capaian indikator utama, efektivitas intervensi terhadap indikator utama, dan keterkaitan antar-indikator. Berdasarkan hasil analisis relevansi, arah intervensi kebijakan perlu ditujukan kepada penanganan indikator utama yang perkembangannya belum relevan dengan

kemajuan di tingkat provinsi/nasional, dengan tetap mempertahankan (memperbaiki) penanganan terhadap indikator-indikator utama lain yang sudah relevan.

Perkembangan indikator utama yang belum relevan dengan kemajuan di tingkat provinsi/nasional menyiratkan bahwa intervensi yang sudah dilakukan terhadap indikator utama itu (melalui perbaikan terhadap capaian indikator-indikator pendukungnya), secara kumulatif belum efektif. Oleh sebab itu, evaluasi untuk penyempurnaan penyelenggaraan program/kegiatan terkait indikator-indikator pendukung yang bersangkutan perlu dilakukan. Pada tahap selanjutnya, berdasarkan hasil analisis keterkaitan, prioritas intervensi dapat mengacu kepada indikator-indikator pendukung yang perkembangannya belum sesuai harapan, dengan tetap mempertahankan (memperbaiki) penanganan terhadap indikator-indikator pendukung lain yang sudah menunjukkan kemajuan dalam perkembangannya. Prioritas intervensi ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan program/ kegiatan dan alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan di daerah.

Analisis akar masalah pada setiap prioritas bidang intervensi adalah sebagai berikut:

4.3.1 Prioritas Intervensi Bidang Pendidikan

1. *Teory of Change* Bidang Pendidikan

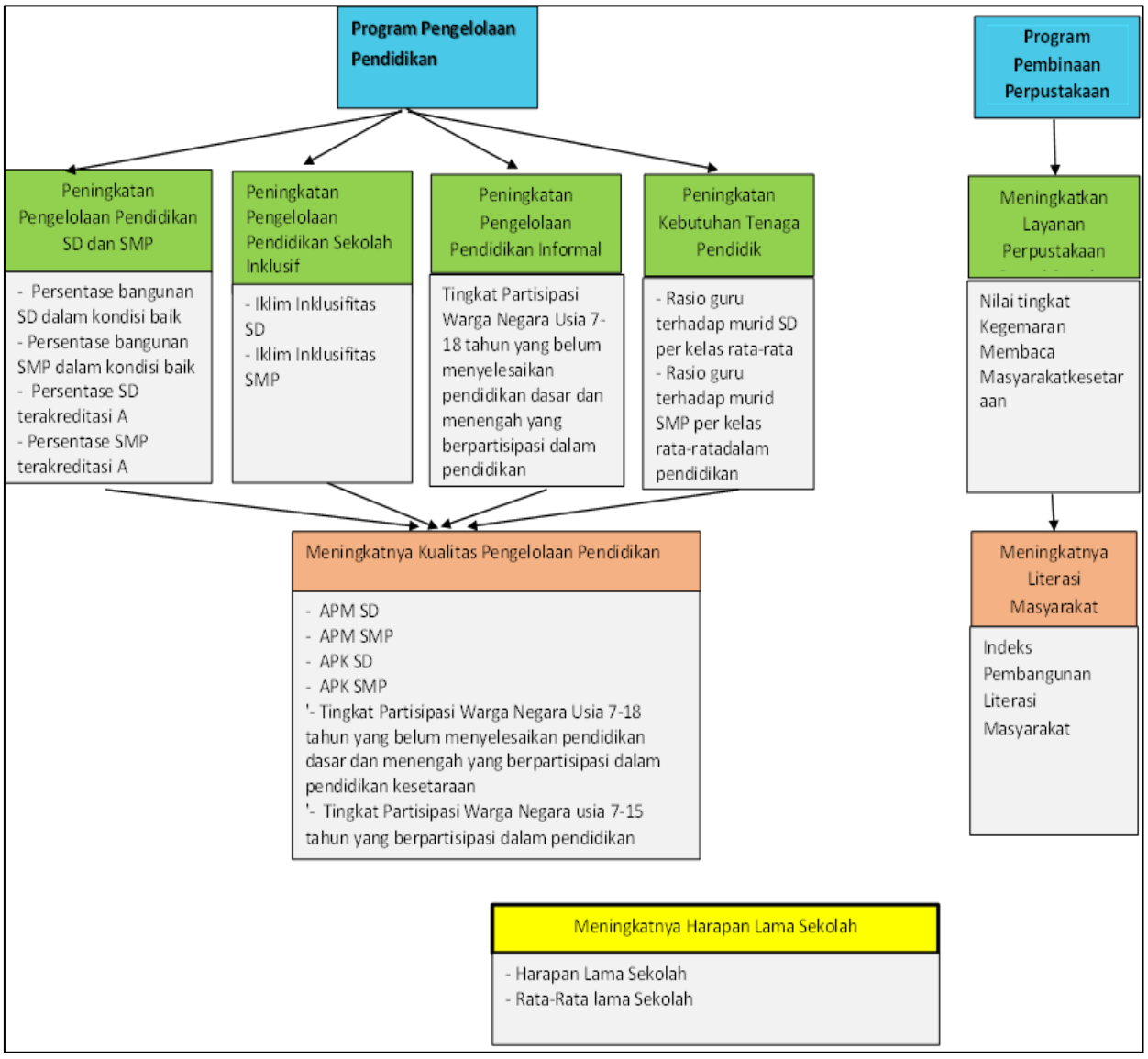
Berdasarkan hasil analisis capaian indikator utama bidang Pendidikan, maka dapat disimpulkan yang masih menjadi permasalahan utama adalah indikator harapan lama sekolah, karena masih berada posisi kedelapan terendah dan capaian persentase putus sekolah yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka peningkatan Harapan Lama Sekolah, ada 2 (dua) sasaran bidang pendidikan yang ingin dicapai, dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: (1) **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan** (indikator: APM SD/MI, APM SMP/MTs, APK SD/MI, APK SMP/MTs, Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan) dan (2) **Meningkatnya Literasi Masyarakat** (indikator: indeks pembangunan literasi masyarakat). Prioritas intervensi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Pendidikan melalui :

1. **Peningkatan Pengelolaan Pendidikan SD dan SMP**: Persentase bangunan SD dalam kondisi baik, Persentase bangunan SMP dalam kondisi baik, Persentase SD terakreditasi A dan Persentase SMP terakreditasi A;
2. **Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Inklusif:** Iklim Inklusifitas SD, Iklim Inklusifitas SMP;
3. **Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Informal**: Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan;
4. **Peningkatan Kebutuhan Tenaga Pendidik:** Rasio guru terhadap murid SD per kelas rata-rata

Selanjutnya prioritas Intervensi untuk sasaran meningkatnya literasi masyarakat dilakukan melalui **Meningkatkan layanan perpustakaan** dengan indikator nilai tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat.

Terdapat 2 (dua) program yang secara terfokus untuk peningkatan harapan lama sekolah antara lain:

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pembinaan Perpustakaan.



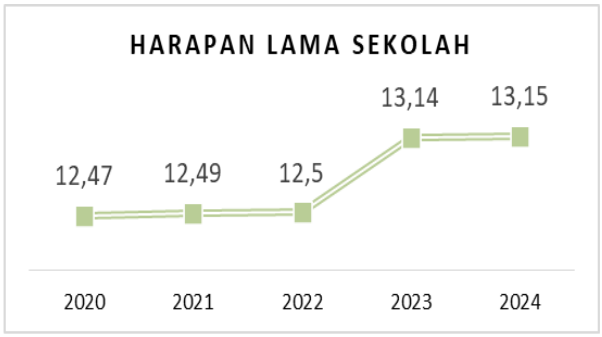
Gambar 4.1
Teory of Change untuk Peningkatan Harapan Lama Sekolah Kota Tanjungbalai

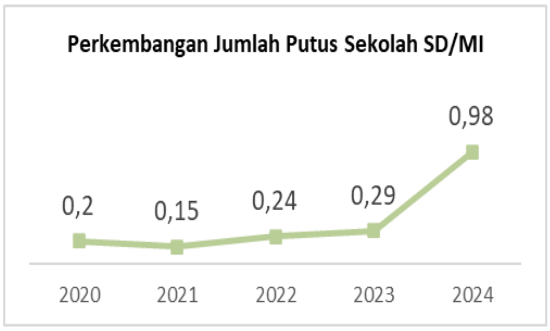
2. Analisis Keterkaitan Bidang Pendidikan

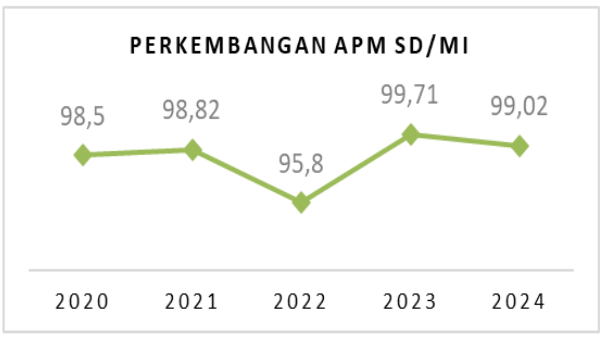
Berdasarkan hasil analisis keterkaitan (*causal relationship*) antara indikator utama Harapan Lama Sekolah dengan indikator-indikator pendukung, diketahui bahwa peningkatan Harapan Lama Sekolah bisa terjadi karena adanya peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan yang dapat dilihat dengan indikator perkembangan APM SD/MI. Trend perkembangan indikator ini, selama lima tahun terakhir sejalan dengan perkembangan Harapan Lama Sekolah, yaitu sama-sama mengalami peningkatan. Hal yang sama juga terjadi pada indikator perkembangan APM SMP/MTs yang mengalami peningkatan. (HLS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SMP memiliki hubungan positif yang kuat: HLS tinggi mencerminkan tingginya peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan, yang didorong oleh tingginya APM di jenjang SD/SMP. APM menjadi indikator operasional yang me partisipasi sekolah tepat usia (SD 7-12 thn, SMP 13-15 thn) yang maksimal akan meningkatkan HLS.

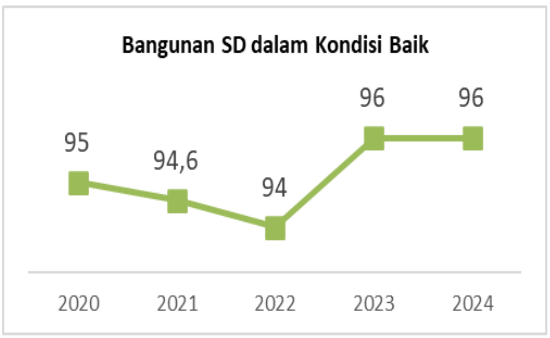
Selanjutnya, indikator pendukung lainnya dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan adalah indikator perkembangan jumlah putus sekolah tingkat SD/MI. Capaian indikator ini selama lima tahun terakhir memang tidak signifikan tetapi mengingat pemerintah pusat mewajibkan belajar 12 tahun, artinya ini masih menjadi tugas bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan. Pada Tahun 2024 indikator ini mengalami peningkatan secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Berbeda, dengan capaian perkembangan putus sekolah SMP/MTs yang mengalami penurunan dan menunjukkan perbaikan yang signifikan. Harapan Lama Sekolah dan angka putus sekolah memiliki hubungan berbanding terbalik. HLS yang tinggi menunjukkan peluang anak sekolah lebih lama, yang mencerminkan rendahnya angka putus sekolah atau sebaliknya.

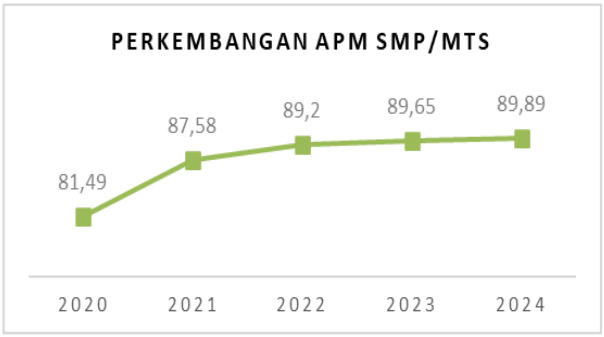
Indikator lain yang perlu diperhatikan dalam peningkatan harapan lama sekolah adalah rasio guru terhaadap murid. Berdasarkan gambar, dapat diketahui bahwa rasio guru terhadap murid tingkat SD/MI dan tingkat SMP MTs sudah cukup ideal antara 15-20 orang. Rasio yang seimbang memastikan guru tidak terbebani, meningkatkan efektivitas pengajaran, serta memberikan dampak positif pada motivasi dan prestasi akademik siswa. Jika motivasi anak meningkat, hal ini akan berdampak pada peningkatan harapan lama sekolah.

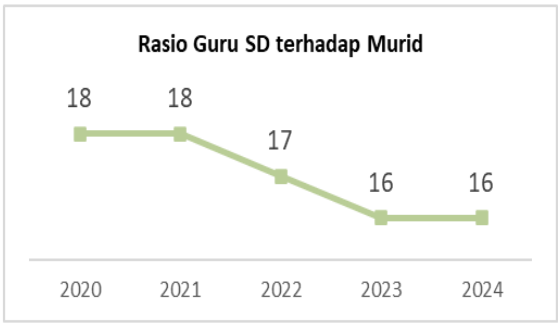


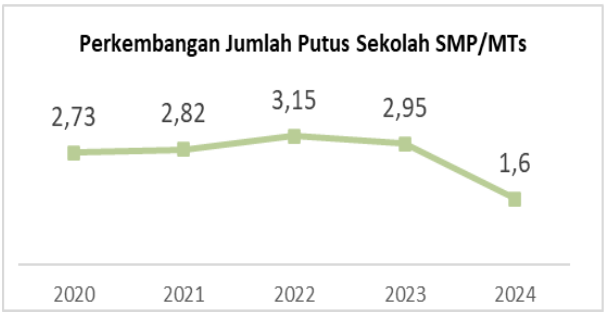


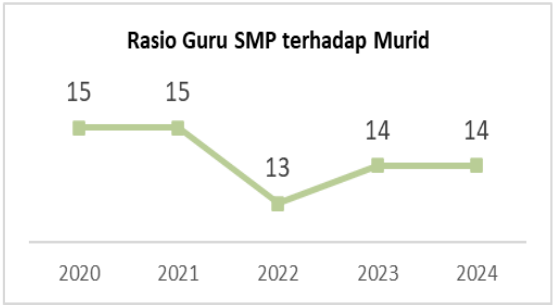












Gambar 4.2
Analisis Keterkaitan untuk Peningkatan Harapan Lama Sekolah Kota Tanjungbalai

4.3.2 Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan

1. Teory of Change Bidang Kesehatan

Berdasarkan hasil analisis capaian indikator utama bidang Kesehatan sebelumnya, maka dapat disimpulkan yang masih menjadi permasalahan utama adalah Peningkatan Derajat Kesehatan dengan indikator Umur Harapan Hidup. Peningkatan derajat masyarakat, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi sangat penting karena merupakan pilar utama pembangunan berkelanjutan yang menciptakan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, mandiri, dan produktif. Dalam rangka peningkatan derajat Kesehatan masyarakat, ada tiga (tiga) sasaran bidang kesehatan yang ingin dicapai, dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: (1) **Meningkatnya Mutu dan Kualitas Kesehatan** (indikator: angka kematian ibu, angka kematian bayi dan gizi buruk). (2) **Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan** (indikator: persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan). (3) **Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan minuman** (indikator: persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman). Prioritas intervensi untuk meningkatkan mutu dan kualitas kesehatan melalui :

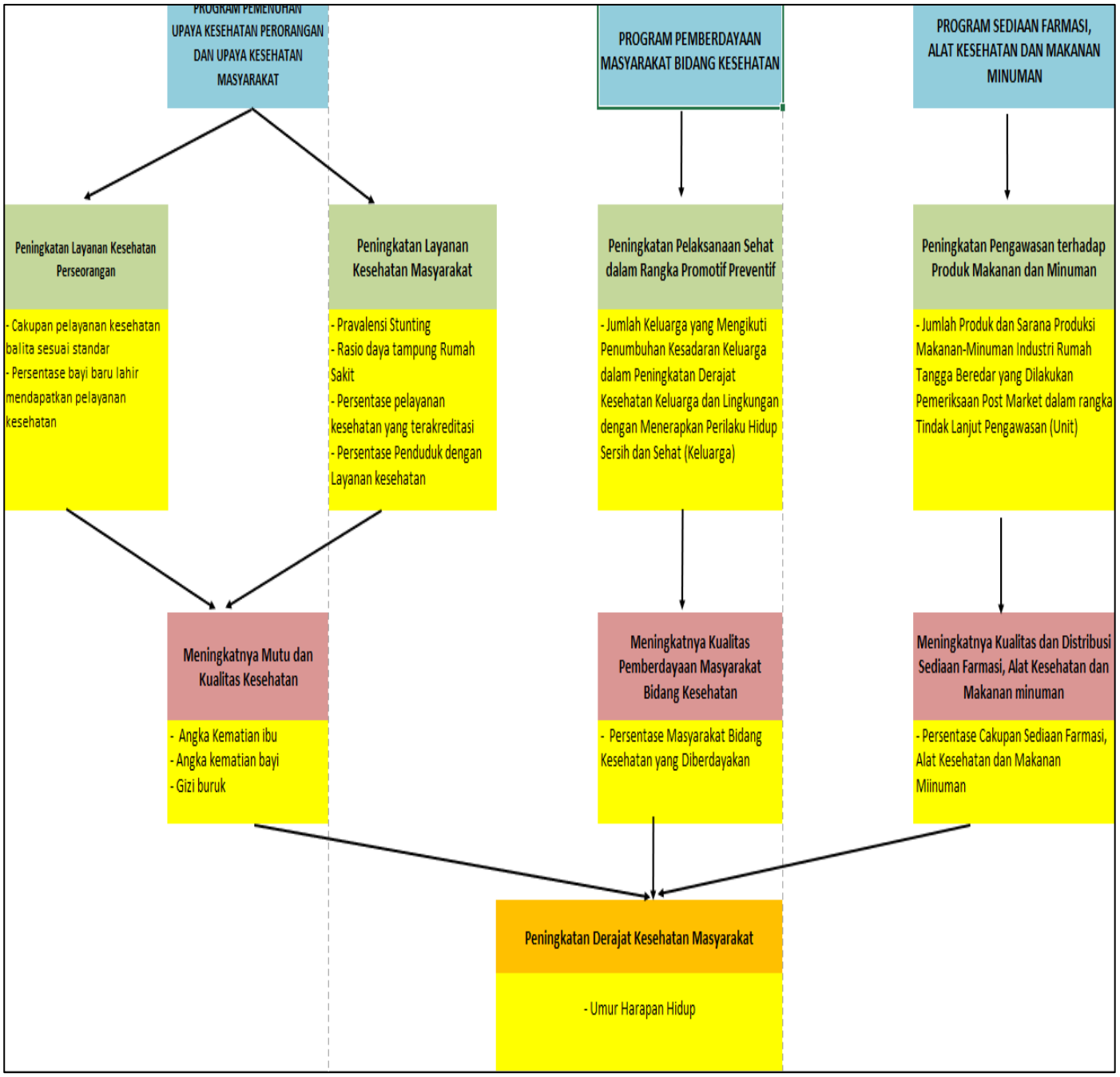
1. **Peningkatan Layanan Kesehatan Perseorangan**: cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar, persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan;
2. **Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat:** pravalensi stunting, rasio daya tampung Rumah Sakit, persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi, persentase penduduk dengan layanan kesehatan.

Selanjutnya prioritas Intervensi untuk sasaran meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dilakukan melalui:

1. **Peningkatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif**: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat (Keluarga)
2. **Peningkatan Pengawasan terhadap Produk Makanan dan Minuman:** Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)

Terdapat 3 (tiga) program yang secara terfokus untuk peningkatan derajat Kesehatan masyarakat antara lain:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman



Gambar 4.3
Teory of Change untuk Peningkatan Derajat Kota Tanjungbalai

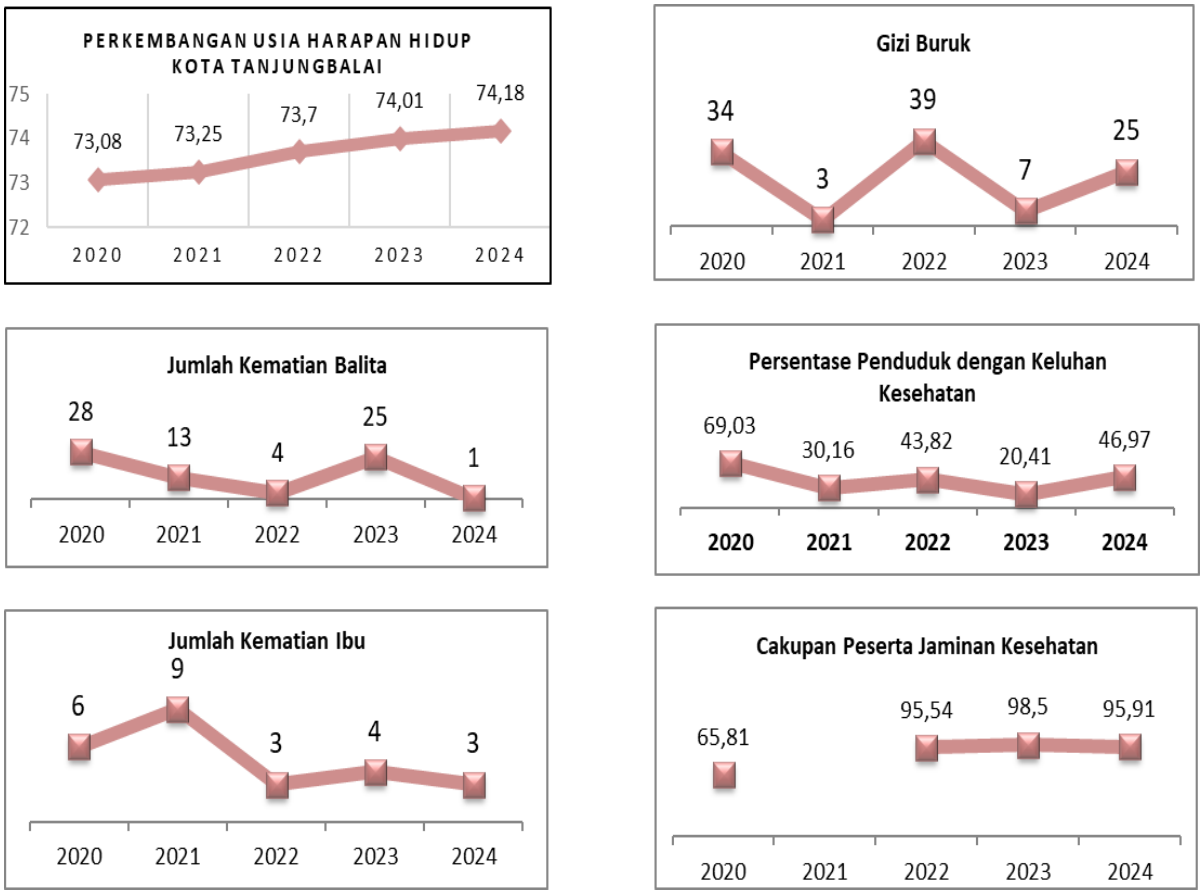
2. Analisis Keterkaitan Bidang Kesehatan

Berdasarkan hasil analisis keterkaitan (*causal relationship*) antara indikator utama Umur Harapan Hidup (UHH) dengan indikator-indikator pendukung, diketahui bahwa peningkatan mutu dan kualitas kesehatan dengan indikator angka kematian ibu dapat mendorong peningkatan umur harapan hidup. Trend perkembangan jumlah kematian ibu

selama lima tahun terakhir menunjukkan penurunan, sejalan dengan peningkatan umur harapan hidup. Kematian ibu saat hamil atau melahirkan mengurangi rerata umur penduduk, sehingga peningkatan pelayanan kesehatan ibu menjadi kunci utama untuk meningkatkan UHH. Kondisi yang sama terjadi pada indikator jumlah kematian balita, tren perkembangan indikator ini menunjukkan penurunan, sejalan dengan peningkatan umur harapan hidup.

Selanjutnya, indikator pendukung lainnya dalam rangka peningkatan derajat Kesehatan adalah adalah indikator persentase penduduk dengan keluhan kesehatan. Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan berbanding terbalik dengan angka harapan hidup. Semakin tinggi keluhan kesehatan (terutama lansia), semakin rendah kualitas hidup dan angka harapan hidup. Sebaliknya, peningkatan kualitas kesehatan secara signifikan memperpanjang angka harapan hidup. Perkembangan capaian indikator ini selama lima tahun cenderung menunjukkan penurunan sejalan dengan peningkatan dengan umur harapan hidup Kota Tanjungbalai yang mengalami peningkatan

Indikator lain yang perlu diperhatikan dalam peningkatan umur harapan hidup adalah cakupan peserta jaminan Kesehatan. Tingginya cakupan peserta jaminan kesehatan (seperti JKN/BPJS) berbanding lurus dengan peningkatan umur harapan hidup (UHH) karena mempermudah akses layanan medis, menurunkan beban biaya, dan mendorong deteksi dini penyakit. Cakupan UHC yang tinggi meningkatkan akses layanan kesehatan, yang secara bertahap menaikkan UHH.



Gambar 4.4 Analisis Keterkaitan untuk Peningkatan Umur Harapan Hidup Kota Tanjungbalai

4.3.3 Prioritas Intervensi Bidang Ketenagakerjaan

1. *Teory of Change* Bidang Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil analisis capaian indikator utama bidang Ketenagakerjaan, maka dapat disimpulkan yang masih menjadi permasalahan utama adalah tingkat pengangguran terbuka. Capaian tingkat pengangguran Kota Tanjungbalai memang dapat dikategorikan rendah, tetapi Pemerintah daerah diharapkan menjaga agar capaian indikator ini bisa menurun dari segi kuantitas sekaligus dapat meningkatkan kualitas dan mutu para tenaga kerja. Dalam rangka penurunan tingkat pengangguran terbuka, ada 5 (lima) sasaran bidang ketenagakerjaan yang ingin dicapai, dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: (1) **Meningkatnya perencanaan Tenaga Kerja** (indikator: tersedianya rencana tenaga kerja), (2) **Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja** (indikator: persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi), (3) **Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja** (indikator: persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri), (4) **Meningkatnya Kapasitas UMUKM yang Tangguh dan Mandiri** (indikator: persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal menjadi formal) dan (5) **Meningkatnya Daya Saing UMKM** (indikator: pertumbuhan wirausaha).

Prioritas intervensi untuk meningkatkan perencanaan tenaga kerja melalui **Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja** dengan indikator persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.

Prioritas intervensi untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui **Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja** dengan indikator jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pendidikan/pelatihan.

Prioritas intervensi untuk meningkatkan penempatan tenaga kerja melalui **Terwujudnya Pelayanan Antar Kerja** dengan indikator jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL.

Prioritas intervensi untuk meningkatkan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri melalui :

1. **Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro**: jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro (Unit Usaha)
2. **Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan:** jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan

Prioritas intervensi untuk meningkatkan daya saing UMKM melalui **Pengembangan Usaha Mikro** dengan indikator Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga).

Terdapat 5 (lima) program yang secara terfokus untuk penurunan tingkat pengangguran antara lain:

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3. Program Penempatan Tenaga Kerja;
4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah;
5. Program Pengembangan UMKM.



Gambar 4.5
Teory of Change untuk Menurunkan Tingkat Pengangguran Kota Tanjungbalai

4.3.4 Prioritas Intervensi Bidang Infrastruktur Dasar

1. *Teory of Change* Bidang Infrastruktur Dasar

Berdasarkan hasil analisis capaian indikator utama bidang infrastruktur dasar, maka dapat disimpulkan yang masih menjadi permasalahan utama adalah kualitas perumahan kumuh. Dilihat dari ketahanan rumah, kecukupan tempat tinggal, akses air bersih, akses sanitasi yang memadai, dan kepemilikkan yang aman yang masih berada di bawah capaian provinsi, artinya masih memerlukan perhatian yang cukup serius. Dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh, ada 4 (empat) sasaran bidang infrastruktur dasar yang ingin dicapai, dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: (1) **Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan** (indikator: persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU, air minum layak) (2) **Terpenuhinya Rumah Layak Huni bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah** (indikator: Persentase RT yang terkena relokasi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni), (3) **Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman** (indikator: Persentase luas kawasan kumuh 10-15 ha yang ditangani), dan (4) **Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah** (indikator: Sanitasi layak).

Prioritas intervensi untuk meningkatkan penyediaan PSU perumahan melalui **Penyediaan dan Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan** dengan indikator jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Prioritas intervensi untuk memenuhi rumah layak huni bagi warga negara korban bencana melalui **Peningkatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun** dengan indikator jumlah RT yang terkena relokasi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni.

Prioritas intervensi untuk meningkatkan kualitas Kawasan permukiman melalui **Peningkatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni** dengan indikator peningkatan persentase rumah layak huni di kawasan kumuh.

Prioritas intervensi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap system pengelolaan air limbah melalui **Peningkatan Pengeloaan Sistem Air Limbah Domestik** dengan indikator jumlah RT yang memiliki fasilitas buang air besar individual dan unit pengolahan setempat anaerob.

Terdapat 4 (empat) program yang secara terfokus untuk penurunan tingkat pengangguran antara lain:

1. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
2. Program Pengembangan Perumahan;
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;



Gambar 4.6
Teory of Change untuk Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Kota Tanjungbalai

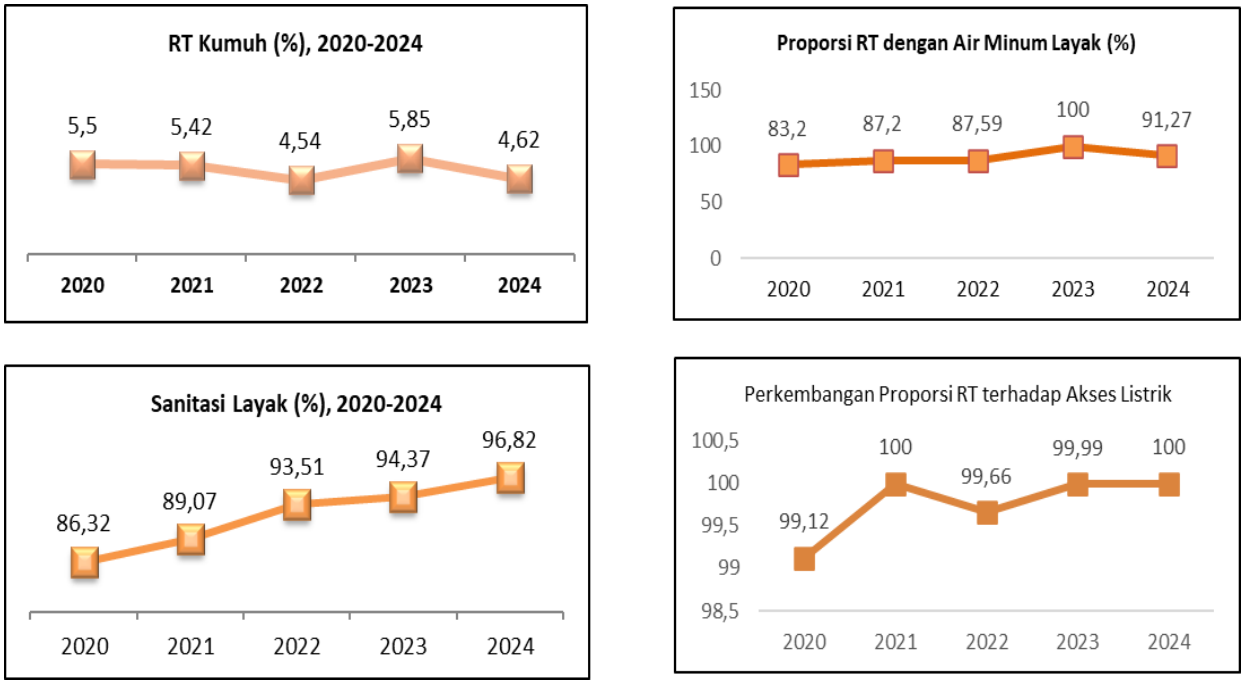
3. Analisis Keterkaitan Bidang Infrastruktur Dasar

Berdasarkan hasil analisis keterkaitan (*causal relationship*) antara indikator utama Rumah Tangga Kumuh dengan indikator-indikator pendukung, diketahui bahwa peningkatan kualitas perumahan kumuh dengan indikator sanitasi layak. Rumah tangga di kawasan kumuh memiliki kaitan erat dengan sanitasi buruk, ditandai dengan kurangnya akses air bersih, pengelolaan sampah yang minim, dan drainase yang tidak layak, yang memicu penyakit seperti diare dan ISPA. Banyak rumah tangga perkotaan dengan sanitasi

tidak layak sering berada di pemukiman padat. Trend perkembangan rumah tangga kuluh selama lima tahun terakhir cenderung menurun, meskipun tidak signifikan. Hal ini sejalan dengan peningkatan capaian sanitasi layak yang mengalami peningkatan.

Selanjutnya, indikator pendukung lainnya dalam rangka peningkatan kualitas rumah tangga kumuh adalah adalah indikator proporsi RT dengan air minum layak. Pemerintah sering kali menjadikan pemenuhan air bersih sebagai komponen utama dalam program perbaikan atau revitalisasi kawasan kumuh karena Keterbatasan akses air bersih yang layak di lingkungan kumuh memperburuk tingkat kemiskinan dan mencerminkan rendahnya kualitas infrastruktur dasar di area tersebut. Berdasarkan data dapat diketahui bahwa peningkatan kualitas rumah tangga kumuh di Kota tanjungbalai juga sudah sejalan dengan Peningkatan penyediaan air bersih.

Indikator lain yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kualitas rumah kumuh adalah perkembangan proporsi RT dengan akses listrik. Banyak rumah tangga kumuh tidak terhubung secara resmi ke jaringan listrik (PLN), sehingga mereka sering menggunakan sambungan ilegal atau meminta bantuan dari tetangga. Kurangnya akses listrik resmi meningkatkan risiko keamanan, ketergantungan pada penerangan minim, dan membatasi produktivitas ekonomi, sehingga menahan rumah tangga tersebut dalam siklus ekonomi rendah.



Gambar 4.7
Analisis Keterkaitan untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tangga Kumuh Kota Tanjungbalai

4.3.5 Prioritas Intervensi Bidang Pangan

Berdasarkan hasil analisis capaian indikator utama bidang Pangan, maka dapat disimpulkan yang masih menjadi permasalahan utama adalah meningkatkan ketersediaan Pangan. Ketersediaan pangan di Kota Tanjungbalai, sebagai wilayah perkotaan dengan lahan pertanian minim, sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah (interregional trade) dan potensi kelautan, bukan dari produksi lokal primer.

Capaian indeks ketahanan pangan Kota Tanjungbalai memang cukup baik, tetapi Pemerintah daerah diharapkan perhatian lebih harus diberikan pada aspek pemanfaatan untuk memastikan bahwa seluruh penduduk tidak hanya memiliki akses, tetapi juga mengonsumsi pangan yang bergizi dan aman. Dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan, ada 6 (enam) sasaran bidang pengan yang ingin dicapai, dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: (1) **Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan** (indikator: Skor Pola Pangan Harapan), (2) **Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan** (indikator: persentase daerah rentan rawan pangan), (3) **Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap** (indikator: nilai tukar nelayan), (4) **Meningkatnya Produksi Perikanan Bididaya** (indikator: persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal menjadi formal), (5) **Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan** (indikator: angka konsumsi ikan), dan (6) **Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian** (indikator: Produktivitas pertanian per hektar per tahun)

Prioritas intervensi untuk meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan melalui **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya** dengan indikator tersedianya informasi stok pangan.

Prioritas intervensi untuk meningkatkan penanganan kerawanan pangan melalui **Peningkatan Pemantauan Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan** dengan indikator ketersediaan dokumen peta analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutahirkan.

Prioritas intervensi untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui **Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil** dengan indikator Jumlah Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit) yang mendapat bantuan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan.

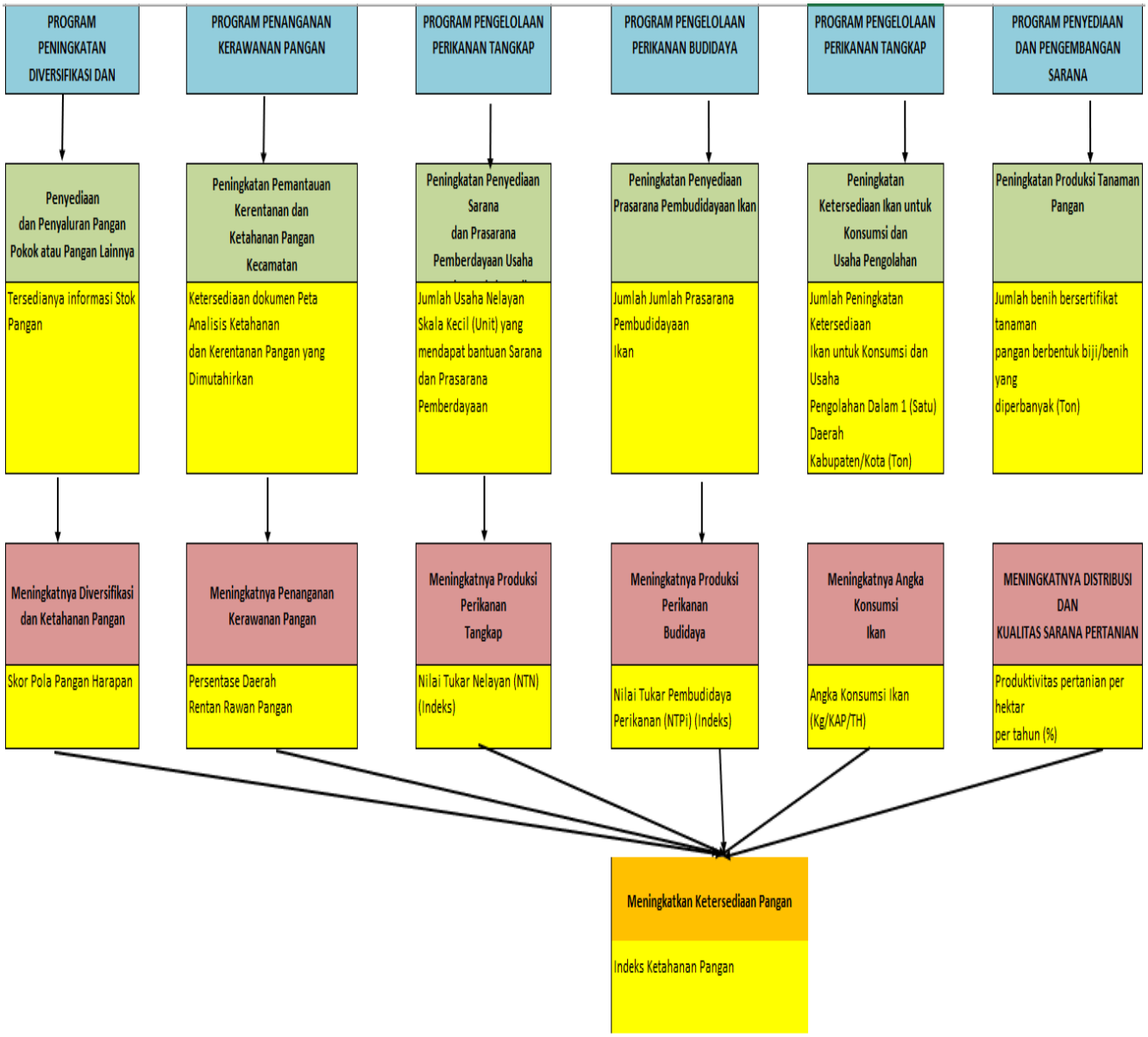
Prioritas intervensi untuk meningkatkan perikanan budidaya melalui **Peningkatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan** dengan indikator Jumlah Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan.

Prioritas intervensi untuk meningkatkan konsumsi ikan melalui **Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan** dengan indikator Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan.

Prioritas intervensi untuk meningkatkan distribusi dan kualitas sarana pertanian melalui **Peningkatan Produksi Tanaman Pangan** dengan indikator Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton).

Terdapat 6 (enam) program yang secara terfokus untuk penurunan tingkat pengangguran antara lain:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan;
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan Masyarakat;
3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian



Gambar 4.8
Teory of Change untuk Peningkatan Ketersediaan Pangan Kota Tanjungbalai

4.4 Analisa Relevansi dan Efektivitas APBD Kota Tanjungbalai

4.4.1 Kinerja Keuangan Tahun 2020-2024

Bagian ini akan menampilkan perkembangan realisasi APBD Kota Tanjungbalai dari Tahun Anggaran 2020-2024 yang terdiri dari komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan. Realisasi pendapatan Kota Tanjungbalai mengalami fluktuasi yang signifikan selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, total pendapatan tercatat sebesar Rp.609.732.713.965,45, yang kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp.606.572.884.754,90. Meskipun ada penurunan sedikit pada tahun 2021, pendapatan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp.599.515.440.812,47. Puncaknya tercatat pada tahun 2023 dan 2024, dengan pendapatan masing-masing sebesar Rp.647.825.876.821,76 dan Rp.651.320.368.865,02. Kenaikan pendapatan ini menunjukkan adanya potensi pengelolaan sumber daya yang semakin baik seiring berjalannya waktu, meskipun ada fluktuasi dalam beberapa tahun.

Realisasi belanja daerah Kota Tanjungbalai mengalami tren peningkatan yang relatif stabil sepanjang periode 2020-2024. Pada tahun 2020, belanja tercatat sebesar Rp.596.252.335.102,39, yang mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 menjadi Rp.567.911.449.159,38. Namun, belanja kembali meningkat pada tahun 2022 dengan jumlah Rp.616.763.976.369,52, dan terus mengalami kenaikan pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing sebesar Rp.666.244.847.828,79 dan Rp.663.417.790.308,93. Kenaikan belanja ini mencerminkan adanya alokasi anggaran yang semakin besar untuk kegiatan dan program yang mendukung pembangunan daerah.

Realisasi pembiayaan netto Kota Tanjungbalai menunjukkan perbedaan yang signifikan antara tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, pembiayaan netto tercatat sangat rendah, yaitu Rp.2.155.399.718,33. Namun, pada tahun 2021, terjadi lonjakan yang sangat besar dengan total Rp.11.681.203.883,39. Puncaknya terjadi pada tahun 2022 dengan pembiayaan netto yang sangat tinggi, mencapai Rp.50.342.639.478,91. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi Rp.32.978.416.588,86, pembiayaan netto masih tetap tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan daerah mengalami kecenderungan yang lebih besar dalam mendukung kegiatan yang memerlukan sumber dana eksternal atau pembiayaan jangka panjang.

Tabel 4.2 Kinerja Keuangan Kota Tanjungbalai Periode 2020-2024 (Juta Rupiah)

Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
Pendapatan	**609.733**	**606.573**	**599.515**	**647.826**	**651.320**	**0,21%**

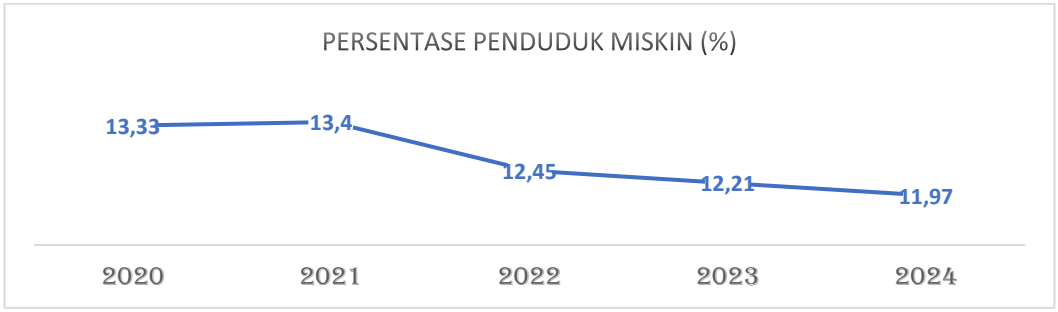
Pendapatan Asli Daerah	**63.479**	**58.650**	**61.142**	**82.710**	**78.493**	**5,29%**
Pajak Daerah	14.459	17.206	17.460	20.429	22.526	7,45%
Retribusi Daerah	16.892	1.663	24.732	3.456	3.778	239,33%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.926	6.072	7.939	7.146	7.419	3,24%
Lain-lain PAD yang Sah	27.201	33.709	11.011	51.679	44.768	72,35%
Pendapatan Transfer	**525.992**	**527.865**	**538.373**	**565.115**	**564.730**	**-0,54%**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	502.574	500.671	502.484	525.848	532.343	-0,47%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	23.418	27.194	33.875	39.267	32.387	0,64%
Pendapatan lainnya	**20.261**	**20.058**	**0**	**0**	**8.096**	**0,00%**
Belanja	596.907	567.911	616.764	666.245	663.417	0,69%
Belanja Operasi	529.092	523.211	547.656	586.583	596.195	1,74%
Belanja Modal	53.908	44.391	67.589	79.662	66.570	-1,60%
Belanja Tidak Terduga	13.907	310	1.519	0	652	0%

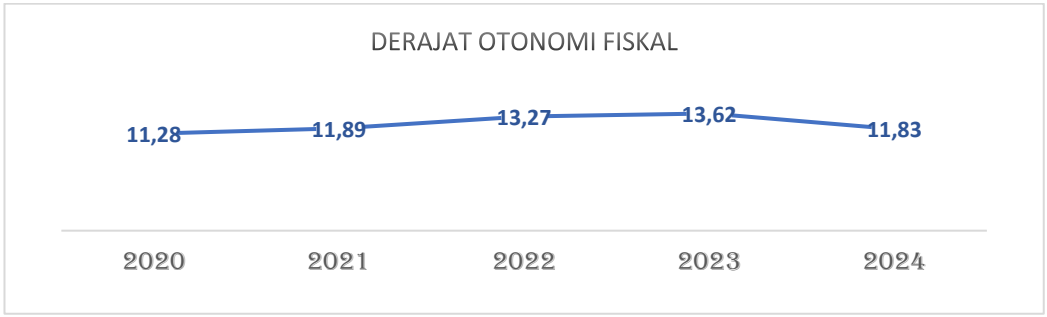
4.4.2 Anggaran Penanggulangan Kemiskinan

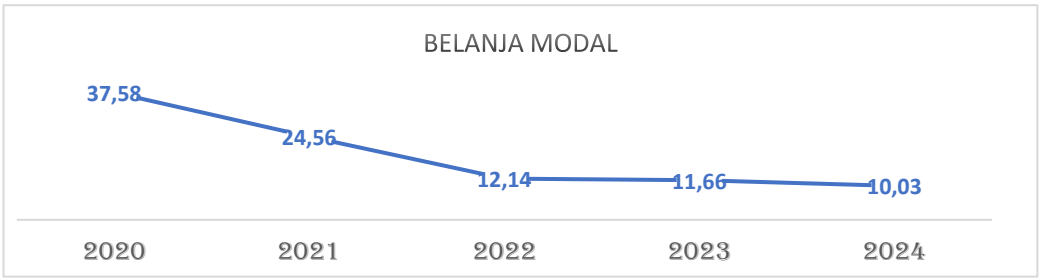
Persentase penduduk miskin Kota Tanjungbalai cenderung menunjukkan penurunan, hal tersebut sejalan dengan peningkatan derajat otonomi fiskal. Pada Tahun 2021 terjadi peningkatan kemiskinan dari 13,40 persen menjadi 13,33 persen pada tahun 2020 dan pada tahun yang sama derajat otonomi fiskal juga mengalami peningkatan. Hingga pada Tahun 2024 persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 11,97 persen, sedangkan derajat otonomi fiskal mengalami penurunan menjadi 11,83. Hal ini menunjukkan bahwa derajat otonomi fiskal memiliki pengaruh negatif terhadap penurunan kemiskinan, artinya pemerintah Kota Tanjungbalai sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.

Selama lima tahun terakhir perkembangan pajak daerah cenderung menunjukkan peningkatan. Pajak daerah pada Tahun 2020 mencapai 2,07 persen meningkat terus hingga menjadi 2,90 persen pada Tahun 2022 dan kembali meningkat pada Tahun 2024 menjadi 3,39 persen. Tahun 2024 kontribusi penerimaan pajak sebesar 3,39 persen dengan penerimaan terbesar berasal dari pajak penerangan jalan yang mencapai Rp.12,5 miliar atau sebesar 58,69 persen. Dilihat dari retribusi daerah menunjukkan perkembangan yang fluktuatif selama lima tahun terakhir. Berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa retribusi daerah pada Tahun 2020 mencapai 26,61 persen, sempat mengalami penurunan pada Tahun 2021 tetapi kembali meningkat secara signifikan menjadi 40,45 persen pada Tahun 2022 dan kembali menurun menjadi 4,81 persen pada Tahun 2024. Pada Tahun 2024 penerimaan pajak dan retribusi daerah memiliki pengaruh positif terhadap penurunan persentase penduduk miskin.

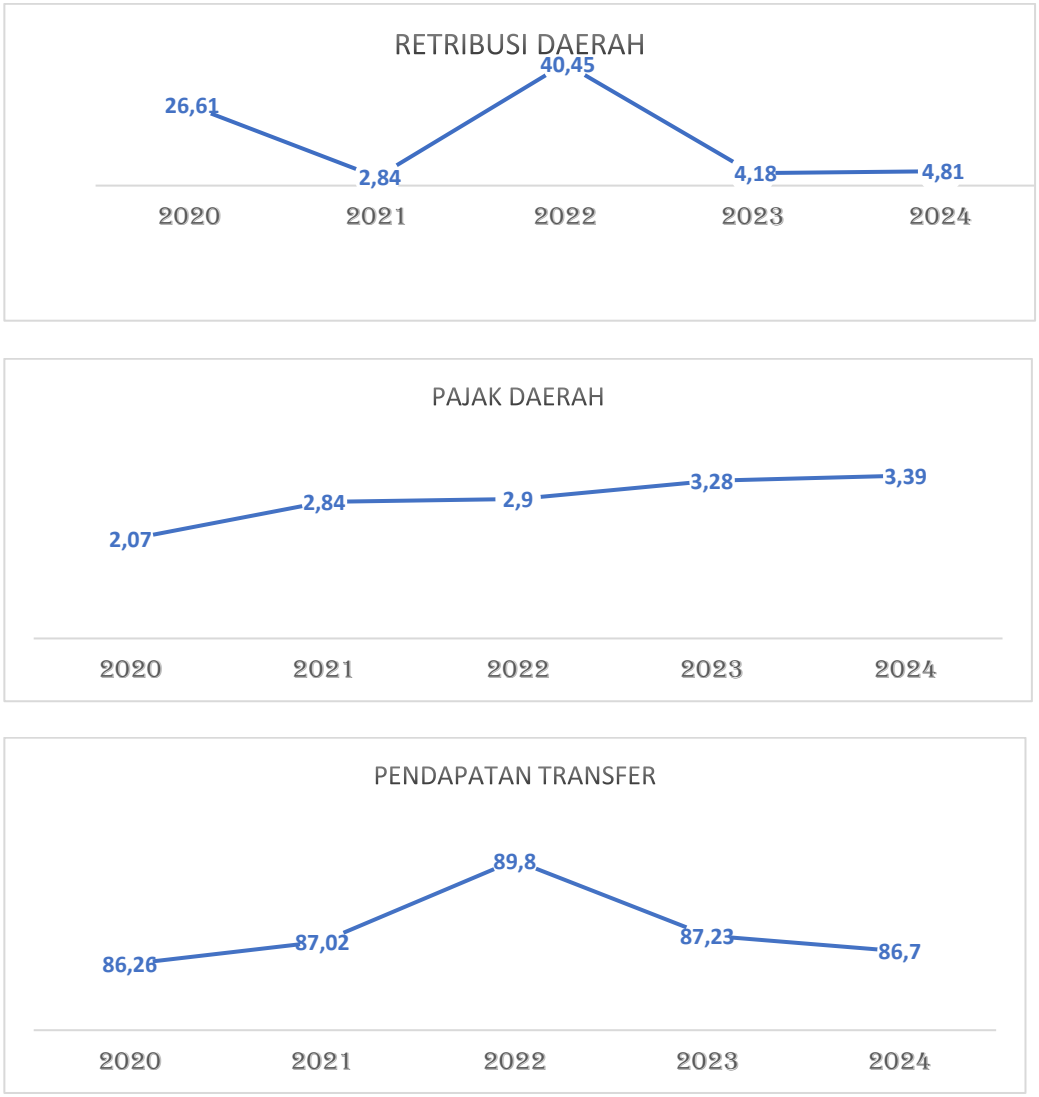
Belanja modal dapat menurunkan kemiskinan secara tidak langsung dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur, serta secara langsung melalui peningkatan kapasitas dan produktivitas. Belanja Modal menunjukkan kecendrungan yang terus menurun selama lima tahun terakhir. Pada Tahun 2021 belanja modal menurun menjadi 24,56 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 37,58 persen kemudian mengalami penurunan menjadi 12,14 persen pada Tahun 2022 hingga menjadi 10,03 persen pada Tahun 2024. Dilihat dari Pendapatan transfer, Pada Tahun 2020 mencapai 86,28 persen, sempat mengalami penurunan menjadi 89,80 persen tetapi Kembali mengalami penurunan menjadi 86,7 persen.







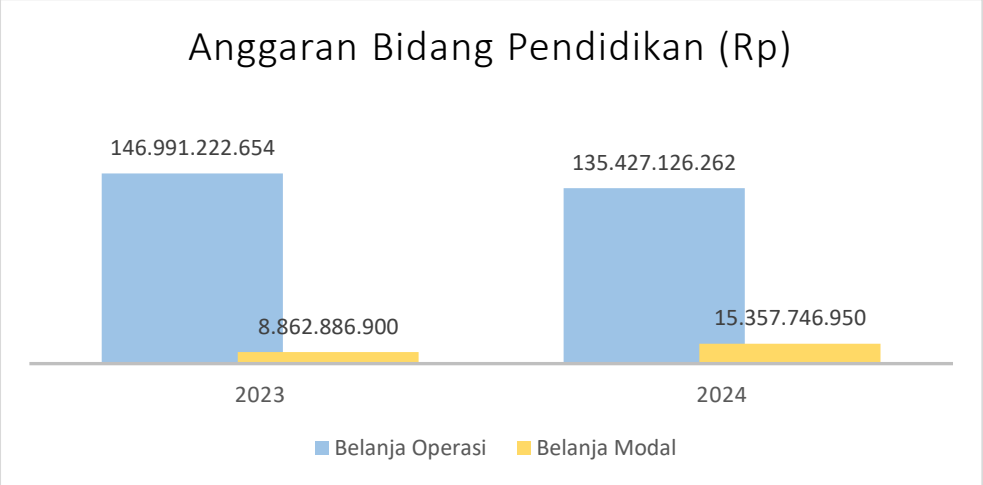
Gambar 4.9 Daya Dukung Fiskal



Gambar 4.9 Daya Dukung Fiskal

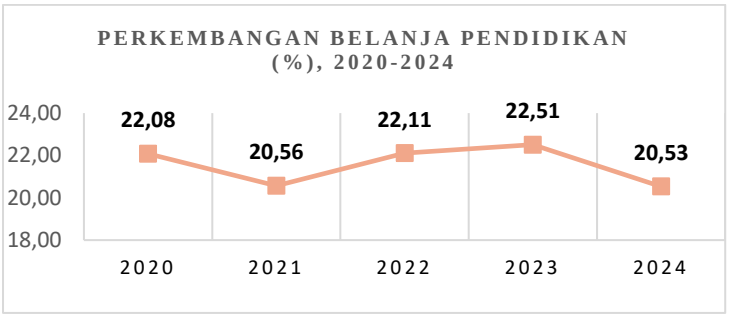
1. Belanja Urusan Pendidikan

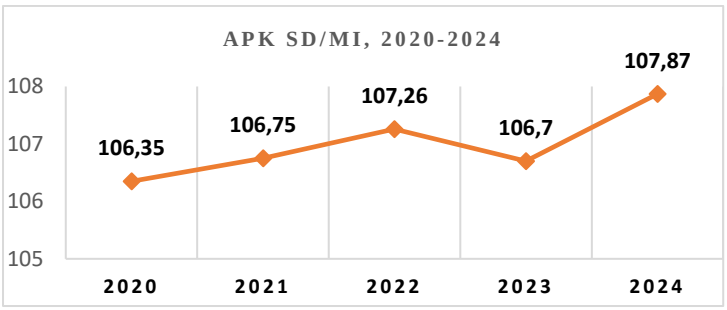
Bila dilihat serapan anggaran pendidikan berdasarkan belanja urusan maka diketahui bahwa belanja pendidikan ternyata lebih banyak diserap untuk belanja operasi yaitu sebesar 89,81 persen dari total belanja pendidikan yang meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja operasi bidang pendidikan pada Tahun 2023 sebesar Rp. 146.991.222.654 menjadi sebesar Rp. 135.427.126.262 pada Tahun 2024 atau menurun sebesar 7,87 persen. Sisanya digunakan untuk belanja modal yaitu sebesar Rp. 8.862.886.900 pada Tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 15.537.746.950 pada Tahun 2024 atau sebesar 10,18 persen dari total belanja pendidikan yang meliputi belanja untuk belanja pembangunan sekolah dan penyediaan perlengkapan sekolah.

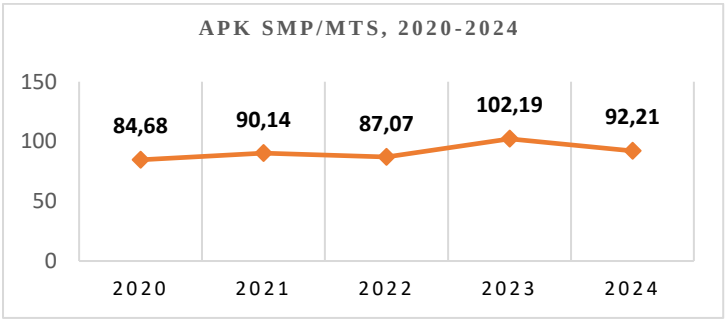


Gambar 4.10 Komposisi Belanja Urusan Pendidikan Kota Tanjungbalai, 2023-2024

Dana APBD untuk pendidikan adalah anggaran yang dialokasikan minimal 20 persen dari total APBD setiap tahun untuk membiayai pendidikan, yang mencakup peningkatan akses, kualitas, dan kesejahteraan guru, serta fasilitas dan program pendidikan. Pada Tahun 2020 belanja urusan pendidikan sebesar 22,08 persen dan meningkat terus hingga menjadi 22,11 persen pada Tahun 2022, dan pada Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 20,53 persen. Secara keseluruhan peningkatan belanja bidang pendidikan ternyata tidak diikuti dengan peningkatan capaian indikator pendidikan yaitu APK SD/MI. Pada Tahun 2020 capaian APK SD/MI sebesar 106,35 persen namun pada Tahun 2023 sempat mengalami penurunan signifikan menjadi 106,7 persen dan kemudian mengalami peningkatan menjadi 106,87 persen pada Tahun 2024. Kondisi capaian APK SD/MI ternyata tidak terjadi pada pencapaian APK SMP/MTs yang mengalami penurunan. Pada Tahun 2020 capaian APK SMP/MTs sebesar 84,68 persen, mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 102,19 persen pada Tahun 2023, tetapi menurun menjadi 92,21 persen pada tahun 2024.



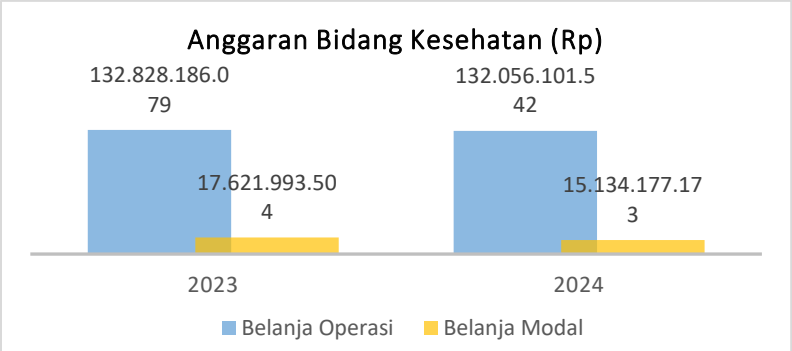




Gambar 4.11 Belanja Urusan Pendidikan dan Indikator Bidang Pendidikan, 2020-2024

2. Belanja Urusan Kesehatan

Bila dilihat serapan anggaran pendidikan berdasarkan belanja urusan maka diketahui bahwa belanja kesehatan ternyata lebih banyak diserap untuk belanja operasi. Belanja operasi bidang kesehatan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 132.056.101.542 atau sebesar 89,72 persen dari total belanja kesehatan yang meliputi belanja pembangunan rumah sakit, prasarana dan sarana pendukung dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, Sisanya digunakan untuk belanja modal yaitu sebesar Rp. 15.134.177.173,- atau sebesar 10,28 persen dari total belanja yang meliputi belanja untuk pegawai dan belanja barang/jasa. Pada Tahun 2024 Belanja modal mengalami penurunan sebesar 0,59 persen, sedangkan, sama halnya dengan belanja operasi yang turut mengalami penurunan sebesar 14,18 persen.

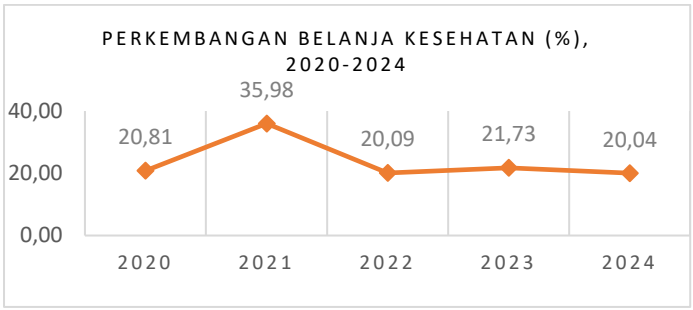


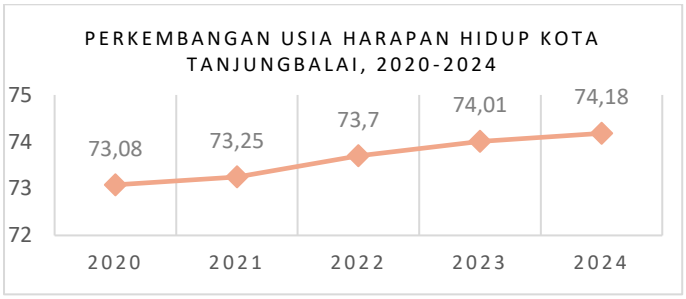
Gambar 4.12 Komposisi Belanja Urusan Kesehatan Kota Tanjungbalai, 2023-2024

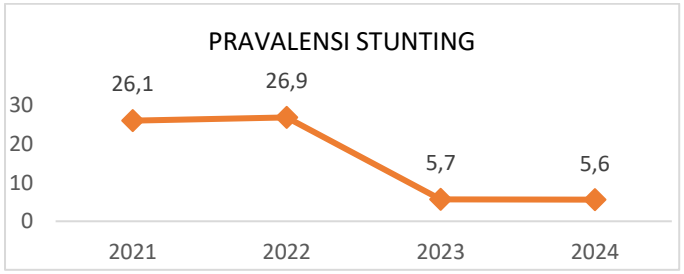
Anggaran Kesehatan dipergunakan untuk mendukung transformasi sistem kesehatan, termasuk pembiayaan Program JKN, imunisasi balita, makanan tambahan, serta sosialisasi TBC dan kesehatan ibu. Perkembangan belanja kesehatan cenderung menunjukkan fluktuasi. Pada pada Tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2020 sebesar 20,81 persen menjadi sebesar 35,98 persen tetapi mengalami penurunan menjadi 20,09 persen pada Tahun 2022 dan kembali menurun menjadi 20,04 persen pada Tahun 2024.

Berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa kecendrungan penurunan belanja kesehatan ternyata diikuti dengan peningkatan Usia Harapan Hidup. Meskipun capaian indikator ini masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan capaian rata-rata kabupaten/kota tetapi capaiannya menunjukkan peningkatan. Pada Tahun 2020, usia harapan hidup di Kota Tanjungbalai sebesar 73,08 tahun selanjutnya terus mengalami peningkatan hingga menjadi 73,70 tahun pada Tahun 2022, bahkan pada Tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan menjadi 74,18 persen.

Prevalensi balita stunting mengacu pada persentase jumlah balita di suatu populasi yang mengalami stunting dalam pertumbuhan fisiknya. Prevalensi balita stunting digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah atau negara. Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Tanjungbalai berhasil menurunkan prevalensi angka stunting menjadi 5,60 persen dari sebelumnya sebesar 5,70 persen. Hal ini tidak terlepas dari kolaborasi dan sinergitas antara Pemerintah Kota, Forkopimda dan OPD terkait yang telah bersama-sama saling bekerja, serta dukungan program kegiatan yang telah dilaksanakan untuk percepatan penurunan stunting. Untuk mengejar target penurunan stunting di Kota Tanjungbalai dikisaran 5,70-5,50 maka Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Tanjungbalai bersama Forkopimda melaksanakan kegiatan intervensi percepatan penurunan stunting di Kota Tanjungbalai baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif.



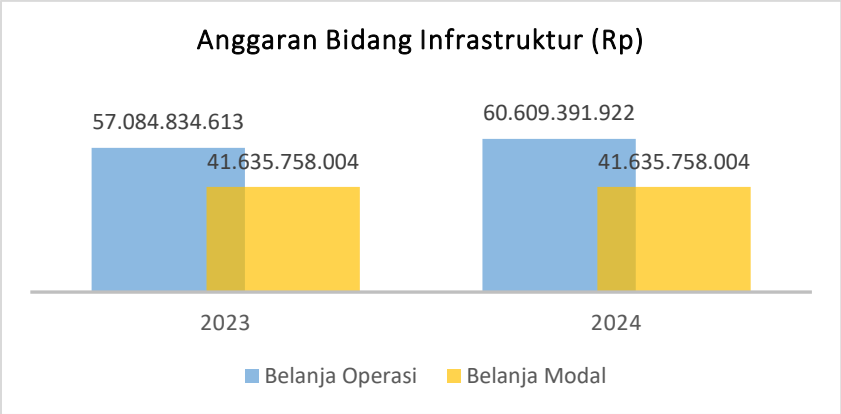




Gambar 4.13 Belanja Urusan Kesehatan dan Indikator Bidang Kesehatan

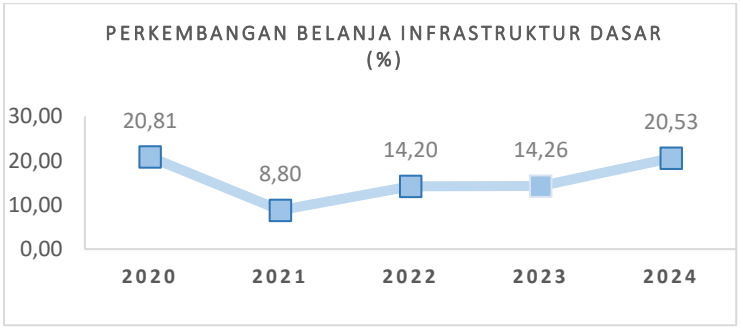
3. Belanja Urusan Infrastruktur Dasar

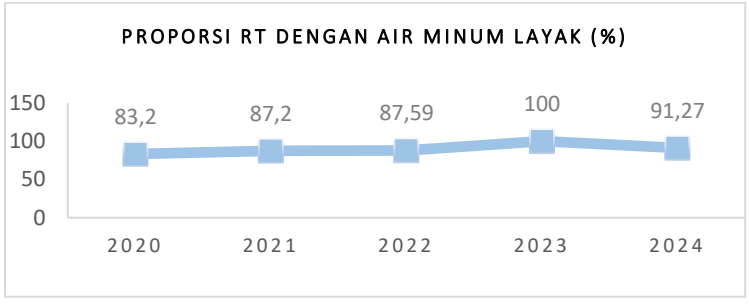
Bila dilihat serapan anggaran untuk infrastruktur dasar berdasarkan belanja urusan maka diketahui bahwa belanja infrastruktur dasar ternyata lebih banyak diserap untuk belanja operasi. Belanja operasi bidang infrastruktur dasar pada Tahun 2023 sebesar Rp. 58.389.133.414,- atau sebesar 59,28 persen dari total belanja yang meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Sisanya digunakan untuk belanja modal yaitu sebesar Rp. 41.635.758.004,- atau sebesar 40,72 persen dari total belanja yang meliputi belanja untuk belanja pembangunan jalan, jembatan, dan drainase serta belanja penyediaan rumah layak huni.

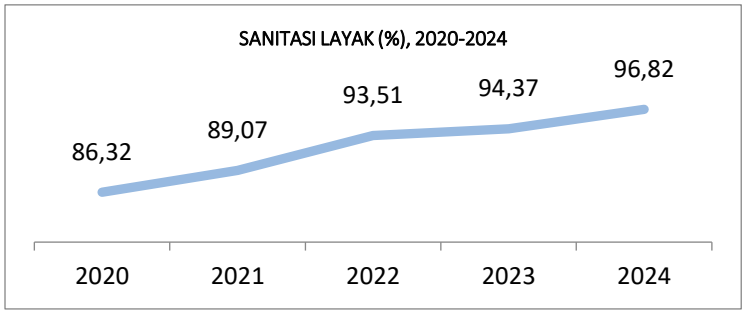


Gambar 4.14 Komposisi Belanja Urusan Infrastruktur Dasar Kota Tanjungbalai, 2023-2024

Pada Tahun 2020 belanja untuk infrastruktur dasar mencapai 20,81 persen kemudian pada Tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi sebesar 8,80 persen. Berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa kecendrungan peningkatan belanja infrastruktur dasar ternyata tidak diikuti dengan perkembangan proporsi RT dengan air minum layak. Persentase RT dengan air minum layak pada Tahun 2023 sudah mencapai 100 persen tetapi mengami penurunan menjadi sebesar 91,27 persen pada tahun 2024. Perkembangan belanja infrastruktur dasar ternyata sejalan dengan perkembangan sanitasi layak. Pada Tahun 2020 capaian sanitasi layak Kota Tanjungbalai sebesar 86,32 selanjutnya meningkat terus hingga menjadi 93,51 persen pada Tahun 2022 dan kembali mengalami peningkatan menjadi 96,82 persen pada Tahun 2023. Kegiatan ini dilakukan dilakukan melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang meliputi stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan, serta pengelolaan sampah dan limbah cair.



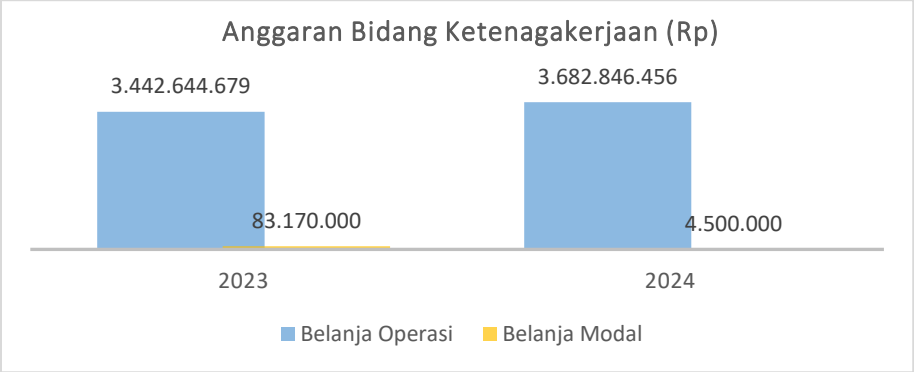




Gambar 4.15 Belanja Urusan Infrastruktur Dasar dan Indikator Bidang Infrastruktur Dasar, 2020-2024

4. Belanja Urusan Ketenagakerjaan

Belanja ketenagakerjaan mengacu pada anggaran yang dialokasikan untuk program-program terkait tenaga kerja, seperti pembinaan, pelatihan vokasi, dan dukungan manajemen. Bila dilihat serapan anggaran untuk ketenagakerjaan berdasarkan belanja urusan maka diketahui bahwa belanja ketenagakerjaan seluruhnya digunakan untuk belanja operasi. Belanja operasi bidang ketenagakerjaan dasar pada Tahun 2024 sebesar Rp. 3.682.846.456,- meliputi belanja pegawai dan belanja barang/jasa tetapi menurun menjadi Rp. 4.500.000.



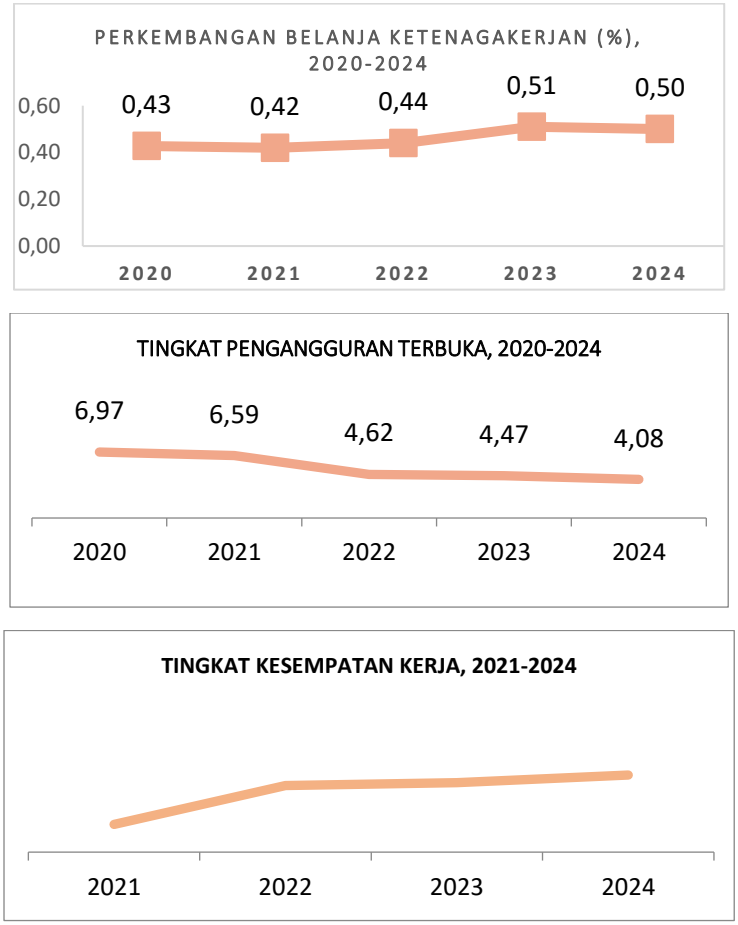
Gambar 4.16 Komposisi Belanja Urusan Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai, 2023-2024

Dilihat berdasarkan perkembangan selama lima tahun terakhir maka diketahui bahwa belanja ketenagakerjaaan menunjukkan fluktuasi. Pada Tahun 2020 alokasi belanja ketenagakerjaan sebesar 20,81 persen lalu menurun menjadi 14,20 persen pada Tahun 2022 hingga Kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 20,53 persen pada Tahun 2024.

Perkembangan belanja ketenagakerjaan ternyata tidak sejalan dengan perkembangan tingkat pengangguran terbuka yang menunjukkan penurunan. Grafik menunjukkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun 2020 hingga 2024. Terdapat penurunan TPT dari tahun 2020 dengan angka 6,97 persen menurun signifikan pada tahun 2022 dengan angka 4,62 persen dan terus menurun hingga tahun 2024 menjadi 4.08 persen. Penurunan TPT pada tahun 2024 menjadi 4,08 persen menandakan keberhasilan kebijakan dan inisiasi program yang diambil untuk

memperbaiki pasar tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Ini bisa mencerminkan pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan efektivitas program intervensi pasar tenaga kerja, seperti pelatihan kejuruan, subsidi upah, atau insentif bagi perusahaan untuk perekrutan.

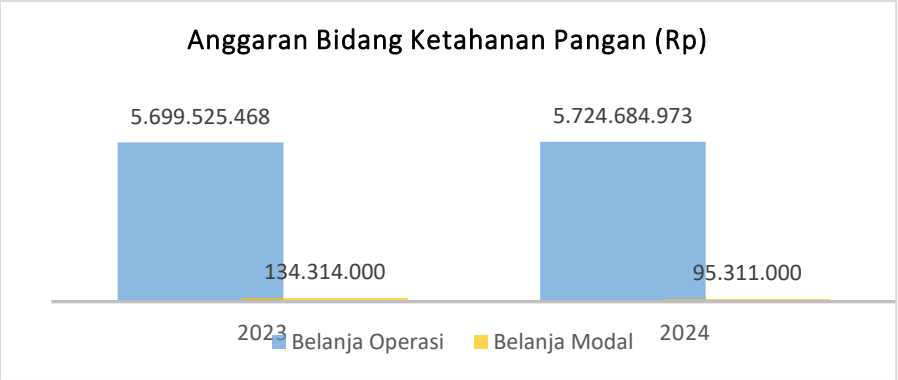
Kesempatan kerja merupakan perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Selama lima tahun terakhir tingkat kesempatan kerja Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 mencapai angka sebesar 93,41 persen meningkat menjadi 95,92 persen pada tahun 2024. Tren ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kesempatan kerja di Kota Tanjungbalai.



Gambar 4.17 Belanja Urusan Ketenagakerjaaan dan Indikator Bidang Ketenagakerjaan, 2021-2024

5. Belanja Urusan Ketahanan Pangan

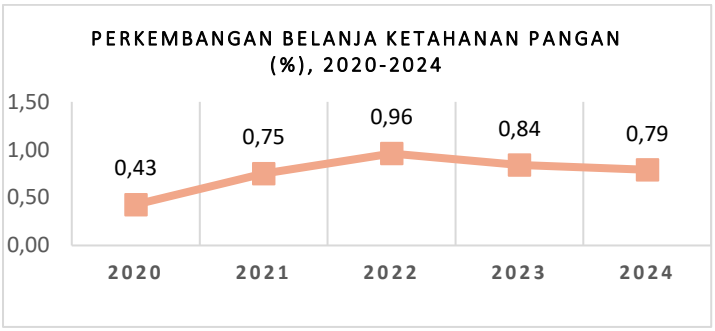
Bila dilihat serapan anggaran untuk ketahanan pangan berdasarkan belanja urusan maka diketahui bahwa belanja ketahanan pangan lebih banyak diserap untuk belanja operasi. Belanja operasi bidang ketahanan pangan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 5.724.684.973,- atau sebesar 98,36 persen dari total belanja yang meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Sisanya digunakan untuk belanja modal yaitu sebesar Rp. 95.311.000,- atau sebesar 1,64 persen dari total belanja yang meliputi belanja untuk belanja perlengkapan kantor.

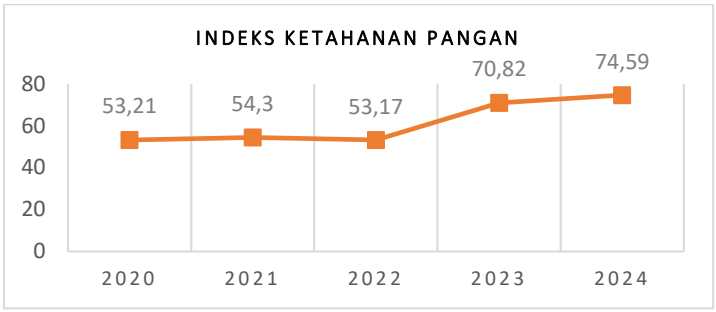


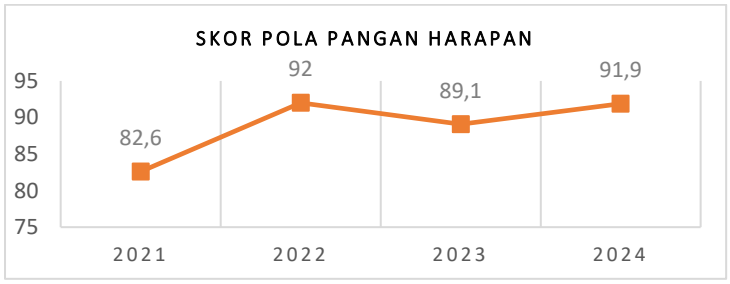
Gambar 4.18 Komposisi Belanja Urusan Ketahanan Pangan Kota Tanjungbalai, 2023-2024

Perkembangan belanja ketahanan pangan selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2020 alokasi besar belanja ketahanan pangan sebesar 0,43 persen meningkat menjadi 0,96 persen pada Tahun 2022. Selanjutnya Tahun 2024 alokasi belanja untuk bidang ini menurun hanya mencapai 0,79 persen. Tetapi tren perkembangan belanja ketahanan pangan ternyata tidak diikuti dengan perkembangan nilai petani yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Penurunan belanja untuk ketahanan pangan tidak sejalan dengan capaian indikator pangan. Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun 2023, Kota Tanjungbalai menunjukkan tingkat ketahanan pangan yang cukup baik dengan skor 70,83, meningkat menjadi 74,59 pada tahun 2024. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun akses ekonomi terhadap pangan cukup baik, perhatian lebih harus diberikan pada aspek pemanfaatan untuk memastikan bahwa seluruh penduduk tidak hanya memiliki akses, tetapi juga mengonsumsi pangan yang bergizi dan aman. Hal ini penting untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih holistik dan berkelanjutan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan







Gambar 4.19 Belanja Urusan Ketahanan Pangan dan Indikator Bidang Ketahanan Pangan

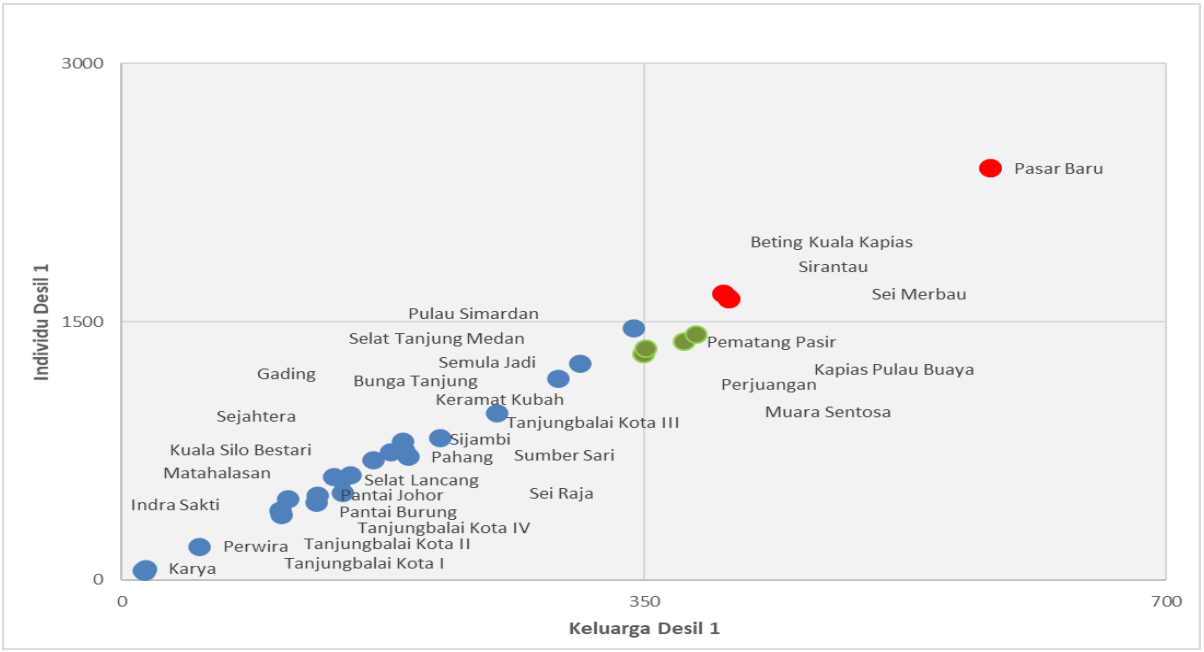
BAB V
PRIORITAS WILAYAH

5.1 Lokasi Prioritas

Analisis prioritas wilayah intervensi bertujuan untuk menentukan wilayah Kabupaten/Kota mana yang memiliki kondisi kritis yang perlu segera mendapatkan intervensi berdasarkan kondisi atau performance indikator utama dan indikator pendukung, dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Analisis wilayah intervnsi ieni menggunakan teknik analisis kuadran, dengan mempersandingkan antara dua indikator (indikator x dan indikator y) yang memiliki keterkaitan/hubungan

Melalui analisis kuadran ini dapat ditentukan 4 kategori prioritas intervensi sebagai berikut :

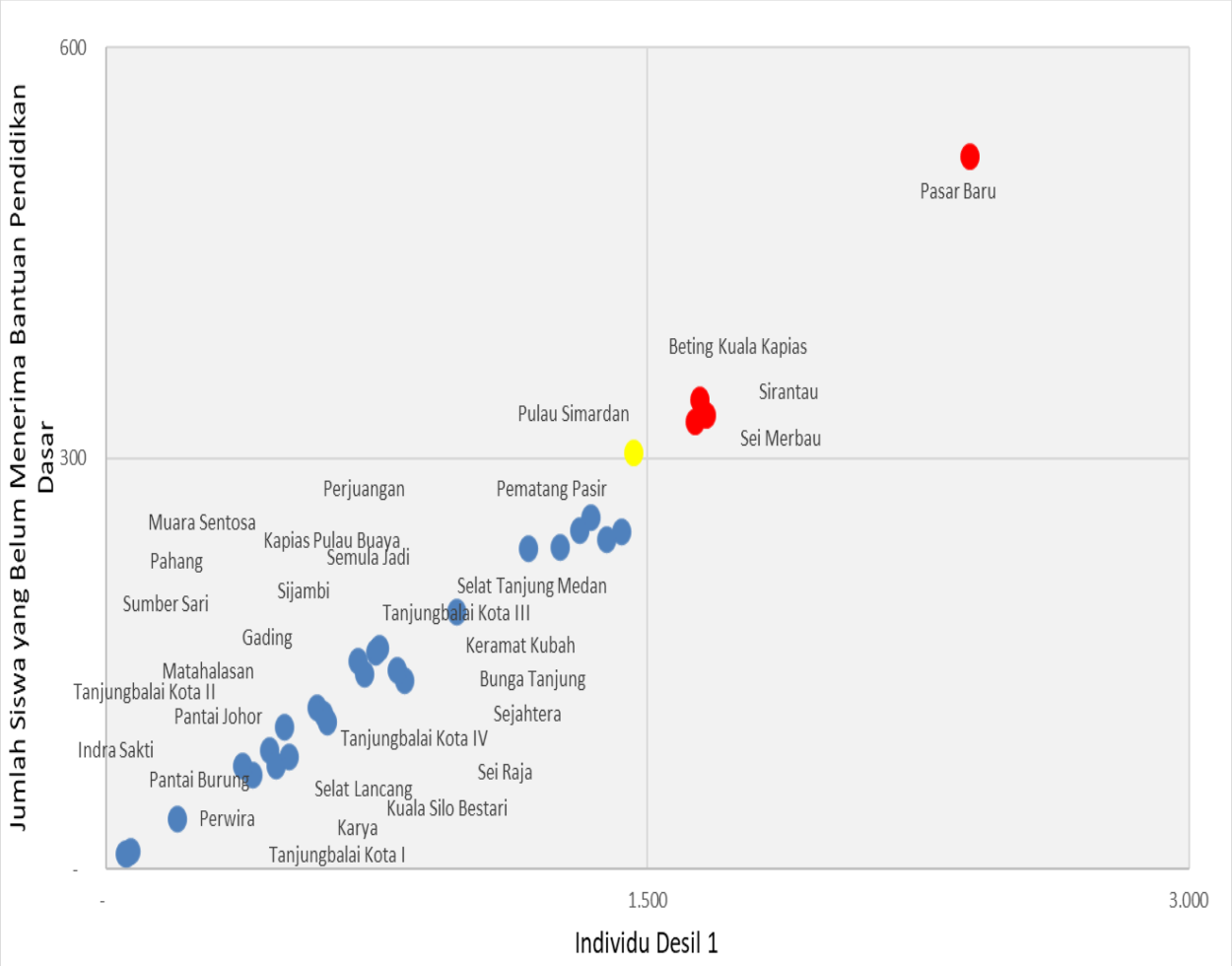
- Prioritas 1 : Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja indikator x dan y kedua-duanya negatif;
- Prioritas 2 : Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja indikator x negatif, namun indikator y positif;
- Prioritas 3 : Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja indikator x positif, namun indikator y negatif;
- Prioritas 4 : Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja indikator x dan y kedua-duanya positif. Prioritas 4, ini memilki derajat prioritas yang paling rendah atau disebut dengan wilayah non prioritas.



Gambar 5.1 Prioritas Lokasi Pengurangan Kantong-Kantong Kemiskinan

Lokasi yang menjadi prioritas pengurangan kantong-kantong kemiskinan karena merupakan kantong-kantong kemiskinan:

Prioritas 1	: Kelurahan Pasar Baru, Beting Kuala Kapias, Sirantau, Sei Merbau
Prioritas 2	: Kelurahan Pematang Pasir, Kapias Pulau Buaya, Perjuangan, Muara Sentosa
Prioritas 3	: Kelurahan Pulau Simardan, Selat Tanjung Medan, Semula Jadi, Gading, Bunga Tanjung, Keramat Kubah, Sejahtera, Tanjungbalai Kota III, Kuala Silo Bestari, Sijambi, Pahang, Sumber Sari, Matahalasan, Selat lancing, Pantai Johor, Sei Raja, Pantai Burung, Tanjungbalai Kota IV, Perwira, Tanjungbalai Kota II, Karya, Tanjungbalai Kota I

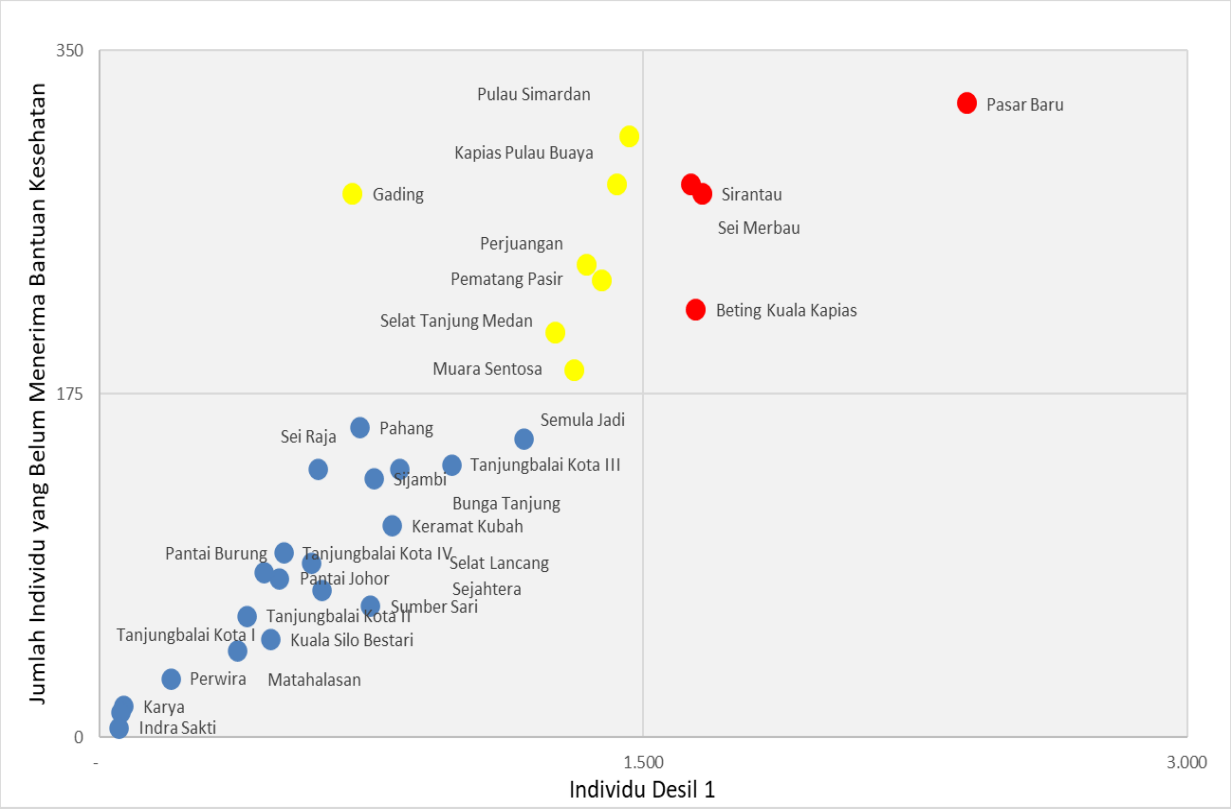


Gambar 5.2

Prioritas Lokasi Penerima Bantuan Pendidikan

Lokasi yang menjadi prioritas penerima bantuan pendidikan dasar adalah sebagai berikut:

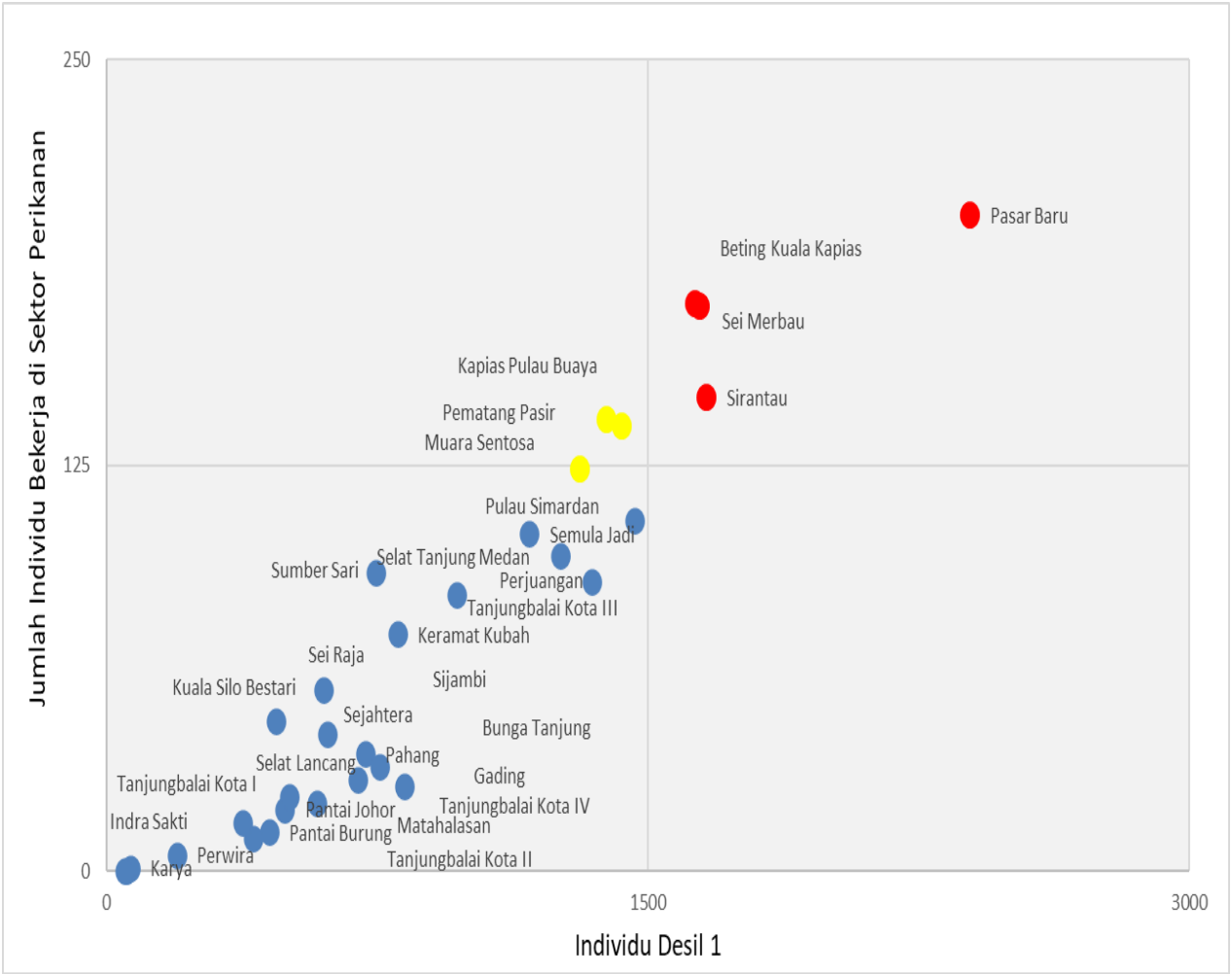
Prioritas 1	: Kelurahan Pasar Baru, Beting Kuala Kapias, Sirantau, Sei Merbau
Prioritas 2	: Kelurahan Pulau Simardan
Prioritas 3	: Kelurahan Selat Tanjung Medan, Semula Jadi, Gading, Bunga Tanjung, Keramat Kubah, Sejahtera, Tanjungbalai Kota III, Kuala Silo Bestari, Sijambi, Pahang, Sumber Sari, Matahalasan, Selat lancing, Pantai Johor, Sei Raja, Pantai Burung, Tanjungbalai Kota IV, Perwira, Tanjungbalai Kota II, Karya, Tanjungbalai Kota I, Pematang Pasir, Kapias Pulau Buaya, Perjuangan, Muara Sentosa



Gambar 5.3
Prioritas Lokasi Penerima Bantuan Kesehatan

Lokasi yang menjadi prioritas penerima bantuan kesehatan adalah sebagai berikut:

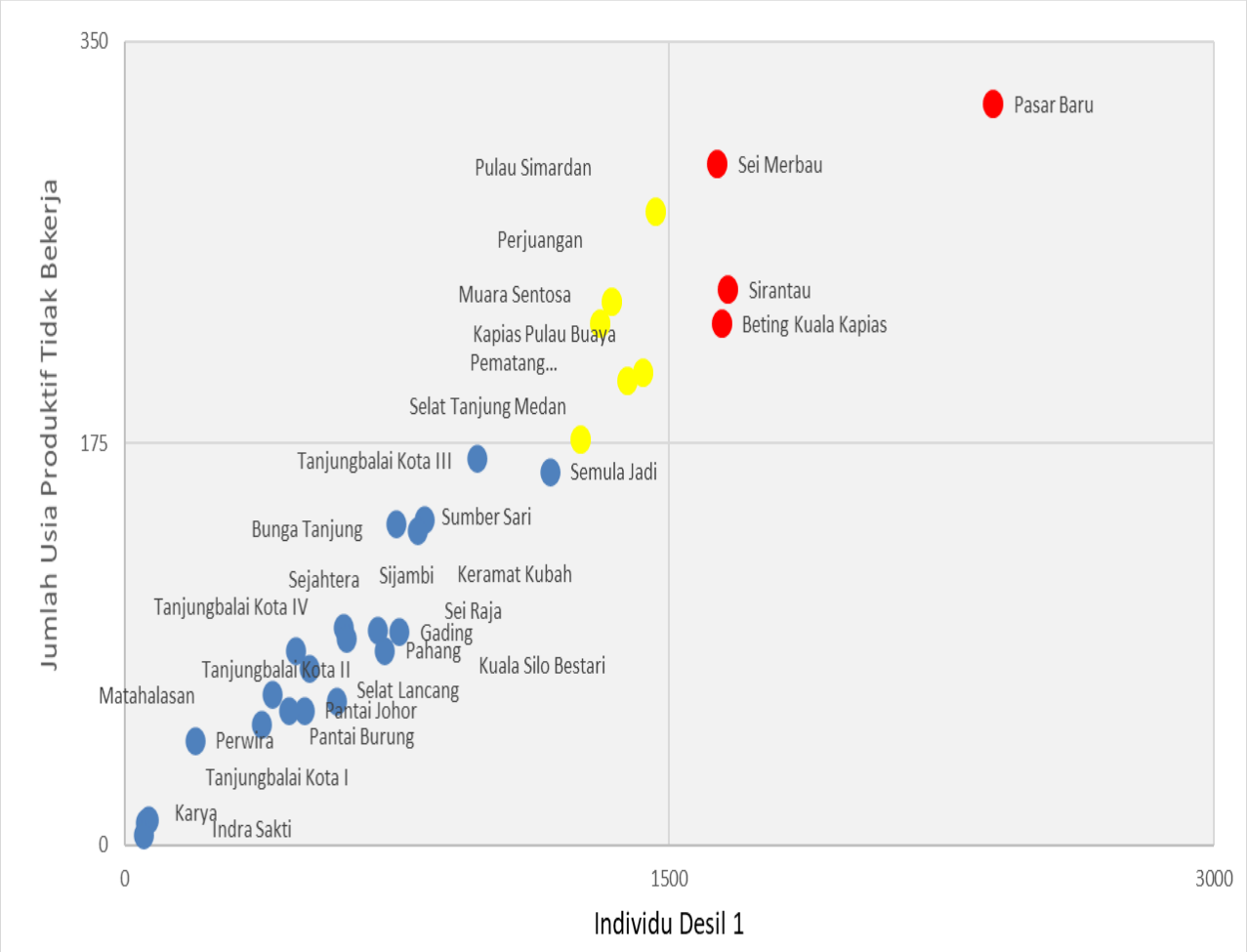
Prioritas 1	: Kelurahan Pasar Baru, Beting Kuala Kapias, Sirantau, Sei Merbau
Prioritas 2	: Kelurahan Pulau Simardan Pematang Pasir, Selat Tanjung Medan, Gading, Kapias Pulau Buaya, Perjuangan, Muara Sentosa
Prioritas 3	: Kelurahan Semula Jadi, Bunga Tanjung, Keramat Kubah, Sejahtera, Tanjungbalai Kota III, Kuala Silo Bestari, Sijambi, Pahang, Sumber Sari, Matahalasan, Selat lancing, Pantai Johor, Sei Raja, Pantai Burung, Tanjungbalai Kota IV, Perwira, Tanjungbalai Kota II, Karya, Tanjungbalai Kota I



Gambar 5.4
Prioritas Lokasi Penerima Bantuan Sektor Perikanan

Lokasi yang menjadi prioritas penerima bantuan di Sektor perikanan adalah sebagai berikut:

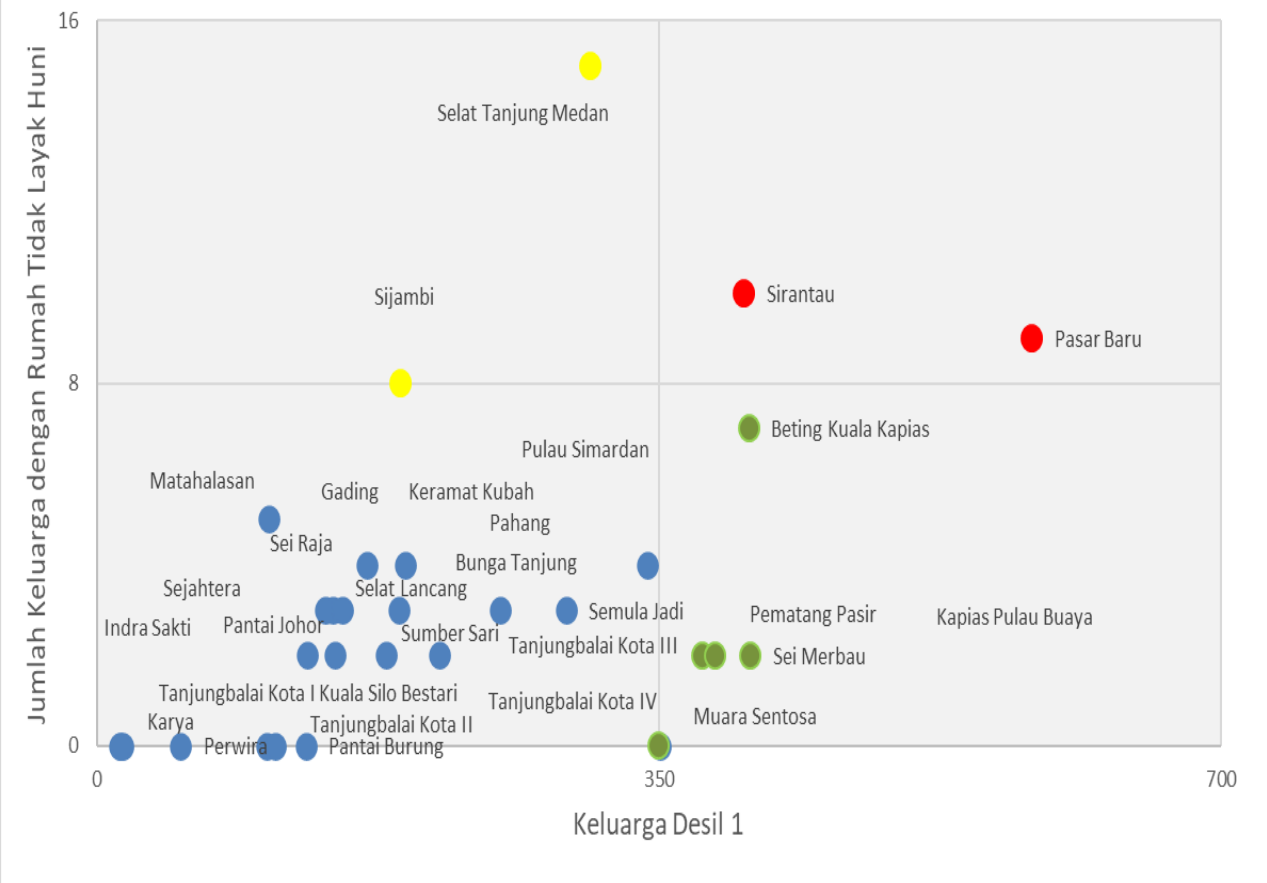
Prioritas 1	: Kelurahan Pasar Baru, Beting Kuala Kapias, Sirantau, Sei Merbau
Prioritas 2	: Kelurahan Pematang Pasir, Kapias Pulau Buaya, Muara Sentosa
Prioritas 3	: Kelurahan Semula Jadi, Bunga Tanjung, Keramat Kubah, Sejahtera, Tanjungbalai Kota III, Kuala Silo Bestari, Sijambi, Pahang, Sumber Sari, Matahalasan, Selat lancing, Pantai Johor, Sei Raja, Pantai Burung, Tanjungbalai Kota IV, Perwira, Tanjungbalai Kota II, Karya, Tanjungbalai Kota I, Pulau Simardan, Selat Tanjung Medan, Gading, Perjuangan



Gambar 5.5
Prioritas Lokasi Penerima Bantuan Wirausaha

Lokasi yang menjadi prioritas penerima bantuan wirausaha adalah sebagai berikut:

Prioritas 1	: Kelurahan Pasar Baru, Beting Kuala Kapias, Sirantau, Sei Merbau
Prioritas 2	: Kelurahan Pulau Simardan, Pematang Pasir, Selat Tanjung Medan, Kapias Pulau Buaya, Perjuangan, Muara Sentosa
Prioritas 3	: Kelurahan Semula Jadi, Bunga Tanjung, Keramat Kubah, Sejahtera, Tanjungbalai Kota III, Kuala Silo Bestari, Sijambi, Pahang, Sumber Sari, Matahalasan, Selat lancing, Pantai Johor, Sei Raja, Pantai Burung, Tanjungbalai Kota IV, Perwira, Tanjungbalai Kota II, Gading, Karya, Tanjungbalai Kota I



Gambar 5.6
Prioritas Lokasi Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

Lokasi yang menjadi prioritas penerima bantuan rumah tidak layak huni adalah sebagai berikut:

Prioritas 1	: Kelurahan Pasar Baru, Sirantau,
Prioritas 2	: Kelurahan Selat Tanjung Medan, Sijambi
Prioritas 3	: Kelurahan Beting Kuala Kapias, Pematang Pasir, Sei Merbau, Kapias Pulau Buaya, Perjuangan, Muara Sentosa
Prioritas 4	: Kelurahan Semula Jadi, Bunga Tanjung, Pulau Simardan Keramat Kubah, Sejahtera, Tanjungbalai Kota III, Kuala Silo Bestari, , Pahang, Sumber Sari, Matahalasan, Selat lancing, Pantai Johor, Sei Raja, Pantai Burung, Tanjungbalai Kota IV, Perwira, Tanjungbalai Kota II, Gading, Karya, Tanjungbalai Kota I

5.2 Monitoring dan Evaluasi

Fungsi monitoring mempunyai nilai yang sama bobotnya dengan fungsi perencanaan. Conor (1974) menjelaskan bahwa keberhasilan dalam mencapai tujuan, separuhnya ditentukan oleh rencana yang telah ditetapkan dan setengahnya lagi fungsi oleh pengawasan atau monitoring. Pada umumnya, manajemen menekankan pentingnya kedua fungsi ini, yaitu perencanaan dan pengawasan (monitoring). Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun. Monitoring digunakan pula untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi penyalahgunaan aturan dan sumber-sumber, serta untuk mengupayakan agar tujuan dicapai seefektif dan seefisien mungkin.

Tujuan utama monitoring adalah untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan program sebagai umpan balik bagi para pengelola dan pelaksana program. Informasi ini hendaknya dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwenang untuk:

a. memeriksa kembali strategi pelaksanaan program sebagaimana sudah direncanakan setelah membandingkan dengan kenyataan di lapangan,
b. menemukan permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program,
c. mengetahui faktor-faktor pendungkung dan penghambat penyelenggaraan program.

Evaluasi merupakan kegiatan penting untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, apakah program sesuai dengan rencana, dan atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan. Keberhasilan pelaksanaan monitoring dan

evaluasi perlu dilandasi oleh kejujuran, motivasi dan kesungguhan yang kuat dari para pelaku. Selain itu, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah:

1. Obyektif dan profesional

   Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara profesionalberdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara obyektif dan masukan yang tepat terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

2. Transparan

   Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara terbuka dan dilaporkan secara luas melalui berbagai media yang ada agar masyarakat dapat mengakses dengan mudah tentang informasi dan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi.

3. Partisipatif

   Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melibatkan secara aktif dan interaktif para pelaku penanggulangan kemiskinan, termasuk masyarakat miskin itu sendiri.

4. Akuntabel

   Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal.

5. Tepat waktu
   Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dilakukan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

6. Berkesinambungan
   Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan agar dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan.

7. Berbasis indikator kinerja;
   Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja, baik indikator masukan, proses, keluaran, manfaat maupun dampak.

Adapun yang menjadi mekanisme dan prosedur dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari dari monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan. Data dan informasi yang dikumpulkan selain berbagai indikator sosial ekonomi yang dapat memberikan pemahaman akurat tentang kondisi masyarakat miskin, juga meliputi data dan informasi kinerja kebijakan/program penanggulangan kemiskinan yang dapat memberikan gambaran status dan pencapaian upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.

Data dan informasi yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan diperoleh dari: (1) hasil laporan rutin perangkat daerah/lembaga pelaksana kebijakan dan program; (2) hasil pendataan oleh Kantor Badan Pusat Statistik, dan lembaga pengumpul data lainnya; (3) hasil penelitian dan kajian kemiskinan partisipatif yang dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga penelitian; (4) hasil pemberitaan media; dan (5) hasil laporan dari kelompok masyarakat.

2. Pelaporan

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang kondisi kemiskinan dan kinerja kebijakan/program secara obyektif dan sistematik. Pelaporan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat sebagai pelaku monev penanggulangan kemiskinan, baik institusi pemerintah maupun non pemerintah, di pusat maupun di daerah. Laporan yang dihasilkan oleh berbagai pihak tersebut harus diverifikasi dan dikonsolidasi agar menghasilkan informasi yang akurat dan sistematis.

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan dilakukan secara teratur dan berkala serta disusun dalam bentuk laporan lengkap dan laporan populer yang sederhana, menarik, dan mudah dipahami serta mudah diakses oleh publik. Pelaporan hasil-hasil monev disesuaikan dengan proses perencanaan pembangunan nasional, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah Tahunan (RKP) .

3. Diseminasi

Hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan menjadi hak publik yang dapat diakses secara terbuka, cepat dan mudah. Oleh sebab itu, hasil laporan monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan perlu didesiminasikan kepada para pengambil keputusan, media massa dan masyarakat luas melalui berbagai saluran informasi seperti media cetak, media elektronik, dan media komunikasi lain yang mudah diakses oleh publik.

4. Pemanfaatan dan Tindak Lanjut

Hasil temuan dari kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan: (1) memberikan umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, (2) melakukan pengarusutamaan dan sinkronisasi berbagai kebijakan dan program, (3) meningkatkan keterbukaan pengelolaan, dan (4) pertanggungjawaban publik terhadap pelaksanaan kebijakan dan program.

Evaluasi penanggulangan kemiskinan berhubungan erat dengan program-program yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. TKPK Kota Tanjungbalai harus melakukan evaluasi atas pelaksanaan program penanggulangan kemisknan, apakah sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan atau tidak atau tepat sasaran atau tidak. mengawasi ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan terkait kemiskinan, dilakukan

monitoring dan evaluasi oleh TKPK Kota Tanjungbalai secara berkala. Kegiatan ini dilaksanakan secara terintegrasi dengan perangkat daerah pelaksana kegiatan penanggulangan kemiskinan sehingga berbagai temuan dan hasil yang didapat di lapangan dapat secara langsung dievaluasi dan ditindaklanjuti. Adapun capaian progres fisik dan keuangan program/ kegiatan penanggulangan kemiskinan secara detail per bulan.

5.3 Organisasi dan Kelembagaan

Sistem monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan suatu pembagian peran yang proporsional pada mekanisme di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan dan kota. Akan tetapi, kegiatan monev tidak perlu mengembangkan suatu struktur kelembagaan baru, melainkan lebih kepada upaya revitalisasi, penguatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyempurnaan prosedur dan mekanisme kerja dari berbagai institusi yang sudah ada.

Tatanan kelembagaan monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/kota pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan di pusat, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) menjadi penanggung jawab utamanya. TKPKD memfasilitasi Forum Konsultasi Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Forum Konsultasi Monev Daerah) yang merupakan institusi tertinggi untuk pengkajian dan pengambilan kebijakan atas hasil-hasil monev penanggulangan kemiskinan, baik yang dilakukan secara internal oleh lembaga pemerintah maupun secara independen oleh lembaga non pemerintah. Forum Monev Daerah adalah sebuah forum lintas pelaku yang unsur-unsurnya melibatkan lembaga-lembaga non pemerintah. Sedangkan untuk melakukan kegiatan teknis operasional konsolidasi hasil-hasil monev di daerah TKPKD membentuk Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Pokja Monev Daerah). Pokja Monev Daerah dikoordinasi oleh lembaga dengan fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan, didukung oleh kantor statistik dan lembaga lain sesuai kebutuhan. Hasil konsolidasi monitoring dan evaluasi oleh Pokja Monev Daerah disampaikan kepada Forum Monitoring dan Evaluasi Daerah.

5.4 Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat yang mencakup kegiatan penerimaan, pencatatan, penelahaan, penyaluran, tindak lanjut, pemantauan dan pengarsipan di Kota Tanjungbalai sudah terlaksana sesuai dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dengan tenaga pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan azas penyelesaian dengan cepat dan tuntas.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kota Tanjungbalai secara berkesinambungan terus

berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui penanganan pengaduan masyarakat khususnya terkait pelayanan penanggulangan kemiskinan di lingkup Pemerintah Kota Tanjungbalai. Mengenai program kegiatan yang berbasis pada penanggulangan kemiskinan, masyarakat Kota Tanjungbalai dapat melakukan koordinasi melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan maupun permasalahan yang terjadi di lapangan terkait dengan berbagai upaya dalam penangangan kemiskinan kepada perangkat daerah terkait. Pengaduan permasalahan, pertanyaan atau koordinasi dapat disampaikan baik secara langsung maupun tertulis dengan metode penanganan masalah dilakukan secara hierarki maupun birokrasi.

BAB VI
PENUTUP

Rekomendasi Kebijakan yang dapat dilakukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Tanjungbalai untuk mengurangi kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pendidikan

a. Perlunya perhatian pemerintah Kota Tanjungbalai untuk terus meningkatkan partisipasi pendidikan usia sekolah melalui program pemberian beasiswa kepada siswa miskin dan rentan;

b. Meningkatkan dan mengoptimalkan program penjaringan anak putus sekolah melalui program Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C dalam meningkatkan akses pendidikan dasar 12 tahun;

c. Mengarustamakan intervensi program pendidikan inklusif terutama bagi yang berkebutuhan khusus;

d. Melakukan pemerataan tenaga pendidik terutama guru pengajar, baik guru yang berstatus pegawai tetap maupun P3K;

e. Meningkatkan persentase alokasi anggaran kegiatan yang mendukung peningkatan mutu kualitas pendidikan dasar seperti peningkatan fasilitas sarana-prasarana sekolah, terutama pembangunan laboratorium, perpustakaan, serta pengadaan buku dan alat praktik;

f. Mengalokasikan anggaran kegiatan untuk meningkatkan peran dan fungsi dari Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu Pendidikan;

g. Meningkatkan alokasi anggaran untuk proses penilaian akreditasi sekolah khususnya.

2. **Kebijakan Kesehatan**

a. Memperkuat basis pelayanan Kesehatan, Ibu dan Anak (KIA) dalam jaminan Kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC)

b. Melakukan evaluasi kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan untuk mengetahui sejauh mana tenaga medis dan fasilitas kesehatan terdistribusi secara merata dan berkualitas antar kecamatan atau kelurahan, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

c. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan pelayanan (SOP) kesehatan terutama di puskesmas, pustu, polindes, posyandu, dan rumah sakit.

d. Penguatan sistem rujukan internal baik untuk *maternal* maupun *neonatal* terutama kepada pasien pasca operasi di RSUD.

e. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan supervisi fasilitatif bidan koordinator di tingkat puskesmas, dengan pembinaan aspek klinis, non klinis, logistik dan manajemen KIA.

f. Penguatan sistem rujukan balik dari rumah sakit ke puskesmas sehingga setiap kasus neonatal yang terjadi di rumah sakit terdeteksi dengan cepat oleh bidan puskesmas dan Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi dengan melakukan pelacakan kasus neonatal risiko tinggi.

g. Revitalisasi program Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan sosialiasi penundaan usia perkawinan.

h. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran denganmengalokasikan lebih besar porsi anggaran kepada program-program dan kegiatan prioritas untuk penurunan AKI, AKB, dan AKBA.

i. Perlunya peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Upaya ini dilakukan dengan memperluas sosialisasi pentingnya PHBS dan lingkungan sehat oleh dinas-dinas terkait

3. Kebijakan UMKM

a. Perlunya penetapan Pelaku Usaha Mikro yang termasuk dalam katagori miskin. Kondisi ini dibutuhkan untuk memastikan ketepatan sasaran dalam memberikan bantuan dan pendampingan sehingga terwujudnya peningkatan pendapatan UMKM dalam waktu singkat dan program UMKM naik kelas dapat terwujud;

b. Perlunya pemberian pendidikan dan pelatihan pengelolaan usaha kecil mikro dan menengah bagi pelaku usaha yang termasuk dalam katagori miskin dan rentan miskin;

c. Perlunya dilakukan pembinaan dan pendampingan usaha bagi pelaku usaha yang termasuk dalam katagori miskin dan rentan miskin;

d. Pemberian prioritas kemudahan/bantuan modal usaha bagi pelaku usaha yang termasuk dalam katagori miskin dan rentan miskin;

4. **Kebijakan Infrastruktur Dasar**

a. Revitalisasi sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang kurang memadai terutama di berbagai kantong wilayah kumuh perkotaan, seperti: penyaluran air bersih, pengolahan limbah, sistem pengelolaan sampah, saluran drainase dan penanggulangan banjir, dan perbaikan kondisi jalan;

b. Penajaman ketepatan dan sasaran penerima manfaat program pembangunan rumah layak huni termasuk pengembangan rumah sehat, pipanisasi air bersih, dan air minum bagi rumah tangga miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin;

c. Program dan kegiataan infrastruktur yang telah diagendakan dan dialokasikan dalam anggaran APBD sedapat mungkin segera direalisasikan agar pemenuhan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat dengan kurangnya sarana dan prasarana;

d. Peningkatan kualitas perencanaan, kebijakan dan penyelenggaran pembangunan kawasan permukiman kumuh berdasarkan pada *evidence based* dan data yang tersedia;

e. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pemenuhan sanitasi layak, air minum layak, akses listrik, rumah layak huni setiap tahun dalam APBD Kota Tanjungbalai.

5. Kebijakan Pertanian dan Perikanan

a. Perlunya dukungan dan perhatian bagi peningkatan kesejahteraan petani/nelayan dengan berfokus pada peningkatan penghasilan petani/nelayan miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin;

b. Perlunya melakukan identifikasi terhadap penduduk miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin yang bekerja sebagai buruh tani/nelayan, kondisi ini dibutuhkan untuk memastikan agar manfaat program pertanian, perkebunan, dan perikanan juga diterima oleh buruh tani dan nelayan dengan status miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin sehingga tidak hanya berfokus pada kelompok tani/nelayan;

c. Revitalisasi sarana dan prasarana pendukung sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang kurang memadai terutama bagi kecamatan-kecamatan dengan luas lahan dan produksi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan tinggi serta kecamatan-kecamatan dengan penduduk miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan juga tinggi;

d. Penajaman ketepatan dan sasaran penerima manfaat program pembagian alat dan mesin pertanian/perikanan/kelautan, bantuan bibit, bantuan pupuk, pelatihan petani dan nelayan bagi penduduk rumah tangga miskin dan rentan miskin yang bekerja di sektor pertanian, dan perikanan.

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM
TAHUN 2025 - 2029

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas real			Alokasi Anggaran					Sumber Pembiayaan	Sifat bantuan	Lokasi	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak langsung	Penunjang	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11			12	13	14	17	18
1	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.0038	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Penyelarasan program antara Dinas Pendidikan, sekolah, pengawas, dan komite sekolah untuk membangun sinergi dan menyelesaikan kendala teknis di lapangan			115.066.000,00	120.500.000	126.525.000	126.525.000	125.200.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Dukungan Program prioritas	1 kali
2	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03.0002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan ruang kelas			273.135.000,00	285.700.000	299.985.000,00	299.985.000,00	280.250.000,00	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan pembangunan fisik	1 kali
3	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03.0034	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Fasilitasi Lomba anak PAUD			99.721.000,00	104.700.000	109.900.000,00	109.900.000,00	85.250.000,00	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	fasilitasi dan pengembangan potensi non-akademik maupun akademik siswa	1 kali
4	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.0025	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Fasilitasi Lomba dan Kompetisi OSN (olimpiade sains nasional)			490.723.325,00	425.000.000	450.000.000,00	450.000.000,00	250.200.000,00	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	fasilitasi dan pengembangan potensi non-akademik maupun akademik siswa	1 kali
5	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.0019	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pemeliharaan bangunan sekolah			473.515.000,00	497.150.000	450.250.000,00	450.250.000,00	300.000.000,00	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Jasa dan Layanan Perbaikan	selama setahun
6	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.0014	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Mebel Sekolah	pengadaan langsung perlengkapan mebelair			476.800.000,00	694.640.000	225.672.000,00	225.672.000,00	236.955.600,00	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Pendidikan	selama setahun
7	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03.0009	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD			361.670.000,00	385.700.000	385.750.000,00	385.750.000,00	320.750.000,00	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan pengadaan perlengkapan sekolah	selama setahun
8	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.0046	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	menyediakan fasilitas pendukung siswa (seperti seragam, tas, buku, atau alat praktik)			300.000.000,00	315.750.000	330.500.000,00	330.500.000,00	347.500.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan pengadaan perlengkapan sekolah	1 kali
9	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03.0018	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	mendukung biaya operasional nonpersonalia satuan pendidikan			1.306.800.000,00	1.372.140.000,00	1.372.140.000,00	1.372.140.000,00	1.372.140.000,00	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	2 tahanp
10	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04.0017	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaran	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	penyaluran dana ke satuan pendidikan (Paket A, B, C)			1.026.700.000,00	1.078.035.000,00	1.078.035.000,00	1.078.035.000,00	1.078.035.000,00	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	2 tahap
11	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.0029	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	mendukung biaya operasional nonpersonalia satuan pendidikan			13.203.900.000,00	13.864.095.000,00	13.864.095.000,00	13.864.095.000,00	13.864.095.000,00	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	2 tahap
12	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.0042	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	mendukung biaya operasional nonpersonalia satuan pendidikan			8.526.900.000,00	8.950.200.000	8.950.200.000,00	8.950.200.000,00	8.953.245.000,00	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	2 tahap
13	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03.0015	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		Pemberian insentif, honorarium, atau tunjangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan		600.200.000,00	430.210.000	350.700.000,00	350.700.000,00	350.100.000,00	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Fasilitasi pelaksanaan pendidikan	selama setahun

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas real			Alokasi Anggaran					Sumber Pembiayaan	Sifat bantuan	Lokasi	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak langsung	Penunjang	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11			12	13	14	17	18
14	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.0039	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Pemberian insentif, honorarium, atau tunjangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan		162.000.000,00	170.100.000,00	173.502.000,00	173.502.000,00	175.500.000,00	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Fasilitasi pelaksanaan pendidikan	selama setahun
15	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.0050	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Menyediakan media pengajaran, modul,			125.994.000,00	150.200.000	157.710.000,00	157.710.000,00	185.300.000,00	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Fasilitasi pelaksanaan pendidikan	selama setahun
16	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.0048	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Perbaikan fasilitas pendukung seperti mebel (meja, kursi), fasilitas perpustakaan, dan laboratorium, listrik			2.500.723.547,00	1.050.000.000	720.000.000,00	720.000.000,00	527.250.000,00	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan pembangunan fisik	selama setahun
17	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Pendidikan	2.22.03.2.01.0001	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	lokakarya, seminar, kelas daring, maupun pelatihan			121.937.000,00	108.525.000	65.000.000,00	65.000.000,00	66.300.000,00	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	fasilitasi dan pengembangan potensi non-akademik maupun akademik siswa	1 kali
18	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0012	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Melakukan Penyuluhan dan Edukasi serta pemeriksan laboratorium			39.838.391.555	40.970.250.152	41.350.140.000	41.350.140.000	41.350.140.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan layanan kesehatan preventif dan promotif	selama setahun
19	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.05.2.01.0001	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)			17.470.000	17.470.000	17.470.000	17.470.000	17.470.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan layanan kesehatan preventif dan promotif	selama setahun
20	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.05.2.03.0001	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya		Bimtek Kader Kesehatan		20.800.000	20.800.000	20.800.000	20.800.000	20.800.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan	1 kali
21	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0026	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	premi BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta			8.838.593.400	8.838.593.400	8.838.593.400	8.838.593.400	8.838.593.400	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan iuran jaminan kesehatan	selama setahun
22	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0003	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	pelayanan medis, asuhan klinis, dan edukasi kesehatan untuk bayi usia 0-28 hari			12.045.000	12.045.000	12.045.000	12.045.000	12.045.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Pelayanan Kesehatan Klinis	selama setahun
23	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0025	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Skrining dan Deteksi Dini			1.090.375.200	1.090.375.200	1.090.375.200	1.090.375.200	1.090.375.200	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Pelayanan Kesehatan Klinis	selama setahun
24	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.03.2.02.0002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Memberikan pelatihan, bimbingan teknis, dan pemenuhan standar kesejahteraan untuk menjaga kualitas layanan			1.265.400.000	1.265.400.000	1.265.400.000	1.265.400.000	1.265.400.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Fasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan	selama setahun

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas real			Alokasi Anggaran					Sumber Pembiayaan	Sifat bantuan	Lokasi	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak langsung	Penunjang	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	17	18
25	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.01.0023	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman			3.137.988.297	3.137.988.297	3.137.988.297	3.137.988.297	3.137.988.297	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Fasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan	selama setahun
26	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0001	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	pemeriksaan rutin ibu hamil sesuai standar			26.590.000	26.590.000	26.590.000	26.590.000	26.590.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Pelayanan Kesehatan Klinis	selama setahun
27	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Penanganan ibu bersalin dengan memantau kemajuan persalinan (kala 1 hingga kala 4) di fasilitas kesehatan untuk mencegah risiko komplikasi			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Pelayanan Kesehatan Klinis	selama setahun
28	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0010	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pemeriksaan fisik dan status mental, penetapan diagnosis, penyediaan obat rutin, hingga rujukan medis ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (seperti RS Jiwa)			33.120.000	33.120.000	33.120.000	33.120.000	33.120.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Pelayanan Kesehatan Klinis	selama setahun
29	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0017	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	memperbaiki atau mencegah masalah lingkungan, seperti penyuluhan, perbaikan sanitasi dasar			236.216.000	236.216.000	236.216.000	236.216.000	236.216.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Pelayanan Kesehatan Klinis	selama setahun
30	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0012	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pemeriksaan dan Konseling (VCT & PIT)			12.800.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Pelayanan Kesehatan Klinis	selama setahun
31	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0040	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Skrining dan Pengobatan TBC			512.000.000	512.000.000	512.000.000	512.000.000	512.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Pelayanan Kesehatan Klinis	selama setahun
32	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0007	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pemeriksaan Kesehatan Berkala			69.930.000	76.923.000	84.615.300	93.076.830	102.384.513	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan layanan kesehata promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif	selama setahun
33	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0006	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut (deteksi obesitas), serta tekanan darah (deteksi hipertensi) dan diabetes			40.564.000	44.620.400	49.082.440	53.990.684	59.389.752	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan layanan kesehatan preventif dan promotif	selama setahun
34	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0009	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pemantauan Glukosa Darah, Terapi Nutrisi Medis dan Edukasi dan Deteksi Dini			25.920.000	28.512.000	31.363.200	34.499.520	37.949.472	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Pelayanan Kesehatan Klinis	selama setahun

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas real			Alokasi Anggaran					Sumber Pembiayaan	Sifat bantuan	Lokasi	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak langsung	Penunjang	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	17	18
35	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0008	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Tatalaksana Pengobatan, Edukasi dan Konseling dan deteksi dini			11.750.000	12.925.000	14.217.500	15.639.250	17.203.175	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Pelayanan Kesehatan Klinis	selama setahun
36	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0020	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Penyelidikan Epidemiologi (PE)			623.446.500	685.791.150	754.370.265	829.807.292	912.788.021	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Pelayanan Kesehatan Klinis	selama setahun
37	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0046	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pemeriksaan kehamilan dan bayi baru lahir			394.280.000	433.708.000	477.078.800	524.786.680	577.265.384	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Pelayanan Kesehatan Klinis	selama setahun
38	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.04.2.01.0001	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Melakukan pemantauan langsung ke fasilitas seperti Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal, dan UMOT guna memeriksa kelengkapan izin, fasilitas fisik, serta kesesuaian operasional		0	-	0	0	0	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pengawasan Obat dan Makanan (POM)	selama setahun
39	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0029	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Desa/Kelurahan Sehat, penyuluhan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dan deteksi dini penyakit			7.050.000	7.755.000	8.530.500	9.383.550	10.321.905	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan fasilitasi dan pembinaan	selama setahun
40	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.05.2.02.0001	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Melakukan edukasi langsung kepada masyarakat secara individu maupun kelompok (seperti di Posyandu) terkait penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan pencegahan penyakit			167.400.000	184.140.000	202.554.000	222.809.400	245.090.340	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan operasional, dukungan sarana/prasarana, serta fasilitas penyuluhan	selama setahun
41	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kesehatan	1.02.04.2.06.0001	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		Pengambilan sampel produk PIRT secara acak di sarana peredaran (pasar tradisional, swalayan, atau retail)		25.104.000	27.614.400	30.375.840	33.413.424	36.754.766	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pengawasan Obat dan Makanan (POM)	1 kali
42	Mengurangi Beban Pengeluaran	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	1.02.02.2.01.0008	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Pembaruan fasilitas krusial seperti Instalasi Gawat Darurat (IGD), ruang kebidanan, atau ruang perawatan intensif (NICU/PICU)			1.686.795.826				APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Pendanaan Sarana dan Prasarana Fisik / Non-Fisikl	selama setahun

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas real			Alokasi Anggaran					Sumber Pembiayaan	Sifat bantuan	Lokasi	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak langsung	Penunjang	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	17	18
43	Mengurangi Beban Pengeluaran	Puskesmas Datuk Bandar	1.02.02.2.02.0015	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pendampingan khusus bagi balita stunting, pelacakan kasus gizi buruk, serta Pemberian Makanan Tambahan (PMT)			108.145.000	108.145.000	108.145.000	108.145.000	108.145.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	selama setahun
44	Mengurangi Beban Pengeluaran	Puskesmas Datuk Bandar	1.02.02.2.02.0020	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Menghimpun data pasien, penyakit menular dan tidak menular, serta masalah kesehatan masyarakat secara real-time	125.100.000	125.100.000	125.100.000	125.100.000	125.100.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	selama setahun
45	Mengurangi Beban Pengeluaran	Puskesmas Kampung Baru	1.02.02.2.02.0048	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Penyelenggaraan vaksinasi baik rutin (di Posyandu/Puskesmas) maupun layanan khusus seperti Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dan Sub Pekan Imunisasi Nasional (SubPIN)			142.380.000	142.380.000	142.380.000	142.380.000	142.380.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	selama setahun
46	Mengurangi Beban Pengeluaran	Puskesmas Kampung Baru	1.02.02.2.02.0004	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Penimbangan berat badan, pengukuran tinggi/panjang badan, dan lingkar kepala secara rutin, Pemberian kapsul Vitamin A, obat cacing, serta edukasi Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)			22.920.000	22.920.000	22.920.000	22.920.000	22.920.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan layanan promotif, preventif, dan pemenuhan kebutuhan gizi	selama setahun
47	Mengurangi Beban Pengeluaran	Puskesmas Kampung Baru	1.02.02.2.02.0015	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Distribusi makanan bergizi bagi balita gizi kurang, balita gizi buruk, ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), dan bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)			156.205.000	156.205.000	156.205.000	156.205.000	156.205.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	selama setahun
48	Mengurangi Beban Pengeluaran	Puskesmas Kampung Baru	1.02.02.2.02.0001	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	pemeriksaan rutin ibu hamil sesuai standar			5.880.000	5.880.000	5.880.000	5.880.000	5.880.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Pelayanan Kesehatan Klinis	selama setahun
49	Mengurangi Beban Pengeluaran	Puskesmas Kampung Baru	1.02.02.2.02.0010	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pemeriksaan fisik dan status mental, penetapan diagnosis, penyediaan obat rutin, hingga rujukan medis ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (seperti RS Jiwa)			10.078.000	10.078.000	10.078.000	10.078.000	10.078.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Pelayanan Kesehatan Klinis	selama setahun
50	Mengurangi Beban Pengeluaran	Puskesmas Kampung Baru	1.02.02.2.02.0021	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Melakukan anamnesa, pemeriksaan status mental, dan penetapan diagnosis. Jika diperlukan, pasien akan dirujuk ke fasilitas rujukan tingkat lanjut			4.320.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Pelayanan Kesehatan Klinis	selama setahun

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas real			Alokasi Anggaran					Sumber Pembiayaan	Sifat bantuan	Lokasi	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak langsung	Penunjang	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	17	18
51	Mengurangi Beban Pengeluaran	Puskesmas Kampung Baru	1.02.02.2.02.0011	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pemeriksaan klinis berupa tes cepat molekular (TCM), tes dahak, serta rujukan pemeriksaan radiologi			18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Pelayanan Kesehatan Klinis	selama setahun
52	Mengurangi Beban Pengeluaran	Puskesmas Kampung Baru	1.02.02.2.02.0005	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	pemeriksaan status gizi (BB/TB), kesehatan gigi dan mulut, penglihatan, pendengaran, serta deteksi gangguan mental emosional dan tumbuh kembang			25.920.000	25.920.000	25.920.000	25.920.000	25.920.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	1 kali
53	Mengurangi Beban Pengeluaran	Puskesmas Kampung Baru	1.02.02.2.02.0020	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Menghimpun data pasien, penyakit menular dan tidak menular, serta masalah kesehatan masyarakat secara real-time	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	selama setahun
54	Mengurangi Beban Pengeluaran	Puskesmas Kampung Persatuan	1.02.02.2.02.0001	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	pemeriksaan rutin ibu hamil sesuai standar			10.152.000	10.152.000	10.152.000	10.152.000	10.152.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Pelayanan Kesehatan Klinis	selama setahun
55	Mengurangi Beban Pengeluaran	Puskesmas Kampung Persatuan	1.02.02.2.02.0010	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pemeriksaan fisik dan status mental, penetapan diagnosis, penyediaan obat rutin, hingga rujukan medis ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (seperti RS Jiwa)			4.320.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Pelayanan Kesehatan Klinis	selama setahun
56	Mengurangi Beban Pengeluaran	Puskesmas Kampung Persatuan	1.02.02.2.02.0021	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Melakukan anamnesa, pemeriksaan status mental, dan penetapan diagnosis. Jika diperlukan, pasien akan dirujuk ke fasilitas rujukan tingkat lanjut			1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Pelayanan Kesehatan Klinis	selama setahun
57	Mengurangi Beban Pengeluaran	Puskesmas Kampung Persatuan	1.02.02.2.02.0011	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pemeriksaan klinis berupa tes cepat molekular (TCM), tes dahak, serta rujukan pemeriksaan radiologi			12.960.000	12.960.000	12.960.000	12.960.000	12.960.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Pelayanan Kesehatan Klinis	selama setahun
58	Mengurangi Beban Pengeluaran	Puskesmas Kampung Persatuan	1.02.02.2.02.0005	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	pemeriksaan status gizi (BB/TB), kesehatan gigi dan mulut, penglihatan, pendengaran, serta deteksi gangguan mental emosional dan tumbuh kembang			18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	selama setahun
59	Mengurangi Beban Pengeluaran	Puskesmas Kampung Persatuan	1.02.02.2.02.0020	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Menghimpun data pasien, penyakit menular dan tidak menular, serta masalah kesehatan masyarakat secara real-time	17.220.000	17.220.000	17.220.000	17.220.000	17.220.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	selama setahun
60	Mengurangi Beban Pengeluaran	Puskesmas Kampung Persatuan	1.02.02.2.02.0046	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pemeriksaan kehamilan dan bayi baru lahir			19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Pelayanan Kesehatan Klinis	selama setahun

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas real			Alokasi Anggaran					Sumber Pembiayaan	Sifat bantuan	Lokasi	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak langsung	Penunjang	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	17	18
61	Mengurangi Beban Pengeluaran	Puskesmas MU. Damanik	1.02.02.2.02.0015	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Distribusi makanan bergizi bagi balita gizi kurang, balita gizi buruk, ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), dan bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)			58.685.000	58.685.000	58.685.000	58.685.000	58.685.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	selama setahun
62	Mengurangi Beban Pengeluaran	Puskesmas MU. Damanik	1.02.02.2.02.0001	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	pemeriksaan rutin ibu hamil sesuai standar			55.220.000	55.220.000	55.220.000	55.220.000	55.220.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	selama setahun
63	Mengurangi Beban Pengeluaran	Puskesmas MU. Damanik	1.02.02.2.02.0020	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Menghimpun data pasien, penyakit menular dan tidak menular, serta masalah kesehatan masyarakat secara real-time	114.480.000	114.480.000	114.480.000	114.480.000	114.480.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Pelayanan Kesehatan Klinis	selama setahun
64	Mengurangi Beban Pengeluaran	Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori	1.02.02.2.02.0015	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Distribusi makanan bergizi bagi balita gizi kurang, balita gizi buruk, ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), dan bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)			139.898.000	139.898.000	139.898.000	139.898.000	139.898.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	selama setahun
65	Mengurangi Beban Pengeluaran	Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori	1.02.02.2.02.0001	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	pemeriksaan rutin ibu hamil sesuai standar			7.872.000	7.872.000	7.872.000	7.872.000	7.872.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	selama setahun
66	Mengurangi Beban Pengeluaran	Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori	1.02.02.2.02.0021	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Melakukan anamnesa, pemeriksaan status mental, dan penetapan diagnosis. Jika diperlukan, pasien akan dirujuk ke fasilitas rujukan tingkat lanjut			8.988.000	8.988.000	8.988.000	8.988.000	8.988.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Pelayanan Kesehatan Klinis	selama setahun
67	Mengurangi Beban Pengeluaran	Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori	1.02.02.2.02.0011	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pemeriksaan klinis berupa tes cepat molekular (TCM), tes dahak, serta rujukan pemeriksaan radiologi			8.640.000	8.640.000	8.640.000	8.640.000	8.640.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Pelayanan Kesehatan Klinis	selama setahun
68	Mengurangi Beban Pengeluaran	Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori	1.02.02.2.02.0005	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	pemeriksaan status gizi (BB/TB), kesehatan gigi dan mulut, penglihatan, pendengaran, serta deteksi gangguan mental emosional dan tumbuh kembang			28.080.000	28.080.000	28.080.000	28.080.000	28.080.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	selama setahun
69	Mengurangi Beban Pengeluaran	Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori	1.02.02.2.02.0020	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Menghimpun data pasien, penyakit menular dan tidak menular, serta masalah kesehatan masyarakat secara real-time	15.660.000	15.660.000	15.660.000	15.660.000	15.660.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	selama setahun

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas real			Alokasi Anggaran					Sumber Pembiayaan	Sifat bantuan	Lokasi	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak langsung	Penunjang	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	17	18
70	Mengurangi Beban Pengeluaran	Puskesmas Sei Tualang Raso	1.02.02.2.02.0015	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Distribusi makanan bergizi bagi balita gizi kurang, balita gizi buruk, ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), dan bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)			71.067.000	71.067.000	71.067.000	71.067.000	71.067.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	selama setahun
71	Mengurangi Beban Pengeluaran	Puskesmas Sei Tualang Raso	1.02.02.2.02.0001	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	pemeriksaan rutin ibu hamil sesuai standar			60.200.000	60.200.000	60.200.000	60.200.000	60.200.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Pelayanan Kesehatan Klinis	selama setahun
72	Mengurangi Beban Pengeluaran	Puskesmas Sei Tualang Raso	1.02.02.2.02.0020	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Menghimpun data pasien, penyakit menular dan tidak menular, serta masalah kesehatan masyarakat secara real-time	127.800.000	127.800.000	127.800.000	127.800.000	127.800.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	selama setahun
73	Mengurangi Beban Pengeluaran	Puskesmas Semula Jadi	1.02.02.2.02.0015	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Distribusi makanan bergizi bagi balita gizi kurang, balita gizi buruk, ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), dan bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)			87.732.000	87.732.000	87.732.000	87.732.000	87.732.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	selama setahun
74	Mengurangi Beban Pengeluaran	Puskesmas Semula Jadi	1.02.02.2.02.0020	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Menghimpun data pasien, penyakit menular dan tidak menular, serta masalah kesehatan masyarakat secara real-time	103.860.000	103.860.000	103.860.000	103.860.000	103.860.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	selama setahun
75	Mengurangi Beban Pengeluaran	Puskesmas Semula Jadi	1.02.02.2.01.0009	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		Perbaikan skala ringan hingga sedang pada bangunan fisik Puskesmas atau Puskesmas Pembantu (Pustu). Ini mencakup perbaikan atap, dinding, lantai, instalasi listrik, sistem sanitasi, hingga ventilasi ruang medis		91.014.000	91.014.000	91.014.000	91.014.000	91.014.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Pendanaan Sarana dan Prasarana Fisik / Non-Fisikl	1 kali
76	Mengurangi Beban Pengeluaran	Puskesmas Teluk Nibung	1.02.02.2.02.0001	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	pemeriksaan rutin ibu hamil sesuai standar			58.872.000	58.872.000	58.872.000	58.872.000	58.872.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	selama setahun
77	Mengurangi Beban Pengeluaran	Puskesmas Teluk Nibung	1.02.02.2.02.0020	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Menghimpun data pasien, penyakit menular dan tidak menular, serta masalah kesehatan masyarakat secara real-time	92.700.000	92.700.000	92.700.000	92.700.000	92.700.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	selama setahun
78	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03.12.2.04.0004	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			Menyelenggarakan rapat koordinasi lintas sektoral untuk membahas dan memberikan rekomendasi teknis terkait Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	565.035.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Bangunan fisik	selama setahun

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas real			Alokasi Anggaran					Sumber Pembiayaan	Sifat bantuan	Lokasi	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak langsung	Penunjang	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	17	18
79	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03.02.2.01.0093	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai		Pengangkatan sampah dan gulma atau vegetasi liar yang menghambat aliran air.		2.000.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Bangunan fisik	1 kali
80	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03.10.2.01.0053	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan		Pembangunan Jalan		6.023.582.500	7.000.000.000	7.000.000.000	6.000.000.000	6.700.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Bangunan fisik	selama setahun
81	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03.10.2.01.0069	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan		Pembangunan Jembatan		-	-	-	520.678.268	-	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Bangunan fisik	selama setahun
82	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03.06.2.01.0029	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		Pembangunan drainase		205.850.000	400.000.000	-	400.000.000	200.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Bangunan fisik	selama setahun
83	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03.02.2.01.0119	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku		Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku		159.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan fasilitas air bersih (sumur bor)	1 kali
84	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03.10.2.01.0051	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jalan		Pemeliharaan Rutin Jalan		2.000.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Bangunan fisik	selama setahun
85	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03.10.2.01.0067	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jembatan		Pemeliharaan Rutin Jembatan		500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Bangunan fisik	selama setahun
86	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03.09.2.01.0011	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota			Membuat panduan rancang bangun suatu kawasan tertentu untuk mengendalikan pemanfaatan ruang	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan teknis perencanaan, fasilitasi regulasi, serta pelaksanaan fisik pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur dasar	1 kali
87	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03.12.2.01.0003	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang			Perumusan Kebijakan Teknis sebagai pedoman dalam perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)	80.000.000	750.000.000	200.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan teknis perencanaan, fasilitasi regulasi, serta pelaksanaan fisik pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur dasar	1 kali
88	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03.02.2.01.0101	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing		pembangunan atau perbaikan dinding penahan/pelindung tebing sungai		7.550.360.000	8.000.000.000	8.200.000.000	8.500.000.000	6.700.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Bangunan fisik	selama setahun
89	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03.09.2.01.0010	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			Membuat panduan rancang bangun yang mengatur tata massa bangunan, ruang terbuka hijau, sirkulasi, dan pelestarian lingkungan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan teknis perencanaan, fasilitasi regulasi, serta pelaksanaan fisik pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur dasar	1 kali

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas real			Alokasi Anggaran					Sumber Pembiayaan	Sifat bantuan	Lokasi	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak langsung	Penunjang	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	17	18
90	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03.06.2.01.0030	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan			penyusunan Rencana Induk Drainase (Masterplan), analisis data tata ruang, dan pencegahan genangan atau banjir perkotaan	507.875.000	300.000.000	100.000.000	200.000.000	200.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan teknis perencanaan, fasilitasi regulasi, serta pelaksanaan fisik pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur dasar	1 kali
91	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03.03.2.01.0032	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pemasangan jaringan pipa utama hingga pipa tersier untuk menjangkau kawasan permukiman baru			3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan fisik	1 kali
92	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03.10.2.01.0055	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Rehabilitasi Jalan		6.150.000.000	6.925.114.000	7.000.000.000	6.000.000.000	6.700.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan teknis/infrastruktur fisik (konstruksi)	selama setahun
93	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03.06.2.01.0028	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan		Rehabilitasi Drainase Perkotaan		-	-	400.000.000	400.000.000	-	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan teknis/infrastruktur fisik (konstruksi)	selama setahun
94	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03.10.2.01.0059	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan		Pemasangan agregat pondasi baru, dilanjutkan dengan pelapisan ulang (aspal hotmix/beton) sesuai spesifikasi desain		9.419.080.000	10.500.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan teknis/infrastruktur fisik (konstruksi)	selama setahun
95	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03.10.2.01.0043	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Survey Kondisi Jalan/Jembatan		Survey Kondisi Jalan/Jembatan		266.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Operasional / Bantuan Jasa Konsultansi	1 kali
96	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03.11.2.01.0010	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis			menerbitkan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) bagi tenaga teknis	183.000.000	183.000.000	183.000.000	183.000.000	183.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan berupa fasilitasi pembekalan teknis	1 kali
97	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03.11.2.01.0016	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis		Pelatihan ini mencakup materi teknis, keselamatan kerja (K3), dan uji kompetensi langsung dari asesor berwenang		257.440.000	257.440.000	260.000.000	260.000.000	260.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dan Fasilitasi Sertifikasi	1 kali
98	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.03.06.2.01.0019	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan		perbaikan struktural ringan pada dinding atau penutup saluran							APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan fisik/infrastruktur (non-permanen atau berkala)	selama setahun
99	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.03.06.2.01.0012	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan		Pemasangan u-ditch, pengecoran, atau pasangan batu kali sesuai spesifikasi teknis dan desain		670.000.000	670.000.000	670.000.000	670.000.000	670.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan fisik/infrastruktur	selama setahun

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas real			Alokasi Anggaran					Sumber Pembiayaan	Sifat bantuan	Lokasi	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak langsung	Penunjang	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	17	18
100	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.02.2.05.0002	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			Verifikasi identitas, kelayakan berkas, dan status hunian agar sesuai dengan kriteria penerima bantuan	160.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	layanan pendataan, pencatatan, dan inventarisasi pemanfaatan aset	selama setahun
101	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.03.2.03.0007	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh			Menentukan prioritas area yang akan dibangun fasilitas dasarnya atau disusun DED						APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan jasa konsultansi atau bantuan administrasi data	selama setahun
102	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.03.05.2.01.0044	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Pembangunan atau pengadaan tangki septik			1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan fisik/infrastruktur	selama setahun
103	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.03.2.03.0002	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			845.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan fisik	1 kali
104	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.04.2.01.0001	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah	1 kali
105	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.02.2.03.0001	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	pembangunan langsung rumah relokasi/hunian sementara sesuai kelayakan standar.			200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah	1 kali
106	Mengurangi Beban Pengeluaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02.0018	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			Simulasi evakuasi mandiri, penyelamatan korban di lokasi rawan, dan mitigasi risiko	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Fasilitasi berupa edukasi dan pelatihan	1 kali
107	Mengurangi Beban Pengeluaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.04.0010	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Rehabilitasi Fisik dan Sosial		15.000.000	-	25.000.000	25.000.000	5.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	fasilitasi koordinasi, sosialisasi, dan penyusunan dokumen/regulasi	selama setahun
108	Mengurangi Beban Pengeluaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.03.0003	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	4.173.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	operasi pencarian, serta mobilisasi sarana dan prasarana evakuasi	selama setahun
109	Mengurangi Beban Pengeluaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02.0020	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		Memberikan edukasi kebencanaan, adaptasi perubahan iklim, dan penyebaran peta rawan bencana kepada masyarakat		0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan non-fisik atau layanan pengembangan kapasitas	1 kali

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas real			Alokasi Anggaran					Sumber Pembiayaan	Sifat bantuan	Lokasi	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak langsung	Penunjang	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	17	18
110	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.02.2.01.0006	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Melakukan deteksi dini, sosialisasi, dan penyuluhan edukatif untuk mencegah potensi pelanggaran Peraturan Daerah (Perda)		54.000.000	114.600.000	114.600.000	114.600.000	114.600.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan hibah, atau dukungan fasilitasi operasional	1 kali
111	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.02.2.01.0003	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Melibatkan, melatih, dan mengoptimalkan fungsi Linmas dalam pengamanan dan ketertiban lingkungan		0	28.565.000	28.565.000	561.897.970	28.565.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	fasilitasi, dukungan operasional, dan layanan pendukung	selama setahun
112	Mengurangi Beban Pengeluaran	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.04.2.01.0002	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran			709.701.000	1.604.831.892	709.701.000	709.701.000	1.604.831.892	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan teknis langsung	selama setahun
113	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Sosial	1.06.06.2.02.0002	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Melakukan penyuluhan, edukasi, dan pelatihan pengurangan risiko bencana kepada masyarakat dan komunitas lokal agar lebih mandiri dalam menghadapi bencana		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Edukasi & Sosialisasi dan Bantuan Peningkatan Kapasitas Relawan	1 kali
114	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	1.06.05.2.02.0006	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Penyaluran kebutuhan pokok, santunan, atau bantuan tunai/non-tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)			190.800.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Sosial Sembako dan Permakanan	1 kali
115	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	1.06.03.2.01.0003	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri			5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan fasilitasi pemulangan WNI ke tempat asal	selama setahun
116	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	1.06.05.2.02.0008	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Memperbarui data warga miskin secara berkala di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan			-	33.090.000	33.413.820	33.413.820	35.284.499	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Verifikasi dan validasi Data kemiskinan	selama setahun
117	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	1.06.04.2.01.0003	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu			0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Sosial	1 kali

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas real			Alokasi Anggaran					Sumber Pembiayaan	Sifat bantuan	Lokasi	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak langsung	Penunjang	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	17	18
118	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	1.06.04.2.02.0004	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang			0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan sosial barang kebutuhan dasar	1 kali
119	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Sosial	1.06.02.2.03.0016	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial		Melakukan bimbingan teknis (capacity building) bagi pendamping sosial, penyuluh sosial		0	10.000.000	10.500.000	10.500.000	12.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan layanan dan fasilitas pendukung bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	selama setahun
120	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	2.17.07.2.01.0005	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Mengadakan pertemuan berkala untuk membahas kendala perizinan, akses permodalan, pemasaran, dan standardisasi produk Usaha Mikro		267.679.000	267.679.000	267.679.000	267.679.000	267.679.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Fasilitasi non-finansial	selama setahun
121	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	2.17.04.2.01.0001	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		verifikasi lapangan (pemeriksaan berkas RAT) dan penerbitan sertifikat tingkat kesehata		18.000.000	20.000.000	22.000.000	23.000.000	25.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Fasilitasi non-finansial	1 kali
122	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	2.17.07.2.01.0004	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Memfasilitasi UMKM untuk onboarding ke platform e-commerce, sertifikasi halal, dan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)			37.320.000	37.320.000	37.320.000	37.320.000	37.320.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Fasilitas, bimbingan teknis, dan pendampingan	1 kali
123	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	2.07.05.2.02.0001	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Menyediakan mediator/konsiliator dari Dinas Ketenagakerjaan untuk mencari solusi sebelum terjadi pemogokan atau penutupan perusahaan (lockout)	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Fasilitasi non-finansial	selama setahun
124	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.08.02.2.01.0014	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG	6.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Peningkatan kapasitas SDM	1 kali

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas real			Alokasi Anggaran					Sumber Pembiayaan	Sifat bantuan	Lokasi	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak langsung	Penunjang	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	17	18
125	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.08.03.2.01.0006	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)			57.020.000	57.020.000	57.020.000	57.020.000	57.020.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan intervensi sosial	1 kali
126	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.08.07.2.01.0006	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Memberikan pemahaman kepada masyarakat, satuan pendidikan, dan keluarga mengenai tanda-tanda kekerasan dan cara pencegahannya			79.140.000	79.140.000	79.140.000	79.140.000	79.140.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	layanan non-finansial	selama setahun
127	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.08.03.2.02.0009	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Menyediakan pengacara atau paralegal untuk mendampingi korban selama proses penyidikan, penyelidikan, hingga persidangan			5.400.000,00	5.400.000	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan dukungan fisik dan psikologis	selama setahun
128	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.02.0012	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			Pengumpulan Data Primer	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan untuk Verifikasi dan validasi Data kemiskinan	1 kali
129	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.08.06.2.02.0009	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Melatih dan mengembangkan kemampuan para pengurus atau penyedia layanan		4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan edukasi, advokasi dan pendampingan	selama setahun
130	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.02.0013	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			Rekapitulasi hasil pendataan kelompok kegiatan seperti BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia), dan UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor)	20.000.000	60.000.000	100.000.000	140.000.000	180.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan operasional	1 kali

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas real			Alokasi Anggaran					Sumber Pembiayaan	Sifat bantuan	Lokasi	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak langsung	Penunjang	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	17	18
131	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.03.0003	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Pemasangan alat kontrasepsi		336.531.000	336.531.000	336.531.000	336.531.000	336.531.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	layanan pemasangan alat kontrasepsi gratis	selama setahun
132	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.04.2.01.0026	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			Penyediaan Biaya Operasional bagi BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	intervensi pemberdayaan ekonomi keluarga	selama setahun
133	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.08.05.2.01.0003	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota			Publikasi data dalam bentuk dokumen Profil Gender dan Anak	8.400.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	40.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Layanan teknis dan penyediaan dokumen administratif untuk mendukung perencanaan	1 kali
134	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.13.05.2.01.0009	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Mengadakan bimbingan teknis, sosialisasi, dan pelatihan bagi kader PKK		251.160.000,00	251.160.000	251.160.000,00	251.160.000,00	251.160.000,00	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas	selama setahun
135	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Perikanan, Pangan dan Pertanian	2.09.04.2.02.0002	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Memastikan ketersediaan pangan yang merata agar pasokan tetap stabil antarwaktu di tingkat kabupaten/kota							APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan pangan pokok dan sembako	selama setahun
136	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Perikanan, Pangan dan Pertanian	2.09.03.2.01.0011	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok Pangan		pemantauan bahan pangan strategis seperti beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, minyak goreng, gula, daging ayam, dan telur ayam ras		11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	selama setahun

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas real			Alokasi Anggaran					Sumber Pembiayaan	Sifat bantuan	Lokasi	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak langsung	Penunjang	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	17	18
137	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Perikanan, Pangan dan Pertanian	2.09.04.2.01.0001	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			Menghimpun data statistik wilayah yang mencakup tiga aspek utama ketahanan pangan: ketersediaan (produksi & cadangan pangan), keterjangkauan/akses (infrastruktur, daya beli & kemiskinan), dan pemanfaatan (kesehatan, sanitasi & gizi)	11.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan data/layanan informasi	1 kali
138	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Perikanan, Pangan dan Pertanian	3.25.03.2.02.0003	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	penyaluran bantuan sarana produksi perikanan/kelautan			1.186.600.000	450.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	fasilitas non-uang tunai guna memperluas akses permodalan UMKM	1 kali
139	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Perikanan, Pangan dan Pertanian	2.09.03.2.04.0002	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk usaha pengolahan pangan di tingkat kelompok masyarakat			50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai		selama setahun
140	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Perikanan, Pangan dan Pertanian	3.25.04.2.02.0004	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			Bimbingan teknis di lapangan untuk memastikan penerapan teknologi atau praktik usaha berjalan optimal	93.330.000	93.330.000	93.330.000	93.330.000	93.330.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan pemberian fasilitas, bimbingan teknis, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)	1 kali
141	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Perikanan, Pangan dan Pertanian	3.25.06.2.03.0001	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	pengadaan sarana dan prasarana produksi, penyediaan bahan baku, fasilitasi logistik, serta bimbingan penerapan standar mutu			39.100.000	45.000.000	50.000.000	55.000.000	60.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan sarana produksi budidaya	1 kali
142	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Perikanan, Pangan dan Pertanian	3.25.04.2.04.0001	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Survei rutin terkait jumlah pembudidaya, luas lahan/wadah budidaya, volume produksi benih dan ikan konsumsi (seperti lele, nila, gurami), serta nilai produksi	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	penyusunan statistik dan laporan perikanan budidaya	1 kali
143	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Perikanan, Pangan dan Pertanian	3.25.06.2.01.0005	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko		Pendataan fasilitas atau unit yang menangani dan mengolah hasil perikanan menjadi produk bernilai tambah		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan non-fisik berupa layanan fasilitasi, pendampingan	1 kali

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas real			Alokasi Anggaran					Sumber Pembiayaan	Sifat bantuan	Lokasi	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak langsung	Penunjang	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	17	18
144	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.11.2.01.0020	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		Pelaksanaan operasional tempat pembuangan/pengolahan sampah menggunakan metode ramah lingkungan seperti sanitary landfill (penimbunan, pemadatan, dan pelapisan tanah) atau controlled landfill.		100.000.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Pembangunan dan Revitalisasi Infrastruktur	selama setahun
145	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.11.2.01.0004	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Pembentukan & Pembinaan Bank Sampah		150.000.000	150.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan teknis, penyuluhan/sosialisasi	1 kali
146	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.11.2.01.0007	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Penyediaan fasilitas operasional utama pada tiga lokasi TPA, TPST dan SPA		135.367.751	199.292.751	200.000.000	200.000.000	200.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan infrastruktur, alat berat, dan dukungan teknis	1 kali
147	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Perhubungan	2.15.02.2.11.0001	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Menyusun dokumen perencanaan		9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	Bantuan Sosial Tidak Langsung/Non-Tunai	1 kali
148	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Perhubungan	2.15.02.2.02.0002	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan, rambu lalu lintas dan marka jalan		48.600.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan infrastruktur konektivitas	1 kali
149	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Perhubungan	2.15.02.2.02.0004	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Perbaikan dan pemeliharaan rambu lalu lintas		135.685.000	143.858.027	200.000.000	200.000.000	200.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan sosial berbasis infrastruktur dan layanan publik	1 kali
150	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.03.2.02.0036	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Akses Internet	Penyediaan Akses Internet			466.530.000	466.530.000	466.530.000	466.530.000	466.530.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	subsidi di fasilitas publik	1 kali
151	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.02.2.01.0023	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Konten			Proses penulisan naskah, desain grafis, fotografi, dan penyuntingan video yang disesuaikan dengan platform	264.450.000	264.450.000	264.450.000	264.450.000	264.450.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan pemberdayaan, edukasi, dan diseminasi informasi	selama setahun
152	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02.2.01.0004	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pembuatan dan pembaruan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), serta Biodata Penduduk			13.535.200	5.000.000	25.000.000	25.000.000	28.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan fasilitasi layanan dasar administrasi kependudukan	selama setahun
153	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2.23.02.2.02.0007	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		Menjalin kemitraan dengan UMKM, dinas terkait, pegiat literasi, dan komunitas lokal untuk memastikan program berjalan berkelanjutan		20.900.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	25.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas	1 kali

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas real			Alokasi Anggaran					Sumber Pembiayaan	Sifat bantuan	Lokasi	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak langsung	Penunjang	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	17	18
154	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Kecamatan Datuk Bandar	7.01.03.2.01.0003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Koordinasi dan Fasilitasi	99.984.000	220.160.000	224.000.000	224.000.000	224.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan non-tunai yang bersifat produktif	selama setahun
155	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Kecamatan Datuk Bandar	7.01.03.2.02.0001	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan		51.240.000	60.770.000	61.000.000	61.000.000	61.230.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan fasilitasi dan dukungan perencanaan	1 kali
156	Meningkatkan Pendapatan	Kecamatan Datuk Bandar	7.01.03.2.02.0003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Fasilitasi LPM, Sosialisasi Budaya Gotong Royong	14.120.000	15.000.000	15.200.000	15.200.000	15.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan non-tunai yang bersifat produktif	selama setahun
157	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Kecamatan Datuk Bandar Timur	7.01.03.2.01.0003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Koordinasi dan Fasilitasi	88.626.600	159.230.000	189.230.000	189.230.000	209.230.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan non-tunai yang bersifat produktif	selama setahun
158	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Kecamatan Datuk Bandar Timur	7.01.03.2.02.0001	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan		52.900.000,00	52.900.000	52.900.000,00	52.900.000,00	52.900.000,00	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan fasilitasi dan dukungan perencanaan	1 kali
159	Meningkatkan Pendapatan	Kecamatan Datuk Bandar Timur	7.01.03.2.02.0003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Fasilitasi LPM, Sosialisasi Budaya Gotong Royong	5.260.000,00	16.679.000	16.679.000,00	16.679.000,00	16.679.000,00	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan non-tunai yang bersifat produktif	selama setahun
160	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Kecamatan Sei Tualang Raso	7.01.03.2.01.0003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Koordinasi dan Fasilitasi	90.509.350	252.327.900	252.327.900	252.327.900	252.327.900	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan non-tunai yang bersifat produktif	selama setahun
161	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Kecamatan Sei Tualang Raso	7.01.03.2.02.0001	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan		65.530.400	65.530.400	65.530.400	65.530.400	65.530.400	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan fasilitasi dan dukungan perencanaan	1 kali
162	Meningkatkan Pendapatan	Kecamatan Sei Tualang Raso	7.01.03.2.02.0003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Fasilitasi LPM, Sosialisasi Budaya Gotong Royong	33.575.150	34.575.150	36.575.150	37.575.150	38.575.150	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan non-tunai yang bersifat produktif	selama setahun
163	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	7.01.03.2.02.0002	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			membiayai fasilitas pelayanan sosial dasar, sarana ekonomi,	4.400.000	9.000.000	9.500.000	10.000.000	10.500.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan pembangunan fisik	1 kali
164	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	7.01.03.2.01.0003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Koordinasi dan Fasilitasi	90.509.350	252.327.900	252.327.900	252.327.900	252.327.900	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan non-tunai yang bersifat produktif	selama setahun
165	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	7.01.03.2.02.0001	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan		65.530.400	65.530.400	65.530.400	65.530.400	65.530.400	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan fasilitasi dan dukungan perencanaan	1 kali

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas real			Alokasi Anggaran					Sumber Pembiayaan	Sifat bantuan	Lokasi	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak langsung	Penunjang	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	17	18
166	Meningkatkan Pendapatan	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	7.01.03.2.02.0003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Fasilitasi LPM, Sosialisasi Budaya Gotong Royong	33.575.150	34.575.150	36.575.150	37.575.150	38.575.150	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan non-tunai yang bersifat produktif	selama setahun
167	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Kecamatan Tanjungbalai Utara	7.01.03.2.01.0003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Koordinasi dan Fasilitasi	200.196.000	200.196.000	200.196.000	200.196.000	200.196.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan non-tunai yang bersifat produktif	selama setahun
168	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Kecamatan Tanjungbalai Utara	7.01.03.2.02.0001	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan		52.235.000	52.235.000	47.235.000	52.235.000	52.235.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan fasilitasi dan dukungan perencanaan	1 kali
169	Meningkatkan Pendapatan	Kecamatan Tanjungbalai Utara	7.01.03.2.02.0003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Fasilitasi LPM, Sosialisasi Budaya Gotong Royong	8.140.000	8.140.000	8.140.000	8.140.000	8.140.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan non-tunai yang bersifat produktif	selama setahun

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas real			Alokasi Anggaran					Sumber Pembiayaan	Sifat bantuan	Lokasi	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak langsung	Penunjang	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	17	18
170	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Kecamatan Teluk Nibung	7.01.03.2.01.0003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Koordinasi dan Fasilitasi	63.345.000	63.345.000	63.345.000	63.345.000	63.345.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan non-tunai yang bersifat produktif	selama setahun
171	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Kecamatan Teluk Nibung	7.01.03.2.02.0001	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan		40.430.000	40.430.000	40.430.000	40.430.000	40.430.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan fasilitasi dan dukungan perencanaan	1 kali
172	Meningkatkan Pendapatan	Kecamatan Teluk Nibung	7.01.03.2.02.0003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Fasilitasi LPM, Sosialisasi Budaya Gotong Royong	15.120.000	12.120.000	12.120.000	12.120.000	12.120.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan non-tunai yang bersifat produktif	selama setahun
173	Meningkatkan Pendapatan	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	4.01.03.2.01.0005	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD			Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi	-	-	-	-	-	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan fasilitasi publik	1 kali
174	Meningkatkan Pendapatan	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	4.01.03.2.01.0002	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Pemantauan Harga, Distribusi Barang dan Pengendalian inflasi		55.000.000	80.000.000	90.000.000	90.000.000	100.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan fasilitasi publik	selama setahun
175	Meningkatkan Pendapatan	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	4.01.03.2.01.0003	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		Melakukan pemantauan langsung, penyuluhan, serta menyusun laporan hasil analisis dampak kebijakan terhadap pelaku usaha		55.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kota Tanjungbalai	bantuan fasilitasi publik	1 kali

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

HERMAN GULTOM, S.H
PENATA TK.1/ III-d
NIP.198106030 200604 1 003


KOTA TANJUNGBA